

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

# RPJPD

## Kabupaten Bengkalis

Tahun 2025 - 2045



Bappeda Kabupaten Bengkalis

<https://bappeda.bengkaliskab.go.id/>



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Bengkalis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan sesuai Visi dan Misi.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. visi pembangunan;
- b. misi pembangunan;
- c. arah kebijakan pembangunan; dan
- d. sasaran pokok pembangunan.

### BAB II PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJPD

#### Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun telah memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045.

### Pasal 6

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
  - BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PERUBAHAN RPJPD

### Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis muntandis terhadap perubahan RPJMD.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini hingga ditetapkan RPJMD baru sesuai dengan perodesasi RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan dan/atau penyempurnaan bagi Rancangan Teknokratik RPJMD.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 11 September 2024



Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

  
**ERSAN SAPUTRA TH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
(9.45.A/ 2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka RPJPD perlu dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Bengkalis akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Bengkalis.

Ruang lingkup pengaturan RPJPD ini meliputi Ketentuan Umum, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Substansi pokok RPJPD mencakup gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi Daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok. Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan misi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arah kebijakan pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sasaran pokok pembangunan adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-6
1.5 Sistematika.....	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Geografi.....	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-38
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-38
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-62
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-73
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-73
2.3.2 Daya Saing SDM.....	II-99
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-135
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-150
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-156
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-156
2.4.2 Indeks Pelayanan Publik.....	II-157
2.4.3 Indeks Inovasi Daerah.....	II-158
2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	II-159
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-160
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-179
2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk.....	II-180
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-186
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-199
2.7.1 Arah Kebijakan Wilayah Sumatra.....	II-199
2.7.2 Arah Kebijakan Wilayah Provinsi Riau.....	II-200
2.7.3 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	II-208
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	III-1

3.1	Permasalahan.....	III-1
3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	III-1
3.1.2	Daya saing ekonomi.....	III-4
3.1.3	Daya saing SDM.....	III-7
3.1.4	Daya saing sarana prasarana pendukung.....	III-8
3.1.5	Aspek Pelayanan umum.....	III-8
3.2	Isu strategis daerah.....	III-9
3.2.1	Isu Strategis Global.....	III-9
3.2.2	Isu Strategis Daerah.....	III-11
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH KABUPATEN.....	IV-1
4.1	Visi.....	IV-1
4.2	Sasaran Visi.....	IV-2
4.3	Misi.....	IV-4
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1	Arah Kebijakan.....	V-1
5.1.1	Arah Pembangunan Daerah.....	V-1
5.1.2	Arah Kebijakan Transformasi.....	V-5
5.1.3	Target Pembangunan Infrastruktur Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu.....	V-13
5.2	Sasaran Pokok.....	V-16
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.2	Skema Pendanaan dan Penganggaran.....	VI-2
6.3	Manajemen Resiko dan Kerangka Pengendalian.....	VI-2

# DAFTAR TABEL

TABEL II-1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-4
TABEL II-2 TINGGI WILAYAH DAN JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS, 2023.....	II-5
TABEL II-3 KONDISI CURAH HUJAN, KELEMBABAN DAN SUHU KABUPATEN BENGKALIS 2022 .....	II-9
TABEL II-4 RENCANA PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN POLA RUANG KABUPATEN BENGKALIS .....	II-10
TABEL II-5 SEBARAN TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS.....	II-11
TABEL II-6 TREND IKLH KABUPATEN BENGKALIS 2017 - 2022 .....	II-13
TABEL II-7 INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KABUPATEN BENGKALIS.....	II-14
TABEL II-8 INDEKS PENCEMARAN UDARA (IKU) KABUPATEN BENGKALIS 2022 .....	II-15
TABEL II-9 PERSENTASE LUAS TUTUPAN HUTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022.....	II-16
TABEL II-10 KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS.....	II-16
TABEL II-11 LOKASI, PANJANG DAN LAJU ABRASI DI KABUPATEN BENGKALIS .....	II-19
TABEL II-12 REKAPITULASI KEJADIAN BANJIR MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2023 .....	II-21
TABEL II-13 REKAPITULASI LUAS TANAM, LUAS PANEN PRODUKSI TANAMAN SAYURAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-26
TABEL II-14 DATA POTENSI PENGEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-27
TABEL II-15 REKAPITULASI TERNAK BESAR DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-29
TABEL II-16 REKAPITULASI TERNAK UNGGAS DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-30
TABEL II-17 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS, TAHUN 2024.....	II-33
TABEL II-18 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	II-34
TABEL II-19 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-37
TABEL II-20 PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023.....	II-45
TABEL II-21 INDIKATOR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2023.....	II-64
TABEL II-22 CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-65
TABEL II-23 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-66
TABEL II-24 PERKEMBANGAN INDIKATOR KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 ....	II-68
TABEL II-25 PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2023 (%).....	II-69
TABEL II-26 PERSENTASE PPKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-70
TABEL II-27 PERSENTASE PPKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMERINTAHAN KEBUTUHAN DASAR PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-71
TABEL II-28 PERSENTASE PPKS YANG TERTANGANI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-72
TABEL II-29 PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA DI SEKTOR FORMAL (%) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-73
TABEL II-30 INDIKATOR URUSAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-77
TABEL II-31 INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-78
TABEL II-32 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-79
TABEL II-33 PERKEMBANGAN INDIKATOR KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-80

TABEL II-34 RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB ADHB KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-81
TABEL II-35 PERKEMBANGAN INDIKATOR PARIWISATA KABUPATEN BENGKALIS 2018-2023 .....	II-83
TABEL II-36 CAPAIAN INDIKATOR PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-92
TABEL II-37 EKSPOR KABUPATEN BENGKALIS MENURUT NEGARA TUJUAN TAHUN 2023 (RIBU US\$) ..	II-94
TABEL II-38 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN TAHUN 2020-2023.....	II-95
TABEL II-39 RASIO GURU-MURID KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-107
TABEL II-40 PERKEMBANGAN INDIKATOR KINERJA KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-112
TABEL II-41 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-116
TABEL II-42 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-117
TABEL II-43 ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-118
TABEL II-44 ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-118
TABEL II-45 ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DALAM KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-119
TABEL II-46 RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-119
TABEL II-47 RASIO TENAGA MEDIS PER 1000 PENDUDUK KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-120
TABEL II-48 CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-121
TABEL II-49 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-121
TABEL II-50 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-122
TABEL II-51 PENDERITA DIARE YANG DITANGANI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-123
TABEL II-52 PREVALENSI HIV/AIDS (PERSEN) DARI TOTAL POPULASI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-123
TABEL II-53 CAKUPAN KINJUNGAN BAYI PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023....	II-124
TABEL II-54 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-124
TABEL II-55 CAKUPAN PUSKESMA PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-125
TABEL II-56 CAKUPAN PUSKESMAS PEMBANTU PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-126
TABEL II-57 CAKUPAN PELAYANAN NIFAS PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-126
TABEL II-58 CAKUPAN PEMEBRIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN KELUARGA MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-127
TABEL II-59 CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD DAN SETINGKAT PER KECAMATAN DI KABUAPTEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-128
TABEL II-60 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-128
TABEL II-61 JUMLAH PENGUNJUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-133
TABEL II-62 KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS 2017-2022 .....	II-134
TABEL II-63 RASIO PERPUSTAKAAN PERSATUAN PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2023.....	II-134

TABEL II-64 PERKEMBANGAN INDIKATOR ASPEK PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-135
TABEL II-65 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 – 2023.....	II-137
TABEL II-66 LAYANAN SPAM DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-141
TABEL II-67 KAPASITAS DAN PRODUKSI AIR SPAM DI PERUMDA TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-142
TABEL II-68 PERKEMBANGAN INDIKATOR PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-143
TABEL II-69 PERKEMBANGAN INDIKATOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 – 2023.....	II-144
TABEL II-70 CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PADA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.....	II-145
TABEL II-71 PRESTASI PPID UTAMA KABUPATEN BENGKALIS 2017-2023 .....	II-146
TABEL II-72 DATA WILAYAH (KELURAHAN/DESA) YANG BELUM TERCOVER MOBILE BROADBAND 4G KABUPATEN BENGKALIS .....	II-146
TABEL II-73 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH/KAPITA) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2023 .....	II-149
TABEL II-74 BANYAKNYA PRODUKSI TENAGA LISTRIK DIRINCI MENURUT GOLONGAN TARIF DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 .....	II-150
TABEL II-75 PERKEMBANGAN CAKUPAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 – 2023.....	II-152
TABEL II-76 PERKEMBANGAN INDIKATOR PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 - 2023 .....	II-153
TABEL II-77 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2023.....	II-156
TABEL II-78 INDEKS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2023 .....	II-157
TABEL II-79 REFLEKSI PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS.....	II-160
TABEL II-80 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2045 .....	II-180
TABEL II-81 PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-181
TABEL II-82 PROYEKSI DISTRIBUSI PENDUDUK KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-182
TABEL II-83 PROYEKSI PESENTASE PENDUDUK USIA TUA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2045 .....	II-182
TABEL II-84 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2023 -2045.....	II-183
TABEL II-85 PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2045.....	II-185
TABEL II-86 PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-186
TABEL II-87 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS 2025-2045 .....	II-188
TABEL II-88 RATA-RATA JUMLAH DAYA LISTRIK PER KAPITA (WATT) TAHUN 2021 .....	II-190
TABEL II-89 BESAR DAYA LISTRIK (DALAM MW) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2021 .....	II-191
TABEL II-90 PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045.....	II-191
TABEL II-91 PROYEKSI KEBUTUHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-193
TABEL II-92 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 – 2045.....	II-193
TABEL II-93 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-194
TABEL II-94 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-197
TABEL II-95 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	II-197

TABEL II-96 SISTEM PUSAT PERMUKIMAN DI PROVINSI RIAU.....	II-202
TABEL II-97 KAWASAN BUDIDAYA DI WILAYAH PROVINSI RIAU .....	II-202
TABEL II-98 ARAHAN KEBIJAKAN KAWASAN DURI-DUMAI .....	II-205
TABEL II-99 ARAHAN KEBIJAKAN KAWASAN PARIWISATA PULAU RUPAT .....	II-207
TABEL II-100 SISTEM PUSAT PEMUKIMAN KABUPATEN BENGKALIS.....	II-209
TABEL II-101 SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN BENGKALIS .....	II-209
TABEL II-102 KAWASAN LINDUNG KABUPATEN BENGKALIS .....	II-215
TABEL II-103 KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS .....	II-216
TABEL IV-1 SASARAN VISI RPJPD KABUPATEN BENGKALIS 2025-2045 .....	IV-2
TABEL V-1 ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	V-3
TABEL V-2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI RPJPD 2025-2045 .....	V-5
TABEL V-3 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN .....	V-24

# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I-1 HUBUNGAN ANTARA RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	I-5
GAMBAR II-1 PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BENGKALIS .....	II-3
GAMBAR II-2 PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BENGKALIS.....	II-7
GAMBAR II-3 PETA GEOLOGI KABUPATEN BENGKALIS.....	II-7
GAMBAR II-4 PETA HIDROLOGI KABUPATEN BENGKALIS.....	II-9
GAMBAR II-5 PETA KLIMATOLOGI KABUPATEN BENGKALIS .....	II-10
GAMBAR II-6 PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BENGKALIS .....	II-12
GAMBAR II-7 PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN BENGKALIS .....	II-17
GAMBAR II-8 INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015-2023.....	II-18
GAMBAR II-9 PETA WILAYAH RAWAN ABRASI KABUPATEN BENGKALIS .....	II-20
GAMBAR II-10 PETA RAWAN BENCANA BANJIR KABUPATEN BENGKALIS.....	II-22
GAMBAR II-11 PETA RAWAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS .....	II-24
GAMBAR II-12 INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021- 2023.....	II-25
GAMBAR II-13 POTENSI KELAPA SAWIT DAN KARET KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-31
GAMBAR II-14 PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2023.....	II-32
GAMBAR II-15 JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2024....	II-35
GAMBAR II-16 RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.....	II-36
GAMBAR II-17 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 DAN 2023 .....	II-37
GAMBAR II-18 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PDRB HARGA ADHK 2010 TAHUN 2011-2023.....	II-38
GAMBAR II-19 PERKEMBANGAN GINI RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 .....	II-40
GAMBAR II-20 KETIMPANGAN WILLIAMSON PROVINSI RIAU TAHUN 2010 – 2023 .....	II-41
GAMBAR II-21 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2023 (PER BULAN) .....	II-43
GAMBAR II-22 TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2010 – 2023.....	II-44
GAMBAR II-23 PERKEMBANGAN PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 (%).....	II-46
GAMBAR II-24 POSISI CAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023.....	II-47
GAMBAR II-25 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 .....	II-48

GAMBAR II-26 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 .....	II-49
GAMBAR II-27 POISISI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK TAHUN 2023 .....	II-50
GAMBAR II-28 PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 .....	II-51
GAMBAR II-29 POSISI CAPAIAN USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023.....	II-51
GAMBAR II-30 PERKEMBANGAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 .....	II-53
GAMBAR II-31 POSISI CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023 .....	II-54
GAMBAR II-32 PERKEMBANGAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023.....	II-55
GAMBAR II-33 POSISI CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023 .....	II-56
GAMBAR II-34 PERKEMBANGAN PENGELUARAN PER KAPITA RIIL (Rp. 000/TAHUN) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023.....	II-57
GAMBAR II-35 POSISI CAPAIAN PENGELUARAN RIIL PER KAPITA (Rp 000/KAPITA/BULAN) KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023.....	II-59
GAMBAR II-36 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2023 .....	II-59
GAMBAR II-37 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2023 .....	II-60
GAMBAR II-38 TINGKAT INFLASI DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2023.....	II-62
GAMBAR II-39 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023 .....	II-63
GAMBAR II-40 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023 .....	II-64
GAMBAR II-41 NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010) DAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2023 (DALAM TRILIUN) .....	II-74
GAMBAR II-42 PDRB PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 (JUTA RUPIAH).....	II-75
GAMBAR II-43 SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023 .....	II-76
GAMBAR II-44 KLASIFIKASI DESA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023 .....	II-79
GAMBAR II-45 RASIO KEWIRUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS (%) TAHUN 2019-2023.....	II-82
GAMBAR II-46 JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2023 .....	II-83



GAMBAR II-47 RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM (ADHB) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2023 .....	II-84
GAMBAR II-48 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2023 .....	II-92
GAMBAR II-49 PERKEMBANGAN RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB ADHB.....	II-93
GAMBAR II-50 KELOMPOK BARANG EKSPOR KABUPATEN BENGKALIS PADA TAHUN 2022 .....	II-94
GAMBAR II-51 TOTAL DANA PIHAK KETIGA/PDRB KABUPATEN BENGKALIS (%) TAHUN 2018-2023 ....	II-97
GAMBAR II-52 INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2023 .....	II-98
GAMBAR II-53 POSISI CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK ) SD/MI KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2023.....	II-100
GAMBAR II-54 POSISI CAPAIAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM ) SD/MI KABUPATEN BENGKALIS DAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2023.....	II-102
GAMBAR II-55 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 .....	II-108
GAMBAR II-56 PROPORSI PENDUDUK BER UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI (%) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2023 .....	II-109
GAMBAR II-57 INDEK PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 ..	II-110
GAMBAR II-58 PREVALENSI STUNTING BALITA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2023.....	II-115
GAMBAR II-59 PREVALENSI STUNTING BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023.....	II-115
GAMBAR II-60 CAPAIAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2023 (%).....	II-130
GAMBAR II-61 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN KABUPATEN BENGKALIS (%) TAHUN 2018-2023.....	II-131
GAMBAR II-62 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2023 .....	II-132
GAMBAR II-63 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN BENGKALIS 2010 DAN 2023 .....	II-132
GAMBAR II-64 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2023.....	II-139
GAMBAR II-65 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2023 .....	II-140
GAMBAR II-66 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM BERSIH, DAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023.....	II-140
GAMBAR II-67 PERKEMBANGAN JUMLAH UJI KIR DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019-2023 .....	II-143
GAMBAR II-68 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERCATAT DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018-2023 ..	II-151
GAMBAR II-69 RASIO KRIMINALITAS PER 10.000 PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS 2018-2023.....	II-151
GAMBAR II-70 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2023.....	II-154
GAMBAR II-71 INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) KABUPATEN BENGKALIS PADA TAHUN 2023.....	II-155

GAMBAR II-72 INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022-2023 .....	II-159
GAMBAR II-73 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 – 2023.....	II-160
GAMBAR II-74 PROYEKSI JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2045.....	II-180
GAMBAR II-75 PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 DAN TAHUN 2045.....	II-186
GAMBAR V-1 TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN LIMA TAHUNAN JANGKA PANJANG KABUPTEN BENGKALIS TAHUN 2025-2045 .....	V-1
GAMBAR V-2 KAWASAN STRATEGIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS..	V-14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan (2025-2045). RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Penyusunan RPJPD didasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan serta mengakomodir seluruh dinamika kebutuhan nyata daerah yang dipadukan dengan merangkum seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan segala konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dokumen RPJPD merupakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan sesuai dengan amanat pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian penyusunan RPJPD ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan dengan mengacu pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 dan pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka RPJP Kabupaten Bengkalis ini telah memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan daerah dan sasaran pokok pembangunan daerah yang dirumuskan untuk jangka panjang (20 tahun) mengacu pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah. Sistematika dan isi setiap bahagian dari RPJPD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 ini telah disusun sesuai dengan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, tahapan penyusunan telah mengikut arahan yang termaktub dalam pasal 16 ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017, yang dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Selain itu dokumen RPJPD ini juga mempertimbangkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sebagai salah satu referensi laporan untuk memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan.

Setiap kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat strategis perlu didukung oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan instrumen yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dan terintegrasi dalam proses pembangunan suatu wilayah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terutama Pasal 15, dinyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan KLHS dalam rangka penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 disusun untuk melanjutkan dan memperbaharui RPJPD sebelumnya yang telah berakhir untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 yang menyebutkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

## 1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 11) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016

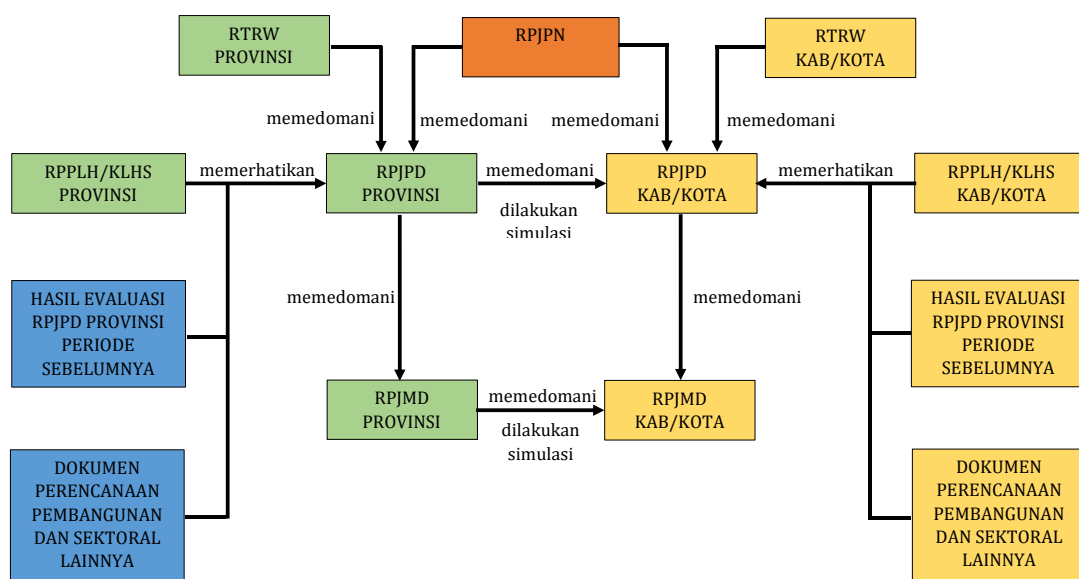
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7).

- 23) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 Nomor 1).

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Bengkulu merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



**Gambar I-1 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD

Provinsi Riau 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Daerah serta memperhatikan RPPLH/KLHS Daerah. RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi stakeholders dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan landasan dan pedoman visi bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang antara daerah dan Pemerintah Pusat;
- 3) Merumuskan capaian kinerja pembangunan;



## 1.5 SISTEMATIKA

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB di dalamnya. Rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- BAB I. Pendahuluan;** Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;** Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;** Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).
- BAB IV. Visi dan Misi Daerah;** Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah.
- Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut (Sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045). Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.
- BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;** Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.
- BAB VI. Penutup** Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 Periode kedepan.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1 Geografi

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### A. Luas dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi  $100^{\circ}57'57,6''$  –  $102^{\circ}30'25,2''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ}7'37,2''$  -  $0^{\circ}55'33,6''$  Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

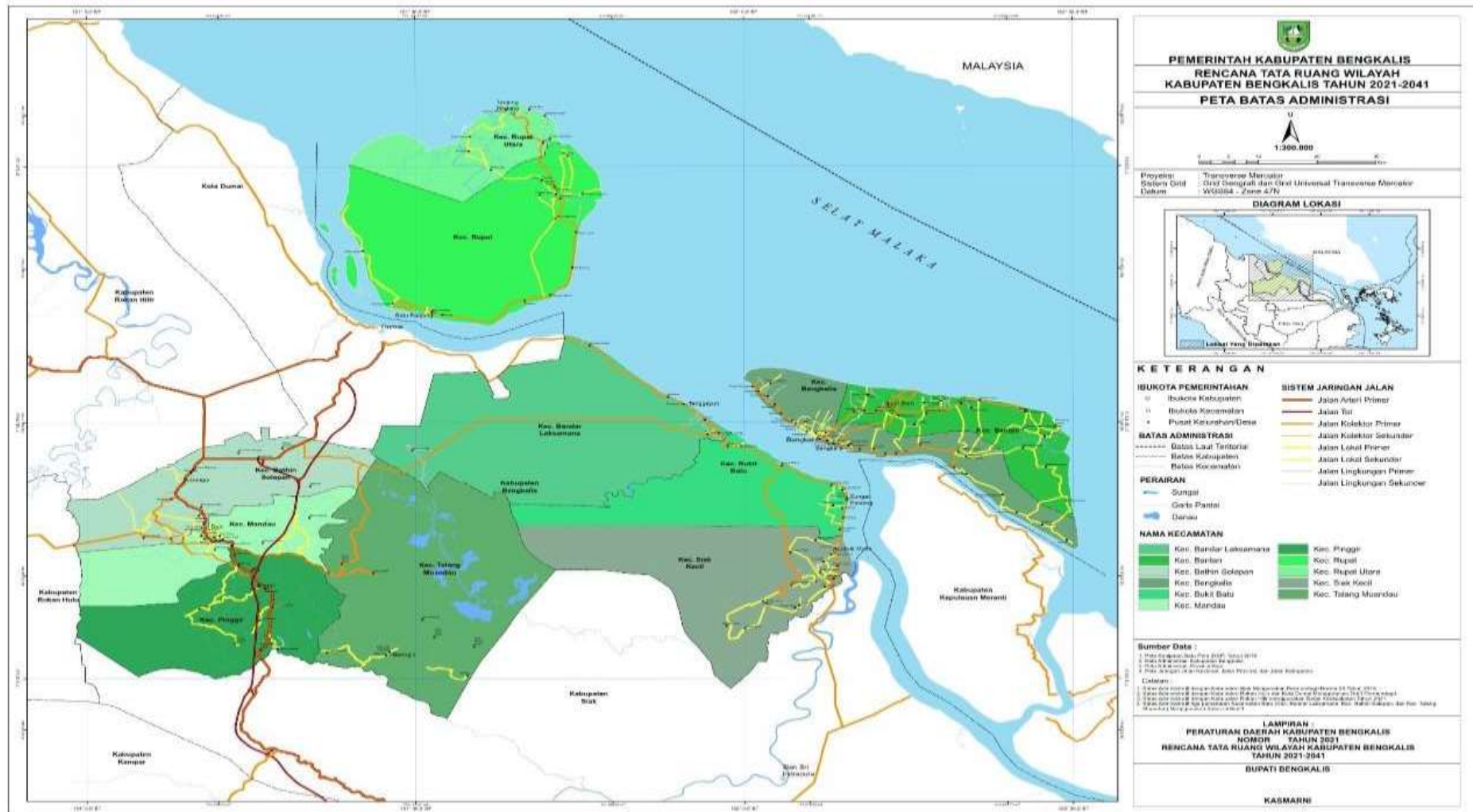
Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya  $938 \text{ Km}^2$  atau 93.840 Hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya  $1.514,99 \text{ Km}^2$  atau 151.499 Hekar. Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairan  $2.722,27 \text{ Km}^2$  atau 272.227 Hektar. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratan  $3.284,04 \text{ Km}^2$  atau 328.404 Hektar.

Secara geografis, letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan sebagian lainnya berada pada jalur ekonomi penting di Pulau Sumatera dan beberapa

kabupaten/kota disekitarnya. Letak wilayah tersebut berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis pada masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi pada bidang pertanian dan perikanan, dan industri pariwisata. Posisi geostrategis dan ketersediaan sumberdaya lahan dan panjang garis pantai Pulau Rupa merupakan potensi sumberdaya alam daerah yang masih dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari sebagai penggerak ekonomi daerah dimasa mendatang

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah luas 8.628,054 km<sup>2</sup> atau 862.805,4 Ha, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai (BPS, 2023). Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 3 (tiga) pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupa yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 53% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu Kecamatan Talang Muandau dengan luas wilayah 1.379,26 Km<sup>2</sup> (15,99%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.303,78 Km<sup>2</sup> (15,11%), Kecamatan Rumat dengan luas wilayah 1.145,19 Km<sup>2</sup> (13,27%) dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 948,11 Km<sup>2</sup> (10,99%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas yang lebih kecil, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rumat Utara (4,39%) dan Kecamatan Bengkalis (5,13%). Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-2 berikut.

**Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	464,04	5,38
2	Bantan	Selat Baru	-	23	443,29	5,14
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	598,76	6,94
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.303,79	15,11
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	948,11	10,99
6	Mandau	Air Jamban	9	2	517,80	6,00
7	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	674,28	7,81
8	Pinggir	Pinggir	2	8	775,03	8,98
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.379,26	15,99
10	Rumat	Batu Panjang	4	12	1.145,19	13,27
11	Rumat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,51	4,39
Kabupaten Bengkalis			19	136	8.628,06	100

Sumber : BPS Bengkalis, 2024

## B. Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha.

Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten disajikan pada Tabel II-3 berikut ini.

**Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2023**

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Mandau	55	103
2	Pinggir	45	100
3	Bathin Solapan	55	106
4	Talang Muandau	45	90
5	Bukit Batu	6	15
6	Siak Kecil	6	25
7	Bandar Laksamana	6	24
8	Rupert	5	71
9	Rupert Utara	5	86
10	Bengkalis	5	-
11	Bantan	5	15

Sumber: BPS Bengkalis dalam Angka 2024

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiografi cekungan rawa dan fisiografi daratar, dengan karakteristik sebagai berikut:

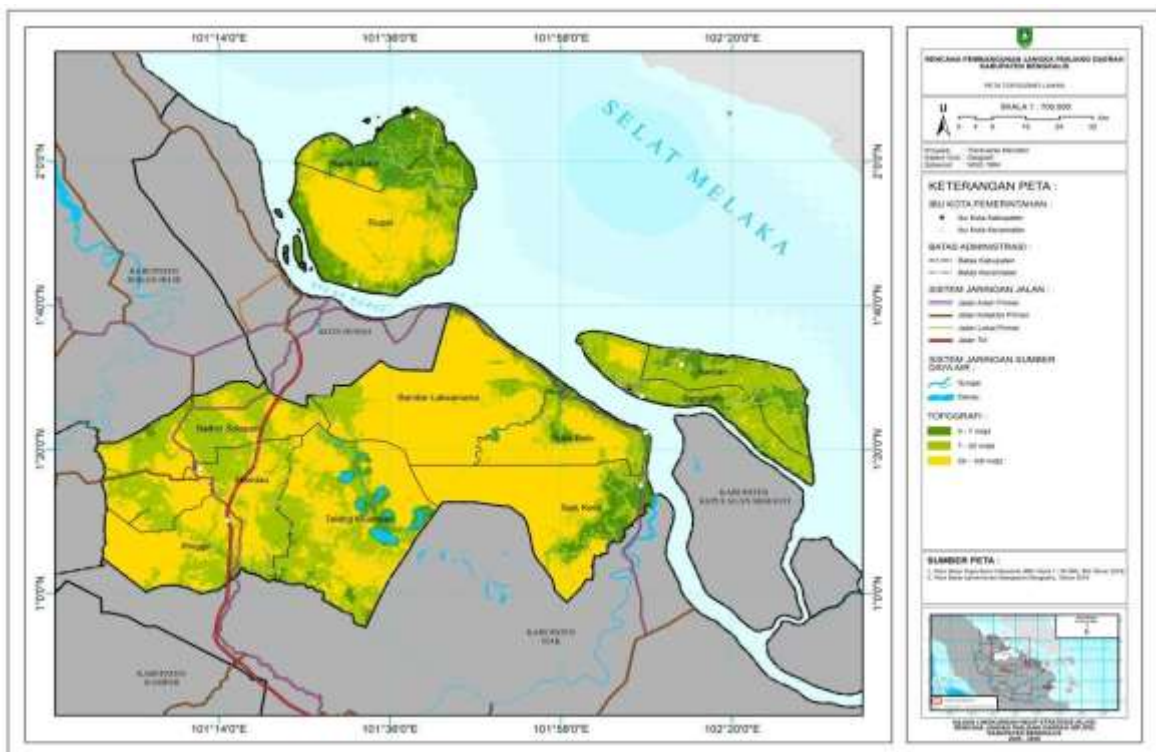
- 1) Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0- 3 mdp) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

2) Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdp) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

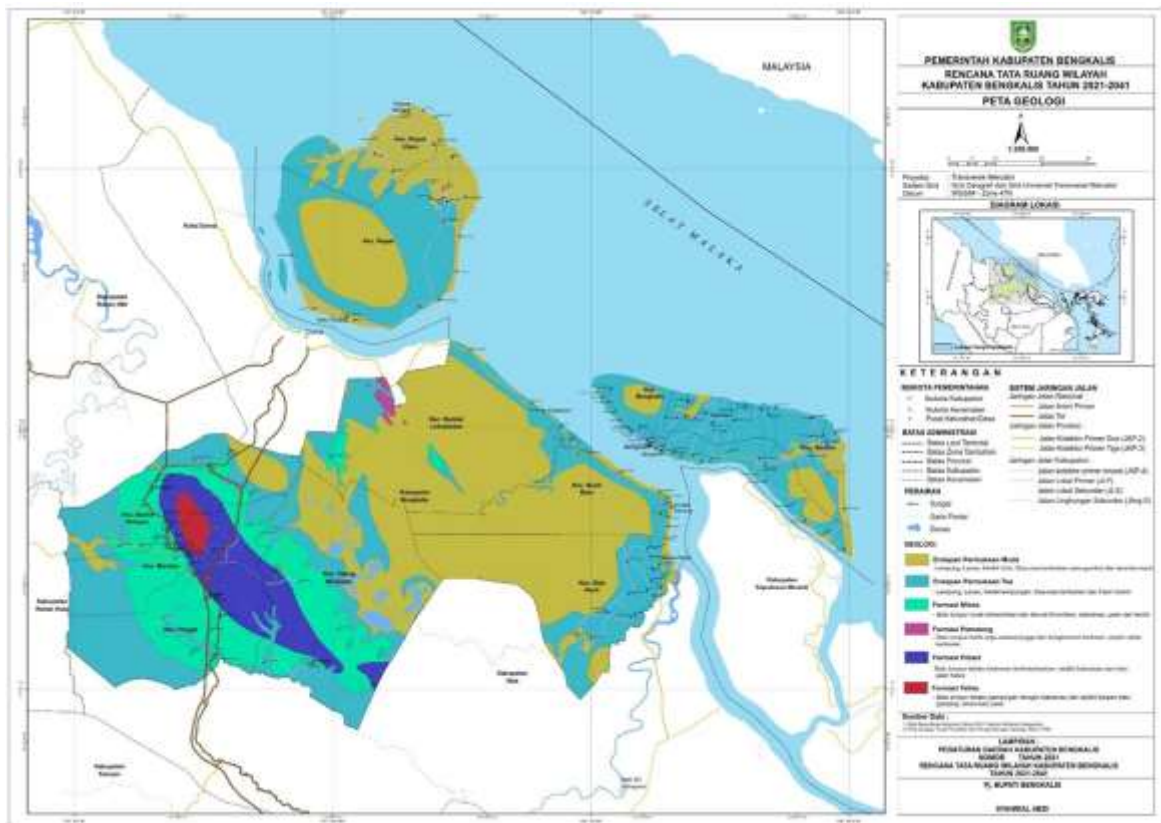


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045

Gambar II-2 Peta Topografi Kabupaten Bengkalis

**C. Geologi**

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Ruptat. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat apda gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Gambar II-3 Peta Geologi Kabupaten Bengkalis

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi



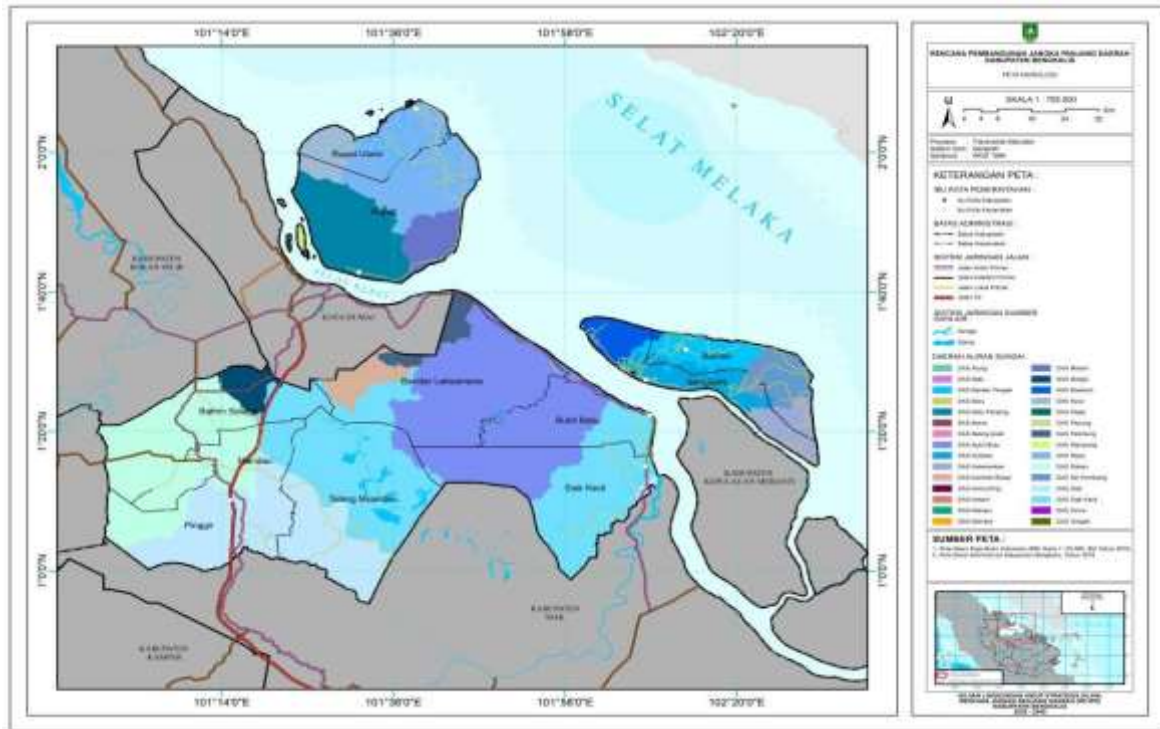
petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuarter terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupal, Rupal Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan.

#### **D. Hidrologi**

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupal, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembang Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang  $\pm$  90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupal. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupal dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045

Gambar II-4 Peta Hidrologi Kabupaten Bengkulu

### E. Klimatologi

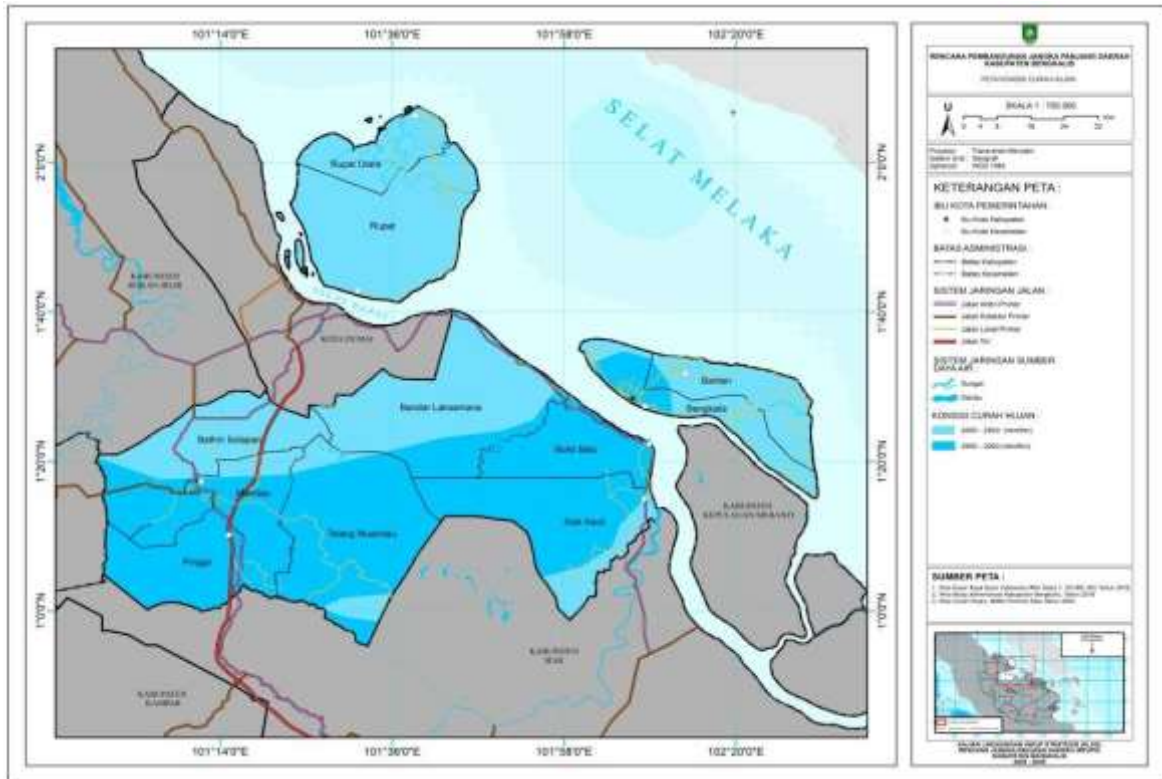
Wilayah Kabupaten Bengkulu secara umum memiliki iklim Tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut dan temperatur berkisar 26oC-34oC serta kelembaban rata- rata berkisar antara 75% - 85%. Musim hujan biasa terjadi pada bulan Agustus-Desember.Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan januari hingga bulan juli. Lebih rinci kondisi iklim Kabupaten Bengkulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-3 Kondisi Curah Hujan, Kelembaban dan Suhu Kabupaten Bengkulu 2022

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu			Kelembaban		
			Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	61	8	22,8	26,5	32,4	62	84	97
Februari	207	16	23,2	26,5	32,4	66	75	98
Maret	190	10	23,3	27,4	33,3	60	82	98
April	200	20	23,5	26,2	33,4	66	83	98
Mei	239	10	23,8	27,7	33,8	62	78	97
Juni	159	17	22,9	26,2	31,8	67	82	97
Juli	123	9	23,3	27,2	33,2	64	85	98
Agustus	180	21	23,2	26,7	31,8	69	79	97
September	108	20	23,3	26,6	32,4	64	82	97
Oktober	360	22	22,4	26,5	32,4	66	83	98
November	175	24	23,7	26,5	30,5	68	80	97
Desember	252	20	23,1	26,5	31,5	67	82	98

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu			Kelembaban		
			Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Rata-rata	187,83	16,42	23,2	26,71	32,4	65,08	81,21	97,46
Maksimal	239	24	23,8	27,7	33,8	69	84	98
Minimal	61	8	22,4	26,2	31,5	62	75	97

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2023



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Gambar II-5 Peta Klimatologi Kabupaten Bengkalis

### 2.1.1.2 Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022–2042 dilihat dari rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkalis ialah sebagai berikut:

Tabel II-4 Rencana Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Bengkalis

No	Peruntukan Ruang	Kode Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
<b>A. Kawasan Lindung</b>			<b>87.755</b>	<b>10,19</b>
1.	Badan Air	BA	8.563	0,99
2.	Kawasan Hutan Lindung	HL	31	0,004
3.	Kawasan Lindung Gambut	LG	1.016	0,12
4.	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	1.135	0,13

No	Peruntukan Ruang	Kode Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
5.	Suaka Margasatwa	SM	77.001	8,94
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	9	0
<b>B. Kawasan Budidaya</b>			<b>773.501</b>	<b>89,81</b>
1.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	109.874	12,76
2.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	342.327	39,75
3.	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	68.034	7,9
4.	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	2.040	0,24
5.	Kawasan Perkebunan	P-3	164.312	19,08
6.	Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	2.246	0,26
7.	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	8.442	0,98
8.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	2.904	0,34
9.	Kawasan Pariwisata	W	6.723	0,78
10.	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	24.977	2,9
11.	Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	41.601	4,83
12.	Kawasan Transportasi	TR	20	0,002
<b>Luas Total</b>			<b>861.256</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Bengkalis 2020-2040

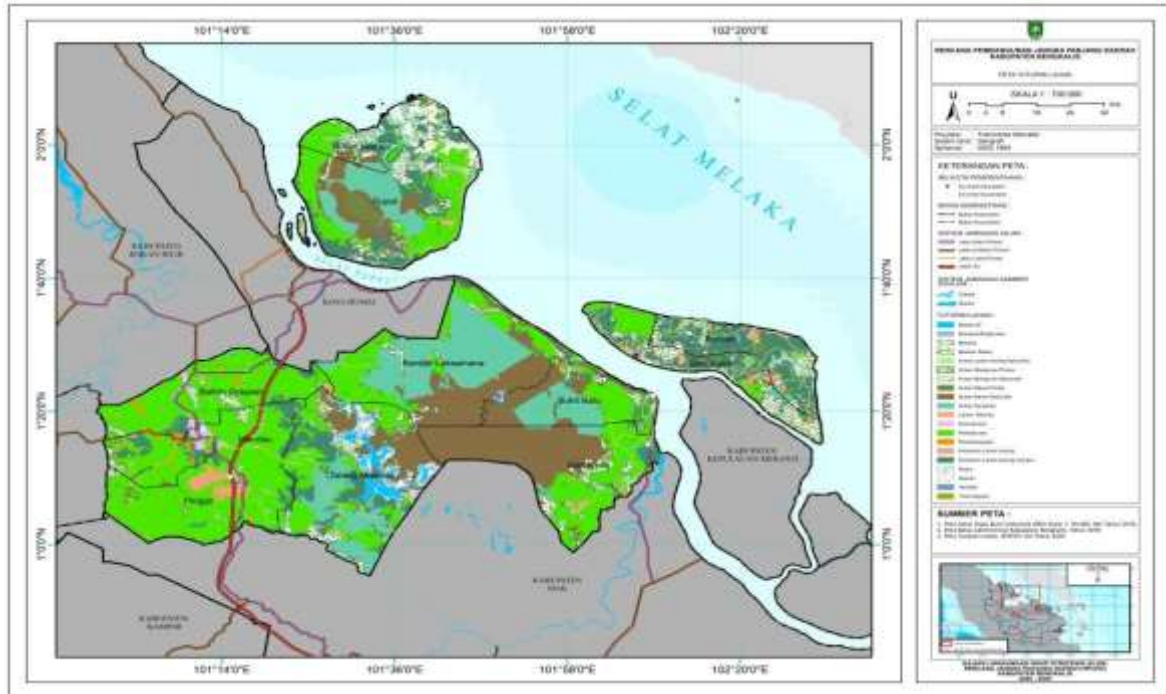
Adapun pola tutupan lahan atau penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bengkalis dihasilkan dari hasil penafsiran data citra satelit secara manual (digitasi on-screen) menggunakan Landsat 8 OLI & dan Landsat 7 ETM + skala 1:250.000 menggunakan Peta Penutup Lahan Kementerian LHK Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) tahun 2018.

Tabel II-5 Sebaran Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	397,26	0,05%
2	Hutan mangrove primer	1.936,74	0,22%
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	24.332,01	2,81%
4	Hutan rawa primer	4.157,33	0,48%
5	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	132.399,51	15,28%
6	Hutan tanaman	111.863,17	12,91%
7	Lahan terbuka	2.272,98	0,26%
8	Perkebunan / Kebun	286.877,08	33,12%
9	Permukiman / Lahan terbangun	8.567,53	0,99%
10	Pertambangan	5.609,89	0,65%
11	Pertanian lahan kering	14.876,19	1,72%
12	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	149.771,37	17,29%
13	Rawa	13.371,44	1,54%
14	Sawah	12.184,14	1,41%
15	Semak belukar	147,48	0,02%
16	Semak belukar rawa	94.504,85	10,91%

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
17	Tambak	256,63	0,03%
18	Tubuh air	2.692,39	0,31%
<b>Total</b>		<b>866.218,00</b>	<b>100%</b>

Sumber: KLHS RTRW Kab. Bengkalis 2020



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

**Gambar II-6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis**

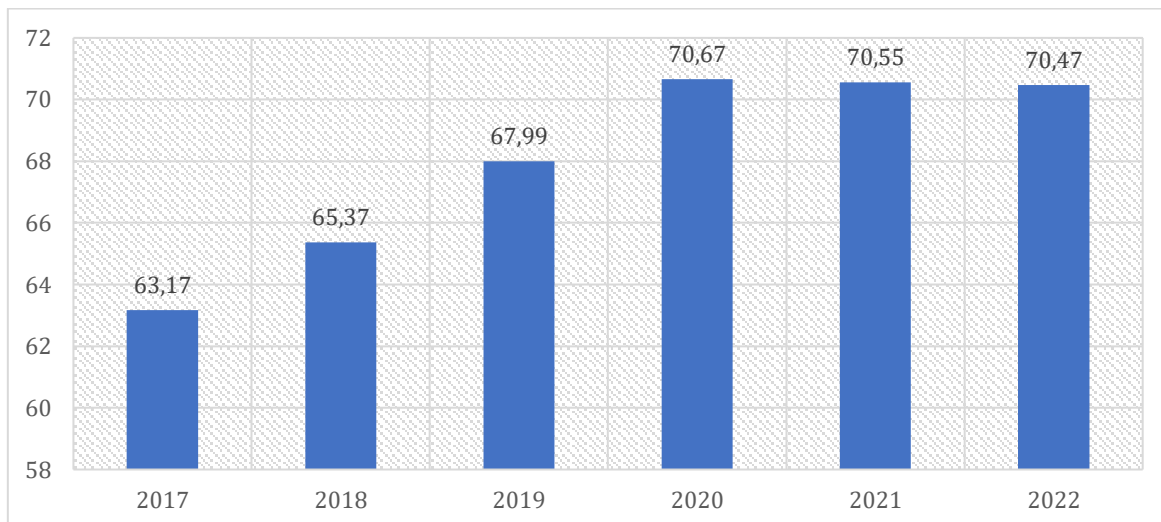
### 2.1.1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekosistem, Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Akan tetapi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan mulai dari tahun 2021-2022. Pada Tahun 2021, nilai IKLH menurun sebesar -0,12 dibanding Tahun 2020.

Nilai IKLH Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah 70,47 dengan kategori BAIK, menurun sebesar -0,08 dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan sebesar -0,84 dibandingkan nilai IKA tahun 2021. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -0,65 jika dibandingkan

tahun 2021, dari 96,91 menjadi 96,26. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami peningkatan sebesar +2,25 jika dibandingkan dengan IKL tahun 2021.



Sumber: Perhitungan IKLH Kabupaten Bengkalis, 2023

**Tabel II-6 Trend IKLH Kabupaten Bengkalis 2017 - 2022**

Strategi peningkatan IKA Kabupaten Bengkalis pada tahun berikutnya perlu dilakukan program-program pengelolaan antara lain (1) menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar; (2) memulihkan kualitas badan air langsung di badan air (3) dan melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan air atau aliran sungai secara terus-menerus atau secara periodik. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan nilai IKLH sebesar 40,5%, saat ini nilai IKU Kabupaten Bengkalis tahun 2022 sudah berprediket Sangat Baik.

Salah satu strategi meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta stakeholders perlu membuat kebijakan dalam meningkatkan persentase luas tutupan lahan (hutan dan non hutan) yang ada di Kabupaten Bengkalis. Diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan dengan menyediakan Ruang terbuka Hijau, penghijauan untuk ekosistem daratan, dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir khususnya mangrove.

#### **A. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan bertahan hidup. Air permukaan adalah air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Areal tanah yang mengalirkan air ke suatu badan air disebut watersheds atau drainage basins. Air yang mengalir dari daratan menuju suatu badan air disebut limpasan permukaan (surface run off) dan air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air

sungai (river run off). Sekitar 60 % air yang masuk ke sungai berasal dari hujan, dan sisanya berasal dari air tanah. Wilayah di sekitar daerah aliran sungai yang menjadi tangkapan air disebut catchment basin. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia.

Dari 48 titik pantau terdapat Indeks Pencemaran Air (PIj) yang memiliki nilai antara  $0 < PIj \leq 1$ , yaitu berstatus memenuhi baku mutu sebanyak 2 titik pantau. Sedangkan Indeks Pencemaran Air (PIj) memiliki nilai antara  $0 < PIj \leq 5$  yaitu berstatus Cemar Ringan sebanyak 46 titik pantau. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkalis tahun 2022 diperoleh dengan mentransformasi Indeks Pencemaran Air (PIj) menjadi Indeks Kualitas Air (IKA). Didapat hasil IKA Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah 50,84. Berdasarkan kategori Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkalis 2022 memiliki Kategori Sedang.

**Tabel II-7 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkalis**

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Permutu air
Memenuhi	2	4,17%	70	2,92
Cemar Ringan	46	95,83%	50	47,92
Cemar Sedang	0	0%	30	0
Cemar Berat	0	0%	10	0
Total	48	Indeks Kualitas Air (IKA)		50,83

Sumber: Perhitungan IKA Kabupaten Bengkalis, 2022

### B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida

(SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun pada saat ini penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Pemantauan kualitas udara ambien Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili kegiatan transportasi, kegiatan industri, kegiatan pemukiman, dan kegiatan perkantoran yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Pemantauan dilakukan selama dua periode dengan parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022 menggunakan data Passive Sampler yang merupakan program kegiatan dari Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2022 dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Pemantauan kualitas udara Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap 1 pada bulan Mei dan tahap 2 pada bulan Juli.

Dari hasil perhitungan indeks kualitas udara Kabupaten Bengkalis tahun 2022, rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> sebesar 4,53 µg/Nm<sup>3</sup>, sedangkan rata-rata kadar SO<sub>2</sub> sebesar 4,43 µg/Nm<sup>3</sup> dengan Indeks Pencemaran Udara (Ieu) sebesar 0,16. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU tahun 2022 Kabupaten Bengkalis adalah 96,91.

**Tabel II-8 Indeks Pencemaran Udara (IKU) Kabupaten Bengkalis 2022**

Parameter	Rerata Pemantauan 2021	Referensi EU	Index
NO <sub>2</sub>	4,53	40	0,11
SO <sub>2</sub>	3,43	20	0,22
Indeks Pencemaran Udara (Ieu)			0,17

Sumber : Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bengkalis, 2022

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bengkalis tahun 2022 didapat nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah 96,26 dengan Kategori Sangat Baik.

### C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks kualitas lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2018. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu



hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 889.755,82 Ha berdasarkan data spasial tutupan lahan (Ditjen PKLAT KLHK, 2021). Persentase luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bengkalis sebesar 36%. Sekitar 36% dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis ditutupi oleh hutan dan non hutan.

**Tabel II-9 Persentase Luas Tutupan Hutan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

Luas Tutupan Lahan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Tutupan Lahan
319.278,69	889.755,82	0,36

Sumber : Peta penutup lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) tahun 2021

Faktor Dampak Kebakaran Kanal Kabupaten Bengkalis adalah -0,01173. Nilai Tutupan Lahan dikonversi dengan menggunakan rumus di bawah ini, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bengkalis tahun 2022 sebesar 56,50 dengan Kategori Sedang.

#### 2.1.1.4 Kawasan Hutan

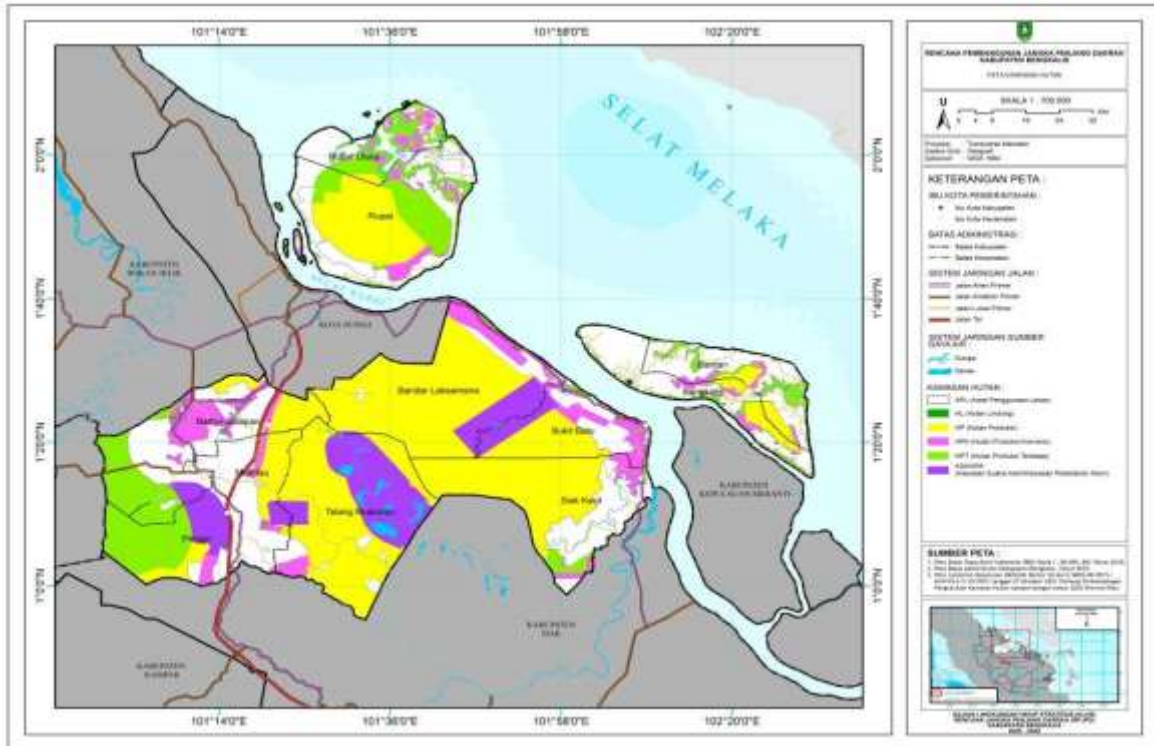
Analisis kawasan hutan di kabupaten Bengkalis dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau, ditemukan luasan terbesar berupa hutan produksi 38,73% dan luasan terkecil berupa Hutan Lindung 0,002%, selengkapnya disajikan pada Tabel II-5.

**Tabel II-10 Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis**

Kawasan Hutan	Luasan (ha)	Persentase (%)
APL	255.786,04	30,47
HL	18,05	0,002

Kawasan Hutan	Luasan (ha)	Persentase (%)
HP	325.171,43	38,73
HPK	66.503,71	7,92
HPT	109.400,74	13,03
KSA/KPA	5.733,31	0,68
SM	76.987,10	9,17
Total	839.600,38	100

Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

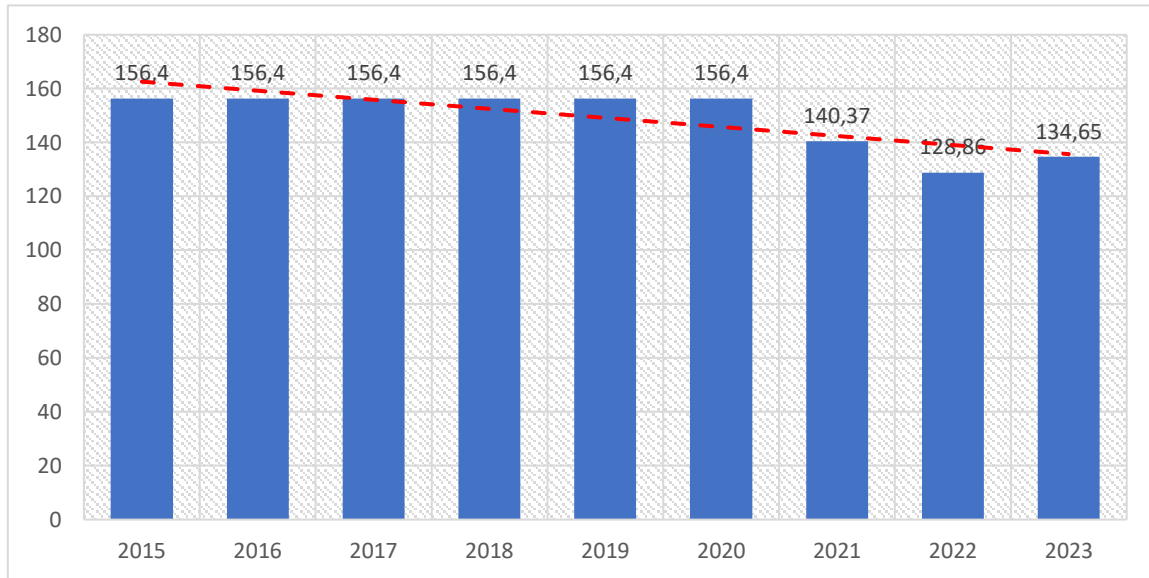
**Gambar II-7** Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bengkalis

### 2.1.1.5 Indeks Resiko Bencana

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan kompleks. Berdasarkan catatan dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis yang berpotensi menimbulkan kerugian jiwa maupun materi adalah adalah Banjir, kebakaran hutan dan lahan serta abrasi. Berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun

2023 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor yang tergolong sedang dengan skor 134,65 pada tahun 2023. Adapun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkalis disajikan pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2024

**Gambar II-8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2023**

### A. Rawan Abrasi

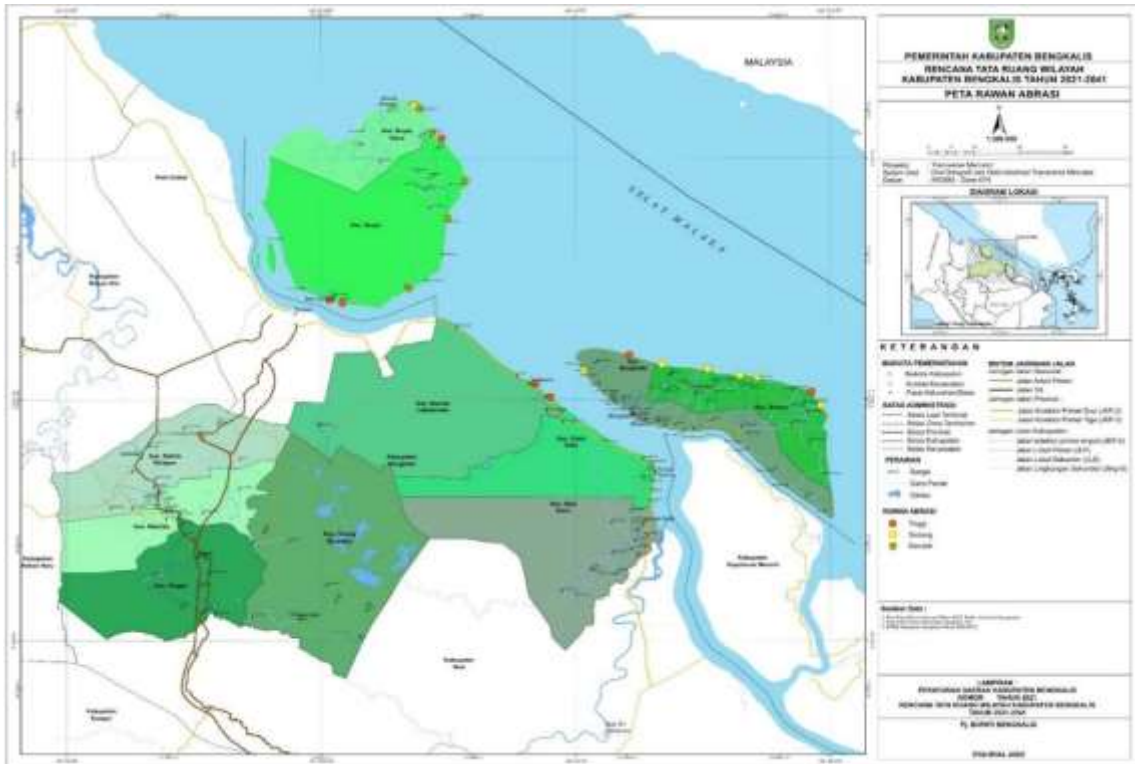
Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel II-11 Lokasi, Panjang dan Laju Abrasi di Kabupaten Bengkalis

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Panjang Pantai Terabrasi (m)	Laju Abrasi Per Tahun (m)	Tingkat Abrasi
1	Desa Muntai	Bantan	7.000	7	Tinggi
2	Desa Simpang Ayam	Bengkalis	6.000	7	Tinggi
3	Desa Pambang	Bantan	4.000	7	Tinggi
4	Desa Sepahat	Bukit Batu	4.500	6	Tinggi
5	Desa Tenggayun	Bukit Batu	3.000	5,5	Tinggi
6	Kampung Tengah Kel. Batu Panjang	Rupat	2.000	5,5	Tinggi
7	Sungai Injap Desa Terkul	Rupat	500	5,5	Tinggi
8	Desa Jangkang	Bantan	5.000	5	Tinggi
9	Pasir Putih Desa Kadur	Rupat Utara	4.000	5	Tinggi
10	Parit Lima Desa Bantan Air	Bantan	4.000	4	Sedang
11	Desa Bantan Tengah	Bantan	3.000	4	Sedang
12	Tanjung Kudu Desa Bantan Air	Bantan	2.000	4	Sedang
13	Desa Selat Baru	Bantan	2.000	4	Sedang
14	Tanjung Teguh Kel. Pergam	Rupat	2.000	3,5	Sedang
15	Selat Morong Desa Teluk Lecah	Rupat	5.000	3	Sedang
16	Desa Api-api	Bukit Batu	1.500	3	Sedang
17	Kelurahan Pergam	Rupat	1.500	3	Sedang
18	Desa Tanjung Medang	Rupat Utara	500	3	Sedang
19	Perapat Tunggul Desa Meskom	Bengkalis	500	2,5	Rendah
20	Desa Makeruh	Rupat	4.000	2	Rendah
21	Alohong Desa Pangkalan Nyerih	Rupat	3.000	2	Rendah
22	Desa Teluk Rhu	Rupat Utara	2.000	2	Rendah
23	Desa Tanjung Punak	Rupat Utara	2.000	2	Rendah
Total Panjang Pantai Terabrasi			69.000		

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

**Gambar II-9** Peta Wilayah Rawan Abrasi Kabupaten Bengkalis

## B. Rawan Banjir dan Gelombang Tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya.

Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

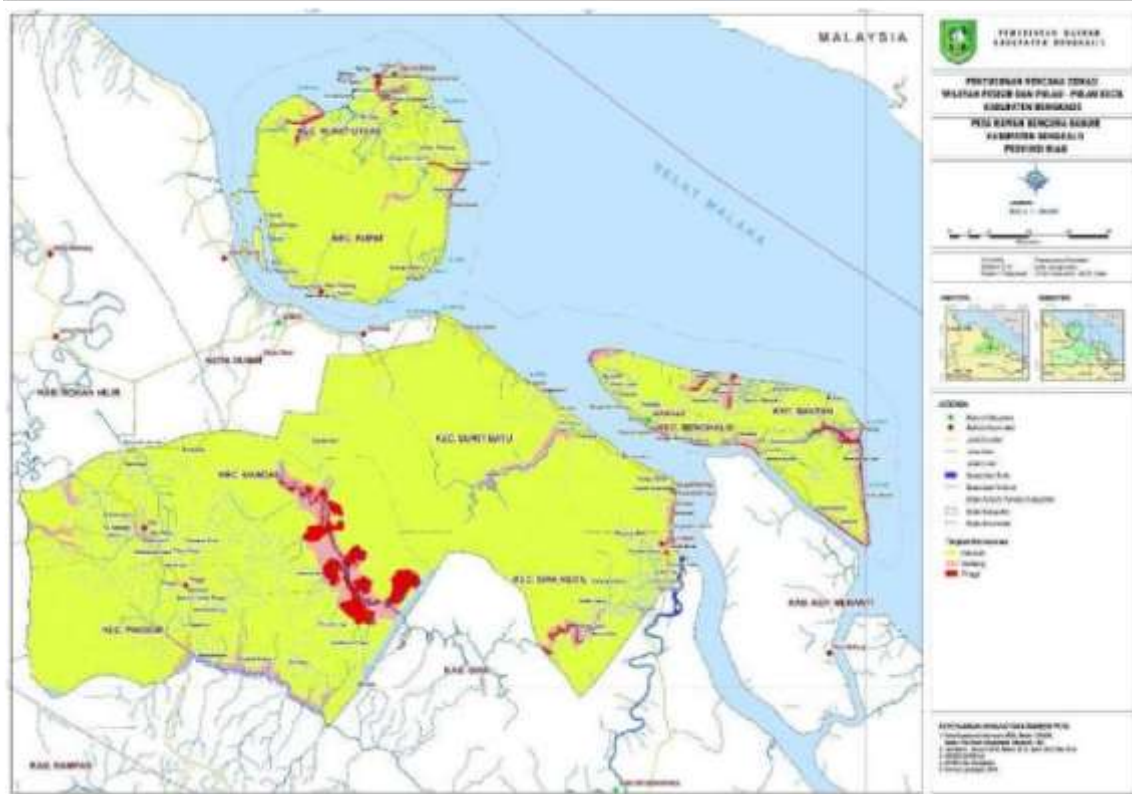
Pada tahun 2022 kejadian banjir sebanyak 50 dengan jumlah rumah yang terdampak sebanyak 3.220 rumah. Pada tahun 2023 turun menjadi 27 kejadian banjir, namun jumlah

rumah yang terdampak meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.228 rumah. Adapun dengan kejadian banjir terbanyak pada tahun 2023 adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Berikut adalah data rekapitulasi banjir menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2022-2023, yaitu:

**Tabel II-12 Rekapitulasi Kejadian Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2023**

No	Kecamatan	2022		2023	
		Jumlah/Kejadian	Jumlah/Rumah	Jumlah/Kejadian	Jumlah/Rumah
1	Mandau	6	665		
2	Pinggir	2	52	1	43
3	Bathin Solapan	10	219		
4	Talang Muandau	5	93	1	8
5	Bukit Batu	2	9		
6	Siak Kecil	5	261	6	649
7	Bandar Laksamana	2	33	1	27
8	Rupat	2	28		
9	Rupat Utara	-			
10	Bengkalis	7	1.601	10	1.216
11	Bantan	9	259	8	1.285
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>3.220</b>	<b>27</b>	<b>3.228</b>

Sumber : BPBD Kabupaten Bengkalis, 2024

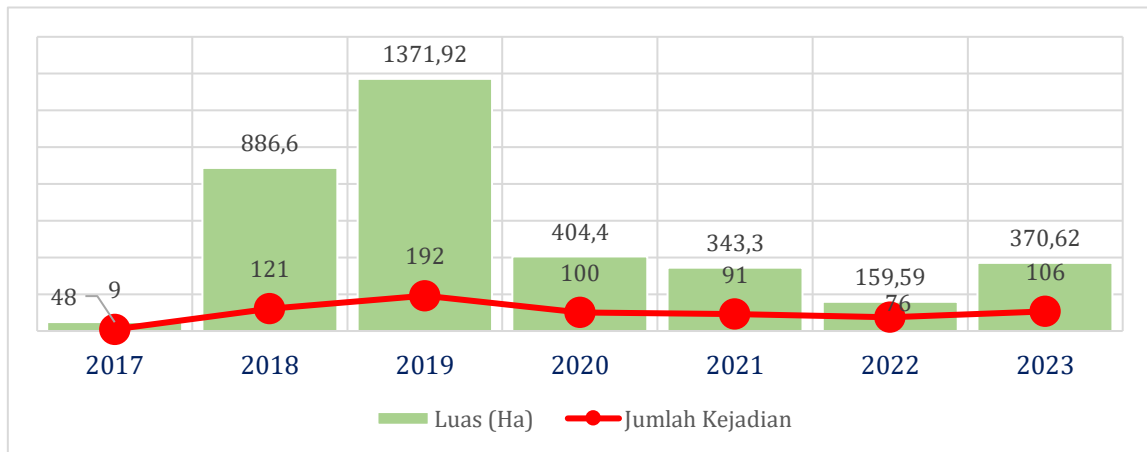


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

**Gambar II-10 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bengkalis**

**C. Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan**

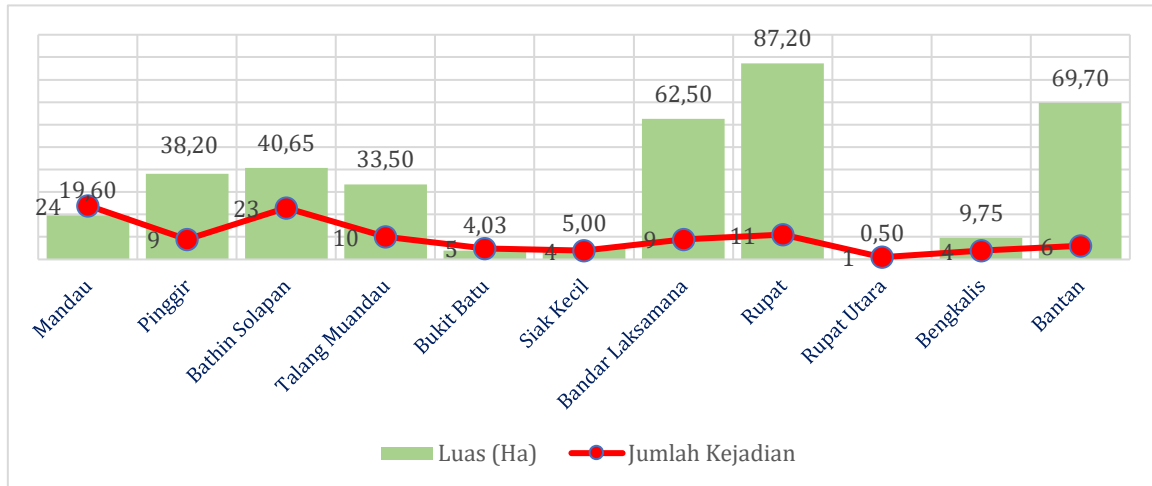
Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi hujan yang jarang. Pada tahun 2017 tercatat terjadi 9 kebakaran lahan dan hutan dengan luas mencapai 48 hektar. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 121 kejadian dan 192 kejadian pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kejadian kebakaran hutan mulai menurun menjadi 100 kejadian dan menghancurkan 404,4 ha lahan. Jumlah ini terus berkurang pada tahun 2022 menjadi 76 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas kebakaran mencapai 159,59 ha. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 106 kejadian kebakaran dengan luas kebakaran mencapai 370,62 Ha. Dalam menanggapi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, pemerintah daerah telah mengencangkan kegiatan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan pada masyarakat dan perusahaan. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan memberkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan pembukaan lahan dengan dibakar. Diharapkan ke depannya masyarakat dan perusahaan akan semakin paham akan bahaya pembakaran lahan sehingga akan terjadi pengurangan kejadian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-6 Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023**

Dari 370,62 ha luas lahan dan hutan yang terbakar pada tahun 2023 terbanyak berada di Kecamatan Rupert dengan luas kebakaran 87,20 ha, Kecamatan Bantan dengan luas kebakaran 69,70 ha dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas kebakaran 62,50 ha.

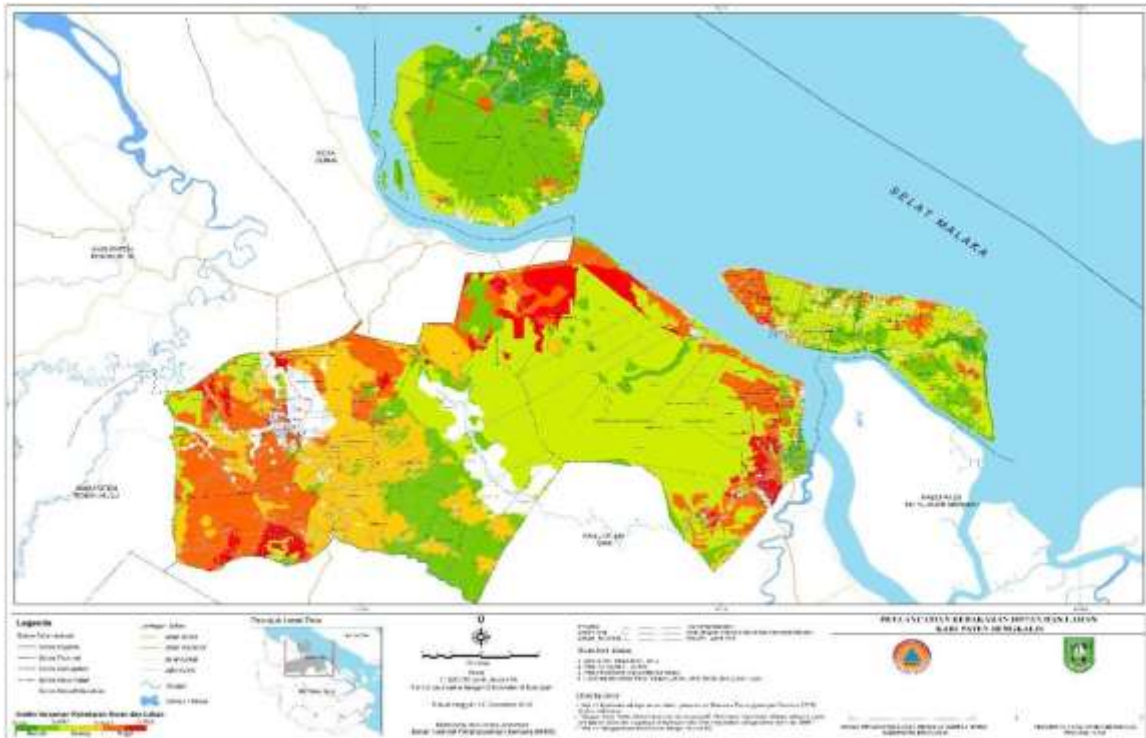


Sumber: BPBD Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-6 Jumlah Kejadian dan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Berdasarkan peta kerawanan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis yang ditunjukkan oleh Indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan, sebagian besar wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit batu memiliki resiko kebakaran lahan dan hutan yang lebih tinggi disbanding wilayah kecamatan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan pada wilayah ini lebih diprioritaskan. Lebih lanjut dapat diamati pada gambar berikut.





Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

### Gambar II-11 Peta Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Bengkalis

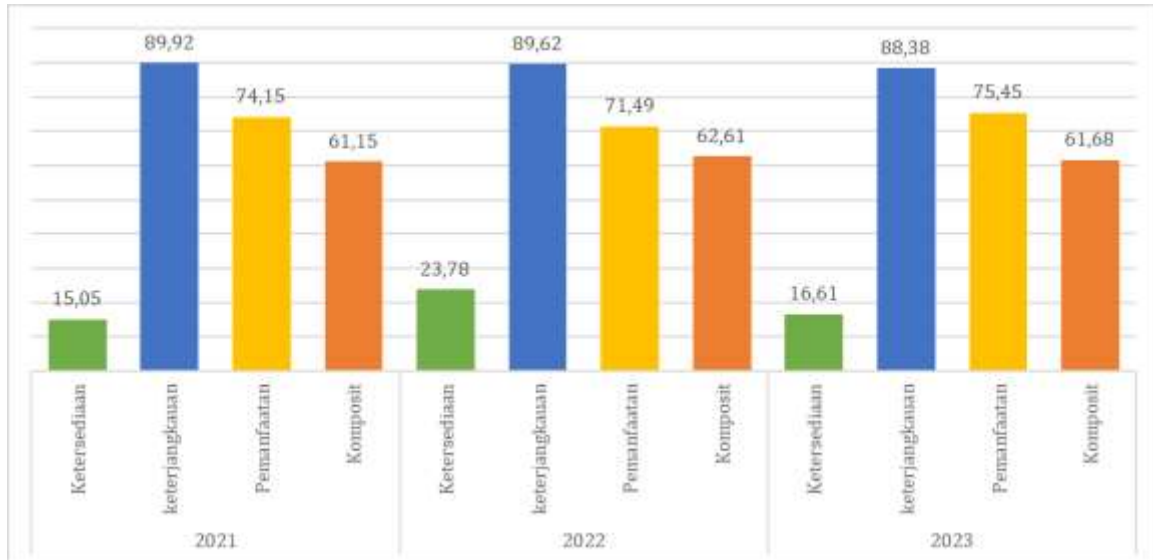
Dari beberapa kejadian bencana yang terjadi di kabupaten Bengkalis, dapat dikatakan sudah semuanya ditangani dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, penanganan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan maksimal.

#### 2.1.1.6 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional dan digunakan untuk mengukur ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.

Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam Indeks Ketahanan Pangan meliputi (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

Indeks Ketahanan Pangan diukur menurut bobot aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Hasil Indeks Ketahanan Pangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki ketahanan pangan yang baik atau buruk, dan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah ketahanan pangan.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

**Gambar II-12 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2023**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kategori Agak Tahan dengan Skor 61,15 pada tahun 2021 dan sedikit membaik menjadi 62,61 pada tahun 2022, namun sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 61,68. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berada pada posisi keempat terendah di Provinsi Riau pada tahun 2023. Aspek Ketersediaan Pangan adalah paling buruk dengan nilai 16,61 pada tahun 2023.

#### 2.1.1.7 Potensi Sumber Daya Alam

##### 1) Sektor Minyak dan Gas

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sektor minyak dan gas yang sangat besar dengan kontribusi sebesar 59,13% dari total PDRB pada tahun 2023. Ladang minyak Kabupaten Bengkalis berada dilapangan duri yang masuk dalam Wilayah Kerja (WK) Rokan pernah menjadi blok penghasil minyak terbesar di Indonesia yang mencapai 159,5 MBOPD atau setara dengan 24% terhadap produksi minyak nasional pada tahun 2021. Selama lebih dari enam dekade, WK Rokan merupakan salah satu penyumbang terbesar

produksi minyak nasional. Selain itu, WK Rokan merupakan WK Migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 11 ribu sumur aktif.

Dua lapangan paling produktif adalah Lapangan Minas dan Lapangan Duri, yang tercatat sebagai Lapangan terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 2,7 miliar barel minyak telah disumbangkan Lapangan Duri untuk produksi migas nasional. Lapangan duri diperkirakan menyumbang sebanyak 35% dari total produksi minyak di WK Rokan. Hingga tahun 2030 WK Rokan ditargetkan mencapai produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030.

## 2) Pertanian

### A. Tanaman Padi dan Palawija

Luas panen tanaman padi dan palawija di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis tahun 2023 2023 diantaranya panen padi 4.222,00 Ha, jagung 69,90 Ha, ubi jalar 20,40 Ha dan ubi kayu 348,33 Ha, sedangkan produksi padi dan palawija, diantaranya padi 17.352,42 Ton, jagung 250,10 Ton, ubi jalar 256,82 Ton dan ubi kayu 9.360,32 Ton.

Meskipun tanaman hortikultura belum menjadi perhatian utama bagi petani, namun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi dan vitamin, serta ditunjang perbaikan penghasilan maka permintaan terhadap komoditas hortikultura setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan tanaman buah-buahan dan sayuran sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Bengkalis baik dari segi jumlah maupun mutu. Hal ini tercermin masih besarnya ketergantungan pasokan produksi sayuran dan buah-buahan ke daerah ini.

Pengembangan tanaman sayuran dibudidayakan di semua wilayah Kabupaten Bengkalis. Perkembangan luas tanam, panen dan produksi tanaman sayuran tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah:

**Tabel II-13 Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Jenis Sayuran	Luas Tanam / Luas Pertanaman (Ha)	Luas Panen / Tanaman yang menghasilkan (Ha)	Produksi Ton/Kg
1	Bawang Merah	1	0	0
2	Petsai / Sawi	64,66	65,23	510
3	Bayam	155,09	155,64	1.358,00
4	Cabai Besar/TW/Teropong	69,3	67	1.004,75
5	Cabai Keriting	80,77	85,54	722

No	Jenis Sayuran	Luas Tanam / Luas Pertanaman (Ha)	Luas Panen / Tanaman yang menghasilkan (Ha)	Produksi Ton/Kg
6	Cabai Rawit	147,48	155,56	1.676,01
7	Jamur Tiram *)	0,8	0,4	2
8	Kacang Panjang	83,41	75,88	810,05
9	Kangkung	199,1	197,71	1.749,60
10	Mentimun	80,8	79,17	1.084,40
11	Terung	35,85	34,85	414,2
12	Tomat	6,83	6,6	126
13	Melon	0,7	3,1	51
14	Semangka	112,6	120,41	1.339,50
<b>Jumlah</b>		<b>1.038,39</b>	<b>1.047,09</b>	<b>10.847,51</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2023

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi untuk pengembangan tanaman buah-buahan, diantaranya tanaman buah naga (*Hilocerreus undatus*) buah nenas (*Ananas comusus*) karena tidak dipengaruhi oleh musim. Selain kedua tanaman tersebut tanaman buah-buahan dengan pola pekarangan dikembangkan hampir di setiap kecamatan. Adapun tanaman buah-buahan yang telah dikembangkan di Kabupaten Bengkalis adalah durian, mangga, manggis, rambutan dan pisang. Potensi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-14 Data Potensi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
<b>1</b>	<b>Bengkalis</b>			
	- Padi	26	25	102,75
	- Jagung	10	10	35,78
	- Ubi Jalar	0	0,6	7,55
	- Ubi Kayu	13,7	23	618,06
	Jumlah	49,7	58,6	764,14
<b>2</b>	<b>Bantan</b>			
	- Padi	517	517	2.124,87
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	0,8	0	0
	- Ubi Kayu	23,28	21,3	572,37
	Jumlah	541,08	538,3	2.697,24
<b>3</b>	<b>Siak Kecil</b>			
	- Padi	2.379,00	2.742,00	11.269,62
	- Jagung	33,5	35,5	127,02
	- Ubi Jalar	8	8,5	107,01
	- Ubi Kayu	12,5	11	295,59
	Jumlah	2.433,00	2.797,00	11.799,24
<b>4</b>	<b>Bukit Batu</b>			
	- Padi	150	96,5	396,62

No	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	1,6	1	12,59
	- Ubi Kayu	8,6	5	134,36
	Jumlah	160,2	102,5	543,56
<b>5</b>	<b>Bandar Laksamana</b>			
	- Padi	171	142	583,62
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	0	0	0
	- Ubi Kayu	0,6	0,5	13,44
	Jumlah	171,6	142,5	597,06
<b>6</b>	<b>Rupat</b>			
	- Padi	98	191	785,01
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	0,01	0	0
	- Ubi Kayu	40,36	38,33	1.030,00
	Jumlah	138,37	229,33	1.815,01
<b>7</b>	<b>Rupat Utara</b>			
	- Padi	1	2	8,22
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	0	0	0
	- Ubi Kayu	11,4	11,3	303,65
	Jumlah	12,4	13,3	311,87
<b>8</b>	<b>Mandau</b>			
	- Padi	297,3	258	1.060,38
	- Jagung	0	0	0
	- Ubi Jalar	3,5	2,5	31,47
	- Ubi Kayu	36,3	34,8	935,15
	Jumlah	337,1	295,3	2.027,00
<b>9</b>	<b>Bathin Solapan</b>			
	- Padi	43	32,5	133,58
	- Jagung	2,7	2,6	9,3
	- Ubi Jalar	3,9	4,9	61,69
	- Ubi Kayu	63,9	56,4	1.515,58
	Jumlah	113,5	96,4	1.720,14
<b>10</b>	<b>Pinggir</b>			
	- Padi	187	196	805,56
	- Jagung	17	13,3	47,59
	- Ubi Jalar	0	0	0
	- Ubi Kayu	159	132	3.547,10
	Jumlah	363	341,3	4.400,25
<b>11</b>	<b>Talang Muandau</b>			
	- Padi	50	20	82,2
	- Jagung	10,5	8,5	30,41
	- Ubi Jalar	1,2	2,9	36,51
	- Ubi Kayu	3,8	14,7	395,01
	Jumlah	65,5	46,1	544,14
	<b>TOTAL - PADI</b>	<b>3.919,30</b>	<b>4.222,00</b>	<b>17.352,42</b>
	<b>TOTAL - JAGUNG</b>	<b>73,7</b>	<b>69,9</b>	<b>250,1</b>
	<b>TOTAL - UBI JALAR</b>	<b>19,01</b>	<b>20,4</b>	<b>256,82</b>

No	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
	<b>TOTAL - UBI KAYU</b>	<b>373,44</b>	<b>348,33</b>	<b>9.360,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.385,45</b>	<b>4.660,63</b>	<b>27.219,66</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2023

## B. Peternakan

Pembangunan sub-sektor peternakan yang merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bengkalis memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan pakan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah dan rata-rata pendapatan penduduk di daerah ini. Hal ini berdampak pada perubahan konsumsi masyarakat yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat kearah konsumsi pakan lain seperti daging. Potensi peternakan yang paling menonjol di Kabupaten Bengkalis masih berupa daging dan telur yang dimanfaatkan untuk memenuhi ebutuhan daerah dan sebagian kecil dipasarkan ke luar daerah. Populasi ternak di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 diantaranya sapi 18.009 ekor, kerbau 463 ekor, kambing 39.260 ekor, kambing perah 63 ekor, domba 515 ekor, babi 5.011 ekor, kuda 13 ekor, ayam buras 190.516 ekor, ayam ras pedaging 134.492 ekor, ayam ras petelur 0 ekor, itik 6.677 ekor, itik manila 13.151 ekor, Kelinci 0 ekor, merpati 75 ekor, dan puyuh 750 ekor. Potensi pengembangan ternak ruminansia (kerbau, sapi dan kambing) dan unggas masih sangat besar, baik di daerah pemukiman penduduk maupun di areal perkebunan

**Tabel II-15 Rekapitulasi Ternak Besar di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Kambing Perah	Domba	Babi	Kudah
1	Bantan	811	0	15.163	0	0	0	0
2	Bengkalis	920	9	8.075	0	0	1.075	0
3	Bukit Batu	1.196	15	1.297	0	158	0	0
4	Siak Kecil	3.395	102	3.160	0	0	0	0
5	Bandar Laksamana	2.777	0	4.621	0	0	0	0
6	Bathin Solapan	1.247	185	1.445	63	132	1.690	0
7	Mandau	812	25	279	0	0	809	0
8	Pinggir	980	109	477	0	0	0	0
9	Talang Muandau	1.343	0	836	0	58	0	0
10	Rupat	4.043	18	2.117	0	7	1.037	5
11	Rupat Utara	485	0	1.790	0	160	400	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.009</b>	<b>463</b>	<b>39.260</b>	<b>63</b>	<b>515</b>	<b>5.011</b>	<b>14</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2023

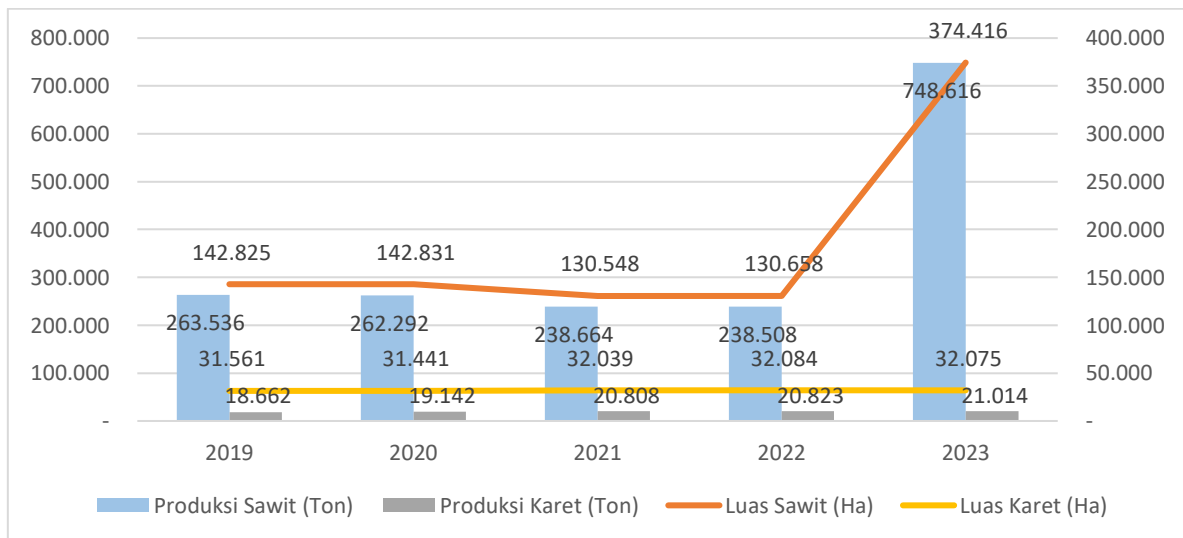
Tabel II-16 Rekapitulasi Ternak Unggas di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila	Merpati	Puyuh
1	Bantan	2.878	0	0	0	0	0
2	Bengkalis	13.700	0	0	1.904	0	0
3	Bukit Batu	4.745	0	3.838	0	0	0
4	Siak Kecil	81.634	0	0	9.013	0	0
5	Bandar Laksamana	14.982	0	0	0	0	0
6	Bathin Solapan	1.271	2.492	522	674	0	0
7	Mandau	2.258	85.000	200	0	0	0
8	Pinggir	32.900	47.000	245	300	75	750
9	Talang Muandau	6.219	0	1.225	1.260	0	0
10	Rupat	27.891	0	369	0	0	0
11	Rupat Utara	2.038	0	278	0	0	0
JUMLAH		190.516	134.492	6.677	13.151	75	750

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis, 2023

3) Perkebunan

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi di sektor perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Sektor perkebunan ini sebagian besar dikuasai oleh perkebunan masyarakat. Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Bengkalis belum dioptimalkan dengan baik. Berikut disajikan potensi perkebunan di Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

### **Gambar II-13 Potensi Kelapa Sawit dan Karet Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

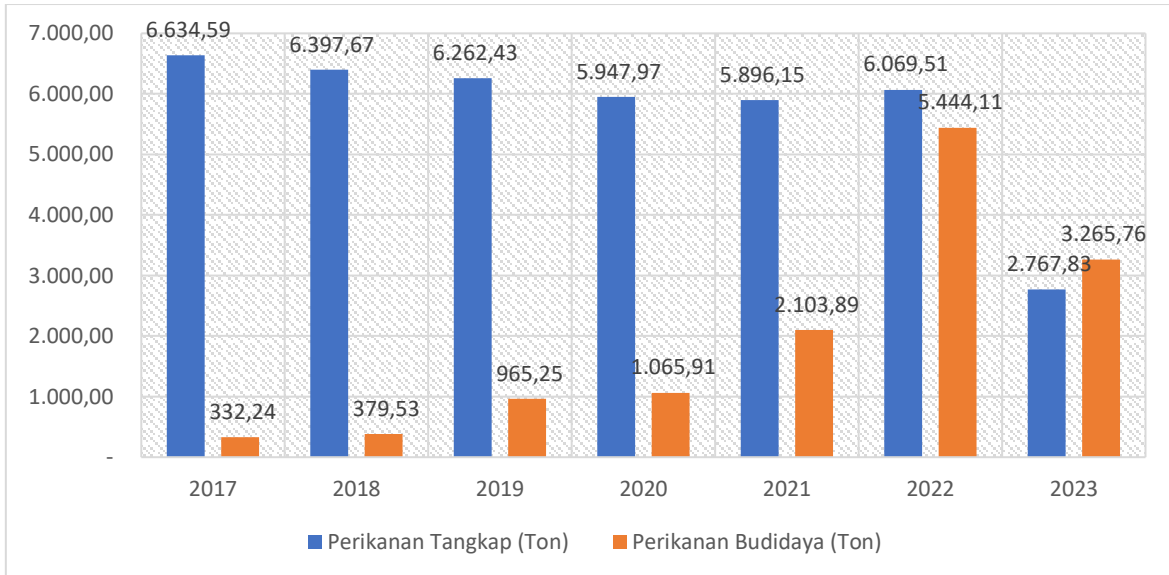
Potensi sub sektor perkebunan terbesar adalah tanaman perkebunan kelapa sawit pada tahun 2019, luas areal kelapa sawit mencapai 142.825 hektar, dengan produksi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 263.536 ton. Pada tahun 2020, meskipun luas lahan sedikit meningkat menjadi 142.830,70 hektar, produksi CPO mengalami penurunan menjadi 262.291,89 ton. Pada tahun 2021, luas lahan kelapa sawit menurun menjadi 130.547,70 hektar, dan produksi CPO turun menjadi 238.664,29 ton. Pada tahun 2022 luas lahan turun menjadi 238.508 ha dengan produksi CPO sebesar 130.658 ton. Pada tahun 2023 luas lahan meningkat signifikan menjadi 374.416 ha dengan produksi 748.616 ton.

Di sisi lain, tanaman karet menunjukkan dinamika yang berbeda. Pada tahun 2019, luas areal tanaman karet sebesar 31.561 hektar, dengan produksi 18.662 ton. Meskipun terjadi penurunan luas lahan pada tahun 2020 menjadi 31.440,70 hektar, produksi meningkat menjadi 19.141,57 ton. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, dengan peningkatan luas lahan menjadi 32.038,70 hektar dan produksi mencapai 20.807,51 ton. Pada tahun 2022 luas lahan sedikit meningkat menjadi 32.084 ha dan produksi menjadi 20.823 ton. Pada tahun 2023 luas lahan sedikit menurun menjadi 32.075 ha, namun produksi sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 21.014 ton.

#### 4) Perikanan

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi perikanan yang besar besar meliputi potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sebagian besar produksi perikanan Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh perikanan tangkap yaitu sebesar 52,72%, namun produksi perikanan budidaya trendnya mengalami peningkatan. Berikut adalah potensi perikanan Kabupaten Bengkalis, yaitu:





Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, 2024

### Gambar II-14 Produksi Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 6.634,59 Ton, turun hingga tahun 2021 menjadi 5.896,15 Ton, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 6.069,51 Ton dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 2767,83 Ton. Rendahnya produksi kelompok perikanan tangkap disebabkan oleh penurunan kualitas sarana dan prasarana tangkap nelayan terutama yang terbuat dari kayu, kendala saat ini sangat sulitnya ketersediaan bahan baku untuk pembuatan dan perbaikan kapal ikan yang telah rusak sehingga kapal-kapal tersebut tidak layak digunakan dan beberapa diantaranya sudah tidak digunakan lagi oleh nelayan. Bantuan terhadap nelayan sudah tidak dapat dilakukan oleh daerah, karna wilayah laut masuk dalam kewenangan provinsi dan pusat.

Kendati demikian, trend produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya sebesar 332,24 Ton, meningkat menjadi 5.444,11 Ton pada tahun 2022, namun turun pada tahun 2023 menjadi 3.265,76 ton. Pada tahun 2017-2022 peningkatan produksi perikanan budidaya lebih banyak didorong oleh budidaya tambak dengan komoditas udang vaname. Pelaku usaha budidaya perikanan tambak udang vaname berlokasi di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara. Namun sampai saat ini, budidaya udang vaname masih terkendala masalah izin usaha.

## 2.1.2 Demografi

### 2.1.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk sebanyak 671.725 jiwa dengan kepadatan 77,85 jiwa per Km<sup>2</sup> pada tahun 2024. Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

**Tabel II-17 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Bengkalis	464,04	93.316	13,89	201,09
2	Bantan	443,29	46.621	6,94	105,17
3	Bukit Batu	598,76	23.322	3,47	38,95
4	Mandau	517,80	170.071	25,32	328,45
5	Rupat	1.145,19	41.304	6,15	36,07
6	Rupat Utara	378,51	17.256	2,57	45,59
7	Siak Kecil	948,11	28.690	4,27	30,26
8	Pinggir	775,03	79.185	11,79	102,17
9	Bandar Laksamana	1.303,79	19.425	2,89	14,90
10	Talang Muandau	1.379,26	33.889	5,05	24,57
11	Bathin Solapan	674,28	118.646	17,66	175,96
Kabupaten Bengkalis		8.628,06	671.725	100,00	77,85

Sumber: Diolah dari BPS dan Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 328 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 170.071 jiwa atau sebesar 25,32% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di

Kecamatan Rupert Utara yaitu sebanyak 17.256 Jiwa atau 2,57% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 343.463 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 328.262 jiwa, sehingga sex ratio Kabupaten Bengkalis sebesar 105, yang artinya perbandingan 105 perempuan dari 100 penduduk laki-laki. Sex rasio tertinggi berada di Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Talang Muandau dimana dari 100 penduduk laki-laki terdapat sebanyak 107 penduduk perempuan. Secara rinci perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menurun kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II-18 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bengkalis	47.563	45.753	93.316	104
2	Bantan	23.830	22.791	46.621	105
3	Bukit Batu	11.871	11.451	23.322	104
4	Mandau	86.589	83.482	170.071	104
5	Rupert	21.209	20.095	41.304	106
6	Rupert Utara	8.803	8.453	17.256	104
7	Siak Kecil	14.652	14.038	28.690	104
8	Pinggir	40.511	38.674	79.185	105
9	Bandar Laksamana	10.029	9.396	19.425	107
10	Talang Muandau	17.470	16.419	33.889	106
x11	Bathin Solapan	60.936	57.710	118.646	106
	Kabupaten Bengkalis	343.463	328.262	671.725	105

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

#### 2.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,59% dan mengalami peningkatan menjadi 3,13% pada tahun 2012. Setelah itu, tingkat pertumbuhan penduduk cenderung menurun hingga tahun 2018. Penurunan yang signifikan pada tahun 2018 disebabkan oleh perbedaan sumber data, di mana data periode 2010-2017 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data periode 2018-2024 menggunakan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,80%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 7,12%. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,88% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,95%..

Berikut disajikan data jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2024, yaitu:

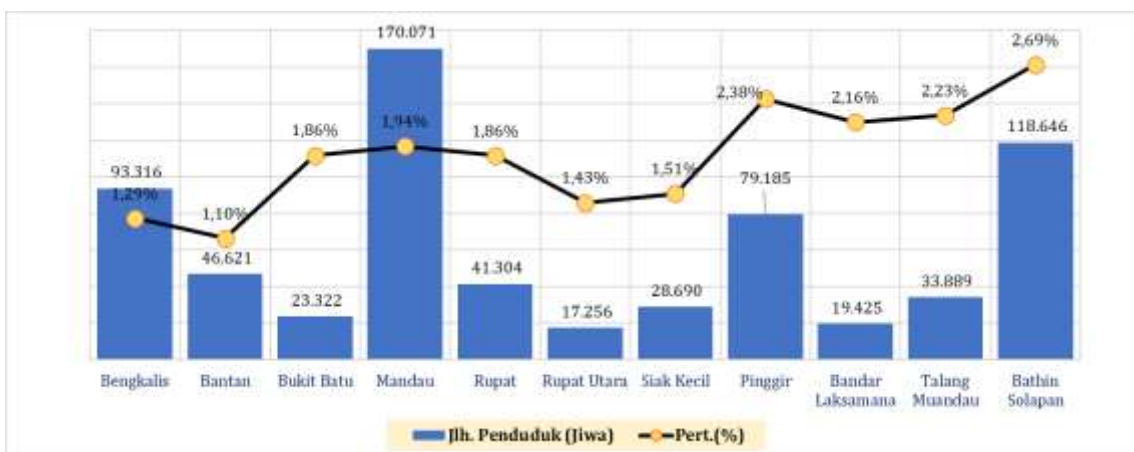


Sumber: BPS 2011-2018 dan Disdukcapil 2019-2024

**Gambar II-15 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2024**

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,12%. Sebagai daerah industri pertambangan, pertumbuhan penduduk Bengkalis disebabkan oleh tingkat kelahiran dan juga migrasi masuk baik antar kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun antar provinsi di Indonesia. Keterbukaan wilayah dan aktivitas ekonomi pertambangan dan perkebunan menjadikan mobilitas orang ke Bengkalis menjadi sangat mudah.

Pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan penambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, 2024

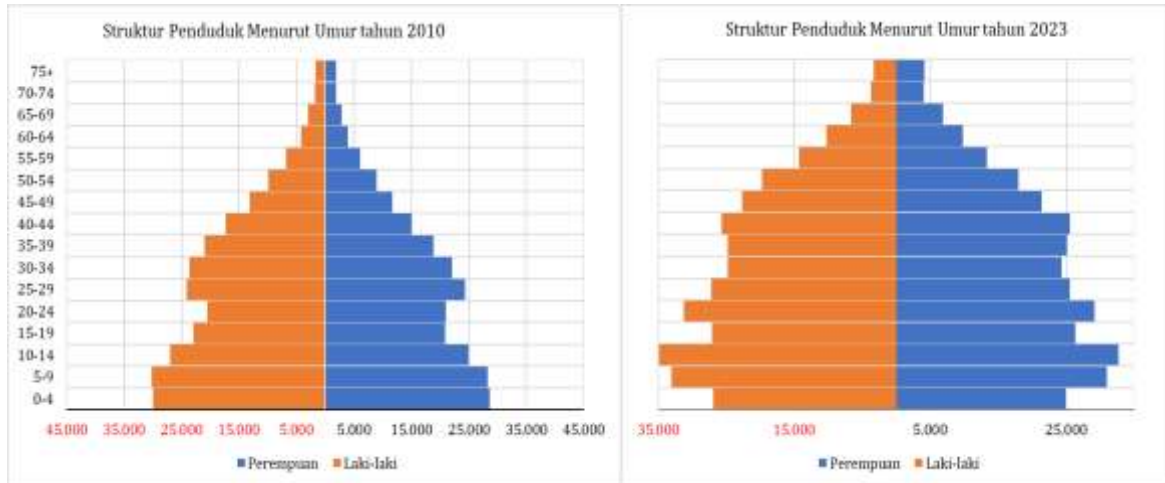
### **Gambar II-16 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024**

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif penambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipasi dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

#### **2.1.2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Selama periode 2010-2023 struktur penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pergeseran. Pada tahun 2010 terlihat bahwa piramida penduduk termasuk ke dalam kategori piramda penduduk expansive, yang memperlihatkan struktur penduduk dengan usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Pada tahun 2010 terlihat bahwa jumlah penduduk remaja lebih sedikit dan penduduk muda masih cukup banyak dalam struktur penduduk. Dependensi rasio penduduk usia muda dan tua terhadap usia produktif pada tahun 2010 sebesar 58%. Kemudian pada tahun 2023 terlihat bahwa komposisi penduduk produktif meningkat dibanding 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa bonus demografi memang nyata-nyata terjadi di Kabupaten Bengkalis. Dependensi rasio penduduk usia muda dan tua terhadap penduduk usia produksi pada tahun 2023 sebesar 48%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 penduduk usia muda dan usia tua.



Sumber : BPS Kab Bengkalis, 2011 dan Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

Gambar II-17 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan 2023

#### 2.1.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis tahun 2023 diperoleh sebanyak 42,85% merupakan buruh, karyawan dan pegawai, dan hanya sebanyak 25,96% penduduk Bengkalis yang berusaha sendiri.

**Tabel II-19 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	37.417	25.932	63.349
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	21.214	6.220	27.434
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.091	1.628	10.719
Buruh/Karyawan/Pegawai	74.982	29.590	104.572
Pekerja bebas	14.656	1.169	15.825
Pekerja keluarga/tak dibayar	9.633	12.505	22.138
<b>Jumlah</b>	<b>166.993</b>	<b>77.044</b>	<b>244.037</b>

Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka, 2024

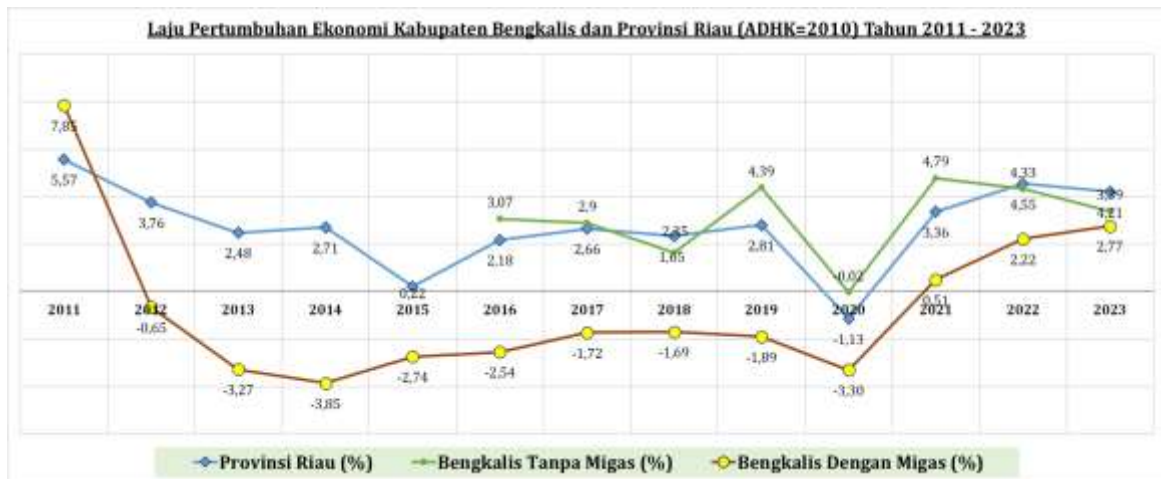
Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja seminggu lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dari total pekerja, sehingga bukan merupakan penduduk yang dapat menciptakan lapangan kerja. Hanya sebanyak 4,39% penduduk Bengkalis yang bekerja dengan mempekerjakan penduduk lain dengan dibayar sebagai tenaga kerja tetap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi penduduk relatif kecil, dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada perusahaan-perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja masih

menggantungkan perekonomian pada lapangan usaha milik orang lain dan bekerja sebagai pegawai/karyawan. Masih sedikit tenaga kerja yang berani membuka lapangan usaha sendiri sebagai pekerjaan utama.

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu yang diukur dari tahun 2011-2023. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstant tahun 2010. Nilai PDRB Kabupaten Bengkalis merupakan keseluruhan nilai dari produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi, namun kembali membaik dari tahun 2021-2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB Harga ADHK 2010 tahun 2011-2023**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012-2020 mengalami kontraksi secara total dengan pertumbuhan negatif. Pasca pandemi Covid-19, sejak tahun 2021-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih ekspansif dan mencapai pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Jika diperhatikan, laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Hal

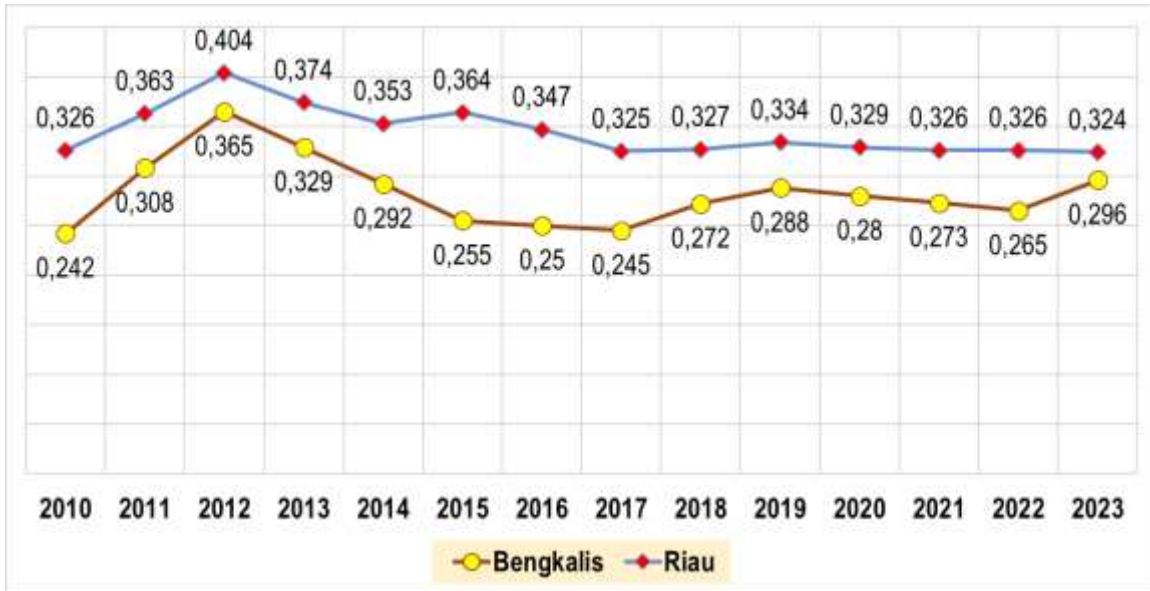
ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi Bengkalis dalam menghasilkan barang dan jasa lebih rendah dari kapasitas perekonomian Riau. Pandemi Covid-19 lebih berdampak bagi perekonomian Kabupaten Bengkalis dari pada bagi perekonomian Riau, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan kapasitas produksi barang dan jasa yang lebih rendah dari Provinsi Riau pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terutama disebabkan oleh kapasitas produksi minyak dan gas yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan perekonomian Kabupaten Bengkalis secara dominan terbentuk dari sektor pertambangan khususnya minyak. Selama tahun 2010-2023, kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan dari 75,98% pada tahun 2010 menjadi 59,13% pada tahun 2023.

Penurunan kapasitas produksi minyak di Kabupaten Bengkalis telah mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis menjadi lebih rendah. Namun, kapasitas produksi sektor-sektor di luar minyak dan gas masih mengalami perkembangan yang baik dan selalu pada tingkat pertumbuhan yang positif selama tahun 2010-2023. Pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas tumbuh positif pada tahun 2016-2019, namun mengalami kontraksi negatif pada tahun 2020 yang disebabkan dampak covid-19 di Kabupaten Bengkalis, selanjutnya tumbuh positif pada tahun 2021-2023. Meskipun kontribusi seluruh sektor perekonomian diluar minyak dan gas kurang dari 50% dalam perekonomian Bengkalis, namun justru memberikan perkembangan yang positif dalam memperkuat struktur perekonomian Bengkalis.

#### 2.2.1.1 Perkembangan Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dalam perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Secara umum ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih merata dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angka gini rasio Kabupaten Bengkalis selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Provinsi Riau selama periode 2010-2023.





Sumber: BPS Riau, 2024

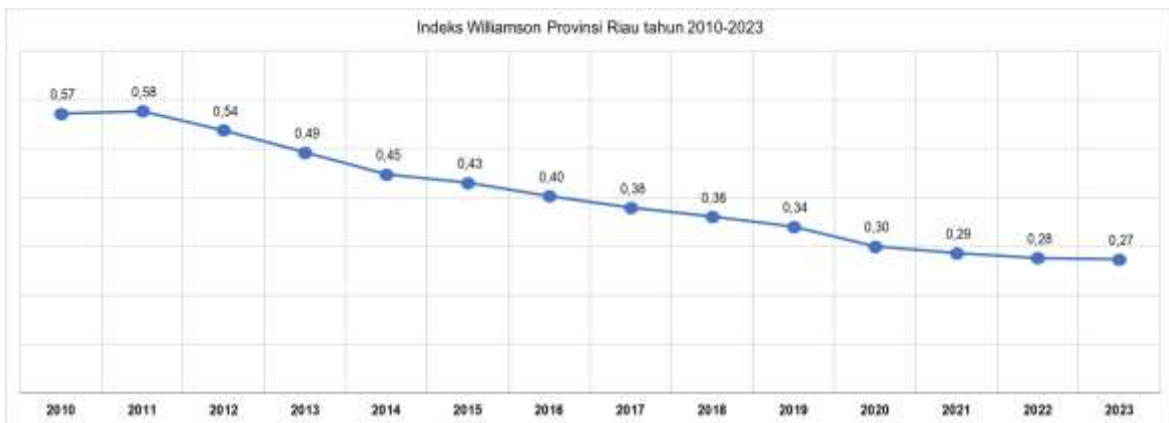
**Gambar II-19 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2023**

Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari nilai gini ratio Kabupaten Bengkalis jauh lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Bengkalis mencapai 0,296, atau termasuk kategori ketimpangan sedang. Sedangkan gini rasio Provinsi Riau termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,324. Gini rasio yang rendah mengindikasikan hasil-hasil pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk. Aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian *transfer of payment* dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (*social security*) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 2.2.1.2 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan

perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Perbedaan nilai PDRB dalam perekonomian dan perbedaan jumlah penduduk mengakibatkan PDRB per kapita penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau juga berbeda. Kapasitas produksi daerah dan jumlah penduduk menjadi variabel penting dalam pendistribusian pendapatan kepada masyarakat yang dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah. Tabel berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Riau selama periode 2010-2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-20 Ketimpangan Williamson Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023**

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ditemukan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau termasuk dalam kategori ketimpangan rendah antar wilayah selama periode 2010-2023. Perbedaan potensi ekonomi dan jumlah penduduk antar kabupaten/kota dapat menjadi pemicu terjadi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Riau. Potensi sumberdaya alam minyak dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis menjadi pemicu terjadinya kesenjangan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan total kapasitas produksi dalam perekonomian yang terlihat dari nilai PDRB yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Nilai produksi minyak yang menyebabkan nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis berada diatas kabupaten lainnya. Proporsi nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bengkalis sebesar 14,13% terhadap total PDRB atas dasar harga konstant Provinsi Riau pada tahun 2023, nomor dua terbesar setelah Kota Pekanbaru. Kontribusi terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sedangkan proporsi jumlah penduduk sebesar 8,80% pada tahun 2023, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru.

### 2.2.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting dalam pembangunan, karena menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau bayar baik untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk pemenuhan input produksi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan demikian, nilai tukar petani yang semakin tinggi menggambarkan daya beli petani produk konsumsi dan input produksi pertanian semakin baik. Nilai tukar petani yang semakin tinggi mengindikasikan kesejahteraan petani yang lebih sejahtera secara relatif. Nilai tukar pada tingkat 100 mengindikasikan bahwa nilai produksi yang dihasilkan baru mencukupi untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan membeli kebutuhan produksi yang diperlukan petani dalam berusahatani. Perkembangan nilai tukar petani Kabupaten Bengkalis diukur dari nilai tukar petani Provinsi Riau, hal ini disebabkan ketersediaan data nilai tukar petani kabupaten yang tidak lengkap. Secara umum, nilai tukar petani di Provinsi Riau menunjukkan trend yang meningkat, mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

Nilai tukar petani di Riau mengalami penurunan pada tahun 2014-2016 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 dan 2019. Nilai tukar petani yang lebih kecil dari 100 menandakan bahwa penerimaan petani lebih rendah dari kebutuhan petani untuk pemenuhan produksi dan konsumsi. Hal ini mengindikasikan pada periode tersebut, kesejahteraan petani mengalami penurunan. Kondisi ini dipicu oleh kondisi perekonomian dunia yang terjadi pada tahun 2018-2019. Gangguan stabilitas ekonomi dunia akibat krisis ekonomi dunia pada pertengahan 2018-2019 juga berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia, salah satunya adalah pada ekspor komoditi. Karakteristik ekonomi Riau dan juga Bengkalis yang dominan pada sektor pertambangan dan industri kelapa sawit (baik pada pertanian dan industri pengolahan) mengalami gangguan pada masa krisis ekonomi dunia. Nilai tukar petani akan terdampak dengan krisis ekonomi dunia, dimana harga minyak dunia mengalami penurunan sejak April 2018 sampai dengan September 2019, bahkan mencapai harga terendah pada November dan Desember 2018. Penurunan harga CPO dunia akan mengakibatkan terjadinya penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang diproduksi dari perkebunan kelapa sawit petani. Kondisi ini telah memicu penurunan pendapatan petani, karena mayoritas petani Riau dan Bengkalis adalah petani kelapa sawit. Pada sisi lain, kebutuhan konsumsi dan input-input pertanian tidak mengalami penurunan, atau dikatakan dalam keadaan tetap.



Sumber: BPS (2022)

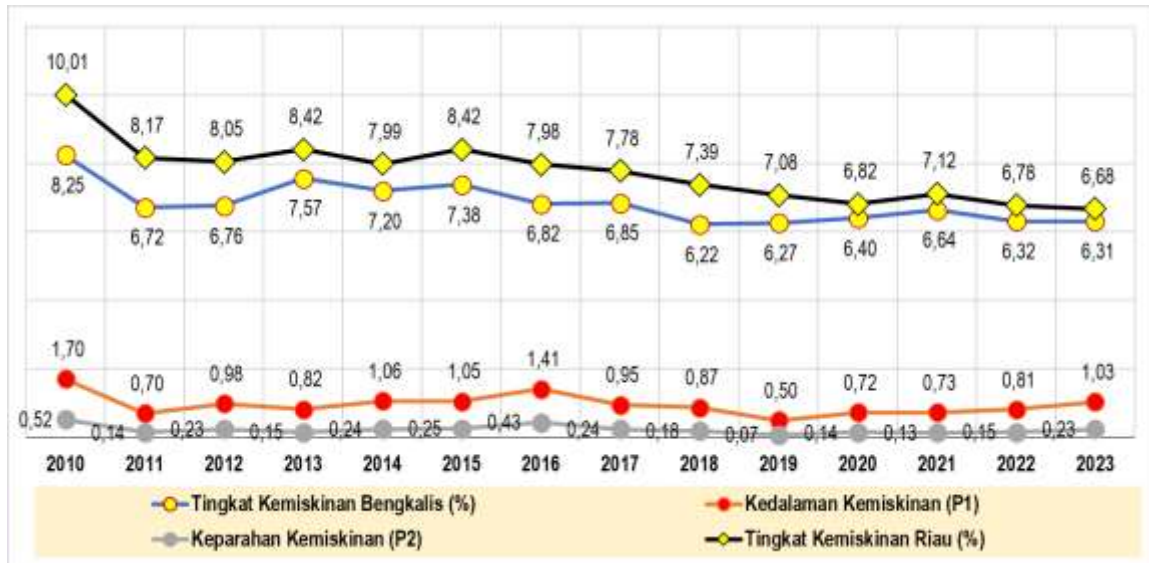
**Gambar II-21 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2009-2023 (per bulan)**

Nilai tukar petani kembali mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun 2020-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani mengalami perbaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan nilai tukar petani di Riau menggambarkan bahwa daya saing ekonomi daerah sangat rentan dengan kondisi pasar dunia, khususnya kelapa sawit dan minyak bumi. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kerentanan harga komoditi dunia terhadap harga komoditi yang dihasilkan petani perlu menjadi perhatian untuk mengurangi pengaruh kondisi ekonomi global terhadap petani di daerah. Pengembangan industri pengolahan yang terintegrasi antara petani dan industri besar di daerah dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jaminan stabilitas harga komoditi sampai pada tingkat petani dan kontrol terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan petani menjadi hal penting dalam pembangunan daerah.

#### 2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis 8,25% lebih rendah dari tingkat kemiskinan di Provinsi Riau 10,01%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan pada

tahun 2023 menjadi 6,31% dan Provinsi Riau menjadi 6,68%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinsn di Provinsi Riau selama periode 2010-2023.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-22 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2023**

Penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, yang terlihat dari garis kemiskinan meningkat dari Rp. 325.485/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 713.826/kapita/bulan pada tahun 2023. Kepala rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga 4 (empat) orang yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 2,6 juta/bulan termasuk kategori miskin di Kabupaten Bengkalis. Garis kemiskinan merupakan sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Inflasi yang merupakan kenaikan harga-harga kebutuhan rumah tangga mengakibatkan jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan juga meningkat, sehingga beban hidup penduduk semakin tinggi. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro lainnya menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak memberikan informasi ‘seberapa miskin’ orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

**Tabel II-20 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Kondisi Kemiskinan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kabupaten Bengkalis</b>														
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	41,30	34,96	35,25	40,11	38,82	40,00	37,49	38,19	35,11	35,83	36,96	37,66	36,03	36,10
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,25	6,72	6,76	7,57	7,20	7,38	6,82	6,85	6,22	6,27	6,40	6,64	6,32	6,31
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	325.485	349.770	367.743	388.671	405.945	420.733	455.021	496.657	508.633	533.123	581.416	604.925	648.933	713.826
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,70	0,70	0,98	0,82	1,06	1,05	1,41	0,95	0,87	0,50	0,72	0,73	0,81	1,03
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,52	0,14	0,23	0,15	0,24	0,25	0,43	0,24	0,18	0,07	0,14	0,13	0,15	0,23
<b>Provinsi Riau</b>														
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	558,00	472,45	476,46	511,47	498,28	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72	483,39	500,81	485,03	485,66
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,01	8,17	8,05	8,42	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	301.190	296.379	310.603	350.129	379.223	399.211	426.001	456.493	479.944	500.612	544.057	565.937	605.912	658.611
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,76	1,36	1,13	1,18	1,20	1,38	1,36	1,32	1,20	1,13	1,14	1,06	1,10	1,00
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,49	0,39	0,25	0,24	0,29	0,36	0,34	0,36	0,30	0,27	0,28	0,24	0,27	0,24

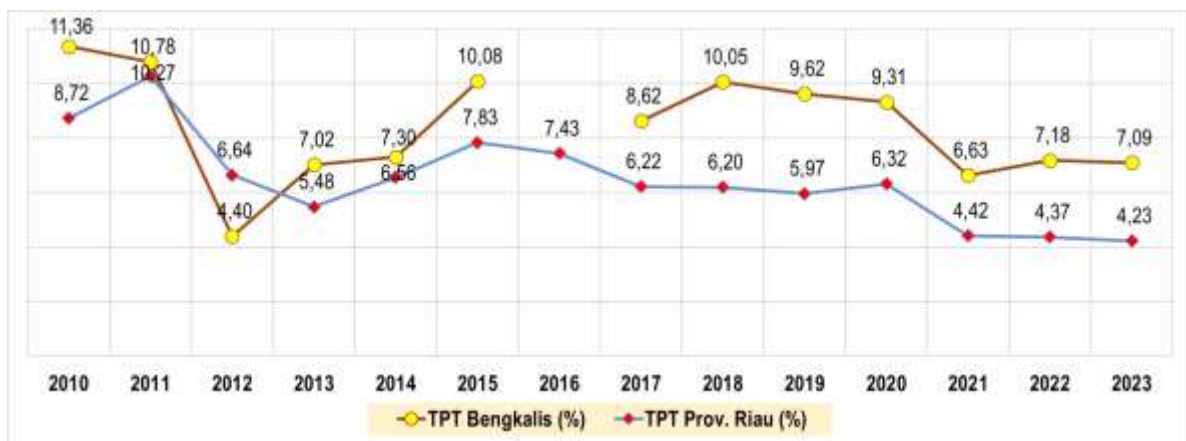
Sumber: BPS Riau, 2024

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Indeks kedalaman kemiskinan atau disebut juga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. *Poverty gap* di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh indeks kedalaman kemiskinan bergerak dari 1,70 pada tahun 2010 menjadi 0,81 pada tahun 2022, kembali meningkat menjadi 1,03 pada tahun 2023. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkalis semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2022 semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin mendekati pada garis kemiskinan, sehingga dengan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengeluarkan penduduk miskin tersebut dari kemiskinan. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat di atas angka satu.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2023, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahhan Kemiskinan bergerak dari 0,52 pada tahun 2010 menjadi 0,15 pada tahun 2022, namun meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,23. Secara ekonomi hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata atau semakin tidak senjang.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis. Indikator tingkat pengangguran menjadi ukuran terhadap kemampuan perekonomian menyerap angkatan kerja kerja. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau selama periode 2013-2023.

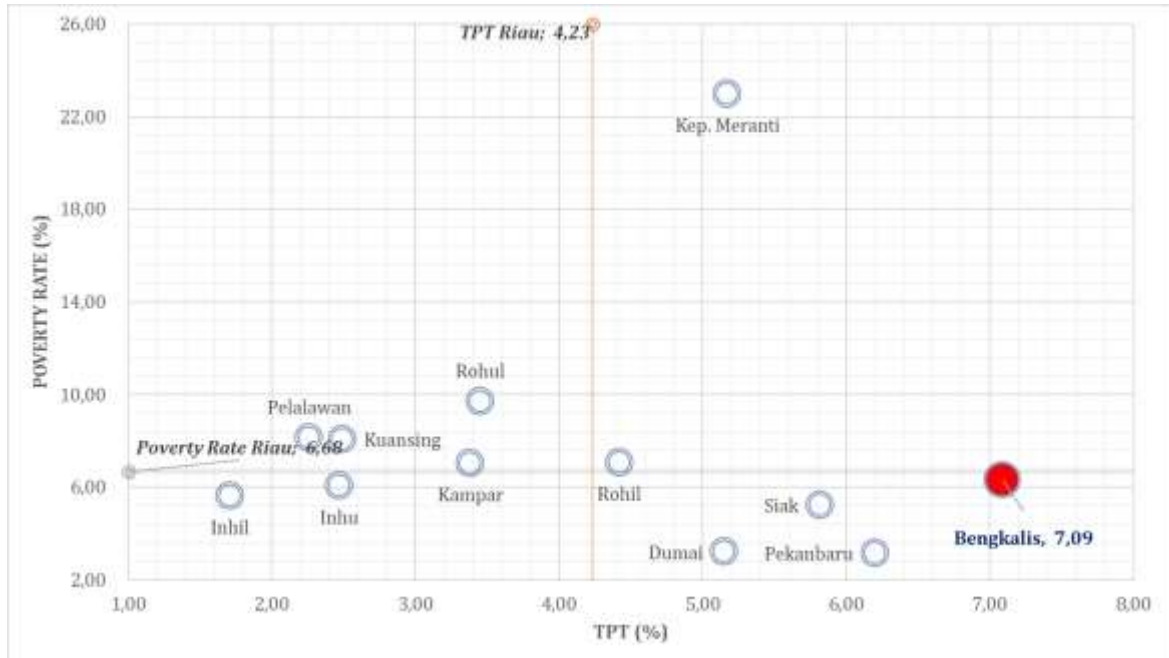


Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-23 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023 (%)**

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 sebesar 11,36%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2012 menjadi 4,40%, meningkat kembali hingga tahun 2015 menjadi 10,08%, turun kembali pada tahun 2017 menjadi 6,22% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 10,05%. Selanjutnya perkembangan TPT hingga tahun 2021 turun menjadi 6,63%, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,18% dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 7,09%.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 telah dapat ditekan hingga 6,63% pada tahun 2021, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 yang diduga disebabkan oleh penambahan angkatan kerja. Salah satu penyebab penambahan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis adalah kembalinya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bengkalis kembali menurun.



Sumber: BPS, Riau, 2024

**Gambar II-24 Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2023**

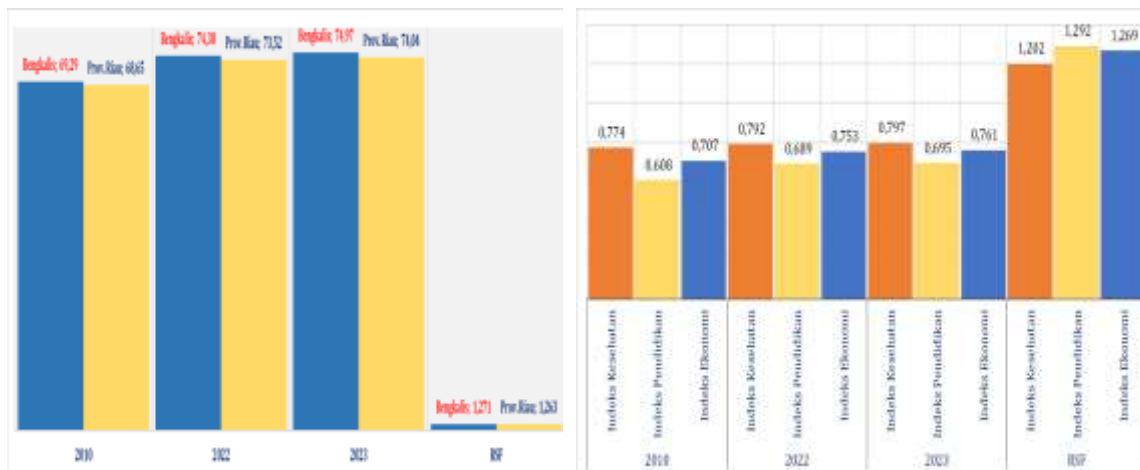
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis menempati posisi paling tinggi di Provinsi Riau pada tahun 2023. Pengangguran yang tinggi di Kabupaten Bengkalis dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perekonomian menyerap tenaga kerja, atau supply tenaga kerja yang terlalu beras dibandingkan dengan pasar tenaga kerja.

#### 2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh



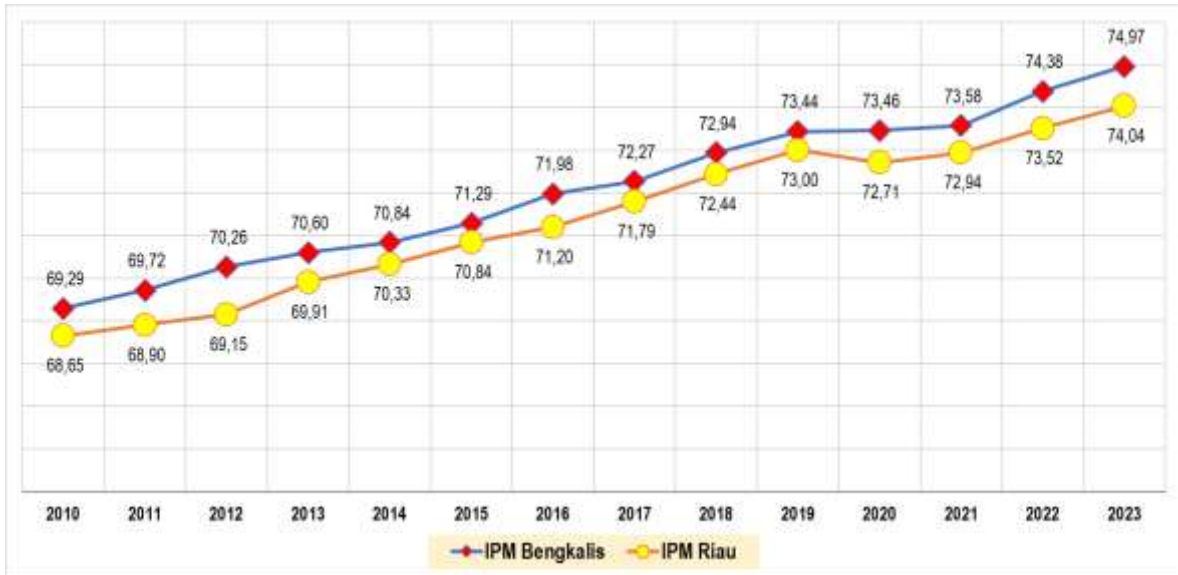
dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkalis mengalami kenaikan selama periode 2010-2023 lebih dari IPM Riau dan menempati nomor 4 tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumia dan Kab. Siak. Reduksi *short fall* IPM Bengkalis 1,271 per tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Reduksi *short fall* IPM Riau sebesar 1,263 pada tahun 2010-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis untuk mencapai IPM ideal lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Keningkan IPM Kabupaten Bengkalis didorong oleh kenaikan semua komposit pembentuk IPM dengan *short fall* tertinggi adalah indeks pendidikan yaitu sebesar 1,292 poin dari tahun 2010 ke tahun 2023, kemudian indeks ekonomi mengalami kenaikan 1,269 poin, sedangkan indeks kesehatan naik lebih rendah, yaitu 1,202 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan kesehatan memiliki kontribusi yang lebih rendah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan hasil pembangunan ekonomi dan pendidikan.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Bengkalis sebesar 69,29 dan mengalami peningkatan menjadi 74,97 pada tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu sebesar 5,68 selama periode 2010-2023. Perkembangan IPM Kabupaten Bengkalis yang cukup baik ini memperlihatkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2023 mengalami perkembangan yang cukup baik.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-26 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Pencapaian pembangunan manusia dalam IPM merupakan ukuran yang memperhatikan tiga aspek esensial atau aspek kapabilitas dasar manusia, yaitu memiliki umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi atau standar hidup layak adalah dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2010-2023 indeks kesehatan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis masih menunjukkan adanya ketimpangan dibandingkan dengan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita penduduk tertinggi di Riau (PDRB per kapita). Pendapatan per kapita penduduk yang tinggi disebabkan oleh nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Riau. PDRB Bengkalis menempati posisi tertinggi di Riau, sedangkan jumlah penduduk berada pada posisi keempat tertinggi di Riau. Dengan demikian, PDRB per kapita penduduk menjadi yang tertinggi. Capaian pembangunan manusia Kabupaten Bengkalis dengan IPM berada lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau dan menempati posisi ke-empat tertinggi di Riau, setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Sedangkan pendapatan per kapita

penduduk adalah yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai PDRB yang tinggi belum sepenuhnya dapat terdistribusi secara merata dalam bentuk kekayaan dan aset bagi seluruh penduduk untuk dimanfaatkan dalam pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis relatif mengalami ketimpangan dibandingkan dengan Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Siak.

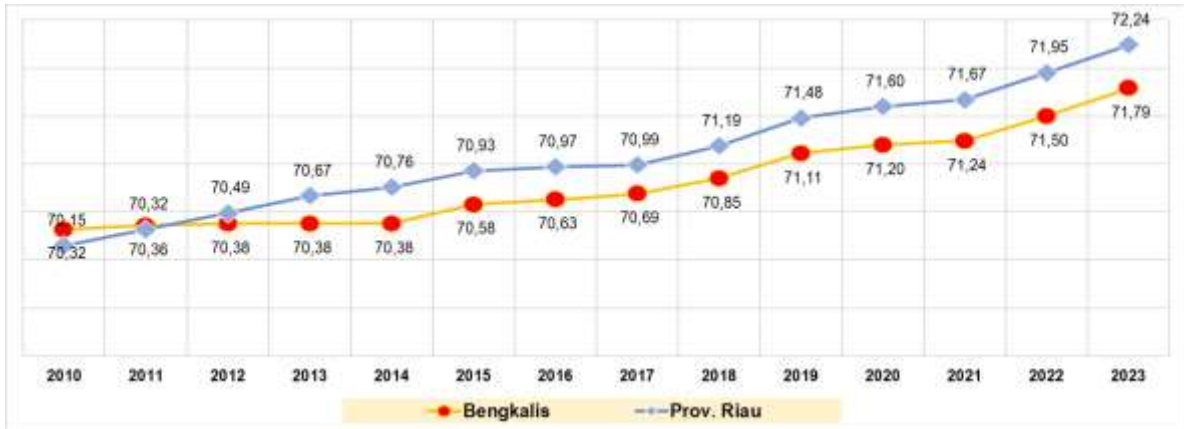


Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-27 Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis dengan Pendapatan per Kapita Penduduk Tahun 2023**

**a) Usai Harapan Hidup (UHH)**

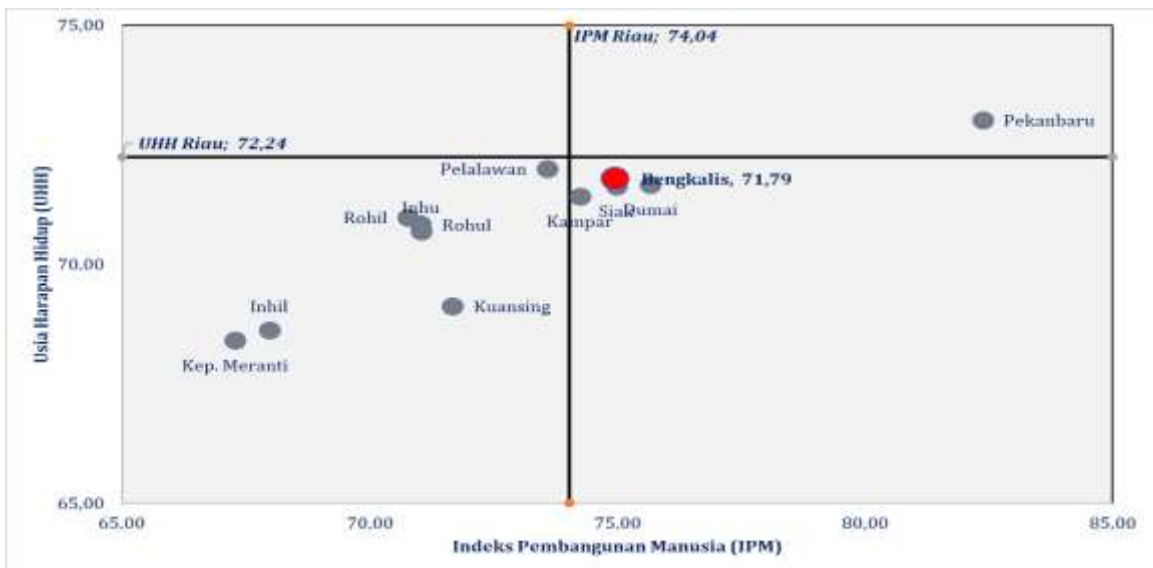
Usia harapan hidup (UHH) dalam IPM menggambarkan kualitas pembangunan kesehatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. penduduk merupakan jumlah rata-rata usia penduduk yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa mendatang. Angka harapan hidup penduduk menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-28 Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 1,47 tahun selama periode 2010-2023, yaitu dari usia harapan hidup 70,32 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,79 tahun pada tahun 2023. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau (72,24 tahun) pada tahun 2023, sedangkan IPM Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan IPM Riau. Capaian usia harapan hidup ini menghasilkan indeks kesehatan di Kabupaten Bengkalis meningkat dari 0,774 pada tahun 2010 menjadi 0,797 pada tahun 2023 dengan reduksi shortfall sebesar 1,202 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Bengkalis meningkat untuk mencapai kualitas pembangunan ideal menurut ukuran IPM dalam pembangunan manusia.



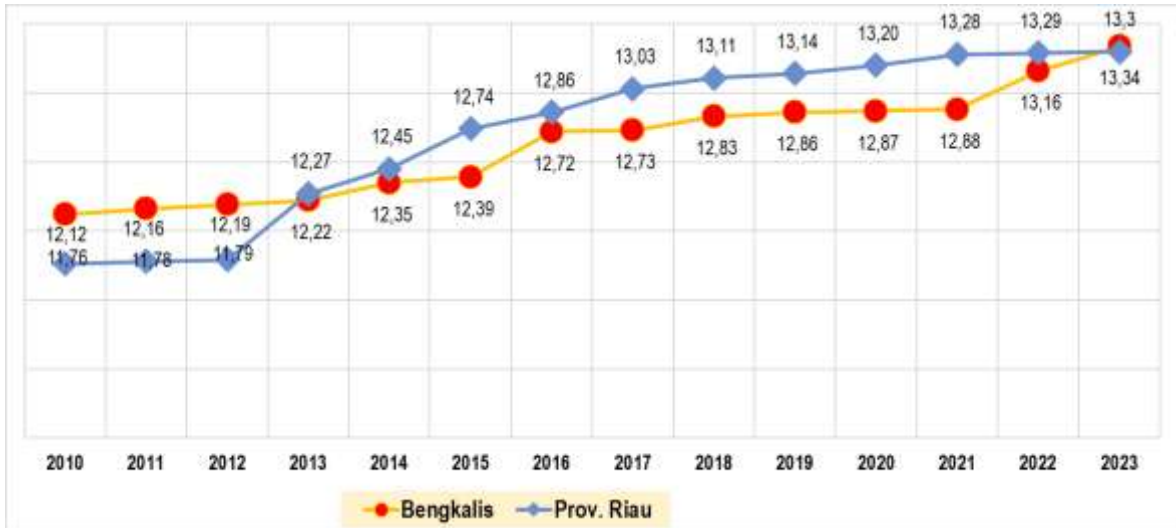
Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-29 Posisi Capaian Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2023**

Secara umum pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis pada aspek kesehatan mengalami perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Bengkalis semakin membaik, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Pembangunan kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kematian bayi, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan usia harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari capaian pembangunan kesehatan dalam pembangunan manusia di Provinsi Riau selama periode 2010- 2023.

#### **b) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah adalah lama sekolah formal (diukur dalam tahun) yang diharapkan penduduk akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (ditetapkan pada usia 7 tahun) pada masa yang akan datang. Harapan lama sekolah disebut angka harapan sekolah yang diperkirakan dapat ditempuh oleh anak dari kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang dibangun. Harapan lama sekolah akan berkaitan dengan pembangunan sistem pendidikan yang dilakukan oleh daerah untuk menjamin anak-anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan secara maksimal. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau. Meskipun demikian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis berada pada posisi keempat pada tahun 2023 setelah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: BPS Riau (2024)

**Gambar II-30 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Pada tahun 2010, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,12 tahun dan meningkat menjadi 13,3 tahun pada tahun 2023. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2010 adalah 11,76 tahun dan meningkat menjadi 13,34 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau. Percepatan menuju angka harapan sekolah ideal (18 tahun) cukup baik dengan *reduction shortfall* 1,292 selama periode 2010-2023. Harapan sekolah penduduk Bengkalis mengalami peningkatan yang cukup tinggi antara tahun 2022 ke tahun 2023. Harapan sekolah penduduk Bengkalis pada tahun 2010 adalah 12,22 tahun atau sampai tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruan tinggi semester satu, menjadi 13,3 tahun pada tahun 2023 atau memasuki jenjang perguruan tinggi, tepatnya pada semester tiga atau dapat menamatkan pendidikan Diploma I.



Sumber: BPS Riau, 2024

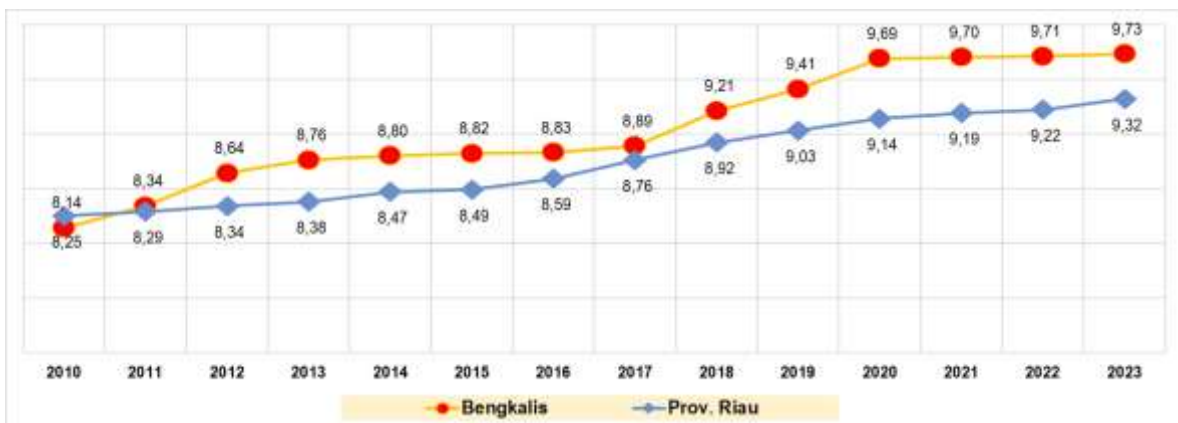
**Gambar II-31 Posisi Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2023**

Harapan lama sekolah penduduk Bengkalis berada pada posisi keempat dinatara kabupaten/kota di Riau dan sedikit lebih rendah dari harapan lama sekolah penduduk Provinsi Riau. Memperhatikan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau pada bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan harapan sekolah penduduk sebagai komposit pembentukan IPM masih berada dibawah capaian IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah penduduk masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas pembangunan pendidikan untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia seutuhnya di Kabupaten Bengkalis. Pembangunan pendidikan masih perlu terus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Untuk mencapai harapan lama sekolah sampai pada tingkat ideal 18 tahun masih diperlukan peningkatan secara gradual hingga 4,66 tahun lagi. Kebijakan pembangunan pendidikan terutama pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi bagi penduduk Bengkalis dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dan memperluas cakupan Pendidikan Tinggi bagi penduduk Bengkalis menjadi pilihan kebijakan pembangunan pendidikan.

**c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menjadi ukuran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama

sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk berusia diatas 25 tahun dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Rata-rata lama sekolah ideal dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Sejak tahun 2010, dengan metoda perhitungan baru, trend capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis terus meningkat hingga mencapai 9,73 tahun pada tahun 2023 atau mencapai kelas X. Peningkatan rata-rata sekolah yang cukup baik ini merupakan modal penting dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bengkalis. Jika dibandingkan dengan pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Riau, maka capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis lebih baik, yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi selama periode 2010-2023.



Sumber: BPS, Riau, 2024

**Gambar II-32 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023**

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis pada 3 (tiga) tahun terakhir 2020-2023 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah penduduk Bengkalis pada tahun 2023 adalah 9,73 tahun, lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dan menempati urutan keempat tertinggi di Riau setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Masih diperlukan percepatan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga mencapai rata-rata lama sekolah ideal (15 tahun). Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 adalah 8,25 tahun atau rata-rata kelas dua SMP dan meningkat menjadi 9,73 tahun pada tahun 2023 atau rata-rata berada pada tingkat kelas satu SMA. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.



Kabupaten Bengkalis berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga 1,59 tahun selama periode 2010-2023. Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas pendidikan ideal dalam konteks pembangunan kualitas sumberdaya manusia daerah. Kebijakan pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 5,27 tahun lagi untuk mencapai rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas hingga 15 tahun atau setingkat pendidikan Diploma III.

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis lebih baik dari Riau dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah mencapai rata-rata lama sekolah dan IPM yang lebih tinggi dari Riau. Meskipun masih jauh dari capaian Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak, namun rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis sudah lebih baik dari 7 (tujuh) kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Mendorong kebijakan pembangunan pendidikan yang memberikan akses yang lebih luas bagi penduduk masih diperlukan untuk pencapaian rata-rata lama sekolah ideal dalam perhitungan IPM. Perluasan akses pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi diperlukan bagi penduduk merupakan salah satu pilihan untuk pembangunan pendidikan dimasa yang akan datang.



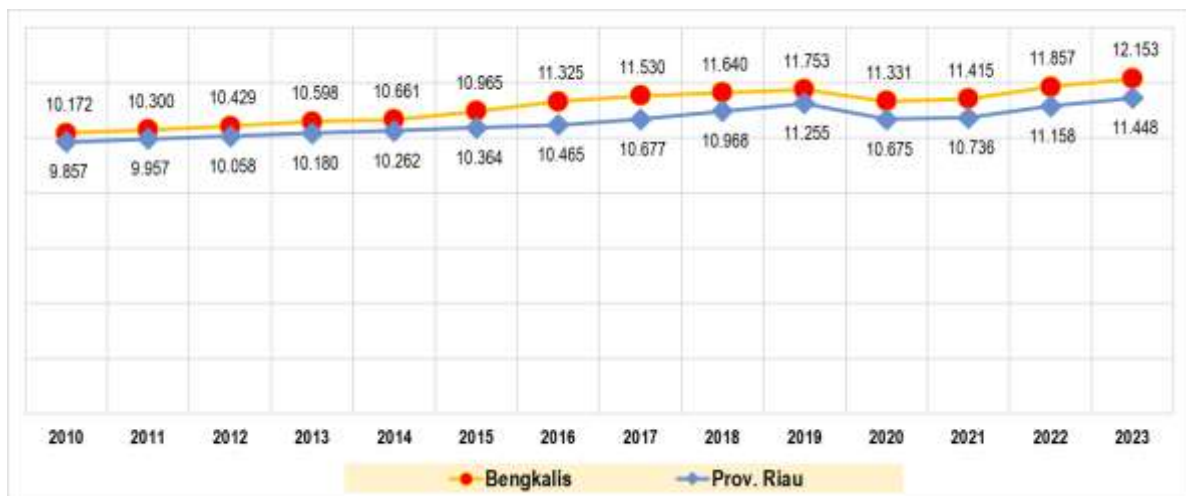
Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-33 Posisi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2023**

**d) Pengeluaran Riil per Kapita**

Salah satu komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan penduduk adalah standar hidup layak yang dinilai dari kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pengeluaran riil penduduk dalam perhitungan IPM merupakan ukuran tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran riil per kapita penduduk dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Selama periode 2010-2023, pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan yang positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Riau. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.981 ribu dari Rp. 10.172 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp. 12.153 ribu pada tahun 2023. Namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 14.419 ribu untuk mencapai pengeluaran riil per kapita penduduk ideal dalam perhitungan IPM yaitu Rp. 26.572 ribu. Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-34 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2023**

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis berada pada peringkat kelima tertinggi di Riau dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per

kapita penduduk Riau selama periode 2010-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau. Meskipun PDRB Kabupaten Bengkalis tertinggi kedua di Riau setelah Kota Pekanbaru, namun pengeluaran penduduk riil per kapita masih lebih rendah dari pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Perhitungan reduksi shortfall indeks ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2010-2023 diperoleh bahwa Kabupaten Bengkalis berada pada posisi ketiga (1,269 poin) setelah Kota Dumai (1,311 poin) dan Kabupaten Pelalawan (1,275 poin). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki percepatan dalam meningkatkan pengeluaran riil per kapitan penduduk sebesar 1,269 poin untuk mencapai kondisi ideal dalam perhitungan IPM.

Memperhatikan komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa indeks ekonomi merupakan komponen kedua setelah indeks kesehatan dalam pembentukan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup layak bagi seluruh penduduk di Kabupaten Bengkalis telah terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Meskipun demikian, masih diperlukan kebijakan pembangunan bidang ekonomi untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang ideal sesuai dengan harapan dalam pembangunan manusia sesuai dengan perhitungan IPM.

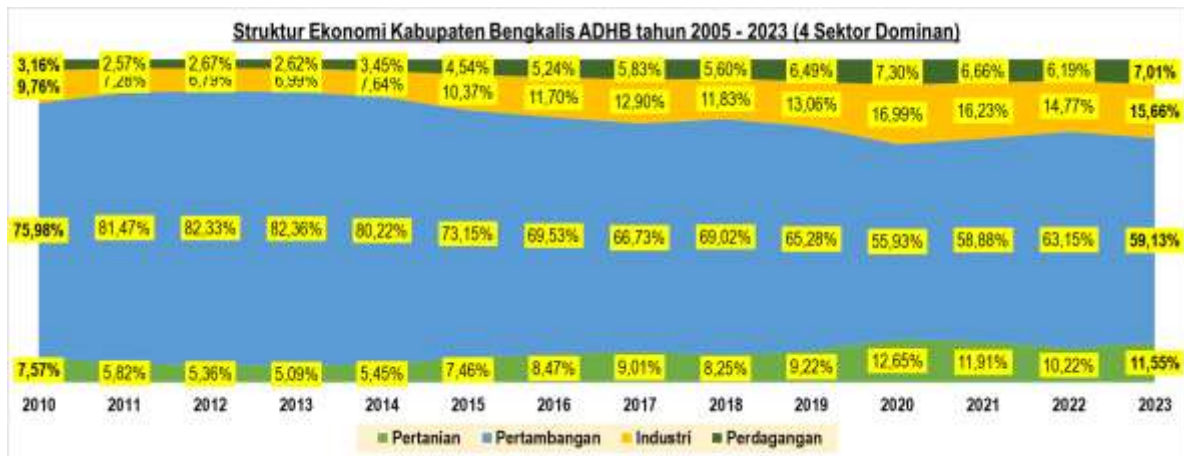


Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-35 Posisi Capaian Pengeluaran Riil per Kapita (Rp 000/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2023**

2.2.1.7 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah menggambarkan peran penting sektor-sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis secara agregat tidak mengalami perubahan atau transformasi selama periode 2010-2023, dan tetap didominasi oleh sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor pertambangan masih sangat dominan dalam struktur perekonomian Bengkalis, dengan kontribusi sebesar 75,98% pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku dan menurun menjadi sebesar 59,13% pada tahun 2023. Pergerakan perekonomian agregat Kabupaten Bengkalis sesungguhnya tidak mengalami perubahan struktur perekonomian, namun sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa sedikit mengalami peningkatan meskipun masih belum mampu mengimbangi kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian.



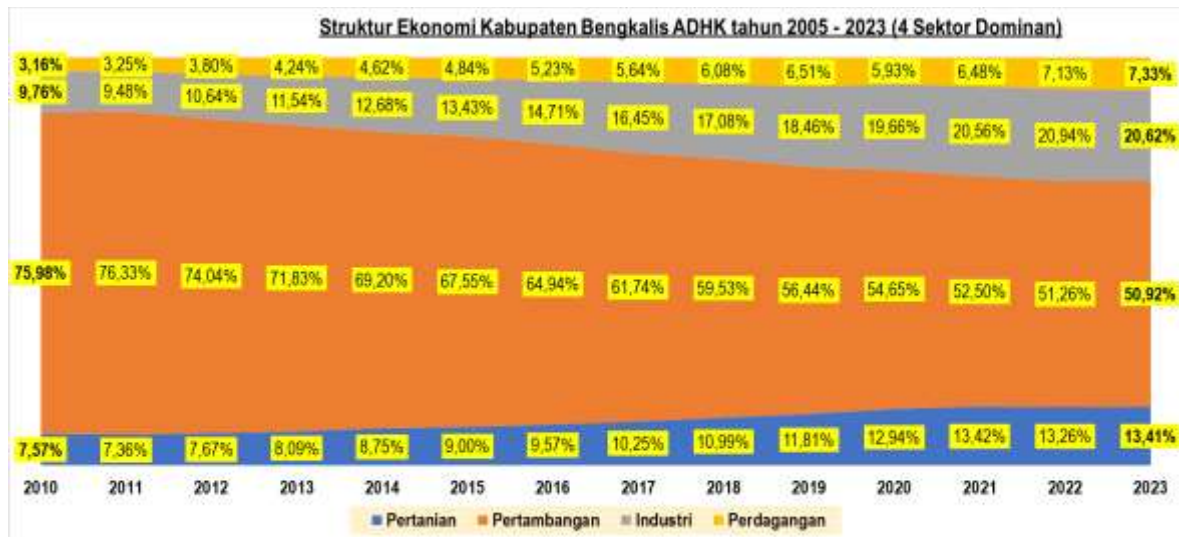
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-36 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2023**

Perekonomian Bengkalis secara riil didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan dan pertanian yang ditunjukkan oleh nilai PDRB harga konstan tahun 2010. Kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2010 sebesar 75,98% terhadap total PDRB ADHK dan menurun menjadi 50,92% pada tahun 2023. Penurunan kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian Bengkalis disebabkan oleh penurunan kontribusi minyak dan gas dalam perekonomian. Nilai PDRB sektor pertambangan mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh penurunan produksi. Perkembangan sektor industri mengalami kenaikan dengan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian yang meningkat dari 9,76% pada tahun 2010,

menjadi 20,62% pada tahun 2023. Sektor pertanian juga sedikit mengalami perkembangan dengan peningkatan kontribusi dari 7,57% pada tahun 2010 menjadi 13,41% pada tahun 2023. Kenaikan kontribusi sektor industri dan pertanian dalam perekonomian Bengkalis menunjukkan bahwa peran kedua sektor ini mengalami peningkatan dalam produksi relatif terhadap total produksi semua sektor dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2023.

Uraian tentang struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2023, maka pembangunan perekonomian harus diupayakan pada transformasi struktur ekonomi dari berorientasi minyak dan gas menjadi berorientasi sektor non migas untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, khususnya minyak. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

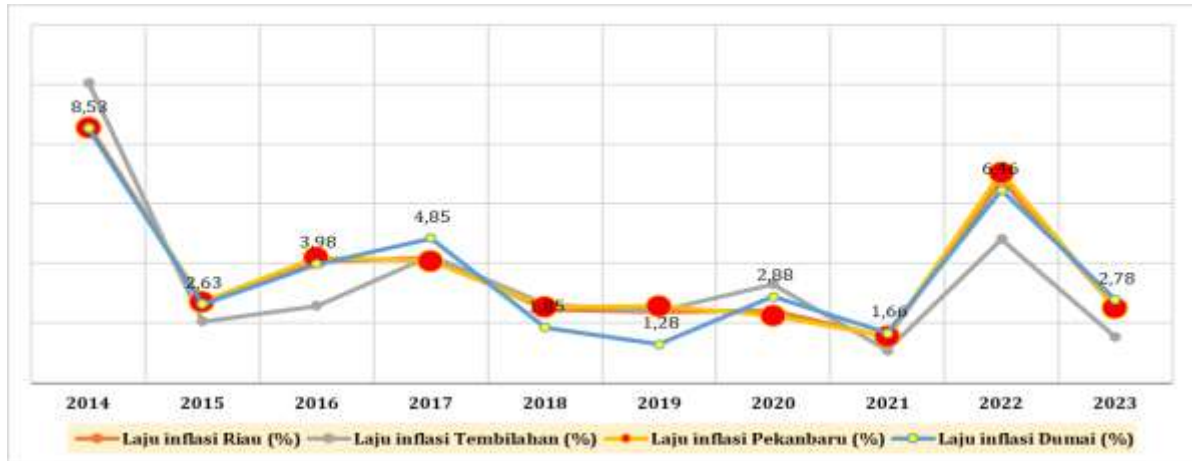
**Gambar II-37 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2023**

Jika dicermati lebih dalam, struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi lapangan usaha didominasi oleh pertambangan, yang kemudian mendorong aktivitas ekonomi pada insurtri pengolahan dan perdagangan luar negeri. Keterkaitan aktivitas-aktivitas tersebut dalam sektor pertambangan mendorong pembentukan modal atau investasi dalam sektor pertambangan dan industri pengolahan. Perkembangan sektor

industri pengolahan juga ditopang oleh perkembangan sektor pertanian yang kemudian mendorong perkembangan sektor pertambangan. Sektor perekonomian yang berbasis masyarakat, seperti industri kecil, pariwisata dan industri kreatif belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian. Kemudian, pada sisi pengeluaran penopang perekonomian Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk memperhatikan struktur ekonomi yang kuat. Maka diperlukan kebijakan untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat agar masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang dalam perekonomian yang terdistribusi sampai pada sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Bengkalis di masa mendatang. Jaminan pekerjaan dan kesempatan berusaha perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak kehilangan pendapatan.

#### 2.2.1.8 Laju Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat. Secara umum, tingkat inflasi di Riau, yang juga terjadi di Kabupaten Bengkalis masih pada tingkat inflasi rendah (dibawah 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum masih dibawah 10%. Inflasi rendah biasanya masih mudah dikendalikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-38 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2014-2023**

Data inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Stabilitas harga-harga di Provinsi Riau cenderung baik selama periode 2014-2023 dan masih pada tingkat yang rendah.

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

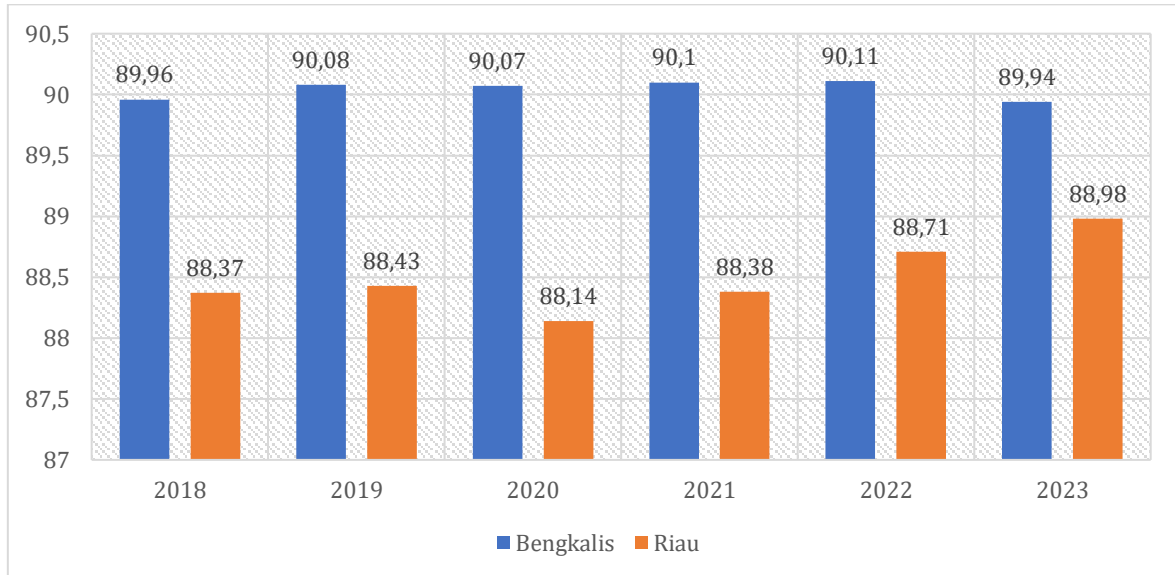
Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial budaya dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indeks kemajuan budaya dan sosial.

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi). Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

**Gambar II-39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023**

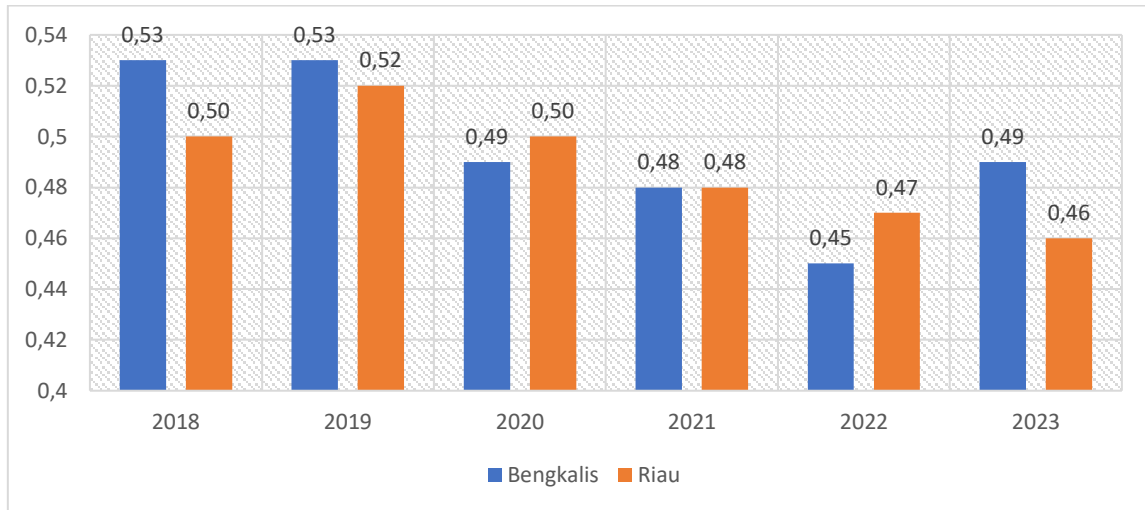
Perkembangan IPG Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 89,96, meningkat hingga tahun 2019 menjadi 90,08, namun turun pada tahun 2020 menjadi 90,07, selanjutnya meningkat hingga tahun 2022 menjadi 90,11 dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 89,94. Capaian IPG Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari capaian IPG Provinsi Riau yaitu sebesar 88,98 pada tahun 2023.

Analisis gender memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Keseimbangan dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan belum disertai dengan kesimbangan dalam aspek lain, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Kesadaran akan hal ini memunculkan pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan apabila kesetaraan dalam berbagai aspek tersebut ditingkatkan, atau ketimpangan dalam berbagai aspek tersebut diminimalkan, yaitu dengan memanfaatkan potensi dan peran laki-laki dan perempuan yang selama ini belum teroptimalkan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga)



dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut disajikan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

**Gambar II-40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023**

Perkembangan IKG Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi menurun dari 0,53 pada tahun 2018 menjadi 0,45 pada tahun 2022, namun meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,49. Capaian IKG Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari capaian IKG Provinsi Riau yaitu sebesar 0,46 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja di Kota Pekanbaru

#### 2.2.2.2 Kepemudaan dan Olahraga

Sementara itu, kondisi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui indikator jumlah sarana olahraga per kecamatan, jumlah pemuda berprestasi atau pelopor jumlah prestasi olahraga, persentase wirausaha muda, persentase organisasi pemuda yang aktif dan jumlah atlet berprestasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel II-21 Indikator Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020- 2023**

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sarana Olahraga Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	Jumah	67	67	67	72
Jumlah Pemuda Berprestasi atau Pelopor	Angka	3	4	2	3
Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	12	14	26	24
Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,17	0,17	0,04	0,04

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	0,86	0,86	0,86	0,86
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	39	75	122	96

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2023

Jumlah sarana olahraga per kecamatan di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2023 sebanyak 72. Adapun jumlah pemuda berprestasi pada tahun 2022 sebanyak 2 orang, meningkat pada tahun 2023 menjadi 3 orang. Sedangkan jumlah prestasi olahraga hingga tahun 2023 cukup memuaskan hingga mencapai 24 cabang.

Untuk persentase wirausaha muda pada tahun 2023 sebesar 0,04 hal ini tergolong cukup baik dimana usahawan merupakan pondasi ekonomi daerah, artinya semakin banyak anak muda yang tertaring berwirausaha maka akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu persentase organisasi pemuda yang aktif hingga tahun 2023 mencapai 0,86%.

**Tabel II-22 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2018-2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10	4	0	3	8	3
2	Jumlah seluruh cabang olahraga terdaftar	42	46	0	50	56	56
3	Cakupan pembinaan olahraga	190	58	0	41	190	42

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2024

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis sudah sangat baik. Sebanyak 56 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bengkalis sudah mendapatkan pembinaan seluruhnya pada setiap tahun, Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

### 2.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui beberapa indikator penting selama periode 2018-2023. Salah satu indikator utama adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD relatif stabil pada angka 8,89% sepanjang periode tersebut, dengan sedikit peningkatan menjadi 8,99% pada tahun 2022 dan 2023. Indikator ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik, meskipun masih perlu peningkatan untuk mencapai paritas gender yang lebih baik.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga menjadi salah satu indikator penting. Pada tahun 2020, partisipasi perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi tercatat sebesar 52,17%, meningkat menjadi 54,56% pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 50,10% pada tahun 2022 dan sedikit membaik pada tahun 2023 menjadi 50,41%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi perempuan di posisi-posisi strategis dan teknis, meskipun terdapat kemajuan pada awalnya.

**Tabel II-23 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	8,89	8,89	8,89	8,89	8,99	8,99
2	Rasio KDRT	0,01	0,04	0,002	0,001	0,45	0,000068
3	Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi			52,17	54,56	50,1	50,41
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	0	0

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	115,4	93,01	90,28	90,22	88,61	88,09
10	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	97,95	59,15	54,78	55,75	59,07	56,16
11	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	84,19	100,86	115,03	55,88	55,65	56,71

Sumber: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menunjukkan perbaikan signifikan. Rasio KDRT pada tahun 2023 tercatat sangat rendah, yaitu sebesar 0,000068, turun drastis dari 0,45 pada tahun 2022. Penurunan ini menandakan keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, yang didukung oleh cakupan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mencapai 100% pada setiap tahun dari 2018 hingga 2023. Cakupan ini mencakup penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu, layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan rumah sakit, serta layanan bantuan hukum dan reintegrasi sosial yang telah mencapai 100% hingga tahun 2023.

Selain itu, penilaian terhadap kesetaraan gender melalui rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan hasil yang beragam. Di tingkat SD, rasio APM perempuan/laki-laki mengalami penurunan dari 115,4 pada tahun 2018 menjadi 88,09 pada tahun 2023. Di tingkat SMP, rasio ini juga menurun drastis dari 97,95 pada tahun 2018 menjadi 56,16 pada tahun 2023. Hal serupa terjadi di tingkat SMA, di mana rasio APM perempuan/laki-laki turun dari 84,19 pada tahun 2018 menjadi 56,71 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar dalam partisipasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki, yang perlu segera diatasi melalui kebijakan dan program yang lebih inklusif dan responsif gender.

#### 2.2.2.4 Kebudayaan

Perkembangan budaya di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari perkembangan indikator budaya diantaranya penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2018 dan 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya sebanyak 6 kegiatan saja. Terakhir pada tahun 2020 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya berlangsung satu kegiatan saja, dikarenakan situasi pandemi yang menuntut berbagai perencanaan yang telah dilakukan di tahun 2020 tidak berjalan seperti biasanya. Pada tahun 2021 kembali diadakan 3 kegiatan festival seni dan budaya. Peningkatan kegiatan pada tahun 2021 ini seiring dengan pelanggaran kegiatan dan

adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 kembali diadakan sebanyak 5 kegiatan festival seni dan budaya, dan kembali berkurang pada tahun 2023 menjadi 4 kegiatan.

Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2018 tercatat 14 situs dan tahun 2019 meningkat menjadi 15 situs cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2020 pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis berjumlah 24 situs dan jumlah ini tetap sama pada tahun 2022, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan meningkat hingga menjadi 37 pada tahun 2023. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lebih baik, semakin baiknya pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta semakin optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang- barang bersejarah. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-24 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten bengkalis Tahun 2018-2023**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	1	3	5	4
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	15	24	24	24	37
Total Benda, situs & dimiliki daerah	12	14	26	26	42	77
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	116%	107%	100%	100%	48,05%	48,05%
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	15	41	41	46	52
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	5	5	0	0	5	6

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2024

Jika dilihat secara persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada, capaian pada tahun 2021, sebesar 100%, cenderung lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2018 sebesar 116%. Namun demikian, hal ini bukan berarti adanya penurunan kinerja pelestarian oleh pemerintah daerah, justru sebaliknya semua benda, situs dan kawasan cagar budaya sudah dilestarikan dengan baik. Penurunan capaian ini disebabkan pada tahun 2020 pemerintah daerah semakin gencar menginventarisir dan mendata kekayaan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bengkalis,

sehingga kepemilikan benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Bengkulu meningkat menjadi 26 situs, dari sebelumnya hanya 14 situs budaya pada tahun 2020. Upaya pemerintah daerah dalam mendata kekayaan budaya milik daerah ini sangat perlu diapresiasi karena sangat berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan. Sementara itu, untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2017 berjumlah 12 dan hingga pada tahun 2023 meningkat menjadi 52.

#### 2.2.2.5 Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial, persentase PPKS yang tertangani dan persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

**Tabel II-25 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2023 (%)**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminansosial	82%	75%	Na	Na	Na
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	78%	80,6%	61,0%	81,8%	86,8%
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	99%	79%	Na	Na	79%
5	Persentase PPKS Skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	77%	80%	Na	Na	80%
6	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	Na	Na	Na	Na	184 KK
7	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial (Orang)	Na	Na	264	596	317

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu, 2024

Selanjutnya jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2023 mencapai 184 KK. Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2021 tercatat 264 orang, meningkat menjadi 596 orang dan kembali turun pada

tahun 2023 menjadi 317 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan dan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi permasalahan sosial baru. Selain itu Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 sudah mencapai 100%.

Adapun persentase PPKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2018 sebesar 78%, menjadi 86,6% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan penanganan terhadap penyandang masalah sosial. Namun persentase PPKS yang tertangani dalam enam tahun terakhir yang mengalami penurunan dari 99% pada tahun 2018, menjadi 79% pada tahun 2023. Sementara itu, indikator persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2018 sebesar 77%, menjadi 80% pada tahun 2023. Berikut adalah persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023, yaitu:

**Tabel II-26 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
1	Bengkalis	32.347	38.289	84,48%
2	Bukit Batu	8.831	10.121	87,25%
3	Bantan	22.219	23.795	93,38%
4	Mandau	26.424	33.761	78,27%
5	Rupat	21.604	22.882	94,41%
6	Rupat Utara	8.043	8.300	96,90%
7	Siak Kecil	9.469	10.072	94,01%
8	Pinggir	12.817	15.585	82,24%
9	Bandar Laksamana	4.940	5.587	88,42%
10	Talang Muandau	6.306	6.883	91,62%
11	Bathin Solapan	17.710	21.385	82,82%
	Kabupaten Bengkalis	170.710	196.660	86,80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data PPKS penerima bantuan Sosial merupakan data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Data yang seharusnya menerima bantuan

bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana berdasarkan data ini, pada tahun 2023 terdapat 196.660 orang yang terdaftar di DTKS, dan sudah sebanyak 170.710 penduduk Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari dana APBD dan APBN.

Jumlah PPKS terbanyak berdasarkan DTKS berada di Kecamatan Bengkalis sebanyak 32.347 orang dan pada Kecamatan Mandau dengan jumlah sebanyak 26.424 orang. Sedangkan jumlah PPKS paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah 4.940 orang.

**Tabel II-27 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemerintahan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jumlah PPKS yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1	Bengkalis	21.756	25.116	87%
2	Bukit Batu	7.101	7.372	96%
3	Bantan	15.248	15.953	95%
4	Mandau	14.511	29.018	50%
5	Rupat	15.500	16.963	91%
6	Rupat Utara	5.708	5.986	95%
7	Siak Kecil	6.408	6.659	96%
8	Pinggir	8.684	11.859	73%
9	Bandar Laksamana	3.656	3.803	96%
10	Talang Muandau	4.344	4.499	96%
11	BathinSolapan	10.076	12.932	78%
	Kabupaten Bengkalis	112.992	140.160	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data PPKS penerima bantuan merupakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat dan Otonom. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 140.160 penduduk yang berhak menerima bantuan berdasarkan data DTKS, dan sudah sebanyak 80% diantaranya diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bengkalis melalui KPM dan BPNT secara keseluruhan sudah menunjukkan capaian yang cukup baik



dan merata. Hanya saja, diperlukan perhatian lebih dalam pemberian bantuan sosial di Kecamatan Mandau, yang capaiannya baru 50% dari total PPKS yang seharusnya menerima bantuan. Pada Kecamatan Mandau masih terdapat setidaknya 14.511 penduduk yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan sosial berdasarkan data DTKS. Dinas Sosial harus lebih memperhatikan hal ini, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan baru karena tidak meratanya bantuan yang diberikan pada PPKS di Kecamatan Mandau ini.

**Tabel II-28 Persentase PPKS yang tertangani Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah PPKS yang Tertangani	Jumlah PPKS yang Ada	Persentase PPKS yang Tertangani
1	Bengkalis	775	848	91%
2	Bukit Batu	177	210	84%
3	Bantan	405	474	85%
4	Mandau	318	639	50%
5	Rupat	354	393	90%
6	Rupat Utara	115	128	90%
7	Siak Kecil	259	269	96%
8	Pinggir	198	333	59%
9	Bandar Laksamana	94	110	85%
10	Talang Muandau	66	86	77%
11	BathinSolapan	343	439	78%
Kabupaten Bengkalis		3.104	3.926	79%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2024

Data PPKS yang tertangani merupakan data PPKS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dimana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3.104 PPKS yang tertangani dan menerima layanan rehabilitasi sosial. Capaian ini sebesar 79% dari total 3.926 PPKS yang ada. Secara umum penanganan PPKS sudah cukup baik dan merata antar kecamatan, kecuali pada Kecamatan Mandau baru 50% PPKS yang tertangani dan pada Kecamatan Pinggir baru 59% PPKS yang tertangani. Pada dua kecamatan ini masih diperlukan perhatian lebih baik dalam penanganan PPKS di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu indikator sosial yang digunakan adalah persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk

mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

**Tabel II-29 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kabupaten/Provinsi	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal	Angkatan Kerja Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
1	Bengkalis	28	866	3,23%
2	Riau	166	8890	1,87%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, 2023 (Diolah)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2023 menunjukkan jumlah pekerja penyandang disabilitas sektor formal Kabupaten Bengkalis sebanyak 28 orang penyandang disabilitas dan Provinsi Riau sebanyak 166 penyandang disabilitas. Adapun persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 3,23% lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau yang hanya mencapai 1,87%.

## 2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas wilayah dan infrastruktur dan daya saing iklim investasi.

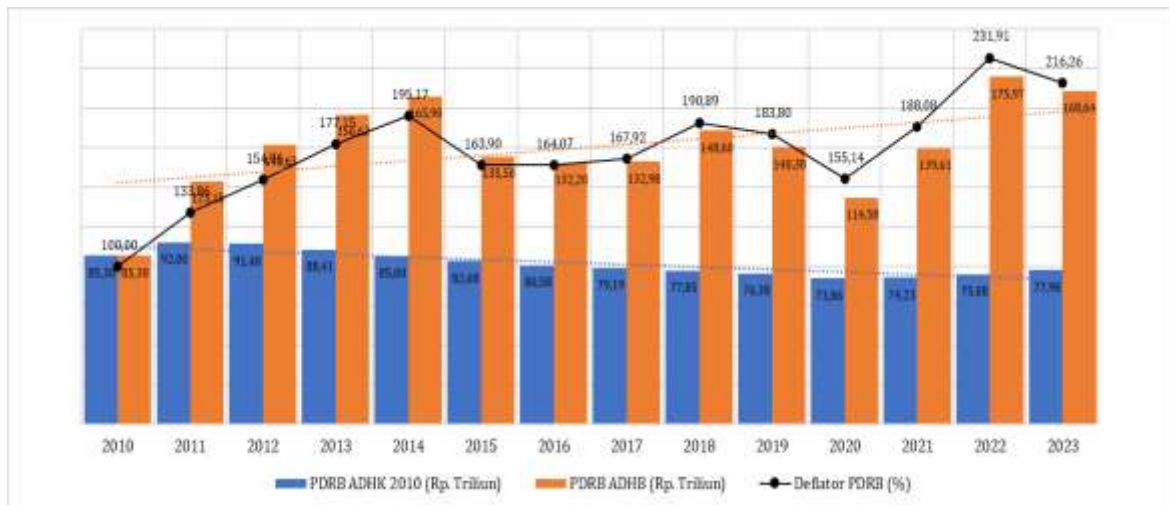
### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.1.1 PDRB

Memperhatikan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2023 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2010 mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun dari Rp. 85,30 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 77,98 triliun pada tahun 2023. Penurunan PDRB harga konstan mengindikasikan terjadinya penurunan produksi pada sektor perekonomian secara agregat. Sedangkan kenaikan pada PDRB harga berlaku selain disebabkan oleh kenaikan harga produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

Kenaikan harga ini terlihat dari deflator PDRB yang cenderung meningkat selama periode 2010-2023.

Nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian Bengkalis pada tahun 2010-2023 terlihat bahwa pada tahun 2020 adalah nilai produksi terendah dari harga konstan dan harga berlaku nilai produksi terendah pada tahun 2010 dan 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan perekonomian daerah Bengkalis secara agregat. PDRB harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2020 yang sama-sama mengalami menurun yang disebabkan oleh penurunan harga dan produksi minyak. Kemudian, pada tahun 2021-2023 kondisi PDRB Kabupaten Bengkalis kembali mengalami ekspansif yang ditunjukkan oleh produksi dan harga minyak yang membaik. Selain perbaikan pada harga minyak dunia, juga disebabkan oleh terjadinya perbaikan pada perekonomian secara keseluruhan.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-41 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2023 (Dalam Triliun)**

Secara umum perekonomian Kabupaten Bengkalis pada harga konstan mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2010-2020, kembali meningkat pada tahun 2021-2023. Penurunan PDRB harga konstan mengindikasikan terjadinya penurunan kapasitas produksi barang dan jasa dalam sektor-sektor perekonomian secara agregat. Kabupaten Bengkalis memberikan kontribusi sebesar 21,95% terhadap PDRB Provinsi Riau ADHK pada tahun 2010 dan menurun menjadi sebesar 14,33% pada tahun 2023. Penurunan kontribusi PDRB Kabupaten Bengkalis terhadap perekonomian Riau mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi pada daerah lain yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan perekonomian Bengkalis, terutama pada sektor-sektor di luar minyak dan gas. Pada tahun 2021-2023, perekonomian Kabupaten

Bengkalis kembali mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sedangkan perekonomian dengan harga berlaku menunjukkan trend meningkat, meskipun terjadi kontraksi yang cukup rendah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun kembali mengalami ekspansi pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali turun pada tahun 2023.

### 2.3.1.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.



Ket: Tahun 2018-2023 menggunakan data jumlah penduduk dari Disdukcapil Kab. Bengkalis

Sumber: BPS Riau, 2024

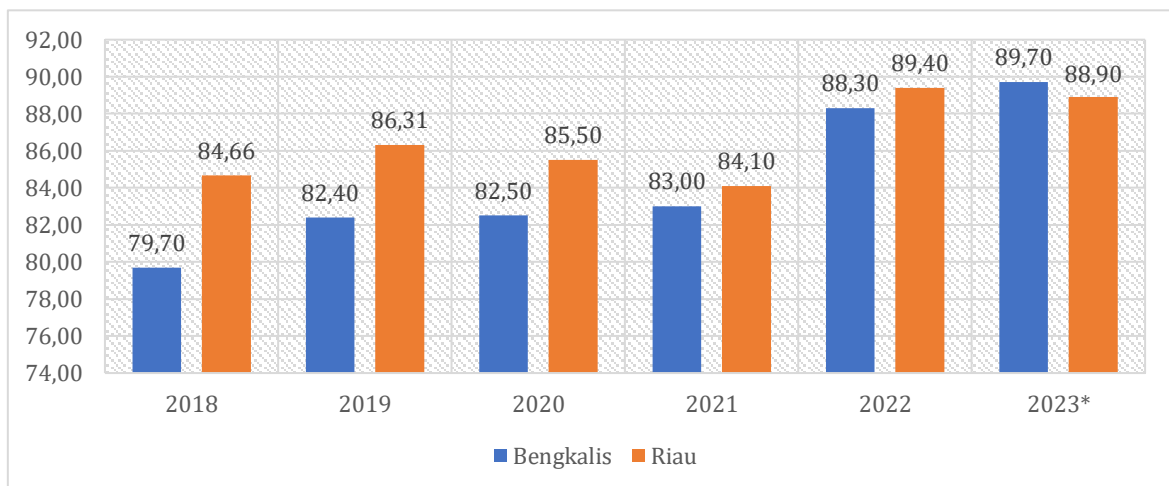
**Gambar II-42 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023 (Juta Rupiah)**

Perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2023 mengalami penurunan secara riil. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan PDRB riil atau harga konstan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, kemudian sedikit mengalami pemulihan pada tahun 2023, namun belum mencapai kapasitas produksi pada tahun 2010-2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat juga mengalami penurunan termasuk aktivitas konsumsi. Penurunan produksi riil mengakibatkan terjadi penurunan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk, yang ditunjukkan oleh penurunan PDRB per kapita penduduk pada harga konstan selama periode 2010-2023. PDRB per kapita penduduk Bengkalis pada harga konstan pada tahun 2010 sebesar Rp.

170,38 juta/kapita/tahun menjadi Rp. 118,35 juta/kapita/tahun pada tahun 2023. Selain faktor kapasitas produksi dalam perekonomian, PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus mengalami pertumbuhan selama periode 2010-2023. Dengan demikian, penurunan PDRB per kapita penduduk disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi dalam perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk. Pada sisi lain terlihat bahwa PDRB per kapita harga berlaku mengalami fluktuasi selama periode 2010-2023. Hal ini disebabkan oleh faktor inflasi atau fluktuasi harga-harga secara umum pada seluruh sektor perekonomian dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, perhatian pada stabilitas harga-harga dalam perekonomian Bengkalis menjadi penting dimasa mendatang untuk mengelola tekanan harga yang dapat merugikan perekonomian dan menurunkan daya beli masyarakat.

### 2.3.1.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk Kabupaten Bengkalis, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Berikut disajikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023, yaitu:



Ket: \*Angka Sementara

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024

**Gambar II-43 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2018-2023**

Perkembangan skor PPH Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 79,70, menjadi 89,70 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian skor PPH Kabupaten Bengkalis berada diatas skor PPH Provinsi Riau yaitu sebesar 88,90.

Selain itu, Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Ketersediaan pangan utama menjadi penting untuk menjamin kebutuhan asupan energi dan protein bagi semua penduduk, karena pemenuhan pangan bagi penduduk merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak azasi manusia. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam urusan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 176,35 kg/kapita, mengalami fluktuasi penurunan hingga tahun 2022 menjadi 116,89 kg/kapita.

**Tabel II-30 Indikator Urusan Pangan Kabupaten bengkalis Tahun 2018-2023**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks ketahanan Pangan	n/a	n/a	65,95	61,15	61,15	61,68
Persentase desa bebas dari status rawa pangan	n/a	n/a	75,5	81,9	60	89
Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn)	176,35	172,63	113,55	119,98	116,89	n/a
Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari)	3.186	3.142	2.545	2.117	n/a	2.205
Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	78,36	73,94	66,01	59,18	n/a	71,74
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	75,75	70,58	100	100	n/a	83,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2024

Pasokan bahan pangan untuk menjamin konsumsi penduduk telah dapat dipenuhi di Kabupaten Bengkalis selama periode 2018-2023, ini terlihat dari ketersediaan energi bagi masyarakat kabupaten Bengkalis pada periode tersebut. Ketersediaan energi pada tahun 2018-2023 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari. Akan tetapi pada tahun 2021 angka ketersediaan energi ini mengalami penurunan menjadi 2.117 kkl/kapita/hari dan meningkat menjadi 2.205 kkl/kap/hari pada tahun 2023 akan tetapi masih dibawah standar 2.400 kkl/kapita/hari.

Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2018-2023 yang sudah sangat baik. Selama periode 2018-2023 ketersediaan protein di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaan protein adalah 63 gram/kapita/hari. Akan tetapi pada tahun 2021 ketersediaan protein mengalami penurunan menjadi 59,18 gram/kapita/tahun dan naik pada tahun 2023 menjadi 71,74 gram/kapita/hari. Dari aspek ketersediaan energi dan protein telah terpenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk.

Perhatian pada aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan agar dapat diakses dengan mudah dan murah sampai pada tingkat rumah tangga masih sangat diperlukan, terutama pada beberapa wilayah terluar seperti pulau Rupa. Jaminan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan, tetapi juga aspek distribusi dan konsumsi. Kemampuan konsumsi akan ditentukan oleh daya beli dan pengetahuan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, urusan pangan tidak hanya mengurus ketersediaan tetapi juga advokasi dan pembinaan pengetahuan pangan dan gizi bagi masyarakat.

#### 2.3.1.4 Kemandirian Desa

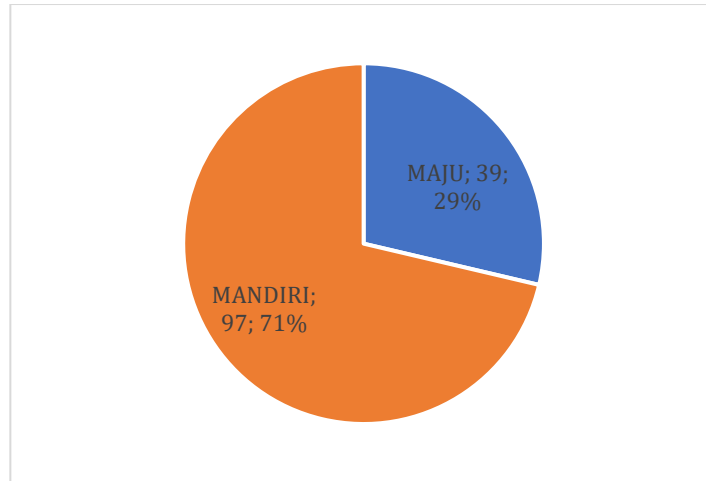
Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat dari Indeks Desa Mandiri (IDM), yang diukur dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 tercatat Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkalis meningkat dari 0,6203 tahun 2018 dengan status IDM Berkembang, menjadi 0,8374 dengan status IDM Mandiri pada tahun 2023. Selengkapnya mengenai perkembangan IDM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-31 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IDM	0,6203	0,6613	0,7273	0,7466	0,7699	0,8374
Status IDM	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Mandiri

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/>

Klasifikasi desa hasil pengukuran IDM Kabupaten Bengkalis tercatat pada Tahun 2023 sebanyak 97 desa atau 71% desa di Kabupaten Bengkalis sudah berstatus desa mandiri, sementara itu sebanyak 29 desa atau 29% desa di Kabupaten Bengkalis sudah berstatus sebagai desa maju.



Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

**Gambar II-44 Klasifikasi Desa Kabupaten Bengkulu Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023**

Selain itu perkembangan pembangunan desa dapat dilihat dari jumlah BUMDesa aktif, kondisi keaktifan LPM, PKK dan Posyandu. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun 2018-2023 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke BUMDesa aktif. Selain itu keaktifan bumdes juga didukung dengan kondisi sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kabupaten Bengkulu yang sangat baik. Dimana dari total 136 desa di Kabupaten Bengkulu, semuanya memiliki sarana prasarana perkantoran yang sangat baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu.

**Tabel II-32 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BUM Desa Aktif	136	136	136	136	136	136
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	136	136	136
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155		154
4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	7	7	7	7		3.395
5	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	Na	Na	24	38	46	97

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kbaupaten Bengkalis, 2024

Indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya adalah persentase LPM dan PKK aktif di Kabupaten Bengkalis. Dalam lima tahun terakhir jumlah LPM di Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 dan sudah aktif 100%. Hal ini menunjukkan bahwa LPM dan PKK di Kabupaten Bengkalis sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam penggerak kesejahteraan keluarga. Sementara itu persentase posyandu aktif pada tahun 2023 mencapai 100%, sedangkan jumlah desa status desa mandiri mencapai 97 desa pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2019 sebesar 24.

#### 2.3.1.5 Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2018 persentase koperasi aktif sebesar 37,91% meningkat hingga tahun 2021 mencapai 48,58%, namun turun pada tahun 2022 menjadi 31,86% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 33%. Meski meningkat pada tahun 2023 koperasi aktif masih jauh dari potensi optimal. Ada lebih kurang 67% koperasi di Kabupaten Bengkalis yang tidak aktif. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk UKM non BPR/LKM aktif capaiannya sudah sangat baik. Hingga tahun 2020 akhir sudah sebanyak 99.36% UKM non BPR/LKM yang aktif di Kabupaten Bengkalis. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM non BPR di Kabupaten Bengkalis cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik berikut.

**Tabel II-33 Perkembangan Indikator Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Aktif	37,99%	42,33%	43,70%	48,58%	31,86%	33%
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	99,38%	99,39%	99,36%	Na	Na	Na
Persentase BPR/LKM Aktif	47,84%	47,84%	47,84%	Na	Na	Na

Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,40%	99,41%	99,38%	116%	135%	135%
----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis, 2024

Selanjutnya persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2018 sebesar 99,40%, menjadi 135% pada tahun 2023. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

**Tabel II-34 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

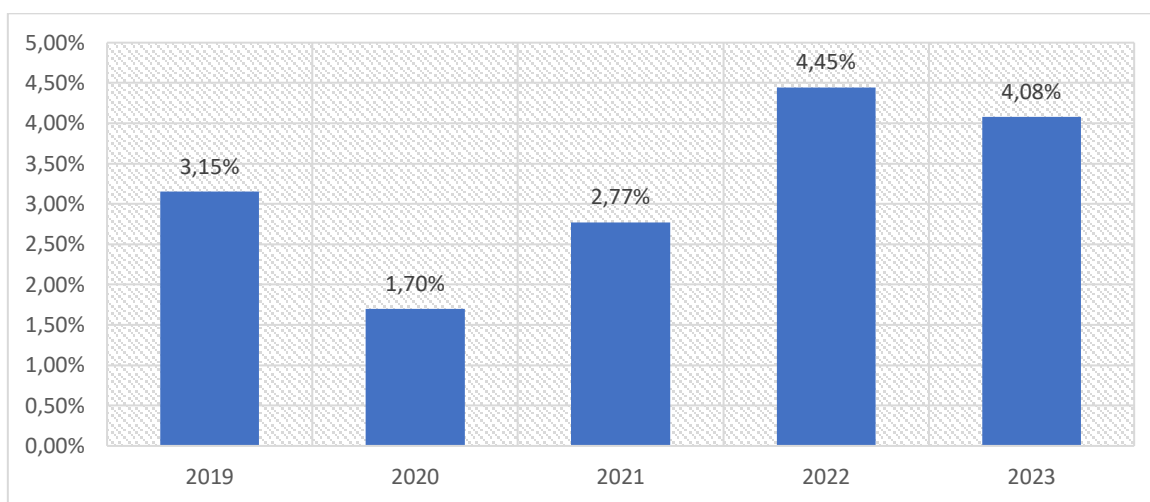
No	Keterangan	Nilai
a	Volume Usaha Koperasi Daerah (Milyar Rupiah)	24,17
b	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	168.635,85
(a/b) x 100	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,014%

Sumber: Dindagkop UKM Provinsi Riau dan BPS Bengkalis, 2024 (*diolah*)

Data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Provinsi Riau tahun 2023 menunjukkan olume usaha koperasi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 24,17 miliar. Jika dibandingkan dengan PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis yang mencapai Rp. 168.635,85 miliar, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB hanya sebesar 0,014%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peran koperasi belum optimal, disebabkan oleh skala usaha yang kecil, keterbatasan akses modal, dan pemasaran yang belum maksimal. Untuk meningkatkan kontribusi koperasi, diperlukan upaya memperbesar skala usaha, meningkatkan akses modal, memperkuat kapasitas SDM, dan diversifikasi produk serta pemasaran. Meskipun kontribusinya saat ini masih rendah, koperasi tetap memiliki potensi untuk menjadi penggerak ekonomi daerah dengan dukungan dan kebijakan yang tepat

### 2.3.1.6 Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



Sumber: BPS Riau, 2024 (Diolah)

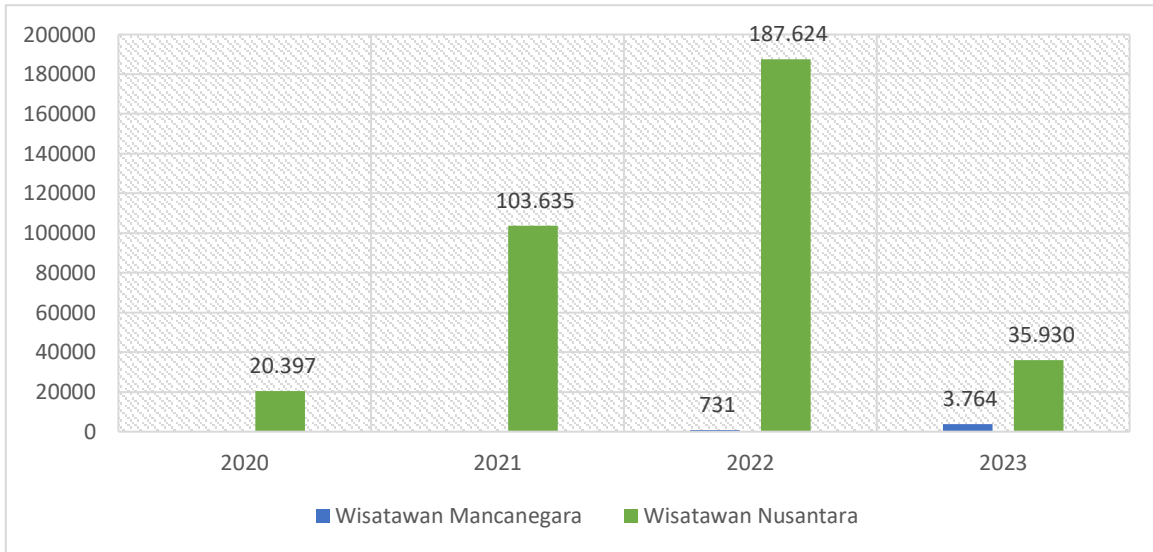
**Gambar II-45 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2019-2023**

Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,15%, turun menjadi 1,70% pada tahun 2020. Selanjutnya meningkat hingga tahun 2022 menjadi 4,45% dan sedikit turun pada tahun 2023. Semakin meningkat rasio kewirausahaan daerah maka semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha

### 2.3.1.7 Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 731 orang, meningkat pada tahun 2023 menjadi 3.764 orang wisatawan mancanegara. Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2020 tercatat sebesar 20.397, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 187.624, namun turun pada tahun 2023 menjadi 35.930. Selama kurun waktu 2019-2021 sektor pariwisata Kabupaten Bengkalis turun drastis

disebabkan oleh kondisi pandemi yang mengakibatkan penutupan sejumlah akses transportasi dan pengurangan kegiatan selama pandemi sangat berdampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-46 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023**

Untuk lama kunjungan wisata di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu selama 3 hari. Lama kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya uang yang dihabiskan wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkalis. Semakin lama wisatawan tinggal maka semakin banyak kontribusi sektor wisata terhadap PAD daerah. Untuk tahun 2020 kontribusi PAD dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp. 4 juta, jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 14 juta, peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023 mencapai Rp. 22 juta. Kontribusi ini disyalir lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menyasar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.

Adapun jumlah wisatawan yang banyak berkunjung ke Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh wisatawan nusantara yaitu mencapai 35.930 orang, sementara jumlah wisatawan mancanegara mencapai 3.764 pada tahun 2023. Peningkatan kunjungan wisatawan berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis dimana persentase tingkat hunian meningkat hingga tahun 2023 mencapai 45,02%.

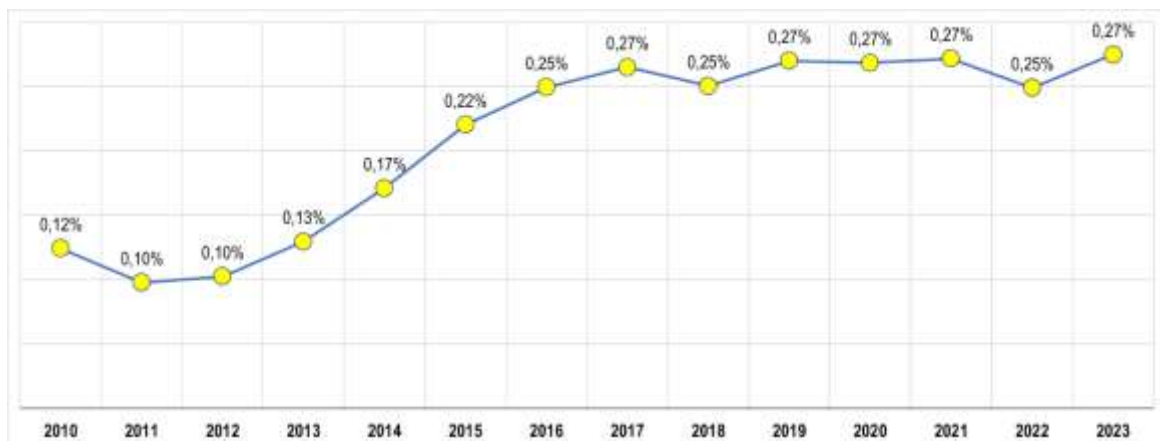
**Tabel II-35 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2018-2023**

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Lama kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PAD sektor pariwisata (Juta)	Na	4,02 Juta	14,51 Juta	20,55 Juta	22,72 Juta
Jumlah Wisatawan Mancanegara	4.373	covid-19	covid-19	731	3.764
Jumlah Wisatawan Nusantara	Na	20.397	103.635	187.624	35.930
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	Na	Na	408,09%	81,04%	-80,85%
Tingkat Hunian Akomodasi	29,32	20,68	39,71	45,37	45,02
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	0,59	-18,85	19,71	13,25	0
Kontribusi Sektor Terhadap PAD Pariwisata	97,71	97,86	84,49	88,76	0

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2024

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, *ceteris paribus*. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. Data rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum menurut harga berlaku di Kabupaten Bengkalis masih tergolong kecil, masih berada dibawah satu persen, akan tetapi selama kurun waktu 2010-2023 menunjukkan trend peningkatan dari 0,12% pada tahun 2010, menjadi 0,27% pada tahun 2023. Berikut adalah data rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum menurut harga berlaku Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2023, yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-47 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (ADHB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2023**

- 1) Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil merupakan suaka margasatwa yang terletak di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil ini telah ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada tahun 2009. Untuk menuju Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 2 jam dari Kota Pekanbaru.

Di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil terdapat area inti seluas 178.722 ha meliputi dua suaka margasatwa dan hutan konservasi cadangan bekas konsesi Sinar Mas. Selain itu, kawasan ini diperuntukkan sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pemantauan ekosistem. Area kedua merupakan area penyangga yang memiliki luas 222.246 ha yang berfungsi mendukung konservasi. Di dalam area ini diperbolehkan untuk aktivitas lainnya seperti perkebunan, pertanian, perikanan, serta pengumpulan produk kayu dan non kayu. Selain itu, area penyangga juga terdapat tempat penangkaran/pelatihan gajah. Terdapat 6 ekor gajah yang terpelihara di area penyangga ini.

Fasilitas pariwisata yang tersedia di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil masih belum memadai. Seperti tidak adanya penginapan terdekat, toilet, gazebo, maupun tempat duduk. Di beberapa titik di Cagar Biosfer Siak Kecil ini tidak tersedia sinyal komunikasi.

## 2) Mangrove Tanjung Leban

Mangrove Tanjung Leban merupakan daya tarik wisata yang terletak di Jalan Lintas Dumai – Sungai Pakning, Dusun Bakti, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana. Untuk menuju Mangrove Tanjung Leban dapat melalui jalur laut Kota Bengkalis selama 1 jam dan melalui jalur darat selama 1 jam dari Kota Dumai atau dari Sungai Pakning. Untuk mengelilingi Mangrove Tanjung Leban, pengunjung telah diberikan fasilitas seperti track di dalam hutan dan dermaga yang terbuat dari kayu namun telah banyak yang rusak. Selain itu juga, telah disediakan menara pandang yang mengarah langsung ke laut serta untuk melihat sekeliling Hutan Mangrove Tanjung Leban. Akan tetapi, daya tarik wisata ini belum menyediakan fasilitas interpretasi yang dapat memberikan edukasi terkait Hutan Mangrove Tanjung Leban.

## 3) Pantai Sepahat

Pantai Sepahat terletak di Jalan Jend. Sudirman, Dusun Murni, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, tepatnya di jalan lintas Dumai-Pakning sehingga lokasi pantai ini mudah dicapai oleh pengunjung. Dari Kota Pekanbaru dapat ditempuh melalui jalur laut dan darat. Perjalanan melalui laut akan lebih singkat, sedangkan melalui jalur

darat pengunjung perlu melewati Kabupaten Siak terlebih dahulu dengan mengambil rute perjalanan menuju Sungai Pakning. Pantai ini sudah memiliki tempat parkir yang luas, serta dapat dicapai dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan kondisi jalan yang baik. Fasilitas di dalam daya tarik wisata ini pun sudah lengkap. Pengunjung yang datang biasanya melakukan aktivitas seperti berfoto dan berjalan santai di pasir pantai saat surut, sehingga tempat ini cocok untuk menghabiskan waktu berekreasi dan memandangi panorama pantai.

#### 4) Pantai Wisata Bahari

Pantai Wisata Bahari terletak di Desa Tanggayun, Kecamatan Bandar Laksamana. Pantai ini memiliki pemandangan langsung menuju Selat Malaka. Di sekitar pantai terdapat beberapa rumah nelayan untuk mengeringkan tangkapannya menjadi ikan asin. Kemenarikan dari rumah nelayan ini memiliki tinggi sekitar 15-20 meter, sehingga saat sedang surut pengunjung dapat berjalan menuju rumah-rumah milik nelayan tersebut. Untuk menuju daya tarik wisata ini cukup mudah, hanya memerlukan waktu satu jam perjalanan dari Kota Dumai yang mengarah ke daerah Sungai Pakning.

#### 5) Wisata Tanah Gambut Arboretum

Wisata Tanah Gambut Arboretum terletak di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu. Selain menjadi salah satu wisata edukasi, Wisata Tanah Gambut Arboretum juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya arti alam, khususnya lahan gambut. Pemerintah berencana untuk memperluas tanah gambut ini sebagai langkah awal untuk menghindari kebakaran hutan.

#### 6) Pantai Tanjung Lapin

Pantai Tanjung Lapin merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupal Utara. Aksesibilitas menuju Pantai Tanjung Lapin dapat ditempuh dengan menggunakan kapal ferry ataupun menggunakan kendaraan pribadi. Jika menggunakan jalur darat perlu kehati-hatian dikarenakan kondisi sebagian jalan yang belum cukup baik. Jarak tempuh Pantai Tanjung Lapin dari ibu kota kabupaten yaitu sejauh 282 km, dan diperlukan waktu sekitar 8 jam untuk mencapainya. Pantai dengan panjang sejauh ± 17 km ini menjadi salah satu wisata yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan karakter pantai berpasir putih dan landai. Setiap tahunnya di wilayah pantai ini diselenggarakan acara pesta pantai dan lomba perahu jong, gasing, dan layang-layang. Selain itu, di Pantai Tanjung Lapin juga terdapat tradisi yang rutin dilaksanakan yaitu Mandi Shafar. Aktivitas lain yang dapat dilakukan di Pantai Tanjung

Lapin diantaranya adalah aktivitas rekreasi seperti bermain jet ski dan banana boat. Beberapa fasilitas yang tersedia di Pantai Tanjung Lapin berupa 2 unit wisma, toilet, gazebo, warung makan dan tempat duduk. Fasilitas umum yang menunjang daya tarik wisata Pantai Tanjung Lapin diantaranya adalah tempat parkir yang cukup luas dan puskesmas yang tidak jauh dari pantai.

#### 7) Pulau Beting Aceh

Pulau Beting Aceh merupakan pulau pasir kecil dengan luas sekitar 2 ha yang memiliki daya tarik utama yaitu hamparan pasir putih yang indah. Di tengah Pulau Beting Aceh terdapat deretan pohon cemara laut yang menambah kemenarikan daya tarik wisata ini. Selain itu ada fenomena unik yaitu pasir putih akan mengeluarkan suara berderit ketika diinjak ataupun disentuh tangan, sehingga masyarakat menyebutnya “pasir berbisik”. Untuk menuju pulau ini wisatawan dapat menggunakan jalur darat dari Pekanbaru dengan melakukan perjalanan menuju Kota Dumai, kemudian menyeberang Selat Rumat menuju Rumat Selatan menggunakan kapal ro-ro dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Rumat Utara sejauh 70 km.

Selain itu, dapat juga menggunakan kapal penumpang dari Pekanbaru menyusuri Sungai Siak menuju Bengkalis. Kemudian dari Bengkalis, wisatawan bisa menyewa speed boat menuju Pulau Rumat. Dinamakan Pulau Beting Aceh karena “beting” memiliki makna gundukan pasir yang memanjang hingga membentuk pulau. Sedangkan “Aceh” menurut cerita, konon ada nelayan asal Aceh yang terdampar di pulau ini, sehingga pulau ini dikenal sebagai Pulau Beting Aceh. Waktu yang direkomendasikan untuk mengunjungi pulau ini adalah pukul 16.00-18.00. Pada jam tersebut, wisatawan dapat melihat burung-burung yang bermigrasi melintasi Pulau Beting Aceh. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh wisatawan diantaranya adalah berfoto. Pulau Beting Aceh memiliki beberapa spot foto yang menarik. Kemenarikan lain dari Pulau Beting Aceh adalah ketika air laut surut, pulau ini akan menciptakan daratan pasir seluas lapangan bola karena menyambung dengan Pulau Babi yang berada di sebelahnya. Pada saat itu, wisatawan dapat berjalan berjalan kaki dari Pulau Beting Aceh ke Pulau Babi melewati pasir putih yang membelah laut.

#### 8) Pantai Tanjung Punak

Pantai Tanjung Punak berlokasi di Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rumat Utara. Pantai ini memiliki potensi wisata bahari yang didukung oleh pasir putih. Di Pantai Tanjung Punak juga terdapat hutan mangrove yang masih lestari. Selain itu, di sekitar Pantai Tanjung Punak tepatnya di Desa Tanjung Punak memiliki budaya yang masih dilakukan



sampai saat ini yakni ritual Mandi Safar yang dilakukan setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar serta Mandi Belimau Petang Megang yang masih tetap dilaksanakan setiap tahunnya pada saat sehari menjelang masuknya bulan Ramadhan.

#### 9) Pantai Pesona

Pantai Pesona merupakan salah satu daya tarik wisata menarik yang ada di Pulau Rupat tepatnya di Kecamatan Rupat Utara. Pantai sepanjang 17 km ini memiliki pasir berwarna putih yang indah dengan lebar pantai sekitar 300-500 meter pada saat air laut sedang surut. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Pesona, diantaranya adalah wind surfing, surfing, boating, parasailing, berenang, dan aktivitas rekreasi pantai lainnya. Selain itu, wisatawan dapat melihat aktivitas nelayan yang memulai kegiatannya untuk mencari ikan. Menikmati matahari tenggelam pun tidak kalah indah dengan pantai lainnya yang menghadap Selat Melaka. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pesona tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara seperti dari Malaysia dan Singapura.

#### 10) Pantai Perapat Tunggal

Pantai Perapat Tunggal merupakan salah satu pantai yang berada di Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis. Untuk menuju Pantai Perapat Tunggal dari Kota Pekanbaru dapat menempuh perjalanan darat selama 3 hingga 4 menuju pelabuhan di Sungai Pakning. Selanjutnya wisatawan dapat menyeberang dengan menggunakan kapal Roro. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Pantai Perapat Tunggal, wisatawan dapat melihat pemandangan rumah-rumah panggung tradisional yang terbuat dari papan di bagian kanan kiri jalan yang dilalui. Bagian halaman rumah biasanya ditata dengan taman-taman bunga kecil, tidak ada pagar dan umumnya menyatu dengan kebun-kebun yang dimiliki. Fasilitas yang tersedia di Pantai Perapat Tunggal diantaranya terdapat permainan anak untuk mengisi waktu rekreasi bersama keluarga, warung makan, serta disediakan beberapa pondok yang berukuran kecil dan besar untuk wisatawan bersantai. Di sekitar Pantai Perapat Tunggal terdapat rumah-rumah nelayan yang terbuat dari kayu dan tempat dimana biasanya nelayan menjemur hasil tangkapannya. Wisatawan juga dapat membeli terasi khas Bengkalis dan juga aneka ikan asin yang dijual oleh masyarakat sekitar. Selain keindahan alam bahari dari Pantai Perapat Tunggal, pantai ini juga memiliki kebudayaan yang telah rutin diselenggarakan seperti adanya perayaan pesta nelayan, pacu jalur perahu naga, dan perahu jong.

#### 11) Pantai Jangkang

Pantai Jangkang adalah daya tarik wisata alam yang terletak di Desa Jangkang yaitu sekitar 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Bengkalis atau dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25-30 menit. Aksesibilitas menuju Pantai Jangkang sudah cukup baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Karakter dari Pantai Jangkang adalah pantai dengan pasir hitam yang indah sehingga memberikan kekhasan dibandingkan dengan pantai lainnya. Fasilitas di Pantai Jangkang masih dalam tahap pengembangan sehingga wisatawan perlu menyiapkan perbekalan karena belum tersedia warung makan di sekitar pantai ini.

#### 12) Hutan Mangrove Sebauk

Hutan Mangrove Sebauk terletak di Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis. Untuk menuju daya tarik wisata ini, telah didukung dengan kondisi jalan utama yang baik dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit dengan jarak tempuh 10 km dari pusat ibu kota Kabupaten Bengkalis. Keindahan Hutan Mangrove Sebauk dapat dinikmati dari sisi daratan dengan ciri lebatnya hutan serta dari sisi lautannya ataupun selat. Untuk menikmati keindahan hutan mangrove, telah disediakan jembatan dan beberapa pondok yang berada di pinggir pantai. Daya tarik lain di Hutan Mangrove Sebauk adalah adanya rumah-rumah kecil yang berbaris rapi atau dikenal dengan "Togok".

Togok merupakan rumah para nelayan yang memasang pengerih (alat tangkap ikan dan udang) di laut. Rumah-rumah tersebut digunakan sebagai tempat menampung, menjemur dan mengolah ikan segar untuk dijadikan ikan asin. Selain itu, togok juga dijadikan sebagai tempat menjemur udang dan juga sebagai tempat membuat belacan/terasi atau produk olahan lainnya.

#### 13) Pantai Penampar

Pantai Penampar merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Dekul, Kecamatan Bantan. Pantai ini menyuguhkan panorama alam dan aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Fasilitas wisata telah tersedia dan sudah cukup lengkap seperti gazebo, toilet, spot swafoto, dan warung makan. Untuk menuju Pantai Penampar diperlukan waktu tempuh sekitar 1 jam dengan jarak lebih kurang 30 km. Aksesibilitas menuju Pantai Penampar dalam kondisi yang baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

#### 14) Pantai Indah Selat Baru

Pantai Indah Selat Baru terletak di Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan. Untuk menuju Pantai Selat Baru, wisatawan bisa menggunakan transportasi umum dengan menempuh jalur darat seperti menggunakan bis ataupun shuttle dari Pekanbaru, dengan waktu tempuh sekitar 5 jam perjalanan. Dari Ibukota Kabupaten Bengkalis memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Kondisi jalan menuju pantai ini terbilang baik dengan lebar jalan 5 meter serta akses di dalam daya tarik wisata telah beraspal beton dengan lebar 2 meter.

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan diantaranya adalah berjemur, bermain pasir pantai, berselancar, berperahu, berenang, serta memancing ikan. Selain itu, ada aktivitas masyarakat sekitar yang menarik seperti bermain layang-layang, gasing, dan perahu Jong. Pantai Indah Selat Baru memiliki hamparan pantai yang landai dengan pasir pantai yang halus. Gelombang air laut di Pantai Indah Selat Baru relatif stabil dan tidak berbahaya terkecuali pada musim angin utara gelombang dapat lebih tinggi. Saat surut, wisatawan dapat melihat pemandangan Gunung Ledang yang terdapat di negara tetangga, Malaysia. Kebudayaan yang ada di Pantai Indah Selat Baru pun menarik, seperti Perahu Jong yang merupakan permainan rakyat pesisir yang masih dilestarikan.

Permainan Perahu Jong merupakan replika dari sampan layar tidak dikemudikan oleh manusia melainkan berlayar dengan mengandalkan terpaan angin. Permainan rakyat ini biasanya dilakukan di pantai dengan beberapa orang. Masyarakat melakukan perlombaan Perahu Jong dengan cara yang tercepat sampai di pantai atau di darat maka itulah yang menjadi pemenangnya. Untuk membuat Perahu Jong harus mempunyai keahlian tersendiri, karena harus menggunakan kayu yang baik, dan tidak sembarangan kayu dapat dipakai untuk membuat Perahu Jong. Sejumlah fasilitas sudah banyak tersedia di Pantai Indah Selat Baru ini, diantaranya musholla, kamar ganti, kamar mandi, warung, dan gazebo serta permainan anak-anak. Fasilitas umum yang mendukung daya tarik wisata ini diantaranya adalah warung/toko yang juga merupakan money changer untuk wisatawan asing dapat menukarkan mata uang.

#### 15) Pantai Budung

Pantai Budung terletak di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan. Pantai ini dipengaruhi dengan pasang surut, sehingga pada saat surut memiliki pantai berpasir. Sudah terdapat beberapa fasilitas wisata seperti gazebo, spot swafoto, warung makan, toilet, dan area parkir namun masih terbatas. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan pun masih terbatas, terutama akibat abrasi pantai yang memengaruhi pasang dan surutnya pantai.

#### 16) Pantai Madani

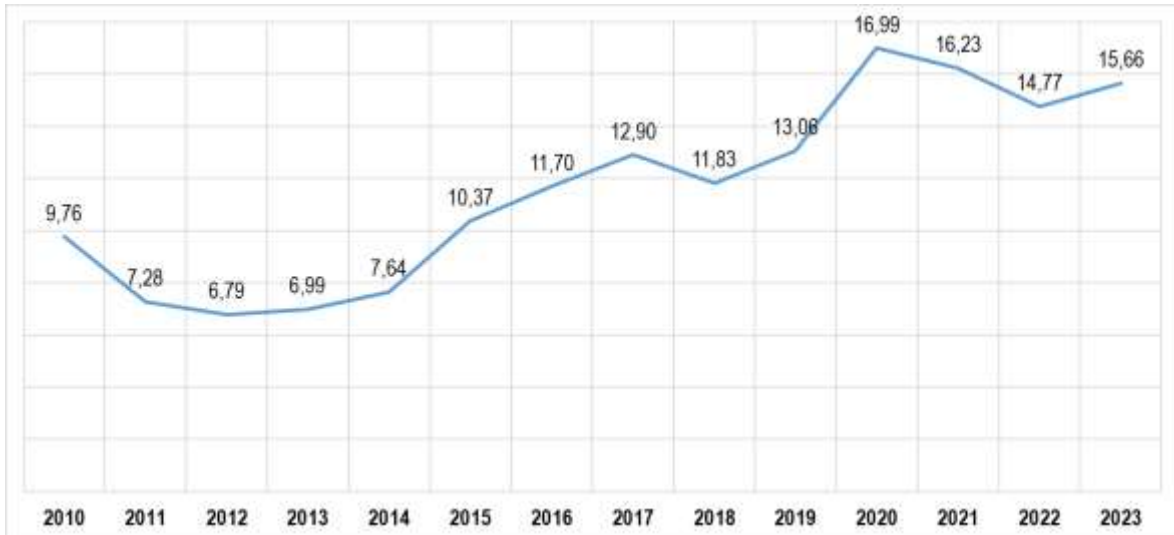
Pantai Madani terletak di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan. Untuk mencapai Pantai Madani diperlukan waktu sekitar 2 jam dari pusat Ibukota Bengkalis atau dengan jarak sekitar 70 km. Aksesibilitas menuju Pantai Madani perlu ditingkatkan, dikarenakan beberapa titik masih adanya jalan yang berlubang. Abrasi di pantai ini pun cukup tinggi, dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan dipengaruhi oleh pasang dan surut. Kehidupan nelayan di pantai ini cukup terasa, wisatawan yang datang dapat melihat rumah-rumah nelayan dan kegiatan nelayan menjemur ikan. Di Pantai Madani masih belum terdapat fasilitas pariwisata.

#### 17) Pantai Ketapang

Pantai Ketapang terletak di Desa Sungai Cingam, Pulau Rupa, Kecamatan Rupa. Untuk menuju Pantai Ketapang dapat melalui jalur darat dengan dilanjutkan jalur laut. Waktu tempuh yang diperlukan menuju Pantai Ketapang selama 4 jam perjalanan dari Pekanbaru menuju Dumai, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Kapal Roro untuk menyeberang dari Pelabuhan Dumai ke Pulau Rupa. Daya tarik Pantai Ketapang adalah panorama pantai berpasir yang bersih. Fasilitas wisata yang tersedia di Pantai Ketapang sudah lengkap dan dalam kondisi baik, diantaranya adalah warung makan, toilet, gazebo, mushalla, dan area bermain anak. Fasilitas lainnya yang tersedia diantaranya adalah wisma di dekat Desa Sungai Cingam tepatnya di Pangkalan Nyirih untuk wisatawan yang ingin menginap.

#### 2.3.1.8 Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 sebesar 9,76%, namun turun hingga tahun 2012 menjadi 6,79%, meningkat hingga tahun 2017 menjadi 12,90% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 11,83%. Selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 16,99%, kembali turun hingga tahun 2022 menjadi 14,77% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 15,66%.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-48 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2023**

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator pertumbuhan jumlah IKM mencapai 1,51 %. Dan presentase pelaku usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya mencapai 7,8%1 pada tahun 2023. Berikut disajikan capaian indikator perindustrian Kabupaten Bengkalis tahun 2023, yaitu:

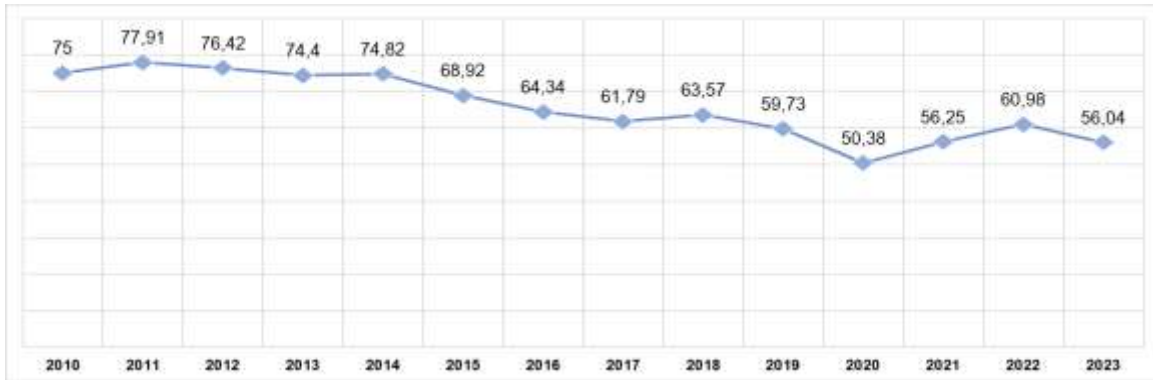
**Tabel II-36 Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Indikator	Capaian
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1,51
Presentase Pelaku Usaha IKM yang di fasilitasi izin produknya	7,81
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	15,66

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2023

### 2.3.1.9 Perdagangan

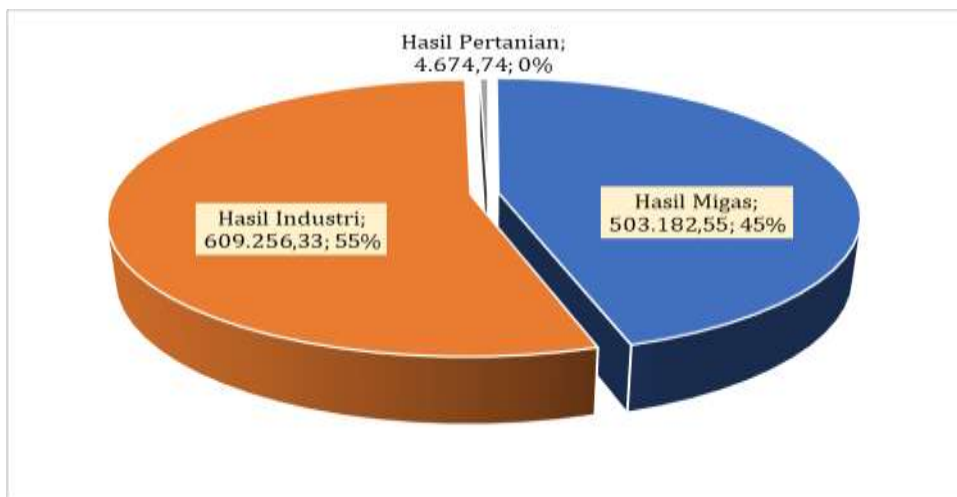
Keterbukaan perekonomian suatu negara atau daerah terhadap perdagangan global dari dihitung dari besaran rasio perdagangan terhadap nilai produksi daerah. Perhitungan rasio perdagangan terhadap perekonomian daerah Bengkalis dihitung dari rasio net ekspor dan impor barang dan jasa pada PDRB menurut sisi pengeluaran dan total nilai PDRB Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2010-2022. Rasio perdagangan dan total PDRB riil Bengkalis (harga konstan) selama periode 2010-2022 menunjukkan trend yang menurun, yaitu dari 75,00% pada tahun 2010 menjadi 54,23% pada tahun 2022. Pada sisi yang bersamaan nilai PDRB riil Bengkalis secara nominal juga mengalami penurunan pada periode yang sama, demikian juga dengan nilai perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan kontribusi perdagangan luar negeri dalam seiring dengan penurunan perekonomian Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-49 Perkembangan Rasio Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Tahun 2010-20223**

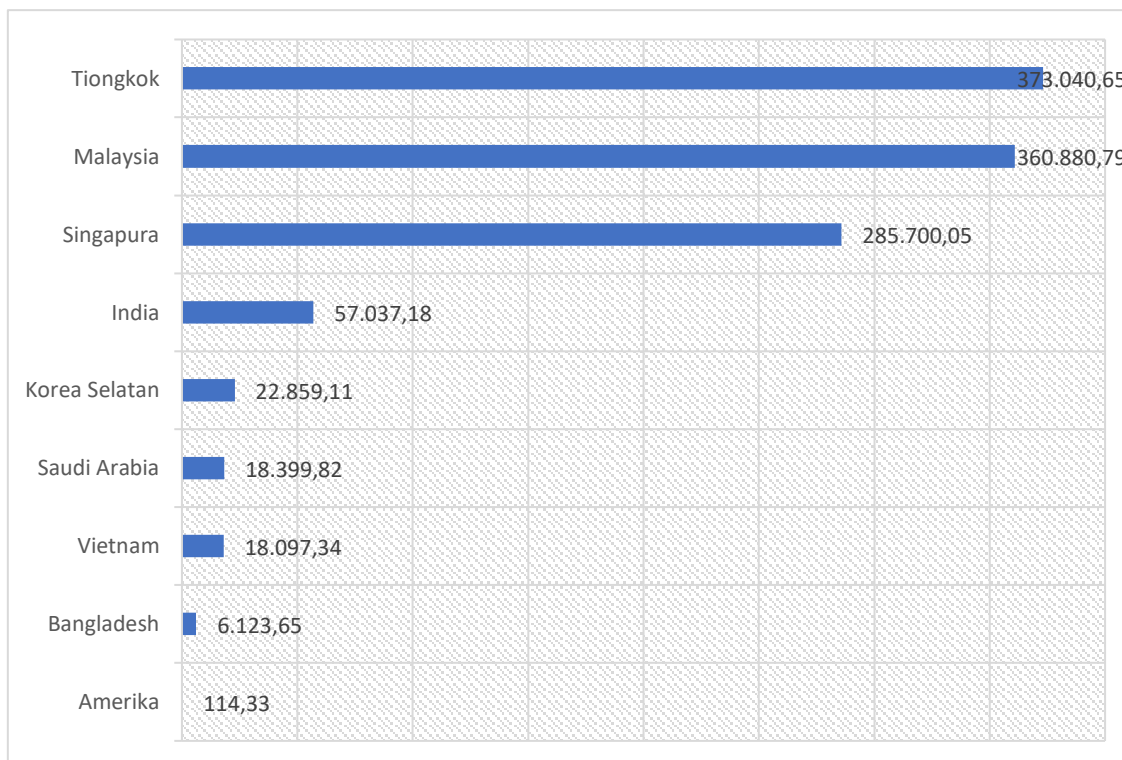
Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan luar negeri dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Rasio perdagangan luar negeri terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat ekspor dan impor tahun 2010-2023 dengan produk domestik bruto pada periode waktu yang sama. Nilai rasio ini merupakan gambaran keterbukaan perekonomian daerah terhadap perekonomian dunia. Berdasarkan nilai rasio perdagangan dan PDRB Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa perekonomian Bengkalis sangat terbuka dengan kondisi perekonomian dunia. Perhatian lebih lanjut pada ekspor barang-barang dari Kabupaten Bengkalis pada umumnya adalah hasil industri dan hasil minyak dan gas. Ekspor hasil industri didominasi oleh ekspor dari kelompok barang burur kayu (pulp) dan sebahagian kecil kempok barang kayu atau barang dari kayu dan buah-buahan. Sedangkan ekspor barang dari hasil minyak gas didominasi oleh bahar bakar mineral. Kemudian ekspor hasil pertanian berupa ikan dan udang serta buah-buahan. Ekspor komoditi dari Kabupeten Bengkalis paling banyak keluar dari Pelabuhan Sungai Pakning, diikuti oleh dari peabuhan muat Bengkalis dan Tanjung Medang. Secara riil barang ekspor yang menjadi produksi daerah adalah minyak dan gas, sedangkan hasil industri bukan didominasi oleh industri di Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-50 Kelompok Barang Ekspor Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022**

Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kabupaten Bengkalis menurut negara tujuan yang masih didominasi oleh Negara Tiongkok 373.040,65 ribu US\$, Malaysia sebesar 360.880,70 ribu US\$ dan Singapura sebesar 285.700,05 ribu US\$.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Tabel II-37 Ekspor Kabupaten Bengkalis Menurut Negara Tujuan Tahun 2023 (Ribu US\$)**

### 2.3.1.10 Keuangan

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 3 (tiga) sumber pendapatan Kabupaten Bengkalis yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya; (2) sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi; dan (3) sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel II-38 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2023**

No	Uraian	2021	2022	2023
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pajak daerah	63.664.818.589,25	94.213.069.616,00	106.094.877.800,00
1.1.2	Retribusi daerah	9.387.616.385,34	11.711.114.828,00	14.326.950.569,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.920.504.935,00	27.311.794.580,00	316.861.797.346,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	158.380.374.679,94	216.398.406.349,15	177.304.804.088,97
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>252.353.314.589,53</b>	<b>349.634.385.373,15</b>	<b>614.588.429.804,97</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	1.050.702.831.784,00	1.577.609.899.644,00	1.588.869.887.040,00
1.2.2	Dana Bagi hasil bukan pajak	678.078.156.631,00	499.596.568.395,00	821.226.397.215,00



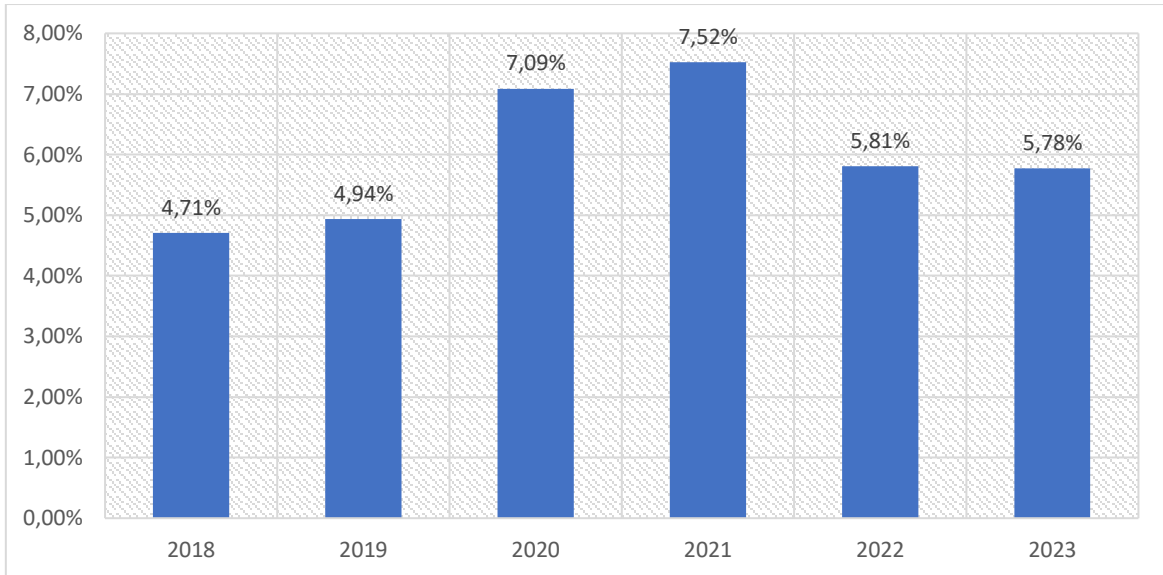
No	Uraian	2021	2022	2023
1.2.3	Dana Alokasi Umum	338.731.609.000,00	335.727.628.000,00	354.410.355.837,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	208.140.860.895,00	288.340.394.551,00	316.951.426.411,00
1.2.5	Dana Penyesuaian	166.657.936.000,00	127.024.597.939,00	129.623.338.071,00
1.2.6	Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.662.859.108,49	138.522.362.493,00	186.100.249.291,00
1.2.7	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	26.623.226.400,00	12.957.842.500,00	10.166.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.573.597.479.818,49</b>	<b>2.979.779.293.522,00</b>	<b>3.407.347.653.865,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>			
1.3.1	Hibah	91.438.330.000,00	808.958,15	
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.7	Pendapatan Lainnya			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	<b>91.438.330.000,00</b>	<b>808.958,15</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.917.389.124.408,02</b>	<b>3.329.414.487.853,30</b>	<b>4.021.936.083.669,39</b>

Sumber: *Bapenda Kabupaten Bengkalis, 2024*

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan total pendapatan daerah pada tahun 2023, peningkatan ini disebabkan oleh naiknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan meningkatnya pembayaran pajak masyarakat ke daerah. Selain itu peningkatan pendapatan daerah disebabkan oleh naiknya pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Kendati demikian rasio PAD terhadap total APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 hanya sebesar 15,28%, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan total Pendapatan Transfer yaitu sebesar 84,72% dengan komponen pendapatan terbesar adalah Dana Bagi Hasil pajak yaitu sebesar Rp. 1.588.869.887.040,00 atau sebesar 39,51% dari total APBD Kabupaten Bengkalis.

#### 2.3.1.11 Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK)/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Rasio DPK terhadap PDRB Bengkalis mengalami fluktuasi dari 4,71% pada tahun 2018, menjadi 7,52% pada tahun 2021, kemudian turun hingga tahun 2023 menjadi 5,78%.



Sumber: BPS Riau, 2024 (Olahan)

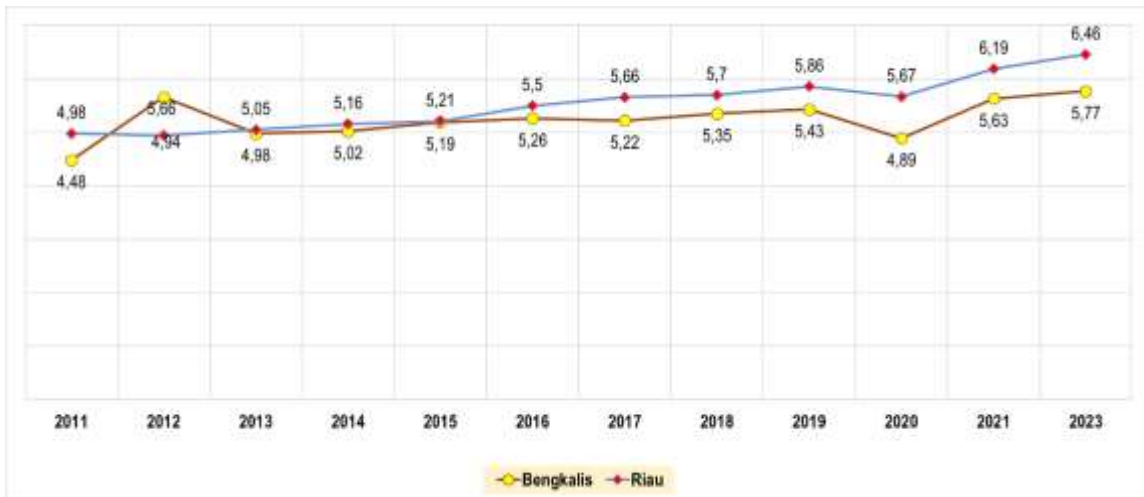
**Gambar II-51 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2018-2023**

### 2.3.1.12 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah upaya untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Hal ini mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses terhadap kesempatan. Pembangunan Ekonomi Inklusif bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses serta kesempatan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif melibatkan peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, serta memerlukan kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terdiri dari 3 pilar dan 8 sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar-pilar yang menjadi dasar pengukuran indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah (1) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi; (2) Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan (2) Perluasan Akses dan Kesempatan.

Pilar pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi, mencerminkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan signifikan. Pilar kedua, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan pilar ketiga, perluasan akses dan kesempatan, fokus pada upaya untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.



Sumber: Bappenas, 2024

**Gambar II-52 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2011-2023**

Gambar diatas menunjukkan terdapat tren fluktuasi kenaikan nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2011 hingga 2023. Pada tahun 2011, nilai indeks Kabupaten Bengkalis sebesar 4,98, meningkat pada tahun 2012 menjadi 5,66 dan turun kembali pada tahun 2013 menjadi 4,98. Pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 5,02, naik hingga tahun 2016 menjadi 5,26 dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 5,22, namun meningkat hingga tahun 2019 menjadi 5,34 dan sedikit turun pada tahun 2020 menjadi 5,24 dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 5,77. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten tersebut. Sementara itu, indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Riau juga mengalami peningkatan dari 4,98 tahun 2011 hingga mencapai 6,46 pada tahun 2023.

Kendati demikian, indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Bengkalis masih dibawah Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kinerja dimensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan

pengurangan kemiskinan serta pilar perluasan akses dan kesempatan Kabupaten Bengkalis dibandingkan Provinsi Riau. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mendorong pembangunan tiga pilar tersebut agar pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih inklusif.

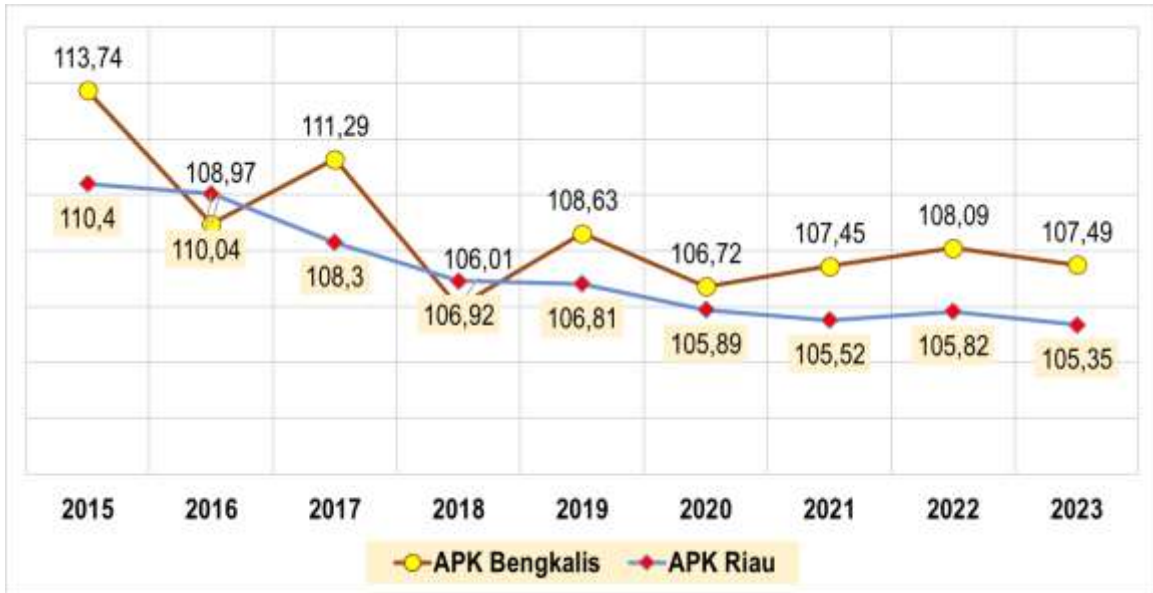
## 2.3.2 Daya Saing SDM

### 2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

#### a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Beberapa fungsi penting persentase APK antara lain: untuk menunjukkan seberapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, yang dapat menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Dengan besaran APK dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Pada tingkat jenjang pendidikan SD /MI Kabupaten Bengkalis capaian APK selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2023 terlihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-53 Posisi Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

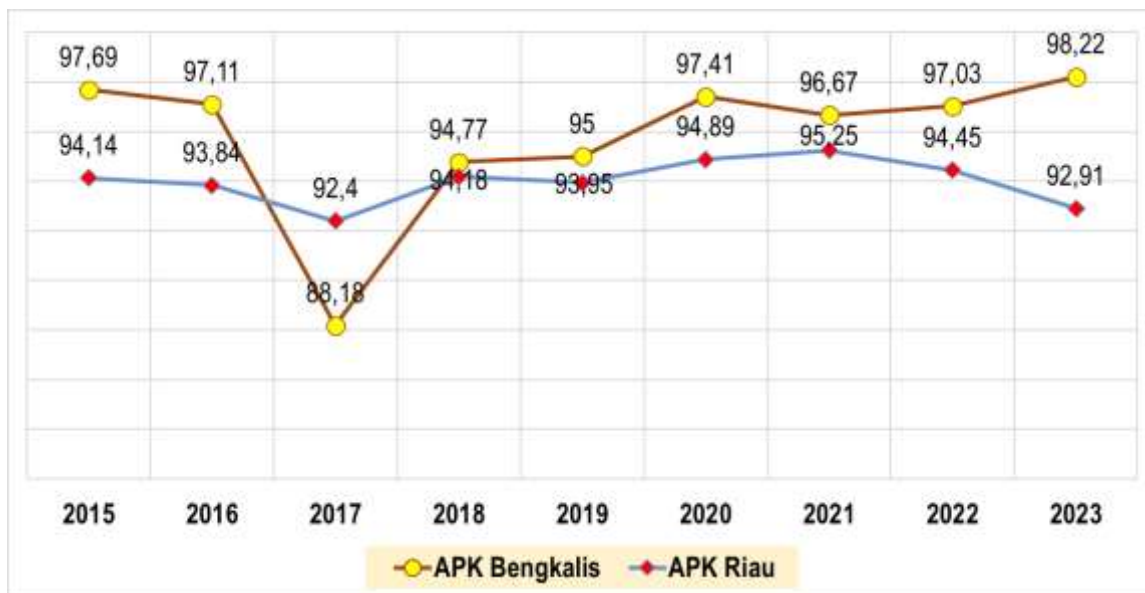
Data pada grafik diatas menunjukkan bahwa APK SD/MI Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2015-2023 menunjukkan trend fluktuasi yang relatif kecil. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan, variasinya cenderung berada dalam kisaran yang terbatas.

Pada awal periode (2015-2017), terjadi peningkatan signifikan dalam APK SD/MI, mencapai puncaknya pada tahun 2015 (113.74). Peningkatan ini mencerminkan berbagai faktor, seperti peningkatan aksesibilitas pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan baru dan perubahan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Setelah mencapai puncak pada tahun 2015, APK SD/MI Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan ekonomi, perubahan demografis yang mempengaruhi partisipasi siswa.

Bika dicermati secara seksama dari grafik diatas penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 (106.72) yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022, terjadi sedikit pemulihan dalam APK SD/MI, sebagai dampak dari usaha untuk memperbaiki partisipasi pendidikan setelah dampak pandemi. Meskipun ada peningkatan, APK SD/MI masih belum mencapai tingkat pada tahun 2015. Namun pada tahun 2023 nilai APK SD/MI turun menjadi 107,49. Kondisi APK SD/MI yang fluktuatif ini menunjukkan perlunya pemantauan dan evaluasi terus-menerus

terhadap kebijakan pendidikan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi partisipasi pendidikan.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan APK SD/MI Provinsi Riau dalam kurun waktu yang sama juga mengalami fluktuasi, namun trennya lebih stabil dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara umum APK SD/MI Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan APK SD/MI Provinsi Riau. Sementara itu APK SMP/MTs Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2015-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-35 Posisi Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK ) SMP/MTs Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

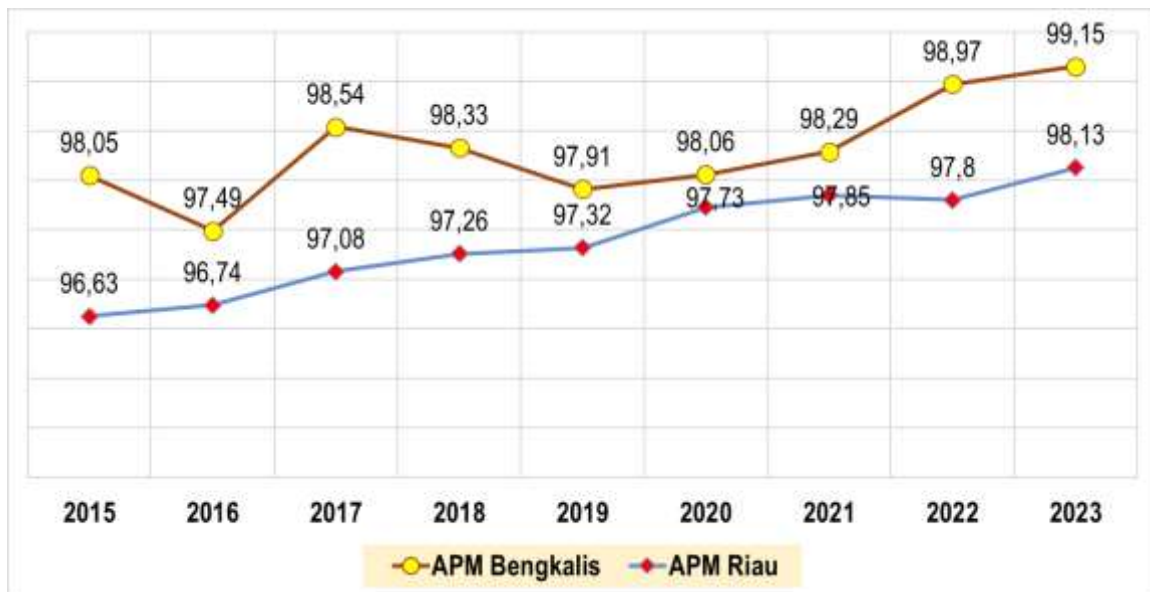
Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2023, terdapat variasi nilai APK setiap tahunnya. Trend umum APK dari tahun 2015 hingga 2023 cenderung naik, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2015 memiliki APK tertinggi sebesar 97.69, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 (88.18). Setelah penurunan pada tahun 2017, APK kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya (2018-2023) dan ini menunjukkan adanya pemulihan. Meskipun ada fluktuasi tahunan, selama kurun waktu 2015-2023, namun secara keseluruhan terdapat konsistensi dalam mencapai nilai APK di atas 94.

Berikutnya dibandingkan dengan APK SMP/MTs Provinsi Riau dengan periode yang sama, secara keseluruhan, baik Kabupaten Bengkalis maupun Propinsi Riau menunjukkan tren yang relatif stabil. Namun demikian APK SMP/MTs Kabupaten

Bengkalis cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Riau sepanjang periode tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi, Kabupaten Bengkalis secara konsisten mencapai nilai APK di atas 94, sedangkan Propinsi Riau memiliki nilai APK di sekitar 94 atau sedikit di bawahnya.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Besaran angka APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Besaran APM SD/MI Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2015-2016 seperti terlihat pada Grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Riau, 2024

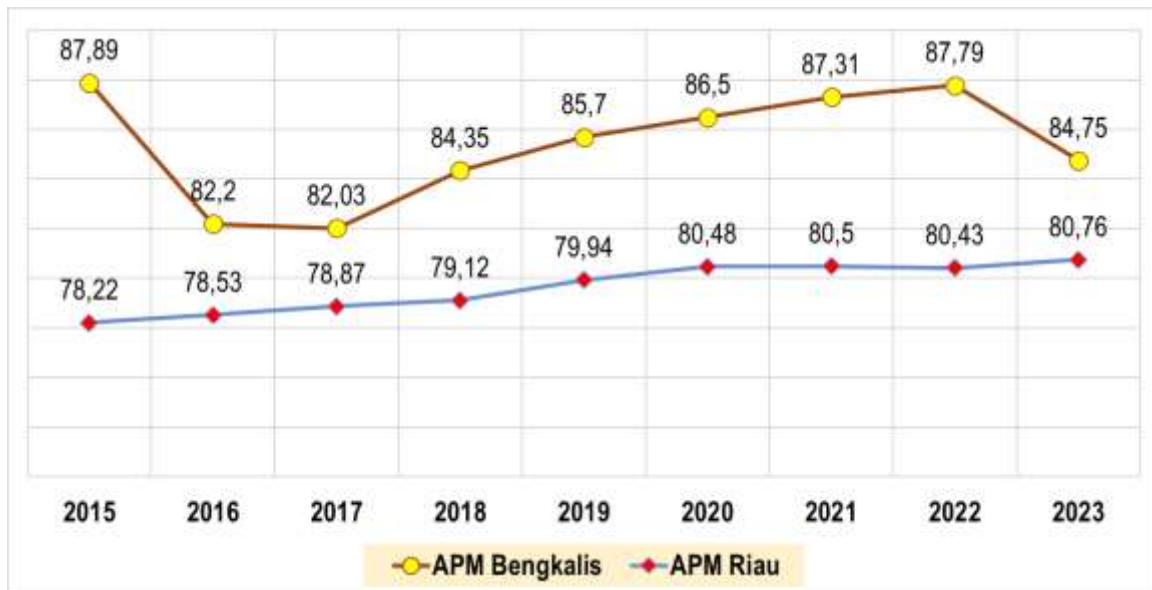
**Gambar II-54 Posisi Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

Grafik diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2023, terdapat variasi nilai APM setiap tahunnya. Secara keseluruhan, APM SD/MI di Kabupaten Bengkalis menunjukkan trend yang cenderung berfluktuasi 2015 sampai dengan 2019, sedangkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat dengan nilai di atas 97 setiap tahunnya. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan APM SD/MI sebesar 99,15, yang berarti pada tahun 2023 penduduk usia sekolah 7-12 yang bersekolah pada tingkat SD/MI adalah sebesar 99,15 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik.

Yang cukup menarik capaian APM SD/MI pada tahun 2020, meskipun terjadi pandemi COVID-19, nilai APM tetap relatif tinggi yakni sebesar 98,06%. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan partisipasi peserta didik tetap tinggi meskipun adanya tantangan. Meskipun nilai APM cukup tinggi, namun penting untuk terus memantau dan menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi partisipasi peserta didik di masa depan, terutama mengingat dinamika perubahan kondisi sosial dan ekonomi, penambahan jumlah penduduk yang menuntut penambahan fasilitas

Hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Bengkalis adalah untuk terus memperbaiki kebijakan dan praktik pendidikan untuk memastikan partisipasi yang optimal dan kualitas pendidikan yang baik dengan penyebaran fasilitas pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia pendidik.

Capaian APM SD/MI Kabupaten Bengkalis, jika dibandingkan dengan Provinsi Riau, secara konsisten APM SD/MI Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau setiap tahunnya. Nilai tertinggi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mencapai 99,15, sementara nilai tertinggi Provinsi Riau pada tahun yang sama adalah 98,13. Hal ini menunjukkan pemerataan pendidikan SD/MI di Kabupaten Bengkalis diatas rata-rata di Provinsi Riau. Selanjutnya capaian APM SMP/MTs Kabupatean Bengkalis selama kurun waktu 2015-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-37 Posisi Capaian Angka Partisipasi Murni (APM ) SMP/MTs Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

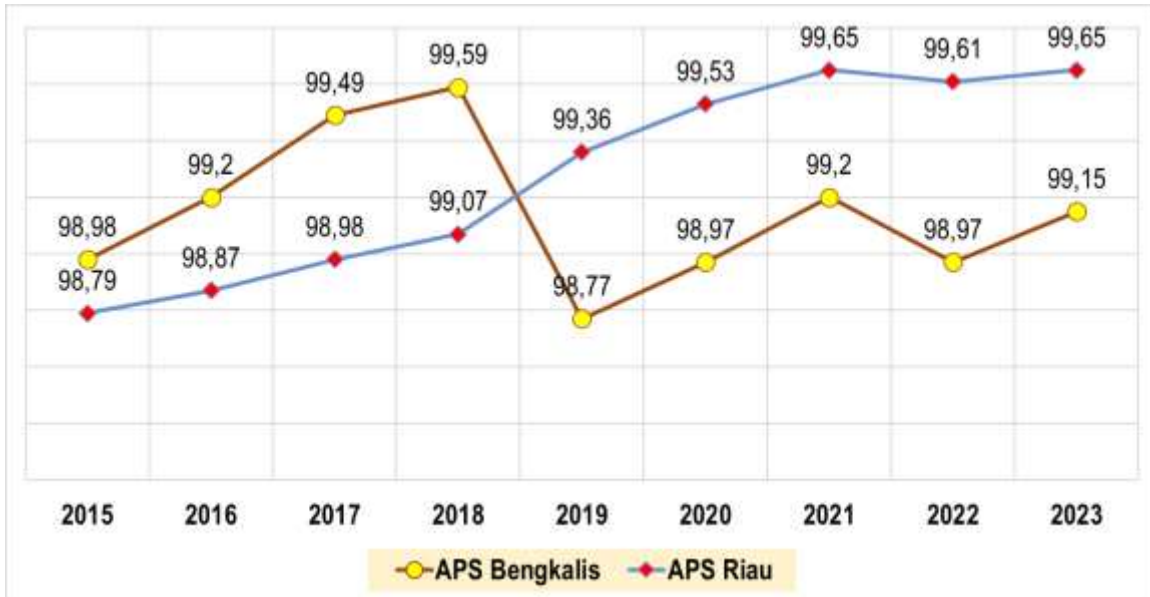


Data pada grafik diatas memperlihatkan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu tahun 2015-2023 mengalami fluktuasi selama periode tersebut, tetapi secara umum mengalami peningkatan rata-rata sekitar 0.9 persentase pada kurun waktu 2015-2022. Ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bengkalis. Artinya terjadi peningkatan anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs. Namun turun pada tahun 2023 menjadi 84,75 persen anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs. Artinya pada tahun tersebut anak usia 13-15 tahun yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs adalah sebesar 84,75 persen atau dengan kata lain masih terdapat 15,25 persen yang tidak melanjutkan studi atau studi di tempat lain diluar Kabupaten Bengkalis.

Sama halnya dengan APM SMP/MTs Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu yang sama secara keseluruhan APM SMP/Mts Provinsi Riau memiliki kecenderungan yang meningkat dengan sedikit menurun pada tahun 2022 dan sedikit meningat pada tahun 2023. Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Bengkalis selama periode yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan capaian APM SMP/MTs Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat parrtispasi siswa tingkat SMP/MTs Kabupaten Bengkalis lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

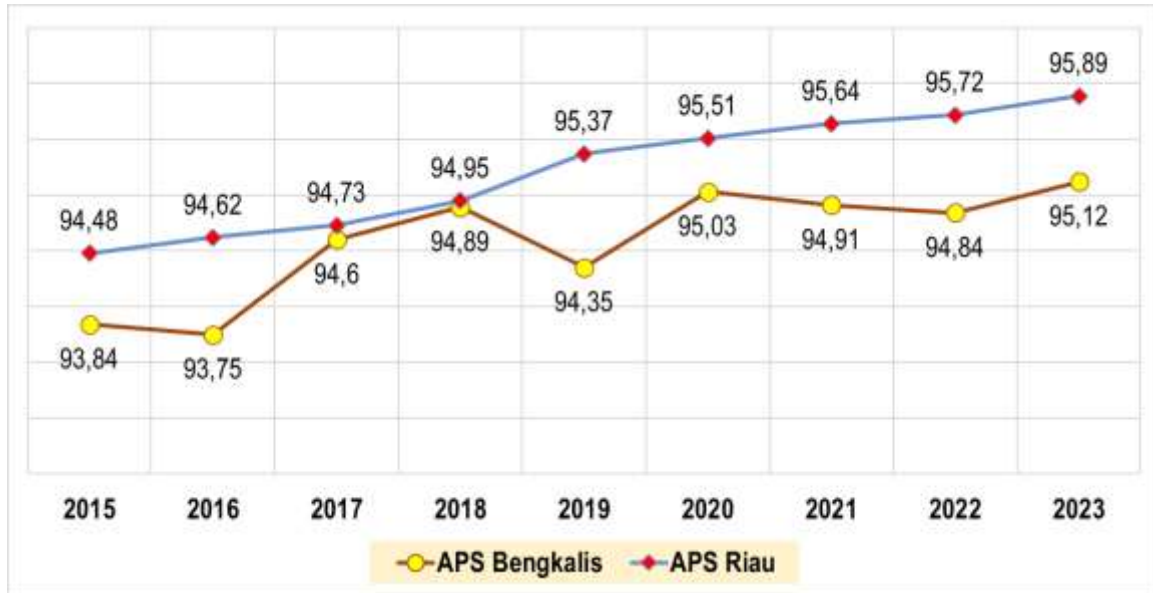
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS 7-12 Kabupaten Bengkalis 2015-2023 seperti terlihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-38 Posisi Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS ) 7 – 12 Tahun Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

Data pada grafik di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 Angka Partisipasi Sekolah 7 -12 tahun Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi dari 98,98 persen pada tahun 2015 menjadi 99,15 persen pada tahun 2023. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu 2015-2023 anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di berbagai lembaga pendidikan meningkat sebesar 0,17 persen. Jika dicermati lebih lanjut pada tahun 2023 masih terdapat anak usia sekolah 7-12 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 0,85 persen. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena penduduk umur 7-12 tahun masih dalam usia wajib belajar 9 tahun. Sementara itu APS 7-12 tahun Provinsi Riau selama kurun waktu yang sama memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari 98,79 menjadi 99,65 atau meningkat sebesar 0,86 persen. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 berada APS 7-12 Provinsi Riau berada di atas APS Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya APS 13-15 tahun Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik yang disajikan sebagai berikut:



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-39 Posisi Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau Tahun 2015-2023**

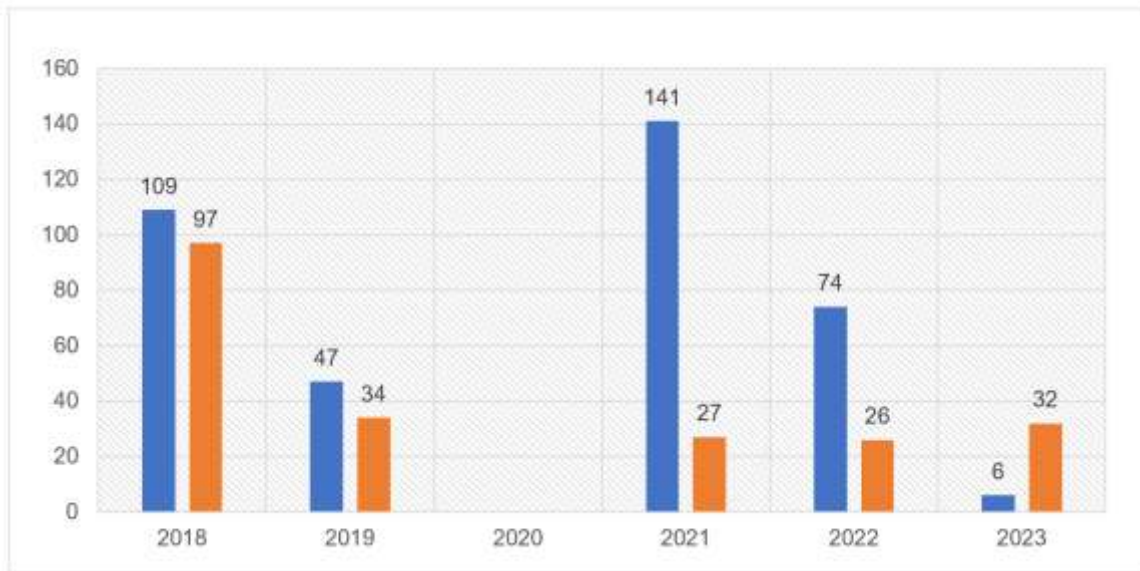
Merujuk pada grafik yang disajikan di atas terlihat bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari 93,84 pada tahun 2015 menjadi 95,12 pada tahun 2023. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2023 anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di berbagai lembaga pendidikan meningkat sebesar 1,28 persen. Kondisi yang demikian ini, berarti bahwa tahun 2023 masih terdapat anak usia sekolah 13-15 tahun yang tidak bersekolah sebesar 4,88 persen. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat usia 13-15 tahun termasuk kelompok umur yang menjadi sasaran wajib belajar 9 tahun.

Jika dibandingkan dengan APS 13-15 tahun Provinsi Riau selama kurun waktu yang sama, capaian APS 13-15 tahun Kabupaten Bengkalis berada dibawah rata-rata APS 13-15 tahun Provinsi Riau.

d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 109, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 97. Besarnya angka putus sekolah pada tahun 2018 ini ditenggarai akses terhadap pendidikan yang belum optimal, terutama dalam hal pemberian bantuan pendidikan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi siswa putus sekolah di Kabupaten Bengkalis. Kemudian

pada tahun tahun berikutnya kembali meningkat dan akhirnya pada tahun 2023 Pada jenjang pendidikan SD/MI berjumlah 6 dan jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 32:



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis, 2024

#### Gambar II-40 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bengkalis 2018-2023

Besaran angka putus sekolah baik pada jejang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs patut menjadi perhatian, karena jenjang pendidikan tersebut merupakan pendidikan dasar, yang menjadi bagian dari kebijakan wajib belajar 9 tahun, yang mesti mendapat prioritas untuk di tangani.

#### e) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 menuju tahun 2020, untuk rasio guru/murid SD/MI mengalami peningkatan dari 623 menjadi 670, turun pada tahun 2021 menjadi 665, naik kembali pada tahun 2022 menjadi 680 dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 679. Adapun rasio Guru/Murid SMP/MTS juga mengalami peningkatan menjadi 873 pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 858. Peningkatan rasio ini menggambarkan bahwa ada lebih banyak murid pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang menjadi beban kerja guru.

Tabel II-39 Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Murid SD/MI	80.157	81.573	81.090	79.359	79.346	80.288
2	Jumlah Guru	4.996	5.253	5.432	5.274	5.393	5.450

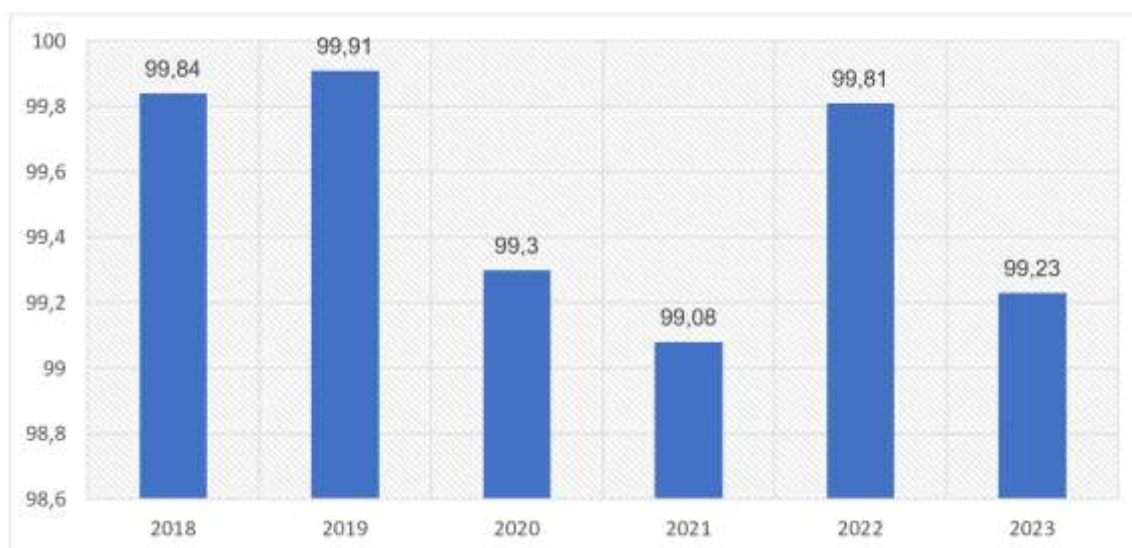
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio per 10.000	623	644	670	665	680	679
4	Jumlah Murid SMP/MTS	36.271	35.772	35.864	35.487	35.124	35.298
5	Jumlah Guru SMP/MTS	2.806	2.894	2.941	2.870	3.015	3.083
6	Rasio per 10.000	774	809	820	809	858	873
7	Jumlah Murid SMA/SMK/MA	29.865	31.067	35.569	32.197	31.340	28.816
8	Jumlah Guru SMA/SMK/MA	2.507	2.549	2.748	2.636	2.815	2.902
9	Rasio per 10.000	839	820	773	819	898	1.007

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SLTA mengalami peningkatan dari 839 pada tahun 2018, menjadi 1.007 pada tahun 2023. Peningkatan rasio ini disebabkan jumlah guru meningkat namun jumlah murid SMA/SMK/MA berkurang pada tahun 2023.

f) Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.



Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

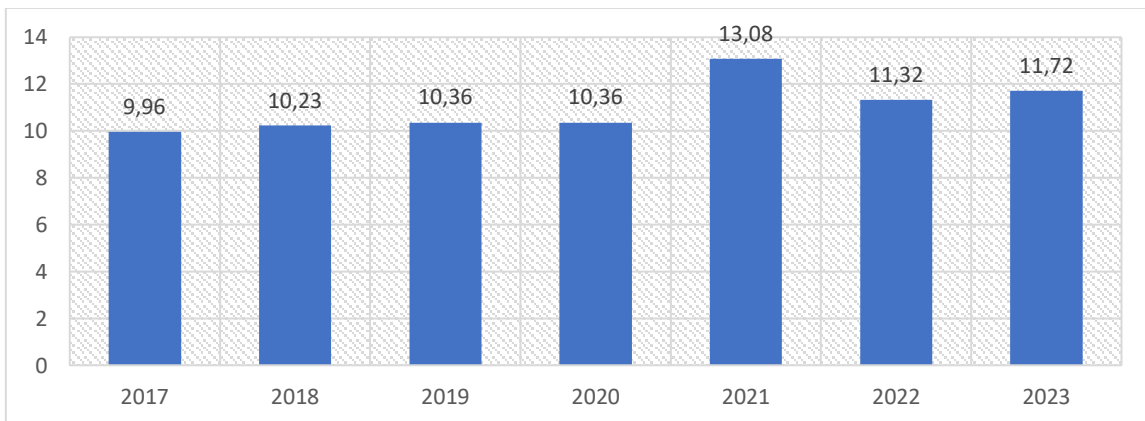
**Gambar II-55 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas meningkat pada tahun 2022 yaitu 99,81% yang sebelumnya hanya berkisar 99,08% pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 99,23%. Penduduk kelompok usia 15-49 tahun di Kabupaten Bengkalis telah sepenuhnya melek huruf, hanya saja penduduk pada kelompok umur 50

tahun keatas hanya 96,95% pada tahun 2023. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai 100%.

g) Proporsi Penduduk Ber Umur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1-S3. Semakin tinggi proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Perkembangan penduduk ber umur 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebesar 9,96%, naik hingga tahun 2021 menjadi 13,08%, kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 11,32% dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 11,72%.



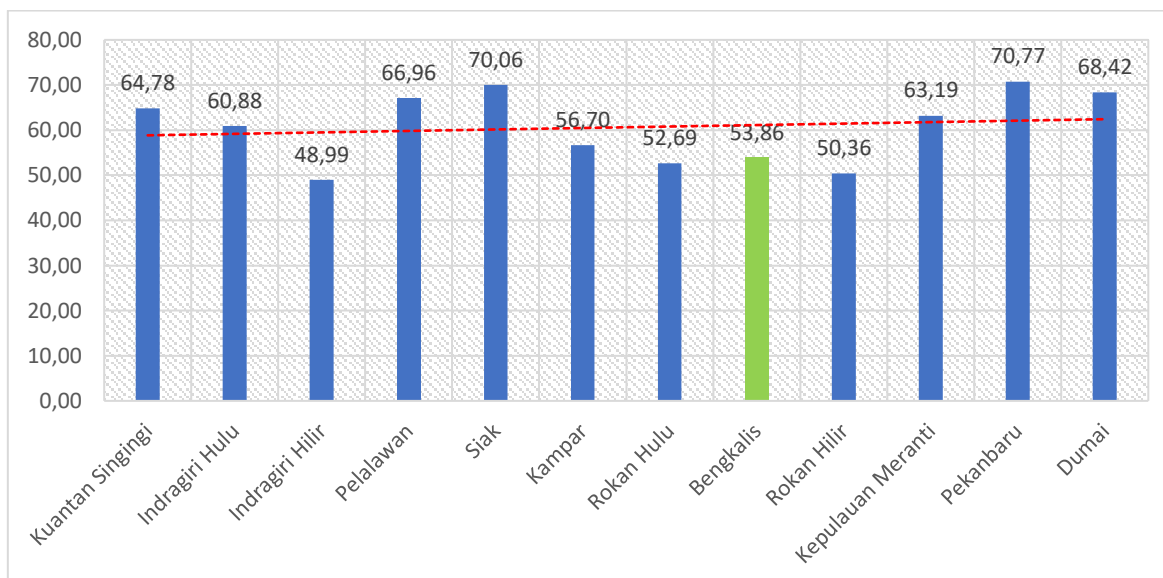
Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-56 Proporsi Penduduk Ber Umur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023**

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam meningkatkan literasi masyarakat. Indeks ini terdiri dari 7 dimensi pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah

perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-57** Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Pencapaian nilai IPLM Kabupaten Bengkalis sebesar 53,86, berada pada peringkat ke empat terendah setelah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini disebabkan masih lemahnya dimensi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan sehingga membuat capaian IPLM Kabupaten Bengkalis masih dibawah 8 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau.

### 2.3.2.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Perkembangan indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2018-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan pada berbagai aspek. Meskipun secara umum indikator kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup

baik, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian serius untuk perbaikan lebih lanjut.

Salah satu indikator yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018, AKB tercatat sebesar 4,5 dan mengalami peningkatan menjadi 6,14 pada tahun 2023. Peningkatan ini juga tercermin dalam jumlah kematian bayi yang meningkat dari 48 kasus pada tahun 2018 menjadi 60 kasus pada tahun 2023. Indikator lain yang menunjukkan peningkatan yang perlu diperhatikan adalah Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, yang meningkat dari 4,6 pada tahun 2018 menjadi 5,4 pada tahun 2023. Selain itu, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup juga mengalami peningkatan dari 3,9 pada tahun 2018 menjadi 5,7 pada tahun 2023.

Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 mengalami penurunan dari 90% pada tahun 2018 menjadi 88,85% pada tahun 2023. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani juga mengalami penurunan drastis dari 21% pada tahun 2018 menjadi hanya 3% pada tahun 2023. Penurunan cakupan pelayanan ini turut berkontribusi pada peningkatan angka kematian bayi dan balita.

Indikator imunisasi juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi menurun dari 94% pada tahun 2018 menjadi 85,43% pada tahun 2023. Penurunan cakupan imunisasi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan peningkatan cakupan imunisasi di masa mendatang.

Penanganan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan diare juga menunjukkan penurunan dalam cakupannya. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menurun dari 93% pada tahun 2018 menjadi 68% pada tahun 2023. Demikian pula, cakupan penanganan penderita diare mengalami penurunan drastis dari 44% pada tahun 2018 menjadi hanya 12,69% pada tahun 2023. Penurunan dalam cakupan penanganan penyakit menular ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelayanan kesehatan yang perlu segera diatasi.

Selanjutnya perkembangan penyakit tidak menular di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2018-2023. Salah satu penyakit yang mengalami peningkatan adalah diabetes melitus, di mana jumlah kasus yang dilayani meningkat dari 684 pada tahun 2018 menjadi 14.543 pada tahun 2023. Peningkatan



serupa juga terjadi pada kasus hipertensi, dengan jumlah kasus yang dilayani naik dari 32.236 pada tahun 2018 menjadi 55.112 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah kasus catastrophic, yaitu penyakit yang menimbulkan beban berat pada sistem kesehatan, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker, juga mengalami tren peningkatan. Jumlah kasus penyakit jantung yang dilayani meningkat dari 121 kasus pada tahun 2018 menjadi 480 kasus pada tahun 2023, sementara kasus stroke melonjak dari 148 kasus pada tahun 2018 menjadi 533 kasus pada tahun 2023. Di sisi lain, meskipun jumlah kasus kanker sedikit menurun dari 66 kasus pada tahun 2018 menjadi 65 kasus pada tahun 2023, ancaman penyakit ini tetap menjadi perhatian serius. Menghadapi tren peningkatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Salah satu upaya utama adalah melakukan skrining pada usia produktif untuk mendeteksi penyakit secara lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengadakan skrining IVA test sebagai langkah pencegahan terhadap kanker serviks pada wanita. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat menekan laju peningkatan penyakit tidak menular di Kabupaten Bengkalis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien masyarakat miskin juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, cakupan ini tercatat sebesar 60%, namun menurun drastis menjadi 11,76% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, yang perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terpadu dari seluruh stakeholders terkait untuk mengatasi permasalahan urusan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2023, yaitu:

**Tabel II-40 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

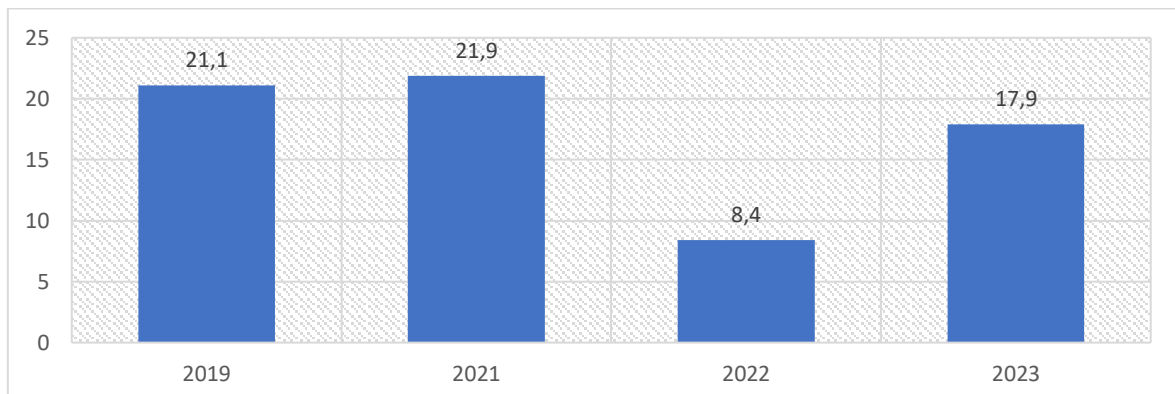
No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,5	4,2	4	4,6	6	6,14
2	Jumlah Kematian bayi	48	45	42	51	60	60
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	116	131	201	189	102	102,38
4	Jumlah Kematian Ibu	12	14	21	20	10	10
5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	90%	84%	77%	97,7%	83,75%	88,85%
6	Cakupan Pelayanan Nifas	86%	78%	75%	86,5%	75,00%	75,03%

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	21%	60%	14%	11,16 %	3,5%	3%
8	Angka Kelangsungan Hidup	1-4,5	1-4,2	1-4,0	Na	Na	1-4,0
9	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	4,6	4,4	4,1	5,1	6,1	5,4
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3,9	3,7	3,6	4,7	5,7	5,7
11	Rasio Posyandu Per 100 Balita	0,7	0,8	1,1	Na	0,89	0,89
12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	4	4	0,16	0,17	0,16	Na
13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1	1	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Rasio dokter per 1000 penduduk	50,2	22,3	66,8	0,51	0,5	0,53
15	Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	50,2	22,3	66,8	3,74	3,68	0,492
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73%	72%	61,30 %	71,4%	73,01%	73,01%
17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86%	81%	79%	92,4%	82,2	79,1
18	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	85%	78%	76,1%	90,1%	80,4%	82,81%
19	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	94%	87%	49%	96%	98%	92,5%
20	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	94%	90%	Na	Na	81,78%	85,43%
21	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	69%	90%	69%		80,65%	80,65%
22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	100%	100%	100%	Na	Na	85,43%
24	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	1,5	0	Na	0	Na
25	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	93%	101%	28%	40,40 %	61,18%	68%
27	Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	114	142	121	115	100	191
28	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2,7	3,3	2,9
29	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	93,20 %	93,30 %	47,80 %	40,40 %	61,18%	68%
30	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	70%	27%	12%	90,08 %	90,03%	68,055
31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Penderita Diare yang di Tangani	44%	32%	10%	88,60 %	12,69%	12,69%
33	Jumlah Kejadian Malaria	3	31	11	0	3	4
34	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0	0
35	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100%	100%	100%	Na	Na	Na

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Na	Na	60%	14,38 %	0,17%	11,76%
38	Cakupan Kunjungan Bayi	89,90 %	85,20 %	81,60 %	97%	87%	81,6%
39	Cakupan Puskesmas	164%	164%	164%	Na	173%	173%
40	Cakupan Puskesmas Pembantu	36%	36%	36%	Na	39%	39%
41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	65%	65%	23%	51	81%	77%
42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Na	Na	5%	Na	Na	Na
43	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	12%	Na	40%	Na	134,53 %	134,53 %
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	33%	Na	60%	50,87 %	31,87%	60%
45	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	100%	100%	100%	Na	Na	Na
46	Cakupan Desa Siaga Aktif	94,44 %	93,65 %	92,86 %	Na	87%	87,01%
47	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	100%	100%	100%	0%	100%
48	Jumlah Kasus Diabetes Melitus Yang Dilayani	684	8.932	11.388	11.325	9.928	14.543
49	Jumlah Kasus Hipertensi Yang Dilayani	32.236	96.126	32.641	55.142	75.962	55.112
50	Jumlah Kasus <i>Catastrophic</i> (Penyakit Jantung) Yang Dilayani	121	351	203	434	455	480
51	Jumlah Kasus <i>Catastrophic</i> (Penyakit Stroke) Yang Dilayani	148	574	251	484	508	533
53	Jumlah Kasus <i>Catastrophic</i> (Penyakit Kanker) Yang Dilayani	66	144	72	51	56	65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi pada kurun waktu 2019-2023. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 21,1%, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 21,9% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, prevalensi stunting turun signifikan menjadi 8,4%, dan naik kembali menjadi 17,0% pada tahun 2023. Berikut disajikan data perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019-2023, yaitu:

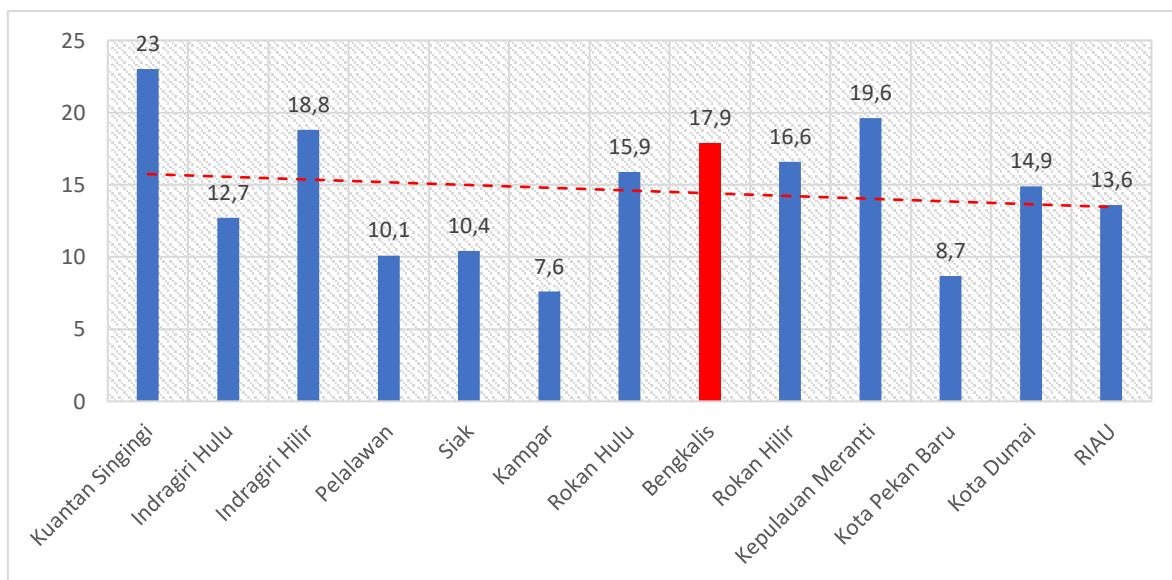


Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019-2023

**Gambar II-58 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023**

Tingginya angka stunting ini menempatkan Kabupaten Bengkalis di posisi keempat tertinggi di Provinsi Riau setelah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Upaya yang sudah dilakukan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bengkalis sudah mengacu pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI). Perpres ini mengamanatkan dua pendekatan utama dalam penanganan stunting, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk mengatasi penyebab langsung dari stunting, seperti kekurangan gizi kronis pada ibu hamil dan balita. Contoh konkret dari intervensi ini adalah pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet kepada ibu hamil, serta pemantauan ketat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Selain itu, dukungan untuk pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan dan penanganan segera terhadap kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita juga menjadi bagian dari intervensi spesifik yang sangat penting.



Sumber: Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia, 2023

**Gambar II-59 Prevalensi Stunting Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023**

Menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 merupakan hasil dari peningkatan efektivitas intervensi penurunan angka stunting di

Kabupaten Bengkalis. Namun, kenaikan kembali angka stunting pada tahun 2023 menandakan perlunya penguatan berkelanjutan dalam program-program tersebut.

Selain intervensi spesifik, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga berfokus pada intervensi sensitif yang menangani penyebab tidak langsung stunting. Ini mencakup peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih, pemberdayaan keluarga berisiko stunting, serta penguatan ketahanan pangan dan gizi. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyediaan akses sanitasi yang layak melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS).

Ke depan, pemerintah daerah akan fokus pada penguatan program-program intervensi spesifik yang ada, termasuk pemantauan yang lebih ketat dan sistematis terhadap ibu hamil dan balita untuk memastikan bahwa gizi mereka terpenuhi dengan baik. Selain itu, meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat intervensi sensitif, seperti peningkatan akses sanitasi dan air bersih serta pemberdayaan keluarga berisiko. Pemantauan dan evaluasi rutin akan kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021.

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis optimis dapat mengatasi tantangan stunting dan secara bertahap menurunkan prevalensinya, sehingga mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

Selanjutnya indikator kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebanyak 60 kejadian. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak ditemukan di Kecamatan bantan Mandau sebanyak 15 kematian bayi dan Kecamatan Bengkalis sebanyak 13 kematian bayi. Kecamatan lain yang memiliki paling sedikit kejadian kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun adalah kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara dengan jumlah kematian bayi sebanyak 1 kejadian.

**Tabel II-41 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Kematian Bayi
1	Bengkalis	13
2	Bantan	5
3	Bukit Batu	0
4	Bandar Laksmana	2
5	Siak Kecil	2

No	Kecamatan	Kematian Bayi
6	Bathin Solapan	8
7	Mandau	15
8	Pinggir	8
9	Talang Muandau	5
10	Rupat	1
11	Rupat Utara	1
Jumlah		60
AKB Per 1000 Kelahiran Hidup		6,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 6,14, hal ini berarti ada sekitar 6 kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Kecamatan Mancau mencapai 15 kematian bayi dan Kecamatan Bengkalis mencapai 13 kematian bayi pada tahun 2023. Jumlah ini diharapkan dapat terus berkurang hingga mencapai 0 dalam tahun-tahun ke depan.

**Tabel II-42 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1	Bengkalis	6	1.356	4,4	1-4,4
2	Bukit Batu	3	358	8,3	1-8,3
3	Bantan	9	861	10,4	1-10,4
4	Mandau	2	2.851	0,7	1-0,7
5	Rupat	3	666	4,5	1-4,5
6	Rupat Utara	5	254	19,7	1-19,7
7	Siak Kecil	5	424	11,8	1-11,8
8	Pinggir	1	1.505	0,7	1-0,7
9	Bandar Laksamana	3	297	10,1	1-10,1
10	Talang Muandau	1	454	2,2	1-2,2
11	Bathin Solapan	4	1.421	2,8	1-2,8
12	Kebupaten Bengkalis	42	10.447	4	1-4,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Angka Kelangsungan Hidup Bayi paling tinggi ditemukan di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau. Tingginya angka kelangsungan hidup bayi di kecamatan Mandau, Pinggir dan Talang Muandau ditenggarai karena lebih mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik beberapa kecamatan ini. Untuk kecamatan Rupert Utara yang memiliki angka kematian bayi paling tinggi membuatnya menjadi kecamatan dengan angka kelangsungan hidup bayi paling rendah di kabupaten Bengkalis.

**Tabel II-43 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Kematian Balita
1	Bengkalis	13
2	Bantan	5
3	Bukit Batu	2
4	Bandar Laksmana	1
5	Siak Kecil	0
6	Bathin Solapan	11
7	Mandau	8
8	Pinggir	5
9	Talang Muandau	3
10	Rupert	6
11	Rupert Utara	1
Jumlah		55
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup		5,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2023

Pada tahun 2023 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 5,54. Artinya terdapat sebanyak 5,57 balita yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Adapun Kecamatan dengan angka kematian balita tertinggi adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bathin Solapan.

**Tabel II-44 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Neonatal
1	Bengkalis	12
2	Bantan	3
3	Bukit Batu	0
4	Bandar Laksmana	2
5	Siak Kecil	2
6	Bathin Solapan	8
7	Mandau	15
8	Pinggir	8
9	Talang Muandau	5

10	Rupat	1
11	Rupat Utara	0
Jumlah		56
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup		5,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 berjumlah 5,57, yang berarti bahwa setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 5,57 bayi yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak ditemukan di Kecamatan Mandau sebanyak 15 kematian dan Kecamatan Bengkalis sebanyak 12 kematian. Untuk itu, pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel II-45 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup dalam kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu
1	Bengkalis	1381	3
2	Bantan	606	0
3	Bukit Batu	278	0
4	Bandar Laksmana	300	0
5	Siak Kecil	475	0
6	Bathin Solapan	1648	2
7	Mandau	2393	1
8	Pinggir	1274	3
9	Talang Muandau	523	0
10	Rupat	615	1
11	Rupat Utara	274	0
Jumlah		9767	10
AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup			102,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2024

Pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Bengkalis berjumlah 102 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 102 kematian setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis tahun 2023.

**Tabel II-46 Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Posyandu
1	Bengkalis	67
2	Bantan	45
3	Bukit Batu	25
4	Bandar Laksmana	18
5	Siak Kecil	34
6	Bathin Solapan	64



No	Kecamatan	Posyandu
7	Mandau	92
8	Pinggir	59
9	Talang Muandau	31
10	Rupat	63
11	Rupat Utara	20
Jumlah		518
Rasio Posyandu per 100.000 Balita		0,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2024

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 rasio posyandu per 100.000 balita sebesar 0,89, yang berarti setiap 100.000 balita terdapat setidaknya 1 posyandu yang melayani. Adapun jumlah posyandu terbanyak terdapat di Kecamatan Mandau mencapai 92 posyandu dan Kecamatan Bengkalis mencapai 67 posyandu pada tahun 2023.

**Tabel II-47 Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Kecamatan	Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk
Mandau	101	154.624	0,653
Pinggir	20	63.377	0,316
Bathin Solapan	22	95.769	0,23
Talang Muandau	5	24.770	0,202
Bukit Batu	10	22.697	0,441
Siak Kecil	12	25.554	0,47
Bandar Laksamana	10	16.783	0,596
Rupat	9	35.779	0,252
Rupat Utara	6	14.416	0,416
Bengkalis	67	85.825	0,781
Bantan	25	43.379	0,576
Kabupaten Bengkalis	287	582.973	0,492

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Jumlah tenaga medis di suatu daerah sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan daerah tersebut. Di Kabupaten Bengkalis, secara total terdapat 287 tenaga medis pada tahun 2023. Namun, jumlah tenaga medis ini tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Pada Kecamatan Mandau, jumlah tenaga medis mencapai 35,19% dari total tenaga medis di Kabupaten Bengkalis, sementara kecamatan lain seperti Kecamatan Talang Mandau hanya memiliki 5 tenaga medis dan Kecamatan Rupat Utara hanya memiliki 6 tenaga medis. Ketimpangan ini tentu saja dapat membuat beberapa daerah lebih terbelakang dalam pelayanan kesehatannya.

**Tabel II-48 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Bumil dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Jumlah Komplikasi Kebidanan
1	Bengkalis	123	315
2	Bantan	146	226
3	Bukit Batu	91	60
4	Bandar Laksmana	132	69
5	Siak Kecil	171	105
6	Bathin Solapan	352	610
7	Mandau	469	549
8	Pinggir	105	136
9	Talang Muandau	229	123
10	Rupat	149	328
11	Rupat Utara	0	173
Jumlah		1967	2694
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani			73,01

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Bengkalis yang ditangani tahun 2023 sebesar 73,01% dari total komplikasi kebidanan yang terjadi. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kecamatan Rupat Utara menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan, padahal penanganan komplikasi sangat berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan bayi. Lemahnya infrsaturuk kesehatan dan tenaga medis yang tidak memadai membuat pelayanan komplikasi kebidanan di Kecamatan Rupat Utara sangat terbatas sekali.

**Tabel II-49 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1	Bengkalis	1.358	1.636	83
2	Bukit Batu	354	416	85,1
3	Bantan	831	955	87
4	Mandau	2.851	3.435	83
5	Rupat	636	806	78,9
6	Rupat Utara	239	316	75,6
7	Siak Kecil	416	430	96,7
8	Pinggir	1.507	1.645	91,6

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
9	Bandar Laksamana	299	279	107,2
10	Talang Muandau	445	605	73,6
11	Bathin Solapan	1.422	2.570	55,3
Kabupaten Bengkalis		10.358	13.093	79,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023 mencapai 79,1%. Capaian ini terbilang sudah cukup baik dan sudah merata antar kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis secara umum sudah cukup baik dan merata. Hal ini tentu saja didukung dengan program pemerintah satu desa satu bidan.

**Tabel II-50 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
1	Bengkalis	31	31	100
2	Bantan	23	23	100
3	Bukit Batu	10	10	100
4	Bandar Laksmana	7	6	85,71
5	Siak Kecil	17	17	100
6	Bathin Solapan	13	8	61,54
7	Mandau	11	2	18,18
8	Pinggir	10	7	70
9	Talang Muandau	9	7	77,78
10	Rupat	16	11	68,75
11	Rupat Utara	8	3	37,5
Jumlah		155	125	80,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sudah mencapai 80,65%. Dari 155 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah sebanyak 125 desa/kelurahan yang menjadi desa/kelurahan UCI. Hal ini berarti sudah sebagian besar desa/kelurahan mencapai imunisasi dasar dasar secara lengkap pada bayi keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada

semua bayi (dibawah 1 tahun). Yang perlu menjadi perhatian adalah, capaian di Kecamatan Mandau dan Rupert Utara yang lebih rendah dari Kecamatan lainnya.

**Tabel II-51 Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penderita Diare yang dilayani	Jumlah Target Penemuan Diare	Penderita Diare yang ditangani
1	Bengkalis	273	2458	11,11
2	Bantan	273	1228	22,24
3	Bukit Batu	99	611	16,21
4	Bandar Laksmana	91	498	18,26
5	Siak Kecil	143	742	19,26
6	Bathin Solapan	224	3011	7,44
7	Mandau	248	4467	5,55
8	Pinggir	396	2053	19,29
9	Talang Muandau	52	867	6
10	Rupert	347	1076	32,24
11	Rupert Utara	70	450	15,56
Jumlah		2216	17461	12,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Jumlah penderita diare yang ditangani di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 masih tergolong kecil yaitu hanya mencapai 12,69%, yang mana jumlah penderita diare yang dilayani hanya 2.216 orang sementara jumlah target penemuan diare di Kabupaten Bengkalis mencapai 17.461 kasus diare. Untuk itu harus menjadi perhatian bersama dalam penanganan penderita diare pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel II-52 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ 4 Tahun	1	1	2
2	5 - 14 Tahun	1	2	3
3	15 - 19 Tahun	3	0	3
4	20 - 24 Tahun	4	0	4
5	25 - 49 Tahun	32	8	40
6	≥ 50 Tahun	3	0	3
Jumlah Kasus HIV		44	11	55
Jumlah Penduduk		298.518	284.455	582.973
Prevalensi HIV/AIDS		0,015	0,004	0,009

Sumber: Diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sudah sangat rendah, yaitu 0,009% dari total penduduk. Penderita HIV/AIDS menurut jenis kelamin dan umur terbanyak adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan kelompok umur 25-49 tahun yaitu sebanyak 32 jiwa.

**Tabel II-53 Cakupan Kinjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	Cakupan Kunjungan Bayi
1	Bengkalis	1.346	1.680	80,1
2	Bukit Batu	348	445	78,2
3	Bantan	872	952	91,5
4	Mandau	2.564	3.324	77,1
5	Rupat	494	837	59
6	Rupat Utara	254	336	75,6
7	Siak Kecil	412	474	86,9
8	Pinggir	1.498	1.239	120,9
9	Bandar Laksamana	296	345	85,8
10	Talang Muandau	452	562	80,4
11	Bathin Solapan	1419	2.005	70,8
Kabupaten Bengkalis		9.955	12.199	81,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebesar 81,6% dari total bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Secara keseluruhan cakupan kunjungan bayi antar kecamatan sudah menunjukkan adanya pemerataan yang baik. Cakupan kunjungan bayi yang baik akan meningkatkan kesehatan bayi dan mengurangi resiko kesehatan yang mungkin terjadi pada bayi.

**Tabel II-54 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
1	Bengkalis	1.427	78,86
2	Bantan	595	63,32
3	Bukit Batu	324	69,03
4	Bandar Laksmana	295	86,46
5	Siak Kecil	465	89,41
6	Bathin Solapan	1.806	90,22
7	Mandau	2.886	90,77
8	Pinggir	1.265	89,7
9	Talang Muandau	428	71,28
10	Rupat	673	86,82
11	Rupat Utara	216	62,21
Jumlah		10.380	83,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mencapai 83,75%. Capaian ini sudah cukup baik dan merata di Kabupaten Bengkalis, menggambarkan bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan berkompeten sudah cukup baik.

**Tabel II-55 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Seluruh Kecamatan	Cakupan Puskesmas
Mandau	2	1	200%
Pinggir	1	1	100%
Bathin Solapan	3	1	300%
Talang Muandau	1	1	100%
Bukit Batu	1	1	100%
Siak Kecil	2	1	200%
Bandar Laksamana	1	1	100%
Rupat	2	1	200%
Rupat Utara	1	1	100%
Bengkalis	3	1	300%
Bantan	2	1	200%
Kabupaten Bengkalis	19	11	173%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, yaitu mencapai 173% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat, bahkan terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki Puskesmas lebih dari 2 unit, khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti halnya Puskesmas.

**Tabel II-56 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Kecamatan	Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa/Kel	Cakupan Puskesmas Pembantu
Mandau	3	11	27%
Pinggir	5	10	50%
Bathin Solapan	3	13	23%
Talang Muandau	3	9	33%
Bukit Batu	5	10	50%
Siak Kecil	4	17	24%
Bandar Laksamana	3	7	43%
Rupat	9	16	56%
Rupat Utara	5	8	63%
Bengkalis	12	31	39%
Bantan	8	23	35%
Kabupaten Bengkalis	60	155	39%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis sebesar 39% dari total kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 60 Puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bengkalis memiliki puskesmas pembantu paling banyak, yaitu berjumlah 12 unit puskesmas pembantu. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bengkalis adalah setiap kecamatan setidaknya terdapat 3 (tiga) unit Puskesmas Pembantu. Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan cukup tersedia.

**Tabel II-57 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
1	Bengkalis	1.171	1.727	67,79
2	Bantan	602	897	67,12
3	Bukit Batu	316	448	70,53
4	Bandar Laksamana	302	326	92,72
5	Siak Kecil	442	496	89,03
6	Bathin Solapan	1.705	1.911	89,23
7	Mandau	2.180	3.035	71,83

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
8	Pinggir	1.111	1.346	82,54
9	Talang Muandau	452	573	78,86
10	Rupat	335	740	45,28
11	Rupat Utara	261	331	78,75
Jumlah		8.877	11.831	75,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mencapai 75,03% dari total seluruh ibu nifas yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 50%, yaitu kecamatan Rupat. Sementara kecamatan lain capaiannya sudah berada di atas 50%.

**Tabel II-58 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 bulan Keluarga Miskin
1	Bengkalis	5	76	6,6
2	Bukit Batu	2	35	5,7
3	Bantan	7	59	11,8
4	Mandau	9	210	4,3
5	Rupat	0	10	0
6	Rupat Utara	4	65	6,2
7	Siak Kecil	0	16	0
8	Pinggir	11	278	3,9
9	Bandar Laksamana	0	10	0
10	Talang Muandau	5	86	5,8
11	Bathin Solapan	2	117	1,7
Kabupaten Bengkalis		46	962	4,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 baru berkisar di angka 4,8%. Saat ini baru 46 dari 962 orang anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapatkan MP-ASI. Bahkan pada kecamatan Rupat dan Siak Kecil belum ada pemberian MP-ASI terhadap anak berusia 6-24%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan karena MP-ASI sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemberian makanan



pendamping ASI bagi rumah tangga miskin sangat penting dalam melengkapi zat gizi ASI untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia.

**Tabel II-59 Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat per Kecamatan di Kabupten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik SD	Jumlah Peserta Didik SD mendapat Pelayanan Kesehatan	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
1	Bengkalis	1.560	1.970	126,28
2	Bantan	790	840	106,33
3	Bukit Batu	291	433	148,8
4	Bandar Laksmana	349	325	93,12
5	Siak Kecil	425	590	138,82
6	Bathin Solapan	2.184	2.305	105,54
7	Mandau	1.698	2.346	138,16
8	Pinggir	788	1.642	208,38
9	Talang Muandau	337	740	219,58
10	Rupat	439	763	173,8
11	Rupat Utara	270	330	122,22
Jumlah		9.131	12.284	134,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2023

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 baru mencapai 134,53%. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat tertinggi ditemukan di Kecamatan Talang Muandau, yaitu 219,58% dari total siswa SD dan setingkat.

**Tabel II-60 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin per Kecamatan di Kabupaten bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1	Bengkalis	15.022	37.872	39,67%
2	Bukit Batu	9.591	13.750	69,75%
3	Bantan	9.679	22.331	43,34%
4	Mandau	16.482	35.396	46,56%
5	Rupat	6.486	12.864	50,42%
6	Rupat Utara	14.898	12.364	120,49%
7	Siak Kecil	8.055	13.037	61,79%
8	Pinggir	13.191	18.237	72,33%
9	Bandar Laksamana	8.685	10.181	85,31%
10	Talang Muandau	3.702	10.877	34,04%
11	Bathin Solapan	20.941	19.310	108,45%

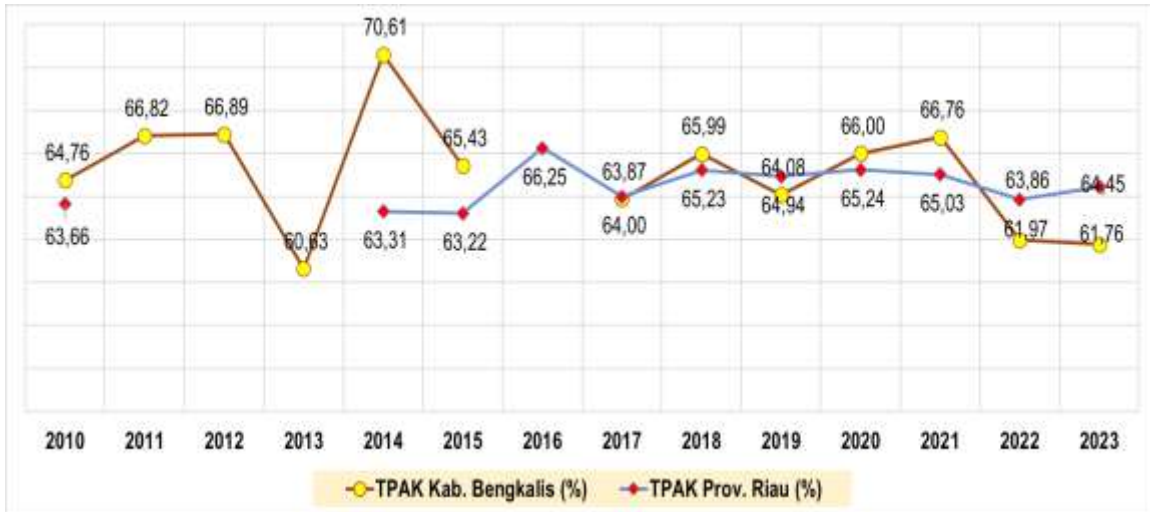
No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
	Kabupaten Bengkalis	126.372	210.325	60,08%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 baru mencapai 60% dari total 210.325 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pada beberapa kecamatan cakupan ini bahkan lebih rendah dari 50%. Seperti pada kecamatan Talang Muandau yang Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin baru mencapai 34% dari total masyarakat miskin

#### 2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Mengukur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi sangat penting dalam analisis kesejahteraan sosial. TPAK menjadi ukuran ketenagakerjaan untuk menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dari penduduk usia kerja. TPAK diukur di daerah untuk mengetahui persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting dalam kegiatan perekonomian karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi selama periode 2010-2023. Partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan. Pada tahun 2010 TPAK Kabupaten Bengkalis sebesar 64,76%, meningkat hingga tahun 2012 menjadi 66,89%, turun pada tahun 2013 menjadi 60,63% dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 70,61%, namun turun hingga 2017 menjadi 64%, kembali naik pada tahun 2018 menjadi 65,99% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 64,08%, selanjutnya meningkat hingga tahun 2021 menjadi 66,76% dan turun kembali menjadi 61,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dapat melibatkan tenaga kerja dalam perekonomian, bahkan mengalami penurunan yang drastis.



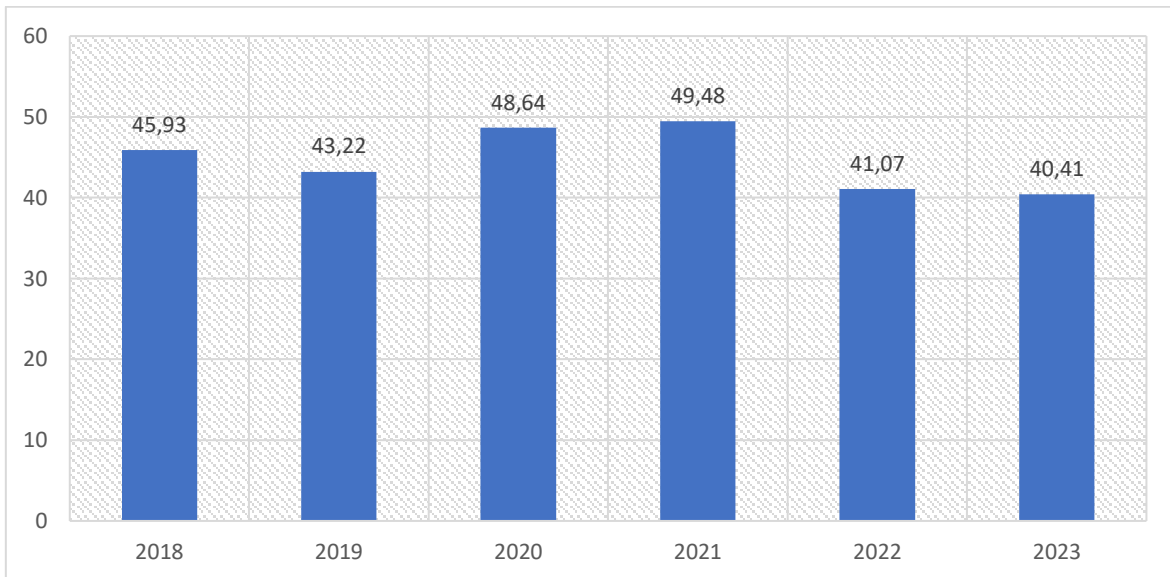
Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-60 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2023 (%)**

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis berada pada posisi terendah ketiga setelah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja termasuk rendah, namun tingkat kemiskinan tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Beberapa daerah terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dari Provinsi Riau, tetapi tingkat kemiskinan justru berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Riau, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu dan Pelalawan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang diperlukan dalam perekonomian dan juga merupakan faktor penting dalam mengerjakan pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah adalah perubahan struktur penduduk menurut usia, tingkat upah dan tingkat pendidikan. Peningkatan jumlah tenaga kerja disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja adalah posisi Kabupaten Bengkalis yang berada di daerah perbatasan telah terpengaruhi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari Malaysia pada saat pandemi Covid-19. Meskipun demikian ditemukan permasalahan bahwa para PMI ini bukan termasuk pekerja legal yang terdaftar sebagai penduduk bekerja.

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja

perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.



Sumber: BPS Riau, 2024

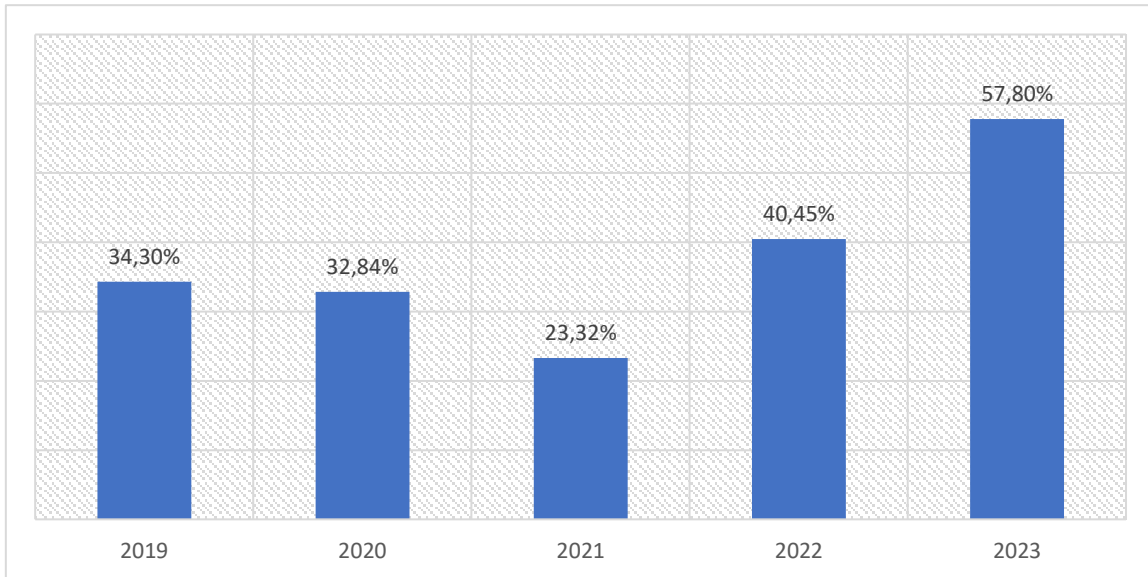
**Gambar II-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bengkalis (%) Tahun 2018-2023**

Perkembangan TPAK perempuan di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun dari 45,93% pada tahun 2018, turun menjadi 43,22% pada tahun 2019, selanjutnya meningkat hingga tahun 2021 menjadi 49,48%, namun kembali turun hingga tahun 2023 menjadi 40,41%.

#### 2.3.2.5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap penduduk bekerja. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan kabupaten Bengkalis menunjukkan trend peningkatan dari 34,30% pada tahun 2019, menjadi 23,32% pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 57,80% pada tahun 2023.



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, 2024 (Diolah)

**Gambar II-62 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023**

#### 2.3.2.6 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dari tahun ke tahun rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis terus berkurang. Hal ini ditenggarai karena semakin meningkatnya penduduk yang memasuki usia produktif, yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang positif. Dimana dengan semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa penduduk cenderung lebih sejahtera dan beban perekonomian berkurang. Hal ini dikarenakan penduduk yang berada pada usia produktif 15-64 tahun biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan dari penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

**Gambar II-63 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2010 dan 2023**

Kelompok Umur	2010	2023*
0-14	168.897	183.388

15-64	316.262	446.565
>64	13.176	28.893
Jumlah Penduduk	498.335	658.846
Rasio Ketergantungan (%)	57,57	47,54%

Ket:\* Data Disdukcapil Kabupaten Bengkalis

Sumber: BPS dan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis, 2024

Rasio ketergantungan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif terhadap penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan, dari 57,57% pada tahun 2010 dan 48,12% menjadi 47,54% tahun 2023. Hal ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung beban terhadap 47 orang penduduk tidak produktif. Penurunan rasio ketergantungan ini menandakan bahwa potensi tenaga kerja memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap daya saing ekonomi Kabupaten Bengkalis. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dalam perekonomian yang meningkat diakibatkan oleh kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat atau penduduk produktif yang bekerja semakin banyak sehingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tekanan pada sistem kesejahteraan sosial

### 2.3.2.7 Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan diukur melalui indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun. Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2018 berjumlah 260.546 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 berjumlah 38.371 orang. Indikator ini sejalan dengan jumlah orang populasi yang dilayani mengingat ketersediaan sarana prasarana yang cukup memadai. Penurunan rata-rata pengunjung perpustakaan disebabkan oleh perkembangan teknologi yang menyediakan kebutuhan literasi ditengah-tengah masyarakat pada era adaptasi hingga menjadi kebiasaan baru masyarakat. Lebih rinci dapat diperhatikan pada tabel berikut:

**Tabel II-61 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	260.546	296679	260.846	31.459	37.297	38.371
Jumlah orang populasi yang dilayani	260.546	296.679	260.846	31.459	37.297	38.372
Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	0	63,04	53,86

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2024

Selain persentase kunjungan perpustakaan, terdapat indikator lain dalam urusan perpustakaan, yaitu rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

**Tabel II-62 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 2017-2022**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	1.000	4.400	6.700	6.700	154.045	155.723

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2023

Untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebanyak 1000 koleksi judul buku, meningkat signifikan hingga mencapai 155.723 koleksi buku. Peningkatan jumlah koleksi buku mendorong terjadinya peningkatan kunjungan ke perpustakaan hingga tahun 2022.

**Tabel II-63 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan	134	145	186	295	295	460	460
2	Jumlah penduduk	559.081	544.144	553.938	593.397	624.231	646.715	658.846
3	Rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk	0,024	0,027	0,034	0,050	0,047	0,071	0,070

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2024

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan hanya sebanyak 134 unit saja, lalu mengalami peningkatan menjadi 145 unit pada tahun 2018 dan menjadi 186 unit pada tahun 2019. Jumlah pustaka kembali mengalami peningkatan menjadi 295 pustaka pada tahun 2020, dan terakhir pada tahun 2023 jumlah seluruh perpustakaan di Kabupaten Bengkalis menjadi 460 unit. Pertambahan jumlah pustaka ini menjadi faktor penting yang menyebabkan rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2023 rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk sebesar 0,070.

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.3.3.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Beberapa capaian indikator selama periode 2018-2023 menunjukkan perbaikan, meskipun dalam beberapa indikator masih perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembangunan infrastruktur jalan memperlihatkan ada sedikit kenaikan dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 38,48% dari total panjang jalan, mengalami fluktuasi peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 49,66%, namun turun pada tahun 2023 menjadi 39,81%.

Sementara itu, untuk rasio panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah, yaitu berada pada angka 0.0022 atau dalam rasio 1:44 pada tahun 2023. Hal ini berarti tiap satu km jalan berbading setidaknya 444 penduduk. Dalam enam tahun terakhir pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis relatif stagnan, hanya sedikit menunjukkan peningkatan dan belum menunjukkan perubahan berarti. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk belum diikuti oleh pembangunan jalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan peningkatan kemudahan akses penduduk dalam pemenuhan kebutuhan.

**Tabel II-64 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	451.679	461.270	476.116	527.030	623.867	522.416
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	35,93	35,77	37,04	Na	49,66	39,81
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0022	0,0022	0,0022	0,0029	0,0022	0,0022
4	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1:450	1:456	1:450	1:456	1:464	1:444
5	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	77,02	Na	Na	Na	Na	Na
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	78,47	87,79	89,67	90,34	86,99	Na
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	83,51	91,19	93,73	93,26	94,2	86,76
8	Ketaatan Terhadap RTRW	39,05	Na	Na	90	90	Na



No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Persentase pengamanan tebing/pantaidalam kondisi baik	8,8	Na	Na	Na	Na	Na
10	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	65,43	67,9	68,96	69,18	71,04	73,41
11	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	32,61	Na	100	100	100	Na
12	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	Na	Na	31,6	36,6	29,5	Na
13	Panjang infrastruktur pengaman daerahrawan longsor	Na	Na	Na	4,44	Na	Na
14	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	5	5	5	5	5	6
15	Persentase luas kawasan bebas banjir	Na	Na	Na	77,1	89,94	89,94
16	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Na	Na	89,67	75,08	61,08	Na
17	Persentase RT akses air bersih	Na	Na	35,2	85,31	60,53	Na

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2024

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarnya.

Indikator lain dalam urusan pekerjaan umum, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak terlihat sudah mengalami penurunan menjadi 86,76% pada tahun 2023, turun dari tahun 2022 yaitu 94,20%. Sementara itu persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 73,41% pada tahun 2023. Selain itu indikator Persentase luas kawasan bebas banjir tetap pada tahun 2022-2023 yaitu 89,94%.

### 2.3.3.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa indikator penting dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya adalah rasio rumah layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh serta cakupan lingkungan sehat dan aman didukung dengan PSU. Untuk rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2023 telah mencapai lebih dari 100,73%. Ini menunjukkan bahwa telah semua rumah yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah layak huni bagi penduduk. Sementara itu pada sisi lain lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 3,38% dari total permukiman penduduk. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit kawasan pemukiman yang kumuh di Kabupaten Bengkalis. Adapun rasio pemukiman layak huni sebesar 98,25%. Dengan demikian upaya pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat sudah sangat baik.

**Tabel II-65 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2023**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio rumah layak huni	96,59	100,67	97,79	97,85	99,51	100,73
2	Rasio pemukiman layak huni	Na	Na	Na	Na	98,16	98,25
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0,11	0,74	0,75	Na	Na	0,38
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	45,81	43,79	Na	Na	Na	44,06
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	na	0.002	4,4	16,72	3,67	3,38
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Na	Na	Na	Na	16,72	34,02
7	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	23,59	17,42	46,45	32,26	49,68	65,98
8	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Na	Na	Na	Na	20%	20%

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bengkalis, 2024

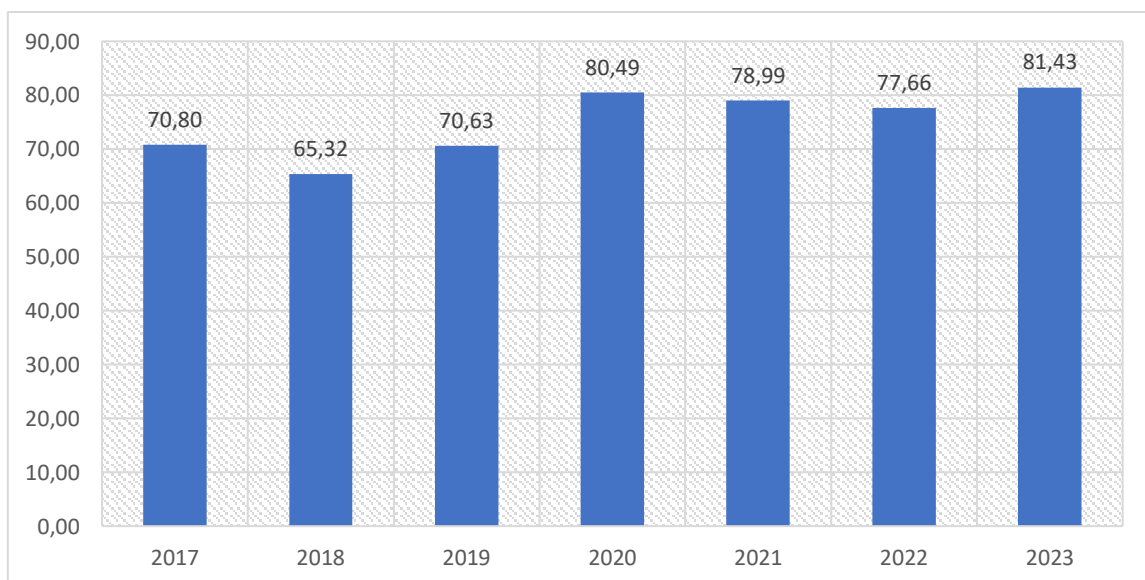
Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih maju jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pada tahun 2018 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai hanya sebesar 23,59% saja di kabupaten Bengkalis. Cakupan lingkungan aman

dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai sudah mencapai 65,98% pada tahun 2023. Ini berarti masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai. Hal ini jika tidak diperhatikan secara serius akan dapat menimbulkan lingkungan kumuh dan tidak sehat, yang berujung penyakit pada masyarakat.

Adapun persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3,38% pada tahun 2023, turun dari tahun 2022 yaitu 3,67%. Hal ini menunjukkan luasan lingkungan kumuh di Kabupaten Bengkalis semakin menurun.

Sedangkan persentase lingkungan kumuh di wilayah perkotaan sudah cukup berkurang menjadi 2,27%. Selain itu indikator penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi hanya 20%, artinya masih banyak sengketa tanah garapan melalui mediasi yang belum terselesaikan dengan baik.

Indikator lainnya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Indikator ini, dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memperhitungkan empat kriteria utama, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, serta ketahanan bangunan. Kriteria-kriteria tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hunian yang tersedia bagi masyarakat tidak hanya memenuhi standar fisik yang layak, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik melalui kepemilikan maupun penyewaan dengan harga yang terjangkau.



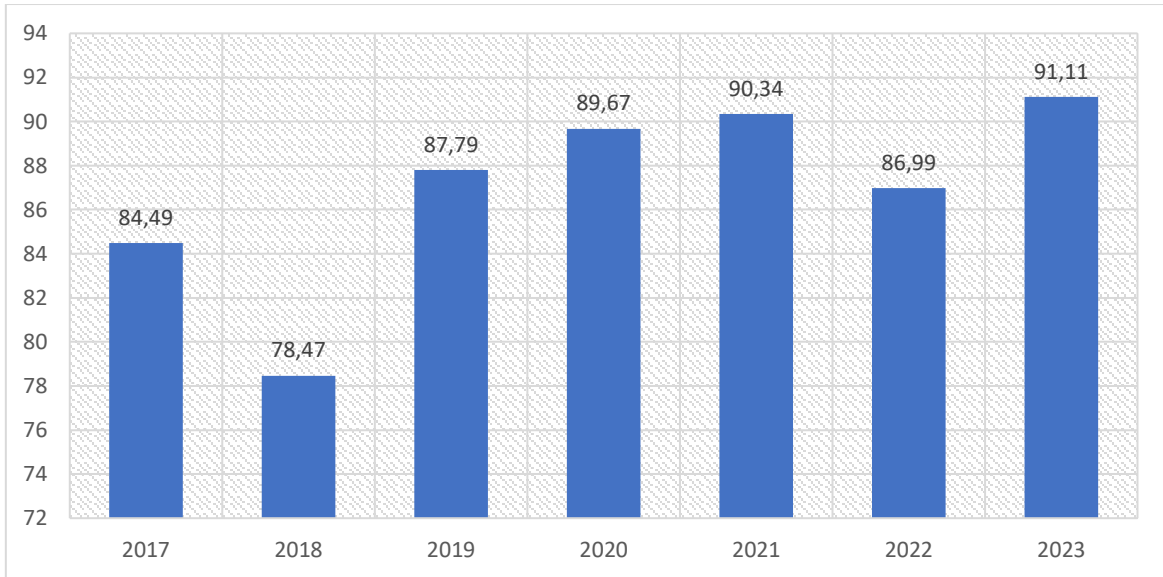
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

**Gambar II-64 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023**

Berdasarkan data BPS, capaian Kabupaten Bengkalis terhadap indikator hunian layak dan terjangkau mengalami beberapa perubahan signifikan selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2017, capaian indikator ini berada di angka 70,80%, yang kemudian menurun menjadi 65,32% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, terjadi peningkatan kembali menjadi 70,63%. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap hunian yang layak, baik melalui pembangunan infrastruktur perumahan baru maupun melalui peningkatan akses terhadap fasilitas dasar seperti air minum dan sanitasi. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2020, ketika capaian indikator menjadi 80,49%. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, yang didorong oleh program-program perumahan dan kebijakan sosial yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun, pada tahun 2021, capaian indikator ini sedikit menurun menjadi 78,99%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2022 menjadi 77,66%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang konsisten dari pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap hunian layak, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah keberlanjutan program perumahan, perubahan demografis, serta dampak ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

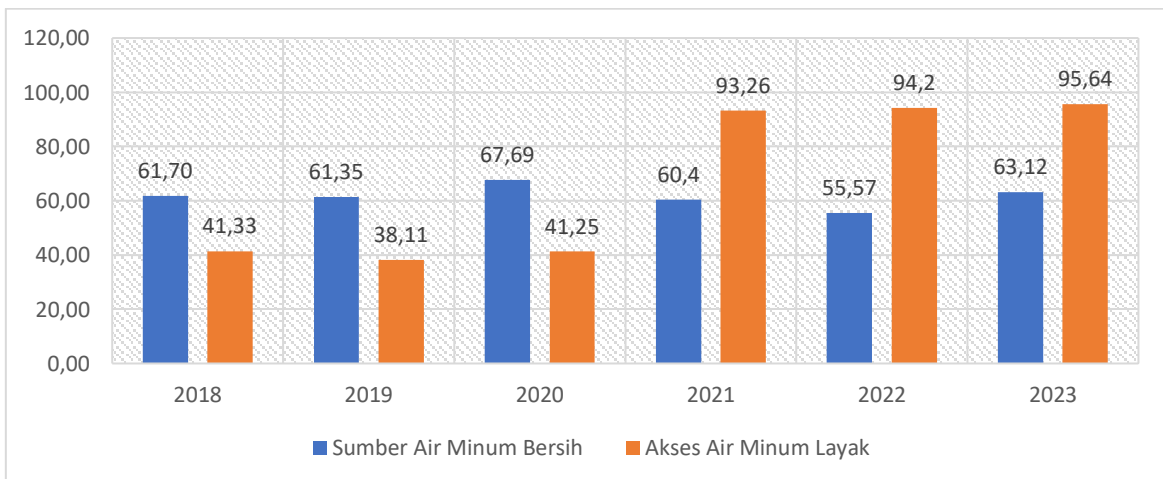
Selanjutnya, pada tahun 2023, capaian indikator ini kembali meningkat mencapai 81,43%, yang merupakan capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Peningkatan menunjukkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-65 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2023**

Sedangkan pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebesar 84,49%, turun menjadi 78,47%, kemudian meningkat hingga tahun 2021 menjadi 90,34%, namun turun menjadi 86,99% pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 91,11%.



Sumber: BPS Riau, 2024

**Gambar II-66 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Indikator lainnya adalah persentase rumah tangga menurut sumber air minum bersih, dan sumber air minum layak di Kabupaten Bengkalis menunjukkan pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih adalah 61,70%, sementara yang memiliki akses air minum layak sebesar 41,33%. Pada tahun berikutnya,

terjadi sedikit penurunan dalam persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih menjadi 61,35%, dan akses air minum layak juga turun menjadi 38,11%. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih meningkat menjadi 67,69%, namun akses air minum layak hanya naik sedikit menjadi 41,25%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana persentase rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat signifikan menjadi 93,26%, meskipun persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih sedikit menurun menjadi 60,4%. Tren peningkatan akses air minum layak berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing mencapai 94,2% dan 95,64%, sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih berada pada angka 55,57% di tahun 2022 dan kembali naik menjadi 63,12% pada tahun 2023.

Selanjutnya layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bengkalis melalui program Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS) dan program non PANSIMAS seperti PDAM, sumur bor instalasi mandiri, program penyediaan air minum dan sanitasi serta lainnya. Berikut disajikan data layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, yaitu:

**Tabel II-66 Layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Keterangan	PANSIMAS	Non PANSIMAS	Belum Akses
Jumlah Penduduk yang Terlayani	49.193	329.504	172.266
Jumlah KK yang Terlayani	12.803	87.161	48.009
Persentase (%)	17,71%	51,49%	30,80%
Berfungsi	148	5	-
Tidak Berfungsi	66	-	-

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bengkalis, 2024

Data diatas menggambarkan layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 menunjukkan pada layanan SPAM dalam bentuk PANSIMAS, sebanyak 49.193 penduduk yang tersebar di 12.803 Kepala Keluarga (KK) telah terlayani, yang setara dengan 17,71% dari total penduduk yang terlayani. Dari infrastruktur yang ada, 148 unit masih berfungsi, sementara 66 unit lainnya tidak berfungsi.

Sementara itu, layanan SPAM dalam bentuk Non PANSIMAS, sebanyak 329.504 penduduk atau 87.161 KK mendapatkan akses air bersih, yang mencakup 51,49% dari total populasi yang terlayani. Namun, di sini hanya terdapat 5 unit infrastruktur yang masih berfungsi.

Sebaliknya, masih ada 172.266 penduduk atau 48.009 KK yang belum memiliki akses terhadap layanan SPAM di Kabupaten Bengkalis, yang mewakili 30,80% dari populasi total. Kelompok ini belum mendapatkan intervensi baik dari layanan SPMA PAMSIMAS maupun Non PAMSIMAS.

**Tabel II-67 Kapasitas dan Produksi Air SPAM di Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

Keterangan	Nilai
Kapasitas Intake Terpasang (L/det)	650
Kapasitas IPA Terpasang (L/det)	375
Produksi Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	2.328.930
Distribusi Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	2.221.378
Air Terjual (M <sup>3</sup> /Tahun)	1.831.037

Sumber: Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, 2024

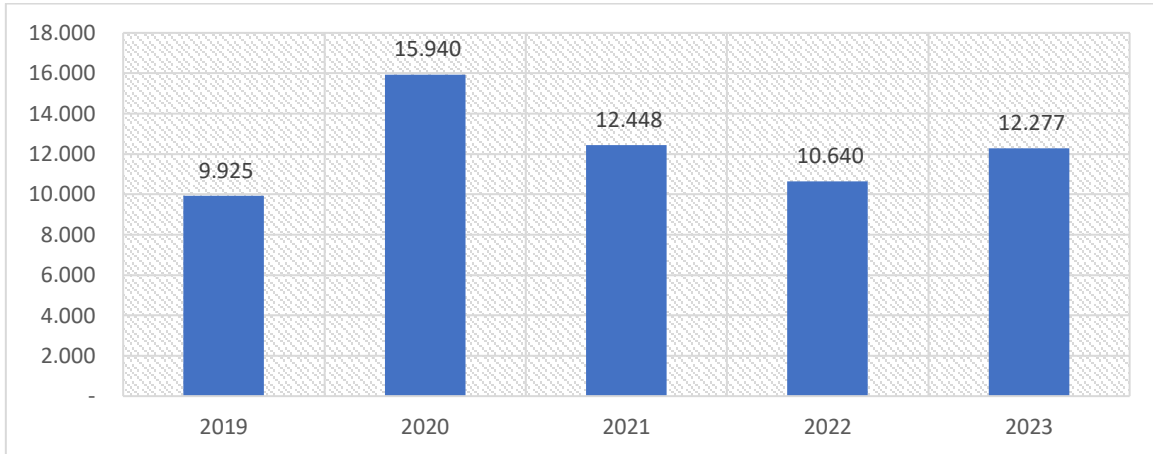
Selanjutnya kapasitas dan produksi SPAM di Perumda Tirta Siak menunjukkan kapasitas intake terpasang sebesar 650 liter per detik menunjukkan bahwa Perumda Tirta Terubuk memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menarik air baku dari sumber-sumbernya. Adapun Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) terpasang yang mencapai 375 liter per detik mengindikasikan bahwa sebagian besar air baku yang diambil dapat diolah menjadi air bersih yang layak konsumsi. Ini berarti Perumda Tirta Terubuk dapat mengolah sekitar 57,7% dari total air baku yang diambil melalui intake, menunjukkan efisiensi yang baik dalam proses pengolahan air.

Produksi air tahunan yang mencapai 2.328.930 meter kubik menunjukkan volume signifikan air yang berhasil diolah dari sumber-sumber baku tersebut. Namun, distribusi air yang hanya mencapai 2.221.378 meter kubik, dan penjualan air sebesar 1.831.037 meter kubik mengindikasikan adanya disparitas antara volume produksi dan penjualan. Disparitas ini disebabkan oleh tekanan air yang belum merata dan kondisi pipa JDU (Jaringan Distribusi Utama) yang memerlukan peremajaan. Akibatnya, terjadi kehilangan air selama proses distribusi serta kendala lain dalam sistem distribusi yang menghambat penyaluran air secara optimal kepada konsumen.

### 2.3.3.3 Perhubungan

Perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Bengkalis dapat diukur dengan indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 telah dilakukan uji kir sebanyak 9.925 kali, meningkat pada tahun 2020 menjadi 15.940 kali, namun hingga tahun 2022 uji kir

mengalami penurunan menjadi 10.640 kali dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 12.277 kali uji kir.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-67 Perkembangan Jumlah Uji KIR di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023**

Selain melakukan uji kir angkutan umum, masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi ukuran kinerja dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-68 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2.640	2.846	2.850	2.984	2.740	3.726
Rasio Izin Trayek	0,00041%	0,00050%	0,00040%	0,00060%	0,00080%	0,00050%
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum			4.167	3.528	3.675	4.203
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	6	6	6	6	6	6
Persentase Layanan Angkutan Darat	0,075%	0,083%	0,089%	0,094%	0,079%	0,098%
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum			26,14 %	28,34 %	34,54 %	34,23 %
Pemasangan Rambu-rambu	5.684	5.684	5.684	5.799	6.040	6.040
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan						
Jumlah Orang/Barang	4.488	4.838	4.845	6.334	6.435	6.707



Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
yang Terangkut Angkutan Umum						
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Pertahun	242.764	205.504	27.618	41.557	148.523	174.853

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2024

Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2018 sebesar 2.640, menjadi 3.726 pada tahun 2023. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2018 sebesar 4.488, menjadi 6.707 pada tahun 2023. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun pada tahun 2018 sebesar 242.764, menjadi 27.618 pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak covid-19, namun kembali naik hingga tahun 2023 menjadi 174.853. Sementara itu rasio izin trayek pada tahun 2018 sebesar 0,00041%, menjadi 0,00050% pada tahun 2023. Adapun jumlah persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 34,23%. Selain itu jumlah pelabuhan laut/ udara/terminal bis hingga tahun 2023 berjumlah 6. Persentase layanan angkutan darat pada tahun 2018 sebesar 0,075%, menjadi 0,098% pada tahun 2023. Dan pemasangan rambu-rambu pada tahun 2018 sebesar 5.684, menjadi 6.040 pada tahun 2023.

#### 2.3.3.4 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet dan cakupan layanan telekomunikasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-69 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2023**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi desa/kelurahan	76,12%	80,00%	96,32%	Na	Na	Na
Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat Daerah	24%	100%	100%	21.41%	23%	89,36%
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet	Na	Na	Na	86,89	87,68	87,59
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	42,21	46,15	54,20	65,05	66,77	75,45
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer pribadi	21,43	21,43	21,43	19,33	19,08	17,5
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon	1,41	1,41	1,41	0,93	0,42	1,2

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular	64,66	64,66	64,66	Na	84,69	Na

Sumber: BPS dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2024

Perkembangan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang positif dari tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan tabel diatas, cakupan layanan telekomunikasi di desa/kelurahan meningkat dari 76,12% pada tahun 2018 menjadi 96,32% pada tahun 2020, meskipun data tidak tersedia untuk tahun 2021 hingga 2023. Penggunaan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah juga mengalami peningkatan signifikan, dari 24% pada tahun 2018 menjadi 89,36% pada tahun 2023. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP atau mengakses internet meningkat dari 42,21% pada tahun 2018 menjadi 87,59% pada tahun 2023. Proporsi rumah tangga dengan akses internet menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 42,21% pada tahun 2018 menjadi 75,45% pada tahun 2023. Namun, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sedikit menurun dari 21,43% pada tahun 2018 menjadi 17,5% pada tahun 2023. Selain itu, proporsi rumah tangga yang memiliki telepon mengalami fluktuasi dan pada tahun 2023 mencapai 1,2%. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang memiliki telepon seluler mengalami peningkatan signifikan dari 64,66% pada tahun 2018 menjadi 84,69% pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan peningkatan adopsi teknologi komunikasi di Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, indikator lain dalam urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 2023 sudah mencapai 37 KIM per kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan dengan jumlah Kim terbanyak adalah Kecamatan Rupert dengan 114 KIM. Sedangkan kecamatan Tua;ang Muandau sama sekali belum memiliki Kelompok Informasi Masyarakat.

**Tabel II-70 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah KIM	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
1.	Bengkalis	1	34	34
2.	Bantan	1	8	8
3.	Siak Kecil	1	16	16
4.	Pinggir	1	19	19
5.	Mandau	1	17	17
6.	Bukit Batu	1	13	13
7.	Rupert	1	114	114

8.	Rupat Utara	1	87	87
9.	Bandar Laksemana	1	56	56
10.	Bathin Solapan	1	81	81
11.	Talang Muandau	1	-	-
<b>Kabupaten Bengkalis</b>		12	445	37

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2024

Pada tahun 2017-2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Beberapa prestasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-71 Prestasi PPID Utama Kabupaten Bengkalis 2017-2023**

No	Jenis Prestasi	Tahun
1	Juara III Kategori Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2017
2	Juara II Kategori Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2018
3	Juara II Kualifikasi Menuju Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2019
4	Juara II Kualifikasi Menuju Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2020
5	Juara II Kualifikasi Informatif Kategori Kabupaten Kota Se Provinsi Riau	2021
6	Terbaik I Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau	2022
7	Juara III Peringkat Informatif Katagori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	2023

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2024

Selain beberapa indikator di atas, terdapat pula salah satu indikator yang menjadi ukuran pemerataan jaringan komunikasi antar wilayah pedesaan/kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Data Wilayah (Kelurahan/Desa) Yang Belum Tercover Mobile Broadband 4G Di Kabupaten Bengkalis masih belum merata. Sebagian besra wilayah pedesaan bahkan belum terkover mobile broadband 4G yang merupakan jaringan tercepat saat ini. Penyebab hal ini belum terealisasi adalah karena pengajuannya sebagian besar baru pada tahun 2020 dan 2021 sehingga masih dalam tahap pengembangan untuk pemasangan movile broadband 4G.

**Tabel II-72 Data Wilayah (Kelurahan/Desa) Yang Belum Tercover Mobile Broadband 4G Kabupaten Bengkalis**

Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Jumlah Penduduk	Tahun Diusulkan	Keterangan
Pematang Pudu	Mandau	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Harapan Baru	Mandau	Ada	Ada	4467	2020	Belum Terealisasi
Batin Betuah	Mandau	Ada	Ada	3869	2020	Belum Terealisasi

Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Jumlah Penduduk	Tahun Diusulkan	Keterangan
Resam Lapis	Bantan	Ada	Ada	1578	2020	Belum Terealisasi
Bantan Timur	Bantan	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Muntai	Bantan	Ada	Ada	1704	2021	Belum Terealisasi
Ulu Pulau	Bantan	Ada	Ada	1655	2021	Belum Terealisasi
Kembung Baru	Bantan	Ada	Ada	2003	2021	Belum Terealisasi
Bantan Tengah	Bantan	Ada	Ada	3098	2021	Belum Terealisasi
Kuala Alam	Bengkalis	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Teluk Latak	Bengkalis	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Penampi	Bengkalis	Ada	Ada	-	2020	Belum Terealisasi
Pangkalan Jambi	Bukit Batu	Ada	Ada	1277	2021	Belum Terealisasi
Bukit Batu	Bukit Batu	Ada	Ada	1205	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2742	2020	Belum Terealisasi
Tanjung Leban	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2742	2021	Belum Terealisasi
Parit I Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	880	2021	Belum Terealisasi
Temiang	Bandar Laksamana	Ada	Ada	1639	2021	Belum Terealisasi
Api-api	Bandar Laksamana	Ada	Ada	1552	2021	Belum Terealisasi
Tenggayun	Bandar Laksamana	Ada	Ada	2094	2021	Belum Terealisasi
Sepahat	Bandar Laksamana	Ada	Ada	1764	2021	Belum Terealisasi
Bukit Kerikil	Bandar Laksamana	Ada	Ada	6164	2021	Belum Terealisasi
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	1658	2020	Belum Terealisasi
Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2431	2021	Belum Terealisasi
Koto Pait Beringin	Talang Muandau	Ada	Ada	2478	2021	Belum Terealisasi
Kuala Penaso	Talang Muandau	Ada	Ada	1640	2021	Belum Terealisasi

Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Jumlah Penduduk	Tahun Diusulkan	Keterangan
Melibur	Talang Muandau	Ada	Ada	1658	2021	Belum Terealisasi
Tasik Tebing Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	2203	2021	Belum Terealisasi
Tasik Serai Timur	Talang Muandau	Ada	Ada	3302	2021	Belum Terealisasi
Serai Wangi	Talang Muandau	Ada	Ada	3049	2021	Belum Terealisasi
Tasik Serai	Talang Muandau	Ada	Ada	6713	2021	Belum Terealisasi
Tasik Serai Barat	Talang Muandau	Ada	Ada	7219	2021	Belum Terealisasi
Lubuk Muda	Siak Kecil	Ada	Ada	3015	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Datuk	Siak Kecil	Ada	Ada	886	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Belit	Siak Kecil	Ada	Ada	2198	2021	Belum Terealisasi
Liang Banir	Siak Kecil	Ada	Ada	628	2021	Belum Terealisasi
Sungai Siput	Siak Kecil	Ada	Ada	1084	2021	Belum Terealisasi
Koto Raja	Siak Kecil	Ada	Ada	1709	2021	Belum Terealisasi
Lubuk Garam	Siak Kecil	Ada	Ada	1797	2021	Belum Terealisasi
Sumber Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	854	2021	Belum Terealisasi
Lubuk Gaung	Siak Kecil	Ada	Ada	2075	2021	Belum Terealisasi
Tanjung Damai	Siak Kecil	Ada	Ada	1384	2021	Belum Terealisasi
Sepotong	Siak Kecil	Ada	Ada	1220	2021	Belum Terealisasi
Langkat	Siak Kecil	Ada	Ada	16225	2021	Belum Terealisasi
Sungai Nibung	Siak Kecil	Ada	Ada	175	2021	Belum Terealisasi
Sadar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	1770	2021	Belum Terealisasi
Sungai Linau	Siak Kecil	Ada	Ada	1068	2021	Belum Terealisasi
Muara Dua	Siak Kecil	Ada	Ada	1509	2021	Belum Terealisasi
Bandar Jaya	Siak Kecil	Ada	Ada	1730	2021	Belum Terealisasi
Pinggir	Pinggir	Ada	Ada	6884	2021	Belum Terealisasi

Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Listrik	Akses Jalan	Jumlah Penduduk	Tahun Diusulkan	Keterangan
Semunai	Pinggir	Ada	Ada	4222	2021	Belum Terealisasi
Muara Basung	Pinggir	Ada	Ada	11207	2021	Belum Terealisasi
Tengganau	Pinggir	Ada	Ada	6351	2021	Belum Terealisasi
Buluh apo	Pinggir	Ada	Ada	2849	2021	Belum Terealisasi
Pangkalan Libut	Pinggir	Ada	Ada	3745	2021	Belum Terealisasi
Sungai Meranti	Pinggir	Ada	Ada	5564	2021	Belum Terealisasi
Balai Raja	Pinggir	Ada	Ada	5175	2021	Belum Terealisasi
Titian Antui	Pinggir	Ada	Ada	1859	2021	Belum Terealisasi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2022

#### 2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.

**Tabel II-73 Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2023**

Keterangan	2021	2022	2023
Konsumsi Listrik (Kwh)	1.311.760.259,00	2.572.096.001,00	2.721.213.602,08
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)	2.287,27	4.412,03	4.130,27

Sumber: PLN, 2024

Konsumsi listrik per kapita Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi peningkatan dari 2.287,27 KWh/kapita pada tahun 2021, menjadi 4.130,27 KWh/kapita pada tahun 2023. Fluktuasi konsumsi listrik perkapita Kabupaten Bengkalis peningkatan konsumsi listrik dari 1.311.760.259,00 KWh pada tahun 2021, menjadi 2.721.213.602,08 KWh pada tahun 2023.

Jenis pelanggan kategori rumah tangga merupakan pemakai utama listrik di Kabupaten Bengkalis. Jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2023 mencapai 182.046 dengan daya terpasang mencapai 314.998.113 KWH. Meski jumlah

pelanggan rumah tangga adalah yang terbanyak, sebenarnya pemakaian listrik untuk pelanggan industri jauh lebih besar meskipun secara jumlah masih kalah jauh dibanding pelanggan rumah tangga. Dengan jumlah industri sebanyak 171 pelanggan saja dapat mengkonsumsi listrik hingga 2.237.677.264 KWH. Ini berarti kebutuhan listrik untuk industri sendiri jauh lebih besar daripada kebutuhan untuk listrik rumah tangga. Dengan kebutuhan yang tinggi ini, PLN Kabupaten Bengkalis sudah bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga.

**Tabel II-74 Banyaknya produksi Tenaga Listrik dirinci Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023**

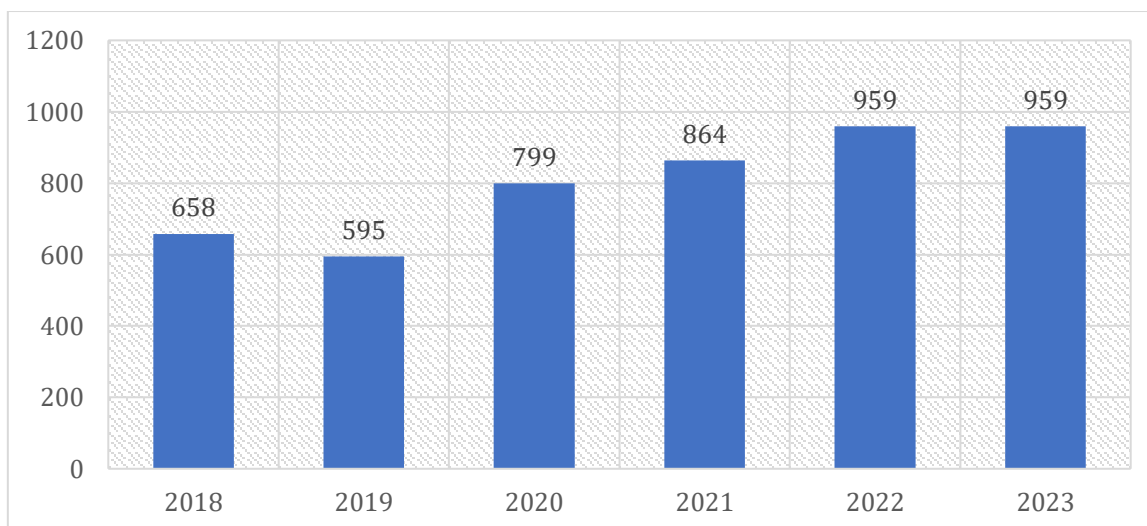
No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Penggunaan (KWH)
1	Tarif Sosial	4.486	23.640.016
2	Tarif Rumah Tangga	182.046	314.998.113
3	Tarif Bisnis	13.893	114.803.490
4	Tarif Industri	171	2.237.677.264
5	Tarif Penerangan	1.273	26.629.661
6	Tarif Lain-lain	33	3.465.058
Jumlah		201.902	2.721.213.602

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2024

### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

#### 2.3.4.1 Kriminalitas

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2018-2023.



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

**Gambar II-68 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2023**

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir trend kasus kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Bengkalis meningkat. Pada tahun 2017 angka kriminalitas sebanyak 569. Kenaikan kasus kembali terjadi pada tahun 2018 sebanyak 658 kasus yang dilaporkan, namun menurun menjadi 595 kasus saja pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kasus kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 799 kejahatan dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 959 kasus kejahatan yang dilaporkan.

**Gambar II-69 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2018-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kriminalitas	658	595	799	864	959	959
Jumlah Penduduk	544.144	553.938	593.397	606.179	646.715	658.846
Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	12,09	10,74	13,46	14,25	14,83	14,56

Sumber: Disdukcapil dan BPS Riau, 2024 (Diolah)

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin rentan terjadi tindak kriminalitas. Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Rasio kriminalitas pada tahun 2018 sebesar 12,09, turun menjadi 10,74, namun naik hingga tahun 2022 menjadi 14,83 dan sedikit turun pada tahun 2023. Adanya kecenderungan peningkatan kasus kriminal ini apabila dibiarkan akan berdampak negatif terhadap keamanan daerah dan mengganggu pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.



### 2.3.4.2 Ketetraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari tahun 2018 hingga 2021 stabil di angka 1.859 orang, namun turun menjadi 1.521 orang pada tahun 2022 dan 2023. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2021 sampai 2023. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan juga mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2023. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di bawah:

**Tabel II-75 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2023**

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.859 Orang	1.859 Orang	1.859 Orang	1.859 Orang	1521 Orang	1521 Orang
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	24%	24%	Na	Na	Na	Na
3	Persentase Penegakan PERDA	80%	90%	80%	100%	100%	100%
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	80%	80%	100%	100%	100%
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	37,47	37,47	37,47	47	73	Na
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	90	80	80	91	Na
7	Indeks Resiko Bencana	156,4	156,4	156,4	140,37	128,86	134,65
8	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Zoonosis Prioritas	Na	Na	100	100	100	Na
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Na	Na	27	102	100	Na
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Na	Na	95	82,23	100	Na
11	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Na	Na	100	99,91	100	100

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2024

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 47%, meningkat menjadi 73% pada tahun 2022. Tingkat waktu tanggap (response time rate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mencapai 91% pada tahun 2022. Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100% pada tahun 2021 dan bertahan hingga 2023. Indeks Risiko Bencana

mengalami penurunan dari 156,4 pada tahun 2018-2020 menjadi 128,86 pada tahun 2022, namun sedikit naik menjadi 134,65 pada tahun 2023

#### 2.3.4.3 Penanaman Modal

Penanaman modal diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional, nilai realisasi investasi, rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Jumlah investor berskala nasional selama periode 2019-2023 memiliki trend peningkatan. Hingga tahun 2023 jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan mencapai 1356. Jika dilihat dari nilai investasi, pada tahun 2018 nilai investasi berskala nasional berjumlah Rp. 6.693.783,70 juta, turun hingga tahun 2022 menjadi Rp. 4.091.448,12 juta dan kembali mengingkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 5.599.344,02 juta.

**Tabel II-76 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 - 2023**

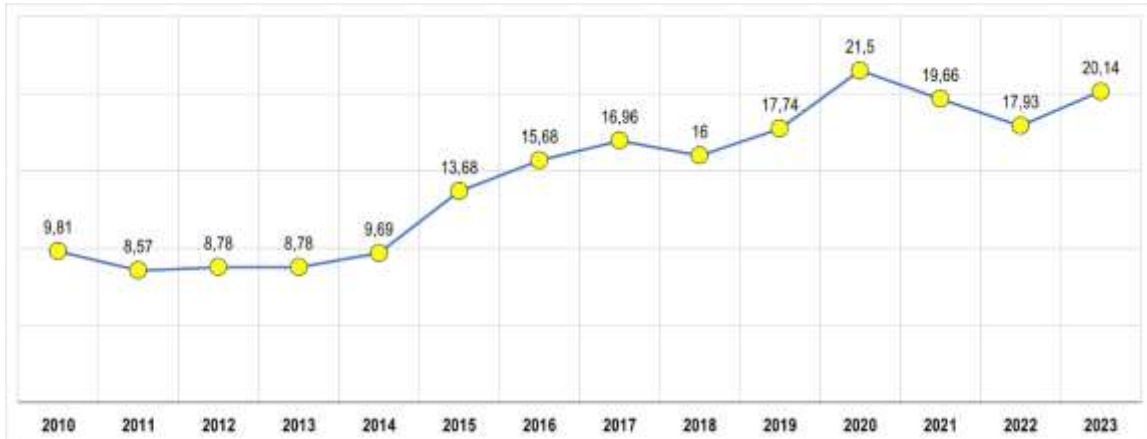
Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	180	161	612	464	1.356
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Jutaan)	6.693.783,70	5.264.557,60	5.760.941,10	4.091.448,12	5.599.344,02
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	18,91	20,58	7,18	Na	Na
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Jutaan)	4.401.854,20	5.208.743,20	5.319.269,20	2.542.549,30	5.296.219,30

Sumber: DPMTSP Kabupaten Bengkalis, 2024

Indikator lain dari urusan penanaman modal adalah rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 26,07%, turun pada tahun 2019 menjadi 7,18%.

Selanjutnya adalah indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Indikator ini

digunakan untuk menggambarkan kontribusi penanaman modal terhadap PDRB di Kabupaten Bengkalis.



Sumber: BPS Bengkalis, 2024

**Gambar II-70 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2023**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut harga berlaku di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 sebesar 9,81%, turun menjadi 8,57% pada tahun 2011, selanjutnya meningkat hingga tahun 2017 menjadi 16,96%. Pada tahun 2018 turun menjadi 16% dan kembali meningkat hingga tahun 2020 menjadi 21,5, namun kembali turun hingga tahun 2022 menjadi 17,93% dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 20,14%.

#### 2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

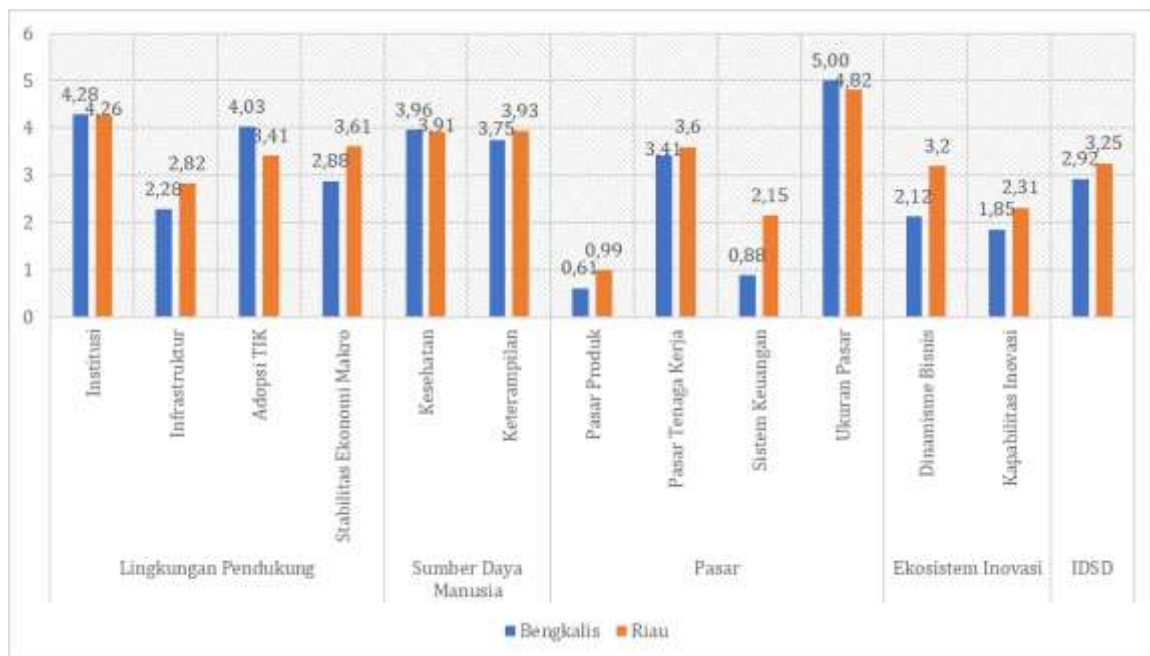
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratikanalitik karena pengukurannya didasarkan pada data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif.

Adanya IDSD akan membantu pemerintah daerah dalam memahami keunggulan kompetitif wilayahnya sendiri sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang makin memperketat persaingan antardaerah dan antarnegara. Persaingan yang makin ketat dan mengglobal memosisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

IDSD menjadi alat penting yang mampu memonitor dan mengevaluasi upaya pengoptimalan potensi tersebut secara komprehensif.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan IDSD tidak hanya untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan itu sendiri. Singkatnya, dengan menggunakan IDSD sebagai rujukan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangan dan pada saat yang bersamaan, memperkuat keunggulan daya saing wilayahnya.

IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari Global Competitiveness Index. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standardisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika. Berikut disajikan indeks daya saing daerah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau, yaitu:



Sumber: Badan Riset Nasional, 2024

**Gambar II-71 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebesar 2,92, berada pada peringkat ke empat tertinggi di Provinsi Riau. Pada aspek lingkungan pendukung, masih lemahnya kondisi infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Bengkalis dibandingkan pilar yang sama di Provinsi Riau. Hal yang sama juga

terjadi pada aspek SDM yang mana masih lemahnya pilar keterampilan SDM di Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan Provinsi Riau. Sementara itu, pada aspek pasar masih lemahnya pilar pasar produk, pasar tenaga kerja dan sistem keuangan, namun masih didukung oleh pilar ukuran pasar yang masih kuat. Sedangkan aspek ekosistem inovasi masih lemahnya dimensi bisnis dan kapabilitas inovasi di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Lemahnya sebagian besar pilar daya saing daerah diatas menunjukkan perlunya investasi dan perhatian yang lebih dalam pengembangan daya saing daerah.

## 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum sekurang-kurangnya memuat analisis Indeks Demokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### 2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk itu, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Berikut adalah indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2023, yaitu:

**Tabel II-77 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2023**

Keterangan	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	48,62	52,74	61,07
Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Kurang (C)	Cukup (Memadai) (CC)	Baik (B)

Sumber: KEMENPANRB, 2023

Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 48,62 masuk kategori Kurang, meningkat pada tahun 2022 menjadi 52,74 masuk dalam kategori Cukup (Memadai), selanjutnya kembali meningkat menjadi 61,07 masuk kategori Baik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu melakukan perbaikan khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

#### 2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik khususnya dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.

Indeks pelayanan publik wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Berikut disajikan data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**Tabel II-78 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2023**

Indeks	Nilai	Kategori	Makna
2022	3,71	B-	Baik (Cukup)
2023	3,81	B	Baik

Sumber: KEMENPANRB, 2024

Pada tahun 2022 nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis sebesar 3,71 atau dengan kategori Baik (Cukup). Pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,81 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun perlu menyesuakannya dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis sudah memiliki sarana prasarana yang cukup, dan memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan sudah dilakukan inovasi dalam pelayanan publik namun belum diterapkan secara optimal. Sehingga dengan

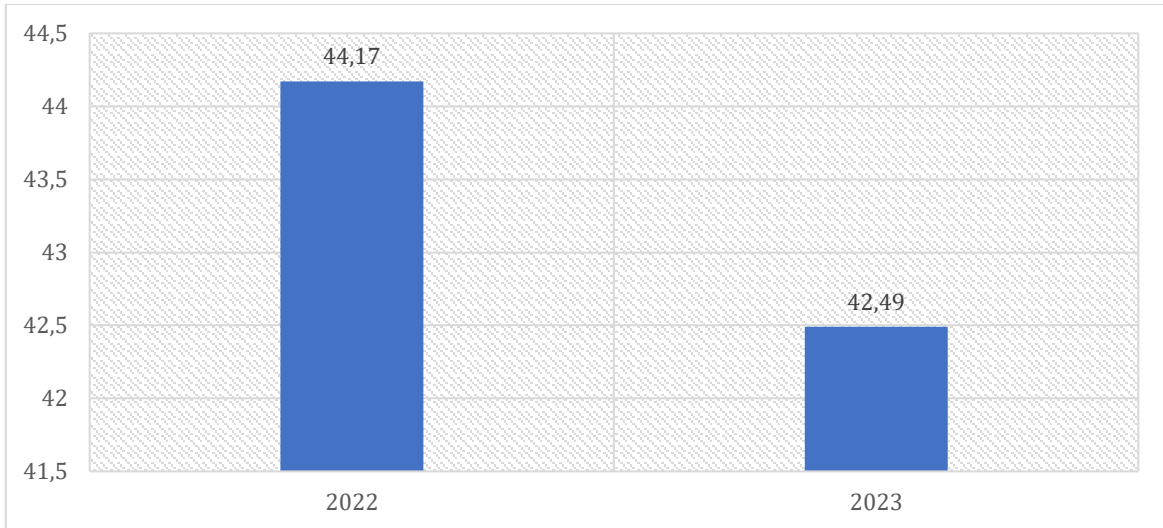
demikian, masih perlu peningkatan tindak lanjut untuk optimalisasi pelayanan di Kabupaten Bengkalis

### 2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Peningkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Hal ini diharapkan dapat lebih memacu kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan, serta memotivasi Pemerintah Daerah lainnya untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek, yang merupakan salah satu bentuk pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa "*dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi*".

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut disajikan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, 2024

**Gambar II-72 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2023**

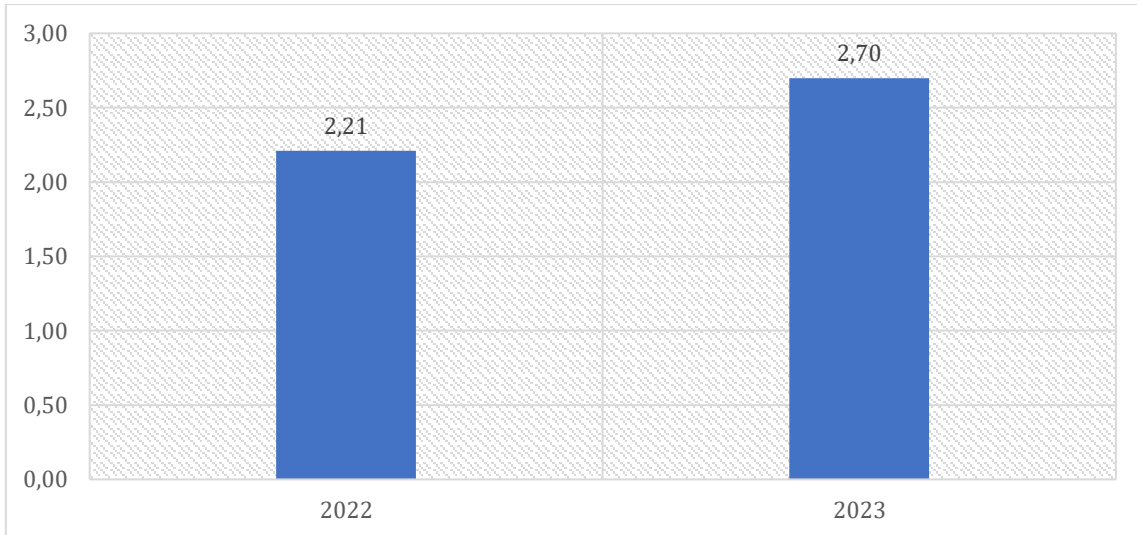
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 sebesar 42,49, sedikit turun jika dibandingkan dari tahun 2022 yaitu 44,17 masuk kategori Inovatif.

#### 2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Pada tahun 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bengkalis telah menyusun arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Adapun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE memiliki tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Bengkalis sebesar 2,21, meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,70 masuk kategori Baik.





Sumber: KEMENPANRB, 2023

**Gambar II-73 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023**

## 2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Refleksi pembangunan Kabupaten Bengkalis dilihat dari capaian dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025, disesuaikan dengan arah kebijakan dan capaian yang diukur dari RPJMD Kabupaten selama empat periode perhitungan. Adapun refleksi pembangunan Kabupaten Bengkalis dipaparkan pada tabel berikut;

**Tabel II-79 Refleksi Pembangunan Kabupaten Bengkalis**

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
<b>Periode Perencanaan Tahun 2010-2015</b>		
<b>Kualitas SDM</b>	Indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi mengalami kemajuan dari tahun 2010-2015.	Sekalipun IPM Kabupaten Bengkalis salah satu yang tertinggi di Provinsi Riau, namun diantara empat komponen pembentuk IPM terdapat dua komponen yang masih menjadi masalah : Angka rata-rata lama sekolah belum dapat mencapai di atas 9 tahun dari kebijakan 12 tahun nasional. Nilai daya beli penduduk per kapita meningkat sejalan dengan peningkatan harga komoditas makanan dan non makanan
<b>Pendidikan</b>	Adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan, tercermin pada peningkatan penduduk yang memiliki ijazah SMA sederajat dan Diploma III.	Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dari aparatur sipil negara antara wilayah perkotaan dan

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Begitu juga terjadi penurunan penduduk yang tidak mempunyai ijazah yang menggambarkan keberhasilan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun dan kejar paket sehingga terjadi peningkatan penduduk yang memiliki ijazah SD pada tahun 2015.</p> <p>Komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun pendidikan, selain pendidikan SD, SLTP dan SLTA, pada jenjang pendidikan tinggi telah tersedia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis, dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Bengkalis, serta Politeknik Bengkalis. Selain itu, telah pula dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duri dan Akbid Bengkalis di Duri.</p>	<p>perdesaan; dan antara wilayah terbuka dan terpencil</p> <p>Rasio guru dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU masih terbatas, dimana guru rata-rata mendapat beban mengajar berkisar 13-17 murid.</p> <p>Tingginya proporsi belanja pegawai khususnya tenaga pendidik dan kependidikan dari kelompok aparatur sipil negara dari total belanja urusan pendidikan menyebabkan rendahnya capaian kinerja pelayanan prasarana dan mutu pendidikan.</p> <p>Terdapatnya pergeseran kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kinerja pelayanan dan perluasan akses pada jenjang menengah baik pada sekolah menengah umum dan kejuruan bergantung kepada arah kebijakan dan prioritas anggaran pembangunan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik oleh provinsi.</p>
<p><b>Kesehatan</b></p>	<p>Periode pembangunan di Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun terakhir telah memberikan kontribusi besar pada kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah pula dinikmati oleh masyarakat tersebut dapat dijelaskan, diantaranya pembangunan Rumah sakit bertaraf Internasional yang terletak di Bengkalis dan Duri. Pembangunan 11 unit Puskesmas, Puskesmas dengan ruang rawat Inap sebanyak 4 unit, serta telah pula dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 38 unit Poskesdes, 52 unit Puskesmas Pembantu dan 32 unit polindes.</p>	<p>Masih belum memadainya pembiayaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan persolan kesehatan masyarakat, terutama untuk pelayanan promotif dan preventif. Hal ini terlihat dari masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan lainnya.</p> <p>Masih belum optimalnya kinerja kesehatan yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif.</p> <p>Masih terdapatnya ketimpangan kesejahteraan dan proporsi pembagian jasa pelayanan antara tenaga dokter dengan tenaga medis lainnya.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan</p> <p>Merumuskan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat/social.</p>	
<b>Kependudukan</b>		<p>Kondisi ketergantungan penduduk tidak produktif yang berasal dari usia tua dan anak-anak cukup tinggi terhadap penduduk produktif yang berasal dari usia angkatan kerja. Angka ketergantungan tahun 2015 sebesar 53 % lebih tinggi dari tahun dasar 2010 yang hanya sebesar 35 %</p> <p>Penyebaran penduduk yang tidak merata terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mendorong pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan fasilitas umum dan pelayanan sosial yang tersedia.</p>
<b>Ketenagakerjaan</b>		<p>Adanya trend penurunan rasio penduduk yang bekerja diindikasikan sebagai dampak pengurangan tenaga kerja tidak tetap dan tetap di sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai akibat dinamika sektor pertambangan minyak bumi. Disamping itu juga, ketersediaan lapangan kerja untuk dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi masih cukup rendah jumlahnya sehingga memperburuk penurunan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkalis</p>
<b>Kemiskinan</b>	<p>Adanya perbaikan kesejahteraan sosial di kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik melalui program penanggulangan kemiskinan dari pusat di daerah, maupun program yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kemelaratan kelompok</p>	<p>Walaupun secara absolut maupun persentase, jumlah penduduk miskin naik menjadi sebesar 40 ribu jiwa atau 7,38% pada tahun 2015.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	penduduk miskin, yang tercermin dari perkembangan indikator tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.	
<b>Perekonomian</b>	<p>Kabupaten Bengkalis dapat menggantungkan keberhasilan pembangunan daerahnya pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa migas, dimana pertumbuhan ekonomi akan lebih menjanjikan karena Kabupaten Bengkalis dapat menggerakkan sektor-sektor bukan migas sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, sekalipun pertumbuhan ekonomi tanpa migas ini juga mengalami perlambatan khususnya pada tahun 2015.</p> <p>Adapun sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi bukan migas berdasarkan kajian terhadap indikator ekonomi daerah oleh BPS pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (2) sektor jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial, (3) sektor informasi dan komunikasi dan (4) sektor jasa pendidikan, yang kesemuanya ini dikategorikan sebagai sektor tersier yang bersumber dari jasa pemerintah, perusahaan dan kelompok masyarakat termasuk perorangan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa minyak bumi dan gas banyak disumbangkan oleh pertumbuhan PDRB pada kelompok sektor tersier dibandingkan sektor sekunder dan primer.</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dengan migas Bengkalis mengalami kontraksi dari 9,06% tahun 2010 menjadi -2,74% tahun 2015 yang disebabkan leading sector yakni sektor pertambangan dan penggalian terus menurun produktivitasnya terutama pertambangan minyak yang dilakukan oleh PT Chevron Pasific Indonesia dan BOB Pertamina.</p> <p>Rendahnya minat investasi yang masuk akibat masih lamanya waktu proses perijinan yang dikelola pemda yaitu 1-7 hari.</p>
<b>Kondisi Ekonomi Masyarakat</b>	Kondisi pendistribusian pemerataan pendapatan antar tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten	Pertumbuhan PDRB per kapita tidak dapat naik diindikasikan terpengaruh oleh: (1) menurunnya lifting minyak bumi yang selama ini dijadikan

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Bengkalis terus membaik karena program pemerintah untuk perlindungan sosial di sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>sebagai sumber utama pendapatan daerah, (2) sektor-sektor penggerak pertumbuhan ekonomi riil daerah baru sebatas berasal dari kelompok sektor tersier yang bersumber dari sektor-sektor jasa terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah, (3) masih tingginya tingkat pengangguran dan (4) pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis.</p> <p>Dan jika disandingkan dengan beberapa indikator sebelumnya seperti PDRB per kapita, garis kemiskinan dan laju inflasi kumulatif dapat diindikasikan bahwa sekalipun rata-rata kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Bengkalis menunjukkan indikasi baik namun sesungguhnya kenaikan harga- harga komoditas makanan dan non makanan juga mempengaruhi nilai beli masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Peningkatan inflasi khususnya terjadi pada tahun 2013 sebagai akibat kebijakan nasional terhadap peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).</p> <p>NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2014 berada pada NTP &lt;100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa.</p>
<p><b>Infrastruktur</b></p>	<p>Pencapaian sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana baik untuk transportasi darat, laut dan udara. Prasarana jembatan utama di Kabupaten Bengkalis meliputi jembatan yang tersebar pada ruas- ruas jalan utama pada kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, Rupert, serta Rupert Utara. Sedangkan dermaga penyeberangan yang ada di Bengkalis dua buah yaitu dermaga Ro Ro di Sei Selari Kecamatan Bukit Batu dan Air Putih Kecamatan Bengkalis.</p>	<p>Masih rendahnya rasio ketersediaan daya listrik akibat kurangnya pembangkit listrik sehingga daya saing peningkatan kualitas komunikasi dan informatika juga rendah.</p> <p>Tidak tersedianya data kepemilikan lahan yang jelas dan di beberapa tempat terjadi tumpang tindih.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Selain itu untuk memperlancar aksesibilitas antar daerah Kabupaten Bengkalis ke wilayah lain bahkan jalur hubungan internasional, maka dibangun juga dermaga Ro Ro di Tanjung Kapal Kecamatan Rukat menuju Kota Dumai.</p> <p>Pembangunan saluran drainase, gorong-gorong dan bangunan penahan abrasi serta pemeliharannya untuk pengendalian banjir dan abrasi secara sistematis dan terpadu, khususnya banjir di bagian pesisir wilayah Kabupaten Bengkalis.</p>	
<p><b>Tata Ruang</b></p>	<p>Pengendalian wilayah perbatasan dan pengembangan sistem informasi dan data mengenai tata ruang</p>	<p>Terdapatnya ruas jalan provinsi di Kabupaten Bengkalis dalam kondisi buruk.</p> <p>Pembangunan wilayah-wilayah sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, karakteristik dan keunggulan wilayah saat ini masih dalam tahapan awal sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan terhadap substansi pembangunan yang telah dilakukan sehingga pertumbuhan wilayah yang diinginkan dapat dilaksanakan secara bertahap, termasuk persoalan penataan ruang dengan fokus penyelesaian penetapan batas-batas wilayah antara Kabupaten Bengkalis dengan kabupaten/kota disekitarnya.</p> <p>Masih rendahnya mutu kualitas jalan poros antar desa, antar dusun dan antar pemukiman menyebabkan tingginya anggaran pemeliharaan jalan setiap tahunnya.</p> <p>Belum disahkannya dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Riau, berakibat belum disahkannya pula dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis sehingga menyebabkan terkendalanya penyusunan terhadap berbagai jenis dokumen turunannya termasuk kebijakan pemanfaatan dan</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
<b>Tata Kelola</b>	Melakukan pengawasan internal berupa kegiatan Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015	pengendalian kawasan budidaya dan lindung di Kabupaten Bengkalis.
<b>Periode Perencanaan Tahun 2016-2020</b>		
<b>Kualitas SDM</b>	Meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan, serta adanya bantuan beasiswa pemerintah daerah.	IPM Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami perlambatan akibat Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Angka harapan lama sekolah dan angka harapan hidup penduduk sebagai komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis masih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau.
<b>Pendidikan</b>	Meningkatkan program pintar bagi Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah (SMP) dan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di tahun 2019. Memberikan bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (adik) mengingat Bengkalis termasuk daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau.	Kemampuan ekonomi masyarakat dan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah.
<b>Kesehatan</b>	Peningkatan pada layanan serta ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang Kesehatan	Pemerataan pelayanan pada beberapa daerah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) dan kematian ibu melahirkan masih tinggi.
<b>Perekonomian</b>	Besarnya kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 59,73% berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 dan sebesar 57,59% berdasarkan PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat	Penurunan produksi minyak, jatuhnya harga minyak mentah dunia ditambah dengan pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian melemah.

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah perekonomian terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri (perekonomian terbuka) yang mengandalkan produk minyak dan gas.</p> <p>Pengendalian inflasi yang tetap terjaga dibawah 3% pada tahun 2020 sebesar 2,89%.</p>	
<b>Kemiskinan</b>	<p>Pelaksanaan pembangunan berupa pemberian transfer of payment dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial (social security) terutama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin, serta usaha yang terdampak Covid-19.</p>	<p>Dampak Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.</p>
<b>Kependudukan</b>		<p>Letak wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab penambahan penduduk yang cukup tinggi.</p>
<b>Ketenagakerjaan</b>	<p>Aspek yang mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah keikutsertaan pekerja dan buruh dan program jaminan sosial. Tahun 2020, persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sudah sangat baik, yaitu dari 91,94% pada tahun 2018 menjadi 97,74% pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 93,20% pada tahun 2020 dimana penurunan ini disinyalir diakibatkan meningkatnya pekerja/buruh yang dirumahkan selama masa pandemi 2020 yang tidak melanjutkan program</p>	<p>Tingginya TPT masih terimbas dari memburuknya kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun sebelumnya.</p> <p>Kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat belum berdampak terhadap serapan angka pengangguran karena pertumbuhan angkatan kerja yang besar.</p>



Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>jamsostek. Meskipun selama Covid-19, persentase orang yang bekerja di sektor non pertanian menurun dari 2019 ke 2020, namun untuk sektor pertanian menunjukkan peningkatan orang yang bekerja jika dibandingkan pada tahun 2019</p>	
<p><b>Infrastruktur</b></p>		<p>Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarnya.</p>
<p><b>Investasi</b></p>	<p>Memperkuat kelembagaan penanaman modal yang terintegrasi, promosi investasi daerah yang efektif dan efisien, pembangunan infrastruktur fisik, penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, aman dan nyaman dan memastikan keamanan kegiatan usaha bersama instansi terkait.</p>	<p>Investasi hanya berfokus pada sektor migas dan perkebunan besar. Pemerintah daerah belum bisa menggaet investor untuk sektor wisata yang sangat potensial</p>
<p><b>Kualitas Lingkungan Hidup</b></p>	<p>Berdasarkan kebijakan jangka menengah daerah, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis pada sektor lingkungan hidup dan</p>	<p>Potensi kebakaran lahan dan hutan, erosi dan abrasi wilayah pesisir pantai dan bahaya banjir rob serta gelombang tinggi</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>sumber daya alam, yakni; penyusunan masterplan lingkungan hidup, mitigasi bencana, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) pelaksana pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan memaksimalkan peran dan fungsi Masyarakat Peduli Api (MPA).</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga selalu mengupayakan penataan dan pembangunan kawasan lingkungan yang optimal, melalui penataan dan pengembangan wilayah pemukiman yang berjalan baik, penataan area bangunan gedung, pengelolaan Sumber Daya Air, penataan kawasan pembuangan dan pemukiman kumuh serta pengembangan sistem air limbah, peningkatan sarana dan prasaranan utilitas umum, program pengelolaan keaneka ragaraman hayati, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</p> <p>Pembangunan wilayah kawaan yang dilakukan berdasarkan dan berwawasan lingkungan hidup untuk menjaga kekayaan hayati yang dimiliki saat ini agar tetap lestari dan terjaga di masa yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan ini terwujud dalam program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian bahan bahaya dan beracun (B3) serta limbah bahaya dan beracun (limbah B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program penyelenggaraan</p>	

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	penataan ruang dan penanggulangan bencana	
<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>	Proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.	Belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan belum optimalnya pembinaan ASN. Masih sedikitnya jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.
<b>Periode Perencanaan Tahun 2021-2026</b>		
<b>Kualitas SDM</b>	Berbagai program yang dikembangkan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, diantaranya: Mewujudkan peran serta kepemudaan untuk berprestasi di berbagai bidang seperti olah raga dan teknologi, menjauhi narkoba, pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan, pengembangan kepramukaan dan peran serta lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, diwujudkan terutama pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan khusus anak, Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan sarana prasarana pengembangan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat	Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang tidak termasuk kategori angkatan kerja adalah 134.426 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 155.856 orang. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga merupakan yang terbanyak dalam kategori ini. Hal ini bisa menunjukkan adanya potensi kelompok masyarakat yang tidak bekerja secara formal atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, seperti menjadi tenaga kerja informal atau berwirausaha.  Investasi yang banyak pada sektor informal di Kabupaten Bengkalis dapat berdampak pada keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan pendidikannya
<b>Pendidikan</b>	Peningkatan kualitas pendidikan juga termasuk program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis, bentuk penguatan pendidikan masyarakat berupa :	Dalam meningkatkan kualitas SDM di tingkat pemerintahan dengan melaksanakan program kepegawaian daerah mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan pembayaran penuh kepada PNS yang sedang menjalani tugas belajar karena tanggal terbit SK Tugas

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Pemberian beasiswa untuk pendidikan khusus dan prestasi Realisasi program unggulan beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi yang diimplementasikan melalui empat program strategis yaitu program kepegawaian daerah, program pengembangan SDM yang dikelola oleh Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan, program pengelolaan pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat oleh Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Belajar pada semester II. Selain itu, capaian anggaran juga rendah karena beberapa lokasi pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan, dikarenakan peserta tugas belajar sedang melakukan studi banding dan kampus sedang libur. Oleh karena itu, Penting untuk meningkatkan koordinasi antara pihak terkait dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal pembayaran tugas belajar. Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan instansi terkait akan membantu mengatasi kendala pembayaran penuh kepada PNS yang tengah menjalani tugas belajar.</p>
<p><b>Kesehatan</b></p>	<p>Fokus pengembangan sektor kesehatan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:</p> <p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Program penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p>	<p>Dari hasil evaluasi diketahui kinerja indikator program kesehatan adalah sangat rendah (&lt;50%) karena tidak ditemukan indikator program pembangunan tahun 2021 dan 2022 sama dengan indikator kinerja program yang terdapat di RPMJD. Kemudian berdasarkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 diketahui bahwa kinerja anggaran dari program tersebut dibandingkan dengan target anggaran akhir RPJMD (tahun 2026) adalah sebanyak 70% sangat tinggi (91%-100%), 10% kinerja anggaran dari program adalah rendah (51%-65%) dan 20% kinerja anggaran program adalah sangat rendah (&lt;50%). Perbedaan antara hasil evaluasi kinerja indikator program dengan kinerja anggaran program disebabkan oleh program yang dilaksanakan mempunyai indikator kinerja dengan yang terdapat pada RPJMD. Sehingga pada saat dilakukan evaluasi kinerja anggaran cukup bagus karena sebanyak 70% program mempunyai kinerja anggaran yang sangat tinggi dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2026, namun karena indikator program yang digunakan berbeda</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
<p><b>Kependudukan</b></p>	<p>Fokus unggulan pemerintah tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi termasuk juga pemerataan pembangunan melalui beberapa program :</p> <p>Pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera, yang diimplementasikan melalui dua bidang yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Peningkatan akses jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat</p> <p>Optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau</p> <p>Penyediaan pelayanan sistem kependudukan berbasis mobile</p> <p>Optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau dengan Target anggaran yang ditetapkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 35,99 milyar, dan realisasi mencapai Rp. 32,08 milyar, atau sekitar 89,14% dari target tersebut. Program ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan.</p> <p>Realisasi anggaran RPJMD untuk program Pemerintahan dan Kesejahteraan yang mencapai Rp 16,64 milyar menunjukkan fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah cukup besar, terutama untuk melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pencapaian kinerja setiap tahunnya Selain itu, Kabupaten Bengkalis telah mengimplementasi-kan beberapa program unggulan dalam upaya meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat. Program-program</p>	<p>maka kinerja indikator program sesuai RPJMD menjadi sangat rendah</p> <p>Realisasi program pemerintah dan kesejahteraan rakyat yang hanya mencapai anggaran sebesar 1,48 milyar rupiah atau hanya 8,89 % dari target anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, seperti proses penyelesaian seleksi administrasi permohonan yang masih berlangsung dan tidak tercapainya target jumlah permohonan dengan kuota yang tersedia, sehingga serapan anggaran sangat rendah. Selain itu, program penyediaan biaya pendidikan khusus Tahfiz Qur'an juga mengalami kendala dalam proses pengumuman penetapan penerima dan rendahnya jumlah pemohon yang sesuai dengan target yang harus dicapai.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>ini dikelola oleh dua bidang pemerintahan, yaitu Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial. Di Bidang Kesehatan, program unggulan yang dilaksanakan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dalam program ini, anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 65,04 milyar, namun realisasi mencapai Rp. 44,11 milyar, atau sekitar 67,82% dari target. Sementara itu, di Bidang Sosial, terdapat tiga program unggulan yang dilakukan. Pertama, Program Pemberdayaan Sosial dengan target anggaran sebesar Rp. 454,35 juta, dan realisasi mencapai Rp. 1,36 milyar atau sekitar 298,70% dari target. Kedua, Program Rehabilitasi Sosial dengan target anggaran sebesar Rp. 830,87 juta, dan realisasi mencapai Rp. 427,29 juta atau sekitar 51,43% dari target. Ketiga, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target anggaran sebesar Rp. 18,39 milyar, dan realisasi mencapai Rp. 31,92 milyar, atau sekitar 173,57% dari target. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Sosial.</p> <p>Terdapat juga Program Penanganan Bencana yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat. Program ini memiliki target anggaran sebesar Rp. 1.30 milyar dan realisasi mencapai Rp. 936,21 juta, atau sekitar 72,06% dari target. Program ini juga dikelola oleh Dinas Sosial. Dengan adanya program-program ini, diharapkan akses jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat ditingkatkan secara signifikan. Program-</p>	

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>program ini mencakup upaya pemenuhan kesehatan individu dan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana. Melalui kerjasama antara Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial, Kabupaten Bengkalis berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam hal jaminan sosial dan kesehatan.</p>	
<p><b>Ketenagakerjaan</b></p>	<p>Dalam periode tahun 2021 – 2026, Kabupaten Bengkalis memiliki program unggulan untuk mempercepat stimulus ekonomi daerah. Dengan demikian akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja daerah. Program yang dilakukan diantaranya: pemberian bantuan keuangan satu milyar satu desa, peningkatan akses jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, optimalisasi layanan transportasi, serta stimulus ekonomi untuk pekerja sektor informal seperti buruh petani, peternak dan nelayan serta pengembangan sektor UMKM. Dengan demikian akan mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah. Secara keseluruhan, meskipun Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki kinerja yang sedang, namun berhasil mencapai target dalam APBD dengan baik. Sementara itu, Program Pengembangan UMKM memiliki kinerja yang tinggi terhadap target APBD, meskipun kinerjanya masih di bawah target RPJMD. Hal ini menunjukkan upaya Dinas</p>	<p>Serapan tenaga kerja di tahun 2022 turun dibandingkan tahun 2021, atau sebesar 0,55 %. Hal ini terjadi karena antara tahun 2021-2022, banyak penduduk yang berhenti dari dunia kerja dan menurunnya kesempatan kerja.</p> <p>Pengangguran meningkat di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, atau sebesar 0,55 %. Hal ini terjadi dikarenakan oleh penduduk yang baru masuk ke dunia pencari kerja belum sepenuhnya tertampung pada lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Bengkalis.</p> <p>Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 4,79 % antara tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa ada kejadian penduduk yang menarik diri dari dunia kerja khususnya perempuan yang dapat dilihat pada persentase TPAK perempuan sebesar 41,07 %.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.</p>	
<p><b>Kemiskinan</b></p>	<p>Kabupaten Bengkalis selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi terutama setelah melewati masa krisis akibat dampak Covid – 19, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kehidupan masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Selain itu fokus pemerintah terhadap masalah kemiskinan juga terus ditingkatkan seperti pengadaan program bantuan sosial, program pelatihan kerja serta fokus kebijakan pada penguatan prospek dan pengembangan sektor potensial terhadap perekonomian dengan harapan untuk mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak juga masih ditingkatkan.</p> <p>Selain itu pemerintah juga dapat mengambil kebijakan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat membawa dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan memberikan sumber daya yang cukup.</p> <p>Fokus pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi sehingga mampu menarik investor baik penanaman modal asing maupun dalam</p>	<p>Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan masyarakat, Masyarakat masih belum memaksimalkan layanan pendidikan dan kesehatan yang dimiliki dan masih belum meratanya program implementasi baik pendidikan dan kesehatan di masyarakat.</p> <p>Kegiatan investasi yang melambat sebagai akibat pandemic Covid 19 turut mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 6,63%, telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD ditahun 2022 yaitu 8,75%, bahkan capaian tersebut juga telah melampaui target akhir RPJMD ditahun 2026 yaitu 8,34%.</p> <p>Angka kemiskinan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 6,64%, jika dibandingkan dengan target RPJMD ditahun 2022 sebesar 6,07%, dan target akhir RPJMD ditahun 2026 sebesar 5,56%, maka diperlukan ada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan agar mencapai target yang telah ditetapkan.</p>



Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>negri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi kemiskinan.</p>	
<p><b>Perekonomian</b></p>	<p>Pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2022 jika dilihat dari sisi produksi / lapangan usaha :</p> <p>Adanya investasi daerah diantaranya pada pada sub sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan Konstruksi.</p> <p>Berkembangnya jumlah usaha kuliner, khususnya pada pusat-pusat berkumpulnya masyarakat.</p> <p>Berkembangnya usaha penginapan pada destinasi-destinasi wisata dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Investasi Pemerintah melalui belanja modal konstruksi khususnya jalan, irigasi dan drainase terus dijaga sesuai mandatori pedum APBD</p> <p>Sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sub sektor yang dapat bertahan selama pandemi covid-19.</p> <p>Kabupaten Bengkalis memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor pertambangan dan penggalian, diperlukan diversifikasidan pengembangan lebih lanjut agar sumbangan sektor semakin optimal terhadap perekonomian daerah</p> <p>Sedangkan dari sisi pengeluaran :</p> <p>Investasi pemerintah dan swasta.</p> <p>Berkembangnya aktivitas perdagangan di pusat pusat kecamatan.</p>	<p>Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap kegiatan investasi di Kabupaten Bengkalis. Perkembangan kegiatan investasi di Kabupaten Bengkalis dapat tercermin dari data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2021 nilai PMDN dan PMA di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 721,46 miliar dan menurun menjadi Rp. 552,32 miliar pada tahun 2022. Namun capaian tersebut masih dibawah target nilai PMDN dan PMA yang ditetapkan dalam RPJMD ditahun 2022 yaitu Rp. 4,8 triliun dan target akhir RPJMD 2026 sebesar Rp. 5,9 triliun. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan investasi dalam bentuk PMDN dan PMA untuk mencapai target yang telah ditetapkan.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Pembangunan daerah yang diarahkan kepada set konstruksi infrastruktur.</p> <p>Share Net Ekspor – Import dari CPO perlu dikembangkan pada PDRB sisi pengeluaran</p>	
<b>Ketenagakerjaan</b>	<p>Struktur ekonomi dan potensial daerah menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Kualitas dan akses pendidikan yang baik</p> <p>Tersedianya layanan fasilitas kesehatan untuk bisa di akses oleh masyarakat</p> <p>Meningkatnya persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Kabupaten Bengkalis terus meningkat sehingga persentase penduduk yang bekerja juga akan meningkat dan itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga semakin baik</p>	<p>Masih tingginya angka pengangguran terdidik (menengah atas) sebesar 13.295 orang pada tahun 2022, disebabkan struktur ekonomi belum mampu mendukung pertumbuhan lapangan kerja yang memadai</p>
<b>Infrastruktur</b>	<p>Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, berwawasan lingkungan terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah</p> <p>Pembangunan infrastruktur, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bengkalis dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan infrastruktur</p>	<p>Masih belum optimalnya target capaian dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sehingga berdampak pada mobilitas aktivitas masyarakat termasuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah kabupaten Bengkalis</p> <p>Akses layanan yang belum berkembang dan fasilitas yang kurang dan rusak seperti jalan, jembatan</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>(sarana dan prasarana) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis terutama diwujudkan dalam :</p> <p>Peningkatan kualitas konektivitas wilayah seperti optimalisasi penyelenggaraan jalan, pengelolaan sistem drainase, pengembangan jasa konstruksi.</p> <p>Peningkatan kapasitas angkutan penyebrangan melalui pengelolaan pelayaran, Fokus pemerintah dalam melanjutkan penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup serta potensial daerah yang dimiliki dengan mengadopsi pendekatan berkelanjutan memanfaatkan prinsip – prinsip tata ruang</p> <p>Pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan kawasan</p> <p>Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dengan memperkuat kerjasama lintas batas, mengembangkan potensi ekonomi wilayah perbatasan dan aksesibilitas layanan publik dan fasilitas dasar</p>	
<p><b>Tata Kelola Pemerintahan</b></p>	<p>Adanya keselarasan antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPd serta meningkatnya pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbu) Bengkalis Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.</p>	<p>Dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan karena alokasi anggaran dalam APBD-P tidak memungkinkan, serta terjadi putus koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan kegiatan. Program Wisma Daerah sebagai Rumah Aspirasi direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagai bagian dari persiapan, agenda kegiatan untuk satu tahun telah disusun, dan program ini akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2023.</p>

Aspek Kinerja	Pendorong	Penghambat
	<p>Melakukan bimbingan teknis penguatan sistem ekonomi desa berbasis digital/multimedia melalui BUMDes Kabupaten Bengkalis.</p> <p>Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurahan</p> <p>Menyediakan layanan Dukcapil JEBOL MASTER (Jemput Bola Secara Masif dan Terintegrasi) dan SIPINTER (Koordinasi pencatatan Perkawinan Terintegrasi)</p> <p>Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan target anggaran di Tahun 2022 mencapai 14,50 milyar</p> <p>Capaian kinerja program unggulan bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurahan menunjukkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan dalam merealisasikan anggaran menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan bantuan keuangan kepada desa, kecamatan, dan kelurahan. Dengan melanjutkan dan meningkatkan program-program ini, diharapkan dapat terus memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.</p>	<p>Selain itu, Kabupaten Bengkalis masih belum mewujudkan program yang tepat dan prioritas dalam penguatan pelayanan pemerintahan sehingga program yang dilaksanakan menjadi tidak efektif, tidak mampu menekan biaya yang cukup besar namun tidak diringi dengan daya dan potensi yang masih terbatas. Disisi lain, kurangnya komunikasi yang jelas dan terstruktur antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, OPD terkait, dan pihak terkait lainnya menyebabkan tidak terkoordinasinya penyusunan kegiatan, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program,</p>

## 2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

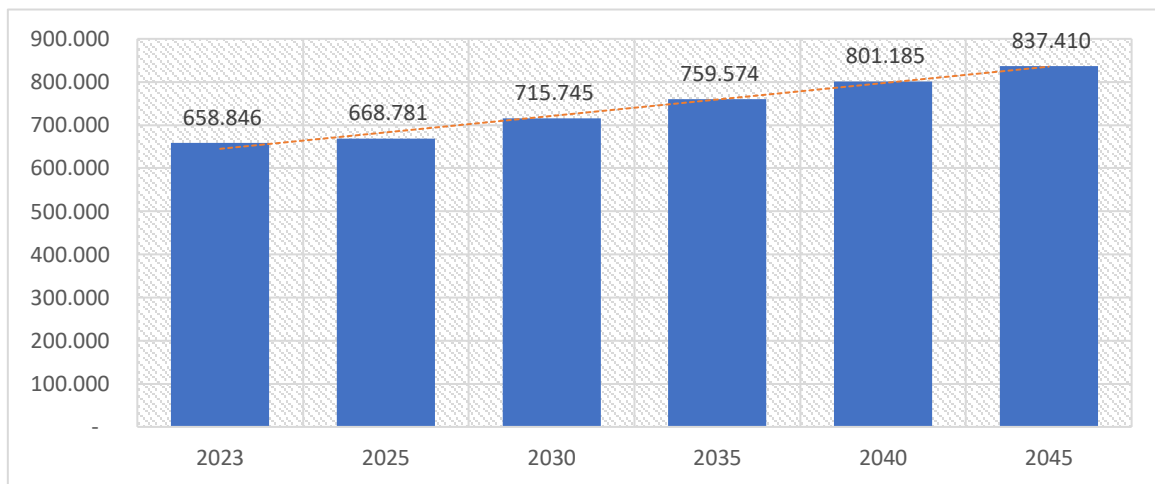
Proyeksi Penduduk yang digunakan dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bengkalis menggunakan data dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang dihitung menggunakan bantuan Software Spectrum. Mengingat ketersediaan data dan akurasi hasil Proyeksi Penduduk di mana dalam penyusunan proyeksi penduduk Kecamatan untuk wilayah yang semakin kecil dan periode proyeksi semakin panjang, maka akurasi hasil proyeksi akan mengalami penurunan, untuk itu Proyeksi Penduduk di Kabupaten Bengkalis yang tersedia antara kurun waktu 2020 sampai dengan 2045.

### 2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

#### 2.6.1.1 Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 tercatat sebanyak 658.846 jiwa. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 668.781 jiwa pada tahun 2025 dan 715.745 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun 2035, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan diperkirakan mencapai 759.574 jiwa, dan terus bertambah menjadi 801.185 jiwa pada tahun 2040. Proyeksi penduduk Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan hingga mencapai 837.410 jiwa pada tahun 2045. Gambaran perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2023 hingga 2045 disajikan pada gambar dibawah:



Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

**Gambar II-74 Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2045**

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023-2045 masuk dalam klasifikasi Kota Besar. Pertambahan jumlah penduduk perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana wilayah. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel II-80 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2045**

Kecamatan (1)	Existing	Proyeksi Penduduk				
	2023 (2)	2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
Bengkalis	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587

Kecamatan (1)	Existing		Proyeksi Penduduk			
	2023 (2)	2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
Bantan	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
Bukit Batu	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163
Mandau	166.828	169.326	180.948	191.744	201.948	210.765
Rupat	40.550	41.123	44.227	47.165	49.991	52.504
Rupat Utara	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
Siak Kecil	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
Pinggir	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
Bandar Laksamana	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
Talang Muandau	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
Bathin Solapan	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
BENGKALIS	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

#### 2.6.1.1.1 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Proyeksi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2045 akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2023 sebesar 76,36 Jiwa/Km<sup>2</sup>, diproyeksikan meningkat hingga tahun 2045 menjadi 97,06 Jiwa/ Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mandau yaitu sebesar 407,04 Jiwa/ Km<sup>2</sup> dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Talang Muandau yaitu sebesar 32,77 Jiwa/ Km<sup>2</sup> pada tahun 2045. Peningkatan kepadatan penduduk menuntut perhatian serius dalam berbagai aspek perencanaan dan pengembangan daerah dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang memadai, termasuk perumahan, transportasi, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Peningkatan kepadatan penduduk juga mendorong kebutuhan akan perencanaan ruang dan pengembangan wilayah yang efisien, untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan meminimalkan risiko bencana. Berikut disajikan data proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Bengkalis menurut kecamatan tahun 2025-2045, yaitu:

**Tabel II-81 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan (1)	Existing		Proyeksi Kepadatan Penduduk			
	2023 (2)	2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
Bengkalis	198,54	200,21	209,79	217,87	224,78	229,69
Bantan	104,02	104,71	111,48	117,68	123,48	128,37
Bukit Batu	38,24	38,78	41,18	43,35	45,36	47,04
Mandau	322,19	327,01	349,46	370,30	390,01	407,04
Rupat	35,41	35,91	38,62	41,19	43,65	45,85
Rupat Utara	44,95	45,39	48,72	51,86	54,86	57,50
Siak Kecil	29,81	30,13	32,25	34,24	36,12	37,77
Pinggir	99,80	101,72	110,58	119,17	127,61	135,38
Bandar Laksamana	14,58	14,83	16,25	17,64	19,03	20,33
Talang Muandau	24,04	24,46	26,64	28,75	30,84	32,77
Bathin Solapan	171,36	175,19	187,61	199,23	210,28	219,93
BENGKALIS	76,36	77,51	82,96	88,04	92,86	97,06

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

Selain itu distribusi penduduk di Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan di dominasi oleh dua kecamatan yaitu Kecamatan Muandau sebesar 25,17% dan Kecamatan Bathin Solapan sebesar 17,71% pada tahun 2045. Berikut disajikan data proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Bengkalis menurut kecamatan tahun 2025-2045, yaitu:

**Tabel II-82 Proyeksi Distribusi Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan (1)	Existing	Proyeksi Distribusi Penduduk (%)				
	2023 (2)	2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
Bengkalis	13,98%	13,89%	13,60%	13,31%	13,02%	12,73%
Bantan	7,00%	6,94%	6,90%	6,87%	6,83%	6,80%
Bukit Batu	3,48%	3,47%	3,44%	3,42%	3,39%	3,36%
Mandau	25,32%	25,32%	25,28%	25,24%	25,21%	25,17%
Rupat	6,15%	6,15%	6,18%	6,21%	6,24%	6,27%
Rupat Utara	2,58%	2,57%	2,58%	2,58%	2,59%	2,60%
Siak Kecil	4,29%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,28%
Pinggir	11,74%	11,79%	11,97%	12,16%	12,34%	12,53%
Bandar Laksamana	2,89%	2,89%	2,96%	3,03%	3,10%	3,16%
Talang Muandau	5,03%	5,05%	5,13%	5,22%	5,31%	5,40%
Bathin Solapan	17,54%	17,66%	17,67%	17,69%	17,70%	17,71%
<b>BENGGALIS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil Kab. Bengkalis, 2024

#### 2.6.1.1.2 Persentase Penduduk Usia Tua

Kabupaten Bengkalis sudah memasuki era *ageing population* Dimana jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 65+ tahun sudah mencapai lebih dari sepuluh persen populasi pada tahun 2045. Pada tahun 2045 terdapat 96.236 jiwa penduduk lansia atau setara dengan 11,49% persen penduduk. Apabila Kabupaten Bengkalis berhasil menyiapkan penduduk lansia yang sehat dan produktif di masa depan, maka Kabupaten Bengkalis dapat memperpanjang periode bonus demografi yang berlanjut ke tahap kedua.

Proporsi penduduk non-produktif pada tahap tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai menerapkan kebijakan yang menunjang penuaan penduduk. Beberapa program yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan antara lain perluasan jaminan sosial, pengembangan program *Long-Term Care* (LTC), memperpanjang usia pensiun, mempromosikan jaminan hari tua, serta mengembangkan skema lapangan pekerjaan ramah lansia. Berikut disajikan hasil proyeksi penduduk usia tua Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2045, yaitu:

**Tabel II-83 Proyeksi Pesentase Penduduk Usia Tua Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2045**

Parameter	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Tua (65+)	28.893	31.071	42.898	58.043	76.907	96.236
Total Jumlah Penduduk	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410

Persentase Penduduk Usia Tua (65+)	4,39%	4,65%	5,99%	7,64%	9,60%	11,49%
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil, 2024

### 2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 tercatat sebanyak 336.794 jiwa. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 341.629 jiwa pada tahun 2025 dan 364.349 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun 2035, jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 385.245 jiwa, lalu bertambah menjadi 404.793 jiwa pada tahun 2040, dan terus meningkat hingga 421.452 jiwa pada tahun 2045.

Sementara itu, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 322.052 jiwa dan diproyeksikan bertambah menjadi 327.152 jiwa pada tahun 2025 serta 351.396 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun 2035, jumlah ini diperkirakan mencapai 374.329 jiwa, meningkat menjadi 396.392 jiwa pada tahun 2040, dan mencapai 415.958 jiwa pada tahun 2045.

**Tabel II-84 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023 -2045**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
<b>Laki-laki</b>	0–4	26.901	27.888	31.777	32.000	32.931	32.526
	5–9	33.076	31.496	27.789	31.676	31.908	32.845
	10–14	34.877	35.372	31.436	27.740	31.625	31.860
	15–19	27.137	27.991	35.281	31.360	27.679	31.560
	20–24	31.240	30.629	27.869	35.136	31.239	27.581
	25–29	27.279	28.208	30.478	27.740	34.985	31.115
	30–34	24.808	25.058	28.064	30.332	27.618	34.843
	35–39	24.781	24.576	24.901	27.901	30.168	27.481
	40–44	25.749	25.758	24.357	24.694	27.686	29.949
	45–49	22.680	23.277	25.381	24.020	24.375	27.352
	50–54	19.737	20.365	22.707	24.786	23.486	23.864
	55–59	14.382	15.268	19.522	21.806	23.838	22.630
	60–64	10.335	10.897	14.241	18.247	20.437	22.391
	65–69	6.686	7.181	9.729	12.766	16.407	18.448
	70–74	3.782	3.990	5.966	8.122	10.720	13.833
75+	3.344	3.675	4.851	6.919	9.691	13.174	
	<b>Jumlah</b>	<b>336.794</b>	<b>341.629</b>	<b>364.349</b>	<b>385.245</b>	<b>404.793</b>	<b>421.452</b>
<b>Perempuan</b>	0–4	24.883	26.043	30.752	31.182	32.311	32.134
	5–9	30.959	29.427	25.974	30.676	31.109	32.238
	10–14	32.692	33.077	29.392	25.944	30.642	31.075
	15–19	26.366	27.115	33.028	29.349	25.908	30.601
	20–24	29.156	28.796	27.052	32.953	29.285	25.855
	25–29	25.527	26.279	28.708	26.973	32.860	29.205
	30–34	24.342	24.342	26.181	28.604	26.880	32.750
	35–39	25.085	24.837	24.224	26.059	28.475	26.764
	40–44	25.483	25.687	24.668	24.065	25.895	28.301



Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
	45–49	21.437	22.255	25.420	24.420	23.833	25.656
	50–54	17.917	18.606	21.898	25.024	24.053	23.489
	55–59	13.349	14.145	18.147	21.376	24.446	23.517
	60–64	9.775	10.318	13.600	17.468	20.606	23.592
	65–69	6.859	7.323	9.653	12.753	16.412	19.406
	70–74	4.077	4.300	6.508	8.610	11.419	14.741
	75+	4.145	4.602	6.191	8.873	12.258	16.634
	<b>Jumlah</b>	<b>322.052</b>	<b>327.152</b>	<b>351.396</b>	<b>374.329</b>	<b>396.392</b>	<b>415.958</b>
<b>Laki-laki dan Perempuan</b>	0–4	51.784	53.931	62.529	63.182	65.242	64.660
	5–9	64.035	60.923	53.763	62.352	63.017	65.083
	10–14	67.569	68.449	60.828	53.684	62.267	62.935
	15–19	53.503	55.106	68.309	60.709	53.587	62.161
	20–24	60.396	59.425	54.921	68.089	60.524	53.436
	25–29	52.806	54.487	59.186	54.713	67.845	60.320
	30–34	49.150	49.400	54.245	58.936	54.498	67.593
	35–39	49.866	49.413	49.125	53.960	58.643	54.245
	40–44	51.232	51.445	49.025	48.759	53.581	58.250
	45–49	44.117	45.532	50.801	48.440	48.208	53.008
	50–54	37.654	38.971	44.605	49.810	47.539	47.353
	55–59	27.731	29.413	37.669	43.182	48.284	46.147
	60–64	20.110	21.215	27.841	35.715	41.043	45.983
	65–69	13.545	14.504	19.382	25.519	32.819	37.854
	70–74	7.859	8.290	12.474	16.732	22.139	28.574
	75+	7.489	8.277	11.042	15.792	21.949	29.808
	<b>Jumlah</b>	<b>658.846</b>	<b>668.781</b>	<b>715.745</b>	<b>759.574</b>	<b>801.185</b>	<b>837.410</b>
<b>Sex Rasio</b>	<b>104,58</b>	<b>104,43</b>	<b>103,69</b>	<b>102,92</b>	<b>102,12</b>	<b>101,32</b>	

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil, 2024

Proyeksi penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 104,58 pada tahun 2023 menjadi 101,32 pada tahun 2045 yang artinya, pada tahun 2045 akan datang jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Tingginya proyeksi jumlah penduduk perempuan di masa yang akan datang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diambil, seperti mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan formal dan non formal; menyediakan akses yang mudah dan terjangkau pada layanan kesehatan reproduksi; memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja; menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, seperti cuti orang tua, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas jam kerja; meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak-hak properti, hak-hak pernikahan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dalam perencanaan pembangunan, komposisi penduduk yang sering digunakan adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur. Komposisi ini tidak hanya mencerminkan proses demografi masa lalu tetapi sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikembangkan beberapa indikator yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk, salah satunya adalah rasio ketergantungan. Berikut disajikan proyeksi rasio ketergantungan Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2045, yaitu:

Tabel II-85 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2045

Parameter	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	183.388	183.303	177.120	179.218	190.526	192.678
15-64 Tahun	446.565	454.407	495.727	522.313	533.752	548.496
> 65 Tahun	28.893	31.071	42.898	58.043	76.907	96.236
Rasio Ketergantungan	47,54	47,18	44,38	45,43	50,10	52,67

Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil, 2024

Dependency ratio merupakan rasio yang menyatakan perbandingan penduduk belum produktif (usia di bawah 15 tahun) dan penduduk tidak produktif (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang berusia (15-64 tahun) atau dikatakan penduduk produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Bengkalis yang tertinggi diproyeksikan pada tahun 2045 yaitu sebesar 52,67% yang artinya bahwa dari 100 jiwa penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkalis menanggung 52-53 jiwa penduduk usia tidak produktif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya usia harapan hidup. Berdasarkan proyeksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Bengkalis telah mengalami bonus demografi karena beban ketergantungannya di bawah angka 50. Namun demikian bonus demografi ini akan berakhir sekitar tahun 2040 di mana angka beban ketergantungan sudah mulai naik di atas 50.



Sumber: Proyeksi Penduduk, diolah dari Data Disdukcapil, 2024

**Gambar II-75 Piramida Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan Tahun 2045**

**2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

**2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau persentase rumah tangga atau keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 adalah 79,68 persen. Diasumsikan bahwa persentase kepemilikan rumah di Kabupaten Bengkalis berlaku sama di seluruh kecamatan. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga adalah 4 orang, maka jumlah rumah tangga pada masing-masing tahun proyeksi menurut Kecamatan bisa didapatkan. Jika diharapkan pada tahun 2045, semua rumah tangga di Kabupaten Bengkalis sudah memiliki rumah sendiri (100 persen), maka target penyediaan rumah untuk setiap penggalan lima tahun seperti terlihat pada Tabel dibawah.

Demikian pula, kebutuhan rumah sampai tahun 2045 menunjukkan total untuk seluruh Kabupaten Bengkalis, dibutuhkan rumah sekitar 44.641 rumah baru. Adapun kecamatan dengan kebutuhan baru rumah tertinggi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2045 adalah Kecamatan Mandau sekitar 10.984 rumah dan Kecamatan Bathin Solapan sekitar 8.187 rumah. Berikut disajikan data proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045, yaitu:.

**Tabel II-86 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan (1)	Uraian (2)	Kondisi Tahun 2023 (3)	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
			2025 (4)	2030 (5)	2035 (6)	2040 (7)	2045 (8)
Bengkalis	Jumlah Penduduk	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587
	Jumlah Rumah Tangga	23.033	23.227	24.337	25.275	26.077	26.647
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	23.033	23.227	24.337	25.275	26.077	26.647
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	18.352	18.581	20.687	22.747	24.773	26.647
Bantan	Jumlah Penduduk	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
	Jumlah Rumah Tangga	11.528	11.604	12.354	13.042	13.684	14.227
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	11.528	11.604	12.354	13.042	13.684	14.227
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	9.186	9.283	10.501	11.738	13.000	14.227
Bukit Batu	Jumlah Penduduk	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163
	Jumlah Rumah Tangga	5.724	5.805	6.164	6.490	6.791	7.041
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	5.724	5.805	6.164	6.490	6.791	7.041
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	4.561	4.644	5.239	5.841	6.451	7.041

Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mandau	Jumlah Penduduk	166.828	169.326	180.948	191.744	201.948	210.765
	Jumlah Rumah Tangga	41.707	42.331	45.237	47.936	50.487	52.691
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	41.707	42.331	45.237	47.935	50.486	52.691
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	33.232	33.865	38.451	43.142	47.963	52.691
Rupat	Jumlah Penduduk	40.550	41.123	44.227	47.165	49.991	52.504
	Jumlah Rumah Tangga	10.138	10.281	11.057	11.791	12.498	13.126
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	10.138	10.281	11.057	11.791	12.498	13.126
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	8.078	8.225	9.398	10.612	11.873	13.126
Rupat Utara	Jumlah Penduduk	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
	Jumlah Rumah Tangga	4.253	4.295	4.610	4.907	5.191	5.442
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	4.253	4.295	4.610	4.907	5.191	5.442
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	3.389	3.436	3.919	4.416	4.931	5.442
Siak Kecil	Jumlah Penduduk	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
	Jumlah Rumah Tangga	7.066	7.141	7.645	8.115	8.562	8.951
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	7.066	7.141	7.645	8.115	8.562	8.951
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	5.630	5.713	6.498	7.303	8.134	8.951
Pinggir	Jumlah Penduduk	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
	Jumlah Rumah Tangga	19.337	19.709	21.425	23.089	24.725	26.231
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	19.337	19.709	21.425	23.089	24.725	26.231
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	15.407	15.768	18.211	20.780	23.489	26.231
Bandar Laksamana	Jumlah Penduduk	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
	Jumlah Rumah Tangga	4.754	4.835	5.297	5.750	6.202	6.625
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	4.754	4.835	5.297	5.750	6.202	6.625
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	3.788	3.868	4.502	5.175	5.892	6.625
Talang Muandau	Jumlah Penduduk	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
	Jumlah Rumah Tangga	8.288	8.435	9.185	9.914	10.634	11.298
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	8.288	8.435	9.185	9.914	10.634	11.298
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	6.604	6.748	7.807	8.923	10.102	11.298

Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bathin Solapan	Jumlah Penduduk	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
	Jumlah Rumah Tangga	28.886	29.532	31.626	33.584	35.446	37.073
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	28.886	29.532	31.626	33.584	35.446	37.073
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	23.016	23.625	26.882	30.225	33.674	37.073
BENGKALIS	Jumlah Penduduk	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410
	Jumlah Rumah Tangga	164.712	167.195	178.936	189.894	200.296	209.353
	Proyeksi Kebutuhan Rumah	164.712	167.195	178.936	189.894	200.296	209.353
	Persentase kepemilikan rumah sendiri	79,68	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Rumah Tangga yang sudah memiliki rumah sendiri	131.242	133.756	152.096	170.904	190.281	209.353

Keterangan: Asumsi pertumbuhan kepemilikan rumah sendiri 100 persen pada tahun 2045 dan asumsi jumlah anggota keluarga dalam 1 rumah tangga adalah 4 orang

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Ketersediaan air bersih sistem perpipaan (leding) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebesar 2,02%, ditargetkan hingga tahun 45 persediaan air bersih sitem perpipaan mencapai 100%. Jika dipakai standar kebutuhan air bersih per orang 120 liter/hari, maka bisa dihitung proyeksi kebutuhan air minum per harinya. Selain kebutuhan air domestik, diestimasikan kebutuhan air non domestik sebesar 67% dan kemungkinan kehilangan sekitar 20%. Demikian pula jumlah debit air bersih dari sistem pengolahan air bersih bisa dihitung dalam liter per detik. Pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Bengkalis adalah sekitar 209.771.205 liter per hari atau dengan kapasitas 2.428 liter/detik.

**Tabel II-87 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Bengkalis 2025-2045**

Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bengkalis	Jumlah Penduduk	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	23.078.816	23.273.208	24.385.864	25.325.535	26.128.982	26.700.045
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	267	269	282	293	302	309
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Bantan	Jumlah Penduduk	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	11.551.056	11.627.376	12.378.960	13.068.087	13.711.304	14.255.285
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	134	135	143	151	159	165
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Bukit Batu	Jumlah Penduduk	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163

Kecamatan (1)	Uraian (2)	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		(3)	2025 (4)	2030 (5)	2035 (6)	2040 (7)	2045 (8)
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	5.735.448	5.816.556	6.176.219	6.502.639	6.804.246	7.054.805
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	66	67	71	75	79	82
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Mandau	Jumlah Penduduk	166.828	169.326	180.948	191.744	201.948	210.765
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	41.790.414	42.416.068	45.327.476	48.031.824	50.587.896	52.796.582
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	484	491	525	556	586	611
Rupat	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	40.550	41.123	44.227	47.165	49.991	52.504
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	10.157.775	10.301.305	11.078.887	11.814.816	12.522.715	13.152.322
Rupat Utara	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	118	119	128	137	145	152
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
Siak Kecil	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	4.261.757	4.303.683	4.619.482	4.916.771	5.201.323	5.452.386
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	49	50	53	57	60	63
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Pinggir	Jumlah Penduduk	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	7.079.882	7.155.347	7.659.926	8.131.221	8.579.024	8.969.384
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	82	83	89	94	99	104
Bandar Laksamana	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	19.375.173	19.748.907	21.468.087	23.135.394	24.774.817	26.283.833
Talang Muandau	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	224	229	248	268	287	304
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
Bathin Solapan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	4.763.007	4.844.636	5.307.154	5.761.942	6.214.505	6.638.593
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	55	56	61	67	72	77
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Bengkalis	Jumlah Penduduk	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	8.304.326	8.451.989	9.203.184	9.934.069	10.654.768	11.320.986
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	96	98	107	115	123	131
Bengkalis	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	28.943.271	29.590.564	31.688.883	33.650.988	35.517.261	37.146.984
Bengkalis	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	335	342	367	389	411	430
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Jumlah Penduduk	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410

Kecamatan (1)	Uraian (2)	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		(3)	2025 (4)	2030 (5)	2035 (6)	2040 (7)	2045 (8)
	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	165.040.923	167.529.641	179.294.123	190.273.287	200.696.843	209.771.205
	Kapasitas yang dibutuhkan (liter/detik)	1.910	1.939	2.075	2.202	2.323	2.428
	Persentase layanan air minum perpipaan	2,02	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

### 2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Di dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, ditetapkan kebutuhan listrik adalah 450 watt per jiwa. Sedangkan menurut standar kebutuhan listrik negara maju adalah antara 700 hingga 1.200 watt per jiwa. Perkembangan kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diproyeksikan kebutuhan listrik di Riau meningkat terus hingga menjadi 800 watt per kapita pada tahun 2045.

Tabel II-88 Rata-Rata Jumlah Daya Listrik Per Kapita (Watt) Tahun 2021

No	Negara	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Jumlah Daya Listrik per Kapita (Watt)
1	Republik Rakyat Tiongkok	1.425.893.504	624
2	USA	336.997.632	1.285
3	India	1.407.563.904	117
4	Rusia	145.102.752	783
5	Jepang	124.612.528	836
6	Brazil	214.326.224	307
7	Korea Selatan	51.830.136	1.250
8	Jerman	83.408.560	700
9	Meksiko	126.705.136	271
10	Turki	84.775.408	382
11	Indonesia	273.753.184	117
12	Vietnam	97.468.024	268
13	Malaysia	33.573.872	513

Sumber: Wikipedia (List of Countries by Electricity Consumption)

Daya listrik terpasang dan daya listrik mampu untuk Provinsi Riau tahun 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah. Besar daya mampu listrik yang tersalurkan di Riau adalah sebesar 1.648,51 MW atau sebesar 248 watt per kapita. Dari total pembangkit tenaga listrik terpasang di Riau tersebut, hanya 1.090 MW yang berasal dari PLN (43,1%), selebihnya adalah dari pihak swasta. Sedangkan untuk daya mampu dari PLN lebih besar yaitu 57,7%. Menurut data dari Statistik PLN tahun 2021, daya tersambung di Provinsi Riau 3.716 MW yang terdiri dari rumah tangga 2.069 MW (55,68%), Industri 617 MW (16,6%), Bisnis 736 MW (19,8%), Sosial 169 MW (4,55%), Kantor Pemerintah 86 MW (2,31%), dan Penerangan Jalan Umum 37 MW (1%). PT Wilmar Nabati di Dumai sendiri

merupakan pelanggan PLN dengan daya tertinggi sebesar 60 MW (masuk kelompok industri).

**Tabel II-89 Besar Daya Listrik (dalam MW) di Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Sumber Energi Listrik	Daya Terpasang			Daya Mampu		
		PLN	Non PLN	Total	PLN	Non PLN	Total
1	PLTU (uap)	238,00	125,00	363	234	62	296
2	PLTG (gas)	165,80		165,8	119,21		119,21
3	PLTGU (gas uap)		30,00	30		26	26
4	PLTMG (mesin gas)	357,20	6,00	363,2	308,84	6	314,84
5	PLTD	214,86		214,86	174,86		174,86
6	PLTA	114,00		114	114		114
7	PLTMH (micro hydro)		0,06	0,06		0,06	0,06
8	PLTBg (bio gas)		29,94	29,94		24,2	24,2
9	PLTBm (bio massa)		1249,44	1.249,44		577,68	577,68
10	PLTS		1,36	1,36		1,36	1,36
11	PLT Hybrid		0,30	0,3		0,3	0,3
<b>Jumlah</b>		1.089,86 (43,1%)	1442,09	2.531,95	950,91 (57,7%)	697,6	1.648,51

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai perbandingan, menurut Wikipedia (*List of Countries by Electricity Consumption*) konsumsi energi listrik Indonesia adalah sebesar 282.000 Gwh (*giga watt hour*) per tahun pada tahun 2021, yang berarti daya listrik perkapita di Indonesia adalah 117 watt. Sementara itu, menurut data dari Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi energi listrik di Riau dan Kepri adalah sebesar 7.021 Gwh pada tahun 2021, yang berarti daya listrik perkapita yang terpakai di Riau dan Kepri adalah sebesar 91 watt. Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2045, sekitar 669,93 MW. Selain itu, disajikan data analisis proyeksi kebutuhan listrik per kecamatan di Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2025-2045, yaitu:

**Tabel II-90 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik per kapita (watt)</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>425</b>	<b>550</b>	<b>675</b>	<b>800</b>
Bengkalis	Jumlah Penduduk	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	22,85	27,87	41,37	55,60	70,41	85,27
Bantan	Jumlah Penduduk	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	11,44	13,93	21,00	28,69	36,95	45,53



Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bukit Batu	Jumlah Penduduk	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	5,68	6,97	10,48	14,28	18,33	22,53
Mandau	Jumlah Penduduk	166.828,00	169.325,62	180.948,01	191.743,81	201.947,69	210.764,80
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	41,37	50,80	76,90	105,46	136,31	168,61
Rupat	Jumlah Penduduk	40.550,00	41.122,98	44.227,09	47.164,94	49.990,88	52.504,28
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	10,06	12,34	18,80	25,94	33,74	42,00
Rupat Utara	Jumlah Penduduk	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	4,22	5,15	7,84	10,80	14,02	17,41
Siak Kecil	Jumlah Penduduk	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	7,01	8,57	13,00	17,85	23,12	28,64
Pinggir	Jumlah Penduduk	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	19,18	23,65	36,42	50,80	66,76	83,94
Bandar Laksamana	Jumlah Penduduk	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	4,72	5,80	9,00	12,65	16,75	21,20
Talang Muandau	Jumlah Penduduk	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	8,22	10,12	15,61	21,81	28,71	36,15
Bathin Solapan	Jumlah Penduduk	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	28,65	35,44	53,76	73,88	95,71	118,63
BENGKALIS	Jumlah Penduduk	658.846,00	668.781,00	715.745,00	759.574,00	801.185,00	837.410,00
	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	163,39	200,63	304,19	417,77	540,80	669,93

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

#### 2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Menurut SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, jumlah timbulan sampah per orang adalah 2,5 liter per hari untuk sampah rumah tangga, ditambah sepertiganya untuk timbulan sampah sejenis sampah rumah tangga (sampah kantor, pasar, perdagangan dan lainnya). Karena itu, proyeksi timbulan sampah Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2045 sebanyak 2.791,37 m<sup>3</sup>/hari. Selanjutnya disajikan data proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025-2045 yaitu:

**Tabel II-91 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan (1)	Uraian (2)	Kondisi Tahun 2023 (3)	Proyeksi Timbulan Sampah				
			2025 (4)	2030 (5)	2035 (6)	2040 (7)	2045 (8)
Bengkalis	Jumlah Penduduk	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	307,10	309,69	324,50	337,00	347,69	355,29
Bantan	Jumlah Penduduk	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	153,71	154,72	164,72	173,89	182,45	189,69
Bukit Batu	Jumlah Penduduk	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	76,32	77,40	82,19	86,53	90,54	93,88
Mandau	Jumlah Penduduk	166.828	169.326	180.948	191.744	201.948	210.765
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	556,09	564,42	603,16	639,15	673,16	702,55
Rupat	Jumlah Penduduk	40.550	41.123	44.227	47.165	49.991	52.504
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	135,17	137,08	147,42	157,22	166,64	175,01
Rupat Utara	Jumlah Penduduk	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	56,71	57,27	61,47	65,43	69,21	72,55
Siak Kecil	Jumlah Penduduk	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	94,21	95,21	101,93	108,20	114,16	119,35
Pinggir	Jumlah Penduduk	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	257,82	262,79	285,67	307,86	329,67	349,75
Bandar Laksamana	Jumlah Penduduk	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	63,38	64,47	70,62	76,67	82,69	88,34
Talang Muandau	Jumlah Penduduk	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	110,50	112,47	122,46	132,19	141,78	150,65
Bathin Solapan	Jumlah Penduduk	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	385,14	393,75	421,68	447,78	472,62	494,30
BENGKALIS	Jumlah Penduduk	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410
	Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	2.196,15	2.229,27	2.385,82	2.531,91	2.670,62	2.791,37

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan proyek peningkatan timbulan sampah total, maka layanan terhadap pengelolaan persampahan dengan penyediaan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga diharapkan meningkat seperti yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel II-92 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045**

Tahun	Penduduk (Orang)	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah		
			TPA	TPST	TPS3R
<b>Kondisi 2023</b>	658.846	1.943	4	0	6
<b>2025</b>	668.781	1.994	4	2	12

Tahun	Penduduk (Orang)	Proyeksi Timbunan Sampah (Ton)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah		
			TPA	TPST	TPS3R
2030	715.746	2.088	4	3	15
2035	759.575	2.162	4	5	17
2040	791.185	2.225	4	7	19
2045	837.409	2.280	4	7	21

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

#### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045

Menurut standar WHO, untuk 1.000 penduduk harus dipersiapkan 1 tempat tidur rumah sakit. Saat ini, di Kabupaten Bengkalis terdapat 6 Rumah Sakit. Permasalahan pemenuhan tempat tidur rumah sakit bukan hanya pada jumlahnya, tetapi juga pada penyebarannya. Di Kabupaten Bengkalis, sebaran fasilitas Kesehatan masih belum merata pada setiap Kecamatan. Dengan mengasumsikan satu rumah sakit memiliki rata-rata 100 tempat tidur, maka masih diperlukan penambahan 2 unit Rumah sakit lagi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2035 dan jumlahnya tetap hingga tahun 2045 yaitu menjadi 8 unit rumah sakit. Adapun jumlah Puskesmas saat ini berjumlah 19. Standar WHO untuk Puskesmas adalah 1: 30.000. Karena itu, seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, maka layanan Puskesmas juga diharapkan meningkat, sehingga pada 2045 dibutuhkan penambahan puskesmas baru yaitu sebanyak 9 puskesmas. Selain itu, dengan mengasumsikan kebutuhan Puskesmas Pembantu adalah 1:15.000 penduduk, maka jumlah Puskesmas Pembantu saat ini tergolong mengalami kelebihan dengan distribusi yang tidak merata di sebagian besar Kecamatan. Berikut disajikan data proyeksi fasilitas kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045, yaitu:

**Tabel II-93 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bengkalis	Jumlah Penduduk	92.131	92.907	97.349	101.100	104.307	106.587
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	1	1	1	1	1	1
	• Puskesmas	3	3	3	3	3	4
	• Puskesmas Pembantu	12	6	6	7	7	7
Bantan	Jumlah Penduduk	46.112	46.417	49.417	52.168	54.736	56.907
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	0	0
	• Puskesmas	2	2	2	2	2	2
	• Puskesmas Pembantu	8	3	3	3	4	4
Bukit Batu	Jumlah Penduduk	22.896	23.220	24.656	25.959	27.163	28.163
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	1	1	1	1
	• Puskesmas	1	1	1	1	1	1

Kecamatan (1)	Uraian (2)	Kondisi Tahun 2023 (3)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025 (4)	2030 (5)	2035 (6)	2040 (7)	2045 (8)
	• Puskesmas Pembantu	5	2	2	2	2	2
Mandau	Jumlah Penduduk	166.828	169.326	180.948	191.744	201.948	210.765
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	5	5	5	5	5	5
	• Puskesmas	2	6	6	6	7	7
	• Puskesmas Pembantu	3	11	12	13	13	14
Rupat	Jumlah Penduduk	40.550	41.123	44.227	47.165	49.991	52.504
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	0	0
	• Puskesmas	2	1	1	2	2	2
	• Puskesmas Pembantu	9	3	3	3	3	4
Rupat Utara	Jumlah Penduduk	17.013	17.180	18.441	19.628	20.764	21.766
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	1	1	1	1	1
	• Puskesmas	1	1	1	1	1	1
	• Puskesmas Pembantu	5	1	1	1	1	1
Siak Kecil	Jumlah Penduduk	28.263	28.564	30.579	32.460	34.248	35.806
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	0	0
	• Puskesmas	2	1	1	1	1	1
	• Puskesmas Pembantu	4	2	2	2	2	2
Pinggir	Jumlah Penduduk	77.346	78.838	85.701	92.357	98.901	104.925
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	1	1
	• Puskesmas	1	3	3	3	3	3
	• Puskesmas Pembantu	5	5	6	6	7	7
Bandar Laksamana	Jumlah Penduduk	19.014	19.340	21.186	23.002	24.808	26.501
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	0	0
	• Puskesmas	1	1	1	1	1	1
	• Puskesmas Pembantu	3	1	1	2	2	2
Talang Muandau	Jumlah Penduduk	33.151	33.740	36.739	39.657	42.534	45.194
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	0	0	0	0	0
	• Puskesmas	1	1	1	1	1	2
	• Puskesmas Pembantu	3	2	2	3	3	3
Bathin Solapan	Jumlah Penduduk	115.542	118.126	126.503	134.335	141.785	148.291
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	0	1	1	1	1	1
	• Puskesmas	3	4	4	4	5	5
	• Puskesmas Pembantu	3	8	8	9	9	10
BENGKALIS	Jumlah Penduduk	658.846	668.781	715.745	759.574	801.185	837.410
	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						

Kecamatan  (1)	Uraian  (2)	Kondisi Tahun 2023  (3)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025  (4)	2030  (5)	2035  (6)	2040  (7)	2045  (8)
	• Rumah Sakit (100 Tempat Tidur)	6	8	9	9	10	10
	• Puskesmas	19	22	24	25	27	28
	• Puskesmas Pembantu	60	45	48	51	53	56

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkulu, Diolah Tim, 2024

### 2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2017 tentang standar pendidikan anak usia dini (PAUD), menyatakan bahwa rasio guru untuk PAUD adalah 1 guru untuk 15 siswa PAUD. Sementara itu, Permendikbud 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD/MI adalah 28 orang, untuk SMP/MTs sebesar 32 orang, dan untuk SMA/SMK/MA 36 orang. Untuk kenyamanan diambil jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar SD/MI sebesar 25 orang, untuk SMP/MTs sebesar 30 orang, serta untuk SMA/SMK/MA sebesar 35 orang.

PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain dan TK berada pada usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan SD/MI berada pada rentang usia 7 sampai 12 tahun, untuk SMP/MTs berada pada rentang usia 13 sampai 15 tahun. Jumlah peserta didik pada masing-masing tingkatan ini diproyeksikan berdasarkan kelompok umur dari data Disdukcapil Kabupaten Bengkulu yang ada. Jumlah rombongan belajar ideal dengan hitungan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar masing-masing tingkatan adalah 15, 25, 30, dan 35 didapat dengan membagi jumlah peserta didik dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar. Jumlah sekolah eksisting dan jumlah murid 2023 eksisting dicantumkan sebagai baseline data.

Jumlah kelompok bermain dan TK saat ini sebanyak 262 unit, jumlah ini sangat kurang dari kebutuhan yang sebenarnya. Hingga tahun 2045 di butuhkan sebanyak 604 unit baru kelompok bermain dan TK. Sementara itu jumlah SD/MI sebanyak 388 unit mengalami kelebihan dari jumlah yang seharusnya dengan distribusi yang tidak merata di sebagian besar Kecamatan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah sekolah SMP/MTS saat ini berjumlah 168 unit, mengalami kelebihan dari jumlah yang seharusnya dengan distribusi yang tidak merata di sebagian besar Kecamatan. Jumlah penduduk pada masing-masing tingkatan pendidikan tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-94 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023			Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025			Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2030			Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2035			Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2040			Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2045		
	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah	Jlh pdk dan Usia peserta didik	Rombel	Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Jumlah Penduduk	658.846			668.781			715.745			759.574			801.185			837.410		
Proyeksi Fasilitas Pendidikan																		
• Kelompok Bermain dan TK	35.971	2.398	262	35.155	2.344	781	34.011	2.267	756	37.577	2.505	835	38.255	2.550	850	38.965	2.598	866
• SD/MI	96.071	3.843	388	97.779	3.911	435	98.067	3.923	436	99.303	3.972	441	107.218	4.289	477	109.557	4.382	487
• SMP/MTs	45.138	1.505	168	46.064	1.535	219	48.145	1.605	229	49.512	1.650	236	50.144	1.671	239	51.642	1.721	246

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

**Tabel II-95 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045**

Kecamatan	Jenis Fasilitas Pendidikan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bengkalis	Kelompok Bermain dan TK	29	109	103	111	111	110
	SD/MI	62	65	66	67	68	69
	SMP/MTs	27	30	31	31	31	31
Bantan	Kelompok Bermain dan TK	36	40	52	57	58	59
	SD/MI	37	30	30	30	33	33
	SMP/MTs	17	15	16	16	16	17
Bukit Batu	Kelompok Bermain dan TK	8	15	26	29	29	29
	SD/MI	21	15	15	15	16	16
	SMP/MTs	7	8	8	8	8	8
Mandau	Kelompok Bermain dan TK	63	150	191	211	214	218
	SD/MI	72	100	110	111	120	123

Kecamatan  (1)	Jenis Fasilitas Pendidikan  (2)	Kondisi Tahun 2023  (3)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025  (4)	2030  (5)	2035  (6)	2040  (7)	2045  (8)
Rupat	SMP/MTs	24	30	58	60	60	62
	Kelompok Bermain dan TK	15	25	47	52	53	54
	SD/MI	39	27	27	27	30	31
Rupat Utara	SMP/MTs	17	13	14	15	15	15
	Kelompok Bermain dan TK	8	15	19	22	22	23
	SD/MI	15	11	11	11	12	13
Siak Kecil	SMP/MTs	5	6	6	6	6	6
	Kelompok Bermain dan TK	10	15	32	36	36	37
	SD/MI	22	19	19	19	20	21
Pinggir	SMP/MTs	9	9	10	10	10	11
	Kelompok Bermain dan TK	42	70	90	102	105	108
	SD/MI	33	41	52	54	59	61
Bandar Laksamana	SMP/MTs	21	26	27	29	29	31
	Kelompok Bermain dan TK	5	10	22	25	26	27
	SD/MI	14	13	13	13	15	15
Talang Muandau	SMP/MTs	6	6	7	7	7	8
	Kelompok Bermain dan TK	14	20	39	44	45	47
	SD/MI	20	22	22	23	25	26
Bathin Solapan	SMP/MTs	11	11	12	12	13	13
	Kelompok Bermain dan TK	32	70	134	148	150	153
	SD/MI	53	77	77	78	84	86
BENGKALIS	SMP/MTs	24	39	41	42	42	44
	Kelompok Bermain dan TK	262	489	755	837	849	865
	SD/MI	388	420	442	448	482	494
	SMP/MTs	168	193	230	236	237	246

Sumber: Disdukcapil dan BPS Bengkalis, Diolah Tim, 2024

## 2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

### 2.7.1 Arah Kebijakan Wilayah Sumatra

Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatra bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra (*silk road*) dan wilayah ALKI I serta SLOC (*Sea Line of Communication*) sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit ekonomi baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian agroindustri, pariwisata, perkotaan dan kawasan konservasi strategis. Termasuk, optimalisasi beberapa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti Kawasan Industri (KI) , Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) , Wilayah Metropolitan (WM) , dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan .

Untuk mendukung ini, *backward* dan *forward linkage* serta konektivitas untuk efisiensi biaya produksi perlu terus ditingkatkan. Pusat - pusat pertumbuhan harus lebih diintegrasikan dengan simpul - simpul transportasi melalui upaya peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya, serta kereta api terutama untuk angkutan barang . Sementara itu, pada beberapa wilayah di Sumatra telah diterapkan rintisan *smart city*, *creative financing* dan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Wilayah Sumatra diarahkan menjadi "*Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia*". Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan , pengembangan Wilayah Sumatra diarahkan ke dalam 6 ( enam ) prioritas , yaitu :

1. Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi / 3T;
2. Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan - strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik dan biru pengembangan ekonomi terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*;



3. Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;
4. Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti penglambangan multi-infrastruktur *backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;
5. Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan
6. Keenam, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatra.

Selain itu, pengembangan multi-infrastruktur *backbone* & *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas pengembangan konektivitas Sumatra, Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka) dan konektivitas Sumatra -Jawa (di Selat Sunda), yang bertujuan untuk mewujudkan konektivitas Sumatra- Jawa-ASEAN guna menurunkan biaya logistik. Selanjutnya pemanfaatan Sloc (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatra bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.

## 2.7.2 Arah Kebijakan Wilayah Provinsi Riau

### 2.7.2.1 Arah kebijakan Wilayah berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023- 2043

#### A. Konsep pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043 Konsep pengembangan wilayah RTRW) Provinsi Riau dilakukan dengan pendekatan cluster wilayah promosi pusat pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan melalui pengembangan ekonomi lokal dan inovasi wilayah yang didukung oleh infrastruktur wilayah terintegrasi berbasis wilayah sungai yang memperhatikan hubungan kawasan hulu – tengah – hilir (berorientasi hubungan daratan, pesisir dan laut) di Provinsi Riau.

Pendekatan cluster atau Wilayah Pengembangan (WP) ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi wilayah ke dalam potensi urban region sehingga tercipta kawasan perkotaan yang terintegrasi antar wilayah sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan daya dukung lingkungan. Dengan konsep pengembangan wilayah ini, maka wilayah Provinsi Riau dibagi menjadi 3 (tiga) WP, yaitu:

1. WP Pekansikawan, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. WP Durolis, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis; dan
3. WP Giring, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengembangan wilayah Provinsi Riau tersebut secara spesifik terdiri dari 4 pengembangan wilayah terintegrasi, yaitu (1) Pendekatan Berbasis Kawasan Metropolitan, (2) Pendekatan Berbasis Pesisir, (3) Pendekatan Berbasis Kepulauan, dan (4) Pendekatan Berbasis wilayah pendukung.

Wilayah Hilir: wilayah hilir di Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis yaitu terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara, namun di satu sisi kerusakan lingkungan dan juga potensi ancaman bahaya dapat mengganggu kegiatan di wilayah hilir atau pesisir Provinsi Riau. Pengembangan pada wilayah hilir difokuskan untuk konservasi wilayah pesisir untuk mengurangi kerusakan pada ekosistem pesisir yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi dan juga penggenangan pesisir yang parah.

Konsep spasial pengembangan transportasi terintegrasi ini berupa jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) berfungsi sebagai jaringan aksesibilitas primer yang akan membentang dari Kota Pekanbaru (sebagai pusat) menuju arah utara (Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir), arah timur (Kabupaten Siak), arah selatan (Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), arah barat (Kabupaten Kampar), dan. Kemudian, jaringan jalan nasional akan menghubungkan gerbang tol-gerbang tol dengan wilayah-wilayah pendukung. Sementara, wilayah-wilayah kepulauan yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, serta Kabupaten Indragiri Hilir akan dilayani oleh layanan angkutan penyeberangan serta pembangunan dan pengembangan jembatan. Selain itu, perencanaan integrasi moda antar simpul transportasi darat dan perairan perlu diterapkan agar pelayanan angkutan umum antar moda dapat berjalan secara optimal.

Untuk mendukung konsep pengembangan wilayah Provinsi Riau, pengembangan ekonomi Provinsi Riau akan diarahkan pada pengembangan kegiatan hulu (pertanian) hingga hilir (industri) yang berbasis pada kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## B. Pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Riau

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau terutama dibentuk oleh jaringan prasarana transportasi, pusat-pusat permukiman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, dan fungsi primer. Pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan struktur ruang yang lebih bersifat horizontal dibandingkan berhirarki secara vertikal, serta penguatan struktur mikro pada satuan ruang yang lebih efisien melalui pembangunan feeder-road dan fungsi transshipment point bagi sentra-sentra produksi.

Pengembangan hirarki fungsional yang lebih bersifat horizontal dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ruang yang lebih terdesentralisasi pada keberadaan sumberdaya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional (*balance growth*). Konsep ini mendorong terciptanya satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

**Tabel II-96 Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Riau**

PKW	PKSN	PKL
1. Bengkalis	1. Kabupaten Bengkalis	1. Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis 2. Duri di Kabupaten Bengkalis 3. Tanjung Medang di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Buku Rencana Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi adalah kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Kawasan Budidaya Ruang di wilayah Provinsi Riau diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel II-97 Kawasan Budidaya di Wilayah Provinsi Riau**

No	Kawasan Peruntukan	Lokasi (Kab/Kota)	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kawasan Hutan Produksi	1. Bengkalis	520.465	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 1.148.515 hektar.
2	Kawasan Pertanian	1. Bengkalis	180.431	Kawasan pertanian tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 2.832.506,23 hektar. Kawasan pertanian di Provinsi Riau, meliputi Kawasan tanaman pangan,

No	Kawasan Peruntukan	Lokasi (Kab/Kota)	Luas (Ha)	Keterangan
				Kawasan perkebunan, dan Kawasan hortikultura.
3	Kawasan Perikanan	1. Bengkalis	1.824	Kawasan Perikanan di Provinsi Riau tersebar pada 6 (enam) kabupaten/kota dan wilayah perairan pesisir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rencana alokasi ruang kawasan perikanan seluas kurang lebih 1.053.494 hektar
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	1. Bengkalis	13.339	Kawasan Pertambangan dan Energi di Provinsi Riau berdasarkan data RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038, data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aktif. Kawasan Pertambangan dan Energi tersebar pada 11 (lima) kabupaten/kota dan perairan pesisir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, rencana alokasi ruang Kawasan Pertambangan dan Energi seluas kurang lebih 76.792 hektar
5	Kawasan Industri	1. Bengkalis	4.580	Kawasan peruntukan industri meliputi industri kehutanan, industri makanan, industri kertas, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia dan farmasi, serta industri biodiesel yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
6	Kawasan Pariwisata	1. Bengkalis	5.350	Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata

No	Kawasan Peruntukan	Lokasi (Kab/Kota)	Luas (Ha)	Keterangan
				baik alam, buatan, maupun budaya
7	Kawasan Permukiman	1. Bengkalis	49.791	Rencana alokasi ruang kawasan permukiman tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau seluas kurang lebih 427.912 hektar.
8	Kawasan Transportasi	1. Bengkalis	14	Kawasan transportasi pada wilayah darat berupa kawasan bandar udara yang tersebar di 8 kabupaten/kota sedangkan kawasan transportasi pada wilayah perairan pesisir berupa kawasan pelabuhan.

Sumber: Draft Revisi RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043

### C. Kebijakan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangan wilayah yang termuat dalam Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043, selain terkait dengan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, juga memperhatikan arahan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi yang terdiri dari:

#### 1. Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

##### a) Kawasan Duri-Dumai

Kawasan Duri-Dumai direncanakan sebagai pusat pertumbuhan pada WP Durolis (Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Bengkalis). Kawasan ini strategis terutama untuk pengembangan kawasan industri hulu agro dan migas, yang mana saat ini di kawasan ini telah terbangun sejumlah industri hulu agro dan migas. Kawasan Duri-Dumai ditetapkan sebagai kawasan strategis karena memiliki kriteria:

- Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan, dan memiliki potensi ekspor. Sebagai kawasan yang tumbuh karena pertumbuhan kegiatan industri yang sangat masif, terutama pada sektor industri hulu agro dan migas, aktivitas pada kawasan Duri-Dumai telah memberikan kontribusi tinggi pada perekonomian Provinsi Riau sejak dua puluh tahun terakhir. Kedua sektor ini juga memiliki nilai ekspor yang tinggi

hingga skala internasional. Pengembangan industri hulu agro yang merupakan sektor prospektif hingga dua puluh tahun mendatang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya di wilayah Riau bagian utara. Selain itu, bertumbuhnya kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini juga diharapkan dapat menjadi outlet Provinsi Riau bagian utara.

- Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi. Berkaitan dengan hal ini, Kota Dumai ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Dalam RPIP Riau 2018-2038, pusat pertumbuhan industri di Kota Dumai berada pada Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, dan Kawasan Industri Pelindo.
- Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (khususnya pada kawasan industri Duri dan kawasan industri Dumai).
- Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi. Wilayah ini dilalui Jalan Lintas Sumatera, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, serta Pelabuhan Dumai.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Duri-Dumai dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel II-98 Arah Kebijakan Kawasan Duri-Dumai**

Nilai Strategis Kawasan	Kawasan Duri-Dumai memiliki nilai strategis berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan (industri hulu sawit dan migas, pertanian, pertambangan, dan perdagangan), dan potensi ekspor.</li> <li>• Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi (termasuk WPPI (RIPIN, 2015)).</li> <li>• Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (Kawasan Industri Duri dan Kawasan Industri Dumai)</li> <li>• Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi (jalan lintas sumatera, tol Pekanbaru-Dumai, pelabuhan)</li> </ul>
Delineasi	Delineasi Kawasan Duri-Dumai terdiri dari kawasan di sepanjang kawasan industri Duri dan Kota Dumai, yang secara rinci delineasi kawasan ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bengkalis.</li> <li>• Kota Dumai.</li> </ul>
Tujuan pengembangan	Tujuan penetapan Kawasan Duri-Dumai sebagai kawasan strategis adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara (WP Durolis) yang berbasis industri dan jasa.

Arahan pengembangan	<p>Arahan pengembangan Kawasan Duri-Dumai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar</li> <li>• Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa</li> <li>• Pengembangan dan pemberdayaan industri lokal</li> <li>• Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal</li> </ul>
---------------------	--

Sumber: *Draf Revisi RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043*

b) Kawasan Pariwisata Pulau Rupat

Pulau Rupat bagian utara memiliki berbagai potensi wisata alam, terutama karena keindahan pantainya. Pulau Rupat Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Riau. Terletak di utara Pulau Rupat, Kecamatan Rupat Utara terdiri dari 5 desa yaitu Kadur, Tanjung Punak, Teluk Rhu, Titi Akar, dan ibu kota kecamatan Tanjung Medang. Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupat Utara adalah 628,50 Km dengan desa terluas yaitu Desa Titi Akar seluas 300,00 Km atau sebesar 47,73 persen dari luas Kecamatan Rupat Utara. Salah satu wisata unggulan di Pulau Rupat bagian utara adalah Pantai Pesona Pulau Rupat Utara yang merupakan objek pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bengkalis. Pantai ini termasuk salah satu dari lima daerah unggulan wisata dalam Master Plan Pariwisata Nasional untuk Provinsi Riau. Selain itu, di Pulau Rupat ada pantai yang cukup dikenal seperti Pantai Rhu di Desa Teluk Rhu, Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam, Pantai Lapin di Desa Tanjung Punak, Pantai Alohong, dan Pantai Makeruh.

Selain wisata alam, Dinas Pariwisata Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya menggelar kegiatan Festival tahunan Pulau Rupat. Festival pantai tersebut menampilkan berbagai macam perlombaan bernuansa bahari maupun kebudayaan, diantaranya lomba yang sering di adakan seperti parade pancung, lomba pancung, lomba mencari kepah, serta windsurfing. Di sekitar kawasan wisata juga telah didukung akomodasi bagi wisatawan berupa penginapan atau homestay. Untuk menuju Pulau Rupat, telah didukung pula aksesibilitas transportasi, yaitu dari Kota Pekanbaru melewati tol Pekanbaru-Dumai, kemudian menuju Pelabuhan Sri Tanjung. Wisatawan kemudian dapat menggunakan kapal Roro atau speedboat menuju Pulau Rupat.

Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Pariwisata Pulau Rupat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel II-99 Arahan Kebijakan Kawasan Pariwisata Pulau Rupat**

Nilai Strategis Kawasan	Kawasan Pariwisata Pulau Rupat memiliki nilai strategis berupa kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi (pengembangan sektor wisata)
Delineasi	Delineasi Kawasan Pariwisata Pulau Rupat terletak di Kabupaten Bengkalis.
Tujuan pengembangan	Tujuan penetapan Kawasan Pariwisata Pulau Rupat sebagai kawasan strategis adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata Pulau Rupat.
Arahan pengembangan	Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Rupat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Pariwisata Alam Pantai dan Pulau sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Skala Nasional dengan diversifikasi daya tarik wisata buatan.</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan wisata.</li> <li>• Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, khususnya untuk meningkatkan amenities wisatawan.</li> </ul>

Sumber: *Draf Revisi RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043*

## 2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis di dalam Draf RTRW Provinsi Riau 2023-2043 adalah Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukti Batu termasuk dalam kawasan lindung lainnya yang memiliki fungsi cagar biosfer sebagaimana ditetapkan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera. Kawasan ini terletak di dalam Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Riau, merupakan suaka margasatwa yang memiliki ribuan keanekaragaman hayati. Koridor ekologi yang menggabungkan dua suaka margasatwa, yakni Giam Siak Kecil dan Bukit Batu. Kawasan Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektare (ha) menempati posisi di bagian Utara Kabupaten Siak, sedangkan SM Bukit Batu seluas 21.500 ha berada di barat daya Kabupaten Bengkalis. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu merupakan bentangan alam berupa hutan rawa gambut serta perairan dan tasik (danau) dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

### C. Infrastruktur

Kebutuhan air bersih dari leding yang terjamin kualitas dan kuantitasnya sangat diperlukan terutama di wilayah pesisir yang air tanahnya berkualitas buruk (rawa dan gambut) seperti di pesisir Rokan Hilir, pesisir Dumai, pesisir Kabupaten Bengkalis dan Pulau Bengkalis, Kepulauan Meranti, pesisir Siak, pesisir Pelalawan, pesisir Inhu, dan Inhil. Pembangunan SPAM Regional terutama di kawasan pesisir perlu diprioritaskan



## D. Lingkungan

Penataan, konservasi, dan pengelolaan lahan gambut tersebar di pesisir Provinsi Riau harus disinkronkan dengan upaya penyediaan air baku untuk air bersih, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karena rawan terbakar di musim kemarau), serta untuk kepentingan pariwisata lingkungan perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

## E. Kerjasama Kawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2020 – 2025 menyatakan: Pulau Rupaat ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

## F. Kawasan Industri

Kawasan industri saat ini yang berada di Dumai, Tanjung Buton, Tenayan, dan Kuala Enok memiliki prospek untuk terus dikembangkan. Kawasan Industri di Kota Dumai yang saat ini ada di Pelintung, Lubuk Gaung, Dumai Timur, Dumai Kota, dan Dumai Barat berpotensi untuk terus berkembang ke arah utara Dumai dan ke arah timur sampai ke rencana kawasan industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis.

### 2.7.2.2 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Berdasarkan sektor PDRB yang menjadi unggulan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bengkalis secara rata-rata cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Riau. Meskipun demikian tingkat pengangguran terbuka adalah tertinggi di Riau, dan APK/APM SMA nya masih dibawah rata-rata Riau. Infrastruktur kewilayahan berupa penyeberangan Roro di Sungai Pakning-Bengkalis dan Dumai-Rupaat masih bermasalah dengan antrian yang panjang terutama pada volume puncak liburan dan hari besar. Padahal, transportasi penyeberangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai faktor seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Perekonomian Kabupaten Bengkalis banyak tergantung pada aktifitas pertambangan migas di Duri dan sekitarnya, meskipun produksinya relatif menurun. Jalan lingkar pulau di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupaat masih belum tuntas, padahal sangat penting untuk kegiatan perekonomian dan aktifitas sosial masyarakat.

### 2.7.3 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Bengkalis

#### 2.7.3.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pemukiman terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-pusat lain. Berikut disajikan sistem pusat pemukiman di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**Tabel II-100 Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Bengkalis**

No	Sistem Pusat Pemukiman	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan
2	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	a. Kecamatan Bengkalis b. Kecamatan Bantan
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. PKL Sungai Pakning b. PKL Duri berada di Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Bathin Solapan
4	Pusat-pusat lain	<p><b>Pusat Pelayanan Kawasan</b></p> <p>a. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>b. Pusat Pelayanan Kawasan Pinggir berada di Kecamatan Pinggir.</p> <p>c. Pusat Pelayanan Kawasan Sebangar berada di Kecamatan Bathin Solapan; dan</p> <p>d. Pusat Pelayanan Kawasan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupa Utara.</p> <p><b>Pusat Pelayanan Lingkungan</b></p> <p>a. Pusat Pelayanan Lingkungan Meskom berada di Kecamatan Bengkalis.</p> <p>b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pematang Duku berada di Kecamatan Bengkalis.</p> <p>c. Pusat Pelayanan Lingkungan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan.</p> <p>d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sepotong berada di Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>e. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu.</p> <p>f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tenggayun berada di Kecamatan Bandar Laksamana.</p> <p>g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bathin Sobanga berada di Kecamatan Bathin Solapan.</p> <p>h. Pusat Pelayanan Lingkungan Beringin berada di Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>i. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupa.</p> <p>j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangkalan Nyirih berada di Kecamatan Rupa.</p> <p>k. Pusat Pelayanan Lingkungan Kadur berada di Kecamatan Rupa Utara.</p>

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

Sistem jaringan prasarana Kabupaten Bengkalis terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Berikut disajikan sistem jaringan prasarana Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**Tabel II-101 Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Bengkalis**

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
1	Sistem jaringan transportasi;	<p><b>Sistem Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan arteri primer, meliputi: Bts. Kota Dumai-Duri; Duri-Kandis; dan Simpang Batang-Simpang Kulim.</li> <li>b. Jalan Kolektor Primer meliputi: Sei. Pakning (Km 130)-Teluk Masjid-Simpang Pusako; Dumai-Sepahat; Sepahat-Sei. Pakning (Km 130); Bengkalis-Ketam Putih; Jembatan Ketam Putih-Tanjung Padang; Sontang-Simpang Jurong-Duri; Batu Panjang-Pangkalan Nyirih; Air Putih-Selat Baru; Batu Panjang-Tanjung Kapal; Jl. Bantan; Lingkar Barat (Duri); Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang; Bengkalis-Muntai; Buruk Bakul-Langkat; Jl. Berancah-Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja; Tanjung Kapal-Jl. Pemuda; Duri-Sei. Pakning; Selat Baru-Pantai; Bengkalis-Perapat Tunggal; Jl. Gajah Mada-Sebangar Duri; Lingkar Timur (Duri); Jembatan Rumat-Dumai; dan Jembatan Bukit Batu-Bengkalis.</li> <li>c. Jalan Kolektor Sekunder berupa Jl. Jenderal Sudirman.</li> <li>d. Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan Jalan Tol Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapa.</li> <li>e. Terminal Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Mandau</li> <li>f. Terminal Penumpang Tipe C berada di seluruh Kecamatan.</li> <li>g. Terminal Barang di Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Mandau; Kecamatan Rumat; dan Kecamatan Rumat Utara.</li> <li>h. Jembatan Timbang berada di Kecamatan Pinggir.</li> <li>i. Jembatan berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Siak Kecil; Kecamatan Bathin Solapan Kecamatan Rumat; Kecamatan Rumat Utara; Kecamatan Pinggir; dan Kecamatan Talang Muandau.</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Keteta Api</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan jalur kereta api umum, meliputi: Rantau Prapat - Duri – Pekanbaru; Dumai – Pelintung – Buruk Bakul – Tanjung Buton; dan Duri – Tambusai – Ujung Batu – Kandis.</li> <li>b. Stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang berada di: Kecamatan Pinggir; Kecamatan Mandau; Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil.</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lintas Penyeberangan Antarnegara, meliputi: Tanjung Medang (Indonesia)-Port Dickson (Malaysia); dan Bengkalis (Indonesia)-Malaka (Malaysia).</li> </ul>

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		<p>b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi yaitu Bengkalis-Tanjung Balai.</p> <p>c. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi: Rupa-Kota Dumai; Ketam Putih-Dakkal; Bengkalis-Mengkapan; dan Kampung Balak-Sei Selari.</p> <p>d. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten meliputi: Air Putih-Sei. Selari; Prapat Tunggal-Tanjung Leban; Prapat Tunggal-Pergam/Sukarjo Mesim; dan Tanjung Leban-Pergam/Sukarjo Mesim.</p> <p>e. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan berupa Pelabuhan Siak Kecil berada di Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>f. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II meliputi: pelabuhan penyeberangan Air Putih/Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Rupa/Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupa; dan pelabuhan penyeberangan Sei. Selari berada di Kecamatan Bukit Batu.</p> <p>g. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi: pelabuhan penyeberangan Ketam Putih berada di Kecamatan Bengkalis; b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupa Utara; pelabuhan penyeberangan Prapat Tunggal berada di Kecamatan Bengkalis; pelabuhan penyeberangan Pergam/Sukarjo Mesim berada di Kecamatan Rupa; dan pelabuhan penyeberangan Tanjung Leban berada di Kecamatan Bandar Laksamana.</p> <p><b>Sistem jaringan transportasi laut</b></p> <p>a. Pelabuhan Pengumpul meliputi: Pelabuhan Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis; Pelabuhan Sungai Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu; dan Pelabuhan Tanjung Medang berada di Kecamatan Rupa Utara.</p> <p>b. Pelabuhan Pengumpuan Regional berupa Pelabuhan Batu Panjang berada di Kecamatan Rupa.</p> <p>c. Pelabuhan Pengumpuan Lokal meliputi: Pelabuhan Buruk Bakul berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Melibur berada di Kecamatan Talang Muandau; Pelabuhan Selat Baru berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Teluk Rhu berada di Kecamatan Rupa Utara; Pelabuhan Bantan Tengah berada di Kecamatan Bantan; Pelabuhan Bukit Batu berada di Kecamatan Bukit Batu; Pelabuhan Darul Aman berada di Kecamatan Rupa; Pelabuhan Lubuk Muda berada di Kecamatan Siak Kecil; Pelabuhan Selat Morong berada di Kecamatan Rupa; Pelabuhan Tanjung Kapal berada di Kecamatan Rupa; Pelabuhan Teluk Pambang berada di Kecamatan Bantan; dan Pelabuhan Titi Akar berada di Kecamatan Rupa Utara.</p>

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		<p>d. Pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan berada di: Kecamatan Bengkalis; dan Kecamatan Rupert Utara.</p> <p><b>Bandar Udara Umum Dan Bandar Udara Khusus.</b> Bandar Udara yaitu Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning berada di Kecamatan Bukit Batu.</p>
2	Sistem Jaringan Energi	<p><b>Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b></p> <p>a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid berada di: Kecamatan Bengkalis; Kecamatan Bantan; Kecamatan Rupert; dan Kecamatan Rupert Utara.</p> <p>c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) Riau Peaker berada di Kecamatan Pinggir.</p> <p><b>Jaringan Minyak dan Gas Bumi</b></p> <p>a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landing Point Riau 2-Landing Point Bengkalis melalui: Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Bukit Batu.</li> <li>• Pakning-Siak melalui: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil.</li> <li>• Duri-Bagan Batu melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir.</li> <li>• Garuda Sakti-Teluk Lembu melalui Kecamatan Pinggir.</li> <li>• Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Bathin Solapan.</li> <li>• Duri-Dumai melalui Kecamatan Bathin Solapan.</li> <li>• Kota Dumai-Bangkinang melalui: Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir.</li> <li>• Balai Pungut-Duri melalui: Kecamatan Mandau; Kecamatan Bathin Solapan; dan Kecamatan Pinggir.</li> <li>• New Garuda Sakti-Balai Pungut melalui Kecamatan Pinggir.</li> </ul> <p>b. Saluran Transmisi Lainnya berupa jaringan interkoneksi listrik Riau-Malaysia melalui: Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>c. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik berupa jaringan sistem Isolated meliputi:</p>

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		<p>Dumai-Pulau Rumat melalui Selat Rumat; dan Pakning-Bengkalis melalui Selat Bengkalis.</p> <p>d. Gardu Listrik berada di: Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Bengkalis.</p>
3	Sistem jaringan telekomunikasi;	<p>a. Jaringan Tetap meliputi: Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berada di Kecamatan Bengkalis; dan b. Jaringan serat optik, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; Kecamatan Bukit Batu; Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan; Kecamatan Mandau; dan Kecamatan Pinggir.</p> <p>b. Jaringan Bergerak Terrestrial berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan; dan Kecamatan Rumat Utara; Jaringan Bergerak Seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan.</p>
4	Sistem jaringan sumber daya air	<p>a. Jaringan Irigasi Primer berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rumat; dan Kecamatan Rumat Utara.</p> <p>b. Jaringan Irigasi Sekunder berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rumat; dan Kecamatan Rumat Utara.</p> <p>c. Jaringan Irigasi Tersier berada di: Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Mandau, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rumat; dan Kecamatan Rumat Utara.</p> <p>d. Sistem pengendalian banjir berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana; Kecamatan Rumat; dan Kecamatan Rumat Utara.</p>
5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	<p><b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b></p> <p>a. Unit Air Baku, berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rumat, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rumat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>b. Unit Produksi berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rumat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rumat Utara, Kecamatan Bandar Laksamana; dan Kecamatan Talang Muandau.</p> <p>c. Unit Distribusi berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>d. Unit Pelayanan berada di seluruh Kecamatan.</p>

No	Sistem Jaringan Prasarana	Lokasi
		<p>e. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas: Sumur Dangkal, Sumur Pompa dan Bak Penampungan Air Hujan</p> <p>f. Sumur Dangkal berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>g. Sumur Pompa berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>h. Bak Penampungan Air Hujan berada di seluruh Kecamatan.</p> <p><b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b> Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di seluruh Kecamatan.</p> <p><b>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b> Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di seluruh Kecamatan</p> <p><b>Sistem Jaringan Persampahan</b></p> <p>a. Stasiun Peralihan Antara (SPA) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>c. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupert; dan Kecamatan Rupert Utara.</p> <p><b>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b></p> <p>a. Jalur Evakuasi Bencana banjir berada di: Kecamatan Bukit Batu; dan Kecamatan Siak Kecil.</p> <p>b. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara; dan Kecamatan Pinggir.</p> <p>c. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berada di: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.</p> <p><b>Sistem Drainase</b></p> <p>a. Jaringan Drainase Primer berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Jaringan Drainase Sekunder berada di seluruh Kecamatan.</p>

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

2.7.3.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu, terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove. Berikut disajikan tabel kawasan lindung Kabupaten Bengkulu, yaitu:

Tabel II-102 Kawasan Lindung Kabupaten Bengkulu

No	Kawasan Lindung	Lokasi
1	Badan Air	Badan Air seluas lebih kurang 8.563 (delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. Kawasan Hutan Lindung seluas lebih kurang 31 (tiga puluh satu) hektare berada di Kecamatan Rupa Utara. b. Kawasan Lindung Gambut seluas lebih kurang 1.016 (seribu enam belas) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir.
3	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat seluas lebih kurang 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bengkulu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupa, dan Kecamatan Rupa Utara.
4	Kawasan konservasi	a. Suaka Margasatwa Bukit Batu dengan luas lebih kurang 21.403 (dua puluh satu ribu empat ratus tiga) hektare berada di: Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana. b. Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dengan luas lebih kurang 34.540 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh) hektare berada di Kecamatan Talang Muandau; c. Suaka Margasatwa Sibanga/PLG dengan luas lebih kurang 5.728 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Talang Muandau. d. Suaka Margasatwa Balai Raja dengan luas lebih kurang 15.330 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di: Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Mandau.
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove dengan luas lebih kurang 9 (sembilan) hektare berada di Kecamatan Bantan.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkulu 2022-2042



Kawasan budi daya terdiri atas Kawasan hutan produksi, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Berikut adalah kawasan budi daya Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**Tabel II-103 Kawasan Budidaya Kabupaten Bengkalis**

No	Kawasan Budi Daya	Lokasi
1	Kawasan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas lebih kurang 109.874 (seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.</li> <li>b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas lebih kurang 342.327 (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.</li> <li>c. Kawasan Hutan Produksi dengan luas lebih kurang 68.034 (enam puluh delapan ribu tiga puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.</li> </ul>
2	Kawasan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas lebih kurang 2.040 (dua ribu empat puluh) hektare berada di: Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, dan Kecamatan Siak Kecil.</li> <li>b. Kawasan Perkebunan dengan luas lebih kurang 164.312 (seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.</li> </ul>
3	Kawasan perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas lebih kurang 2.246 (dua ribu dua ratus empat puluh enam) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara.
4	Kawasan pertambangan dan energi	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dengan luas lebih kurang 8.442 (delapan ribu empat ratus empat puluh dua) hektare berada di: Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, dan Kecamatan Siak Kecil.
5	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lebih kurang 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat) hektare berada di Kecamatan Bukit Batu.
6	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata dengan luas lebih kurang 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare berada di: Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara; dan Kecamatan Bantan.
7	Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas lebih kurang 24.977 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau,</li> </ul>

No	Kawasan Budi Daya	Lokasi
		Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara. b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas lebih kurang 41.601 (empat puluh satu ribu enam ratus satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.
8	Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi dengan lebih kurang 20 (dua puluh) hektare berada di: Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bukit Batu.
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau.

Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Bengkalis 2022-2042

### 2.7.3.3 Kawasan Strategis Kabupaten Bengkalis

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2022–2042.

#### A. Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

#### B. Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

#### C. Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupert)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan Kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (*mangrove*).

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum realisasi indikator kinerja Kabupaten Bengkalis yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

- a) Ketimpangan pembangunan antar wilayah berdampak pada disparitas sebaran penduduk antar kecamatan dan tekanan pada daya dukung lahan di wilayah tertentu.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 69%, Pulau Bengkalis 22% dan Pulau Rupat 9%. Wilayah kecamatan yang berada di Pulau Sumatera, khususnya Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan merupakan wilayah yang terbuka dengan akses jalan lintas Sumatera, sehingga cenderung terbuka dengan arus migrasi, baik dalam kabupaten, dalam provinsi dan antar provinsi. Pembangunan yang pesat pada daerah-daerah ini yang diiringi oleh perkembangan industri, perdagangan dan jasa menjadikan daerah-daerah ini sebagai konsentrasi penduduk terbanyak. Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau, dengan proporsi jumlah penduduk Bengkalis sekitar 9% terhadap jumlah penduduk Provinsi Riau.

Distribusi penduduk antar wilayah kecamatan yang mengalami ketimpangan, dengan kepadatan 68 jiwa per Km<sup>2</sup> pada tahun 2022. Kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Mandau (297 jiwa/Km<sup>2</sup>) dan terendah di Kecamatan Bandar Laksama (13 jiwa/Km<sup>2</sup>). Kecamatan Bengkalis sebagai Ibu Kota Kabupaten atau pusat pemerintahan dan Kecamatan Bathin Solapan yang berada di jalur lintas Sumatera merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling besar dengan pertumbuhan penduduk relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar 1,32% pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk pada wilayah-wilayah dengan

kepadatan jarang, cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, khususnya pada Kecamatan Bandar Laksamana (2,72%) dan Siak Kecil (2,58%). Hal ini mengindikasikan bahwa mobilitas penduduk pada kepadatan jarang merupakan upaya pencarian lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik pada wilayah-wilayah yang masih memiliki ketersediaan sumberdaya lahan. Pergerakan penduduk pada wilayah-wilayah dengan kepadatan jarang dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya tekanan pada daya dukung lahan yang semakin tinggi. Wilayah pedesaan atau pinggiran yang masih memiliki potensi lahan berupa hutan dan pertanian dapat menarik penduduk yang mencari pekerjaan atau mencari peluang usaha. Pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Wilayah pedesaan atau terpinggirkan kan mengalami kekurangan investasi dan infrastruktur, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi antara kota dan pedesaan dapat menjadi pilihan untuk mengurangi terjadinya arus migrasi keluar yang berlebihan dari wilayah pedesaan.

- b) Ketidakseimbangan populasi penduduk antar wilayah menyebabkan urbanisasi yang berlebihan, kemacetan lalu lintas, tekanan pada sumberdaya alam pada daerah padat penduduk.

Konsentrasi penduduk Kabupaten Bengkalis yang dominan pada Pulau Sumatera (69%) merupakan gambaran ketidakseimbangan penyebaran populasi daerah yang dapat disebabkan oleh arus urbanisasi pada daerah-daerah perkotaan dan industri. Kepadatan penduduk yang tinggi pada Kecamatan Mandau (297 jiwa/Km<sup>2</sup>) mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan kependudukan dan kewilayahan, seperti kemacetan lalu lintas pada daerah perkotaan, tekanan pada sumberdaya alam.

Ketidakseimbangan populasi antar wilayah yang diakibatkan oleh dinamika ekonomi yang timpang. Wilayah-wilayah dengan peluang kerja dan kehidupan ekonomi yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak penduduk, sementara wilayah yang kurang berkembang mungkin mengalami migrasi keluar yang berlebihan. Pusat-pusat ekonomi, pusat industri dan perkotaan menawarkan lebih banyak kesempatan dalam hal infrastruktur, layanan, dan aksesibilitas, sehingga menjadi destinasi utama untuk urbanisasi. Kepadatan penduduk pada setiap wilayah akan berpengaruh terhadap kebutuhan lahan dalam berbagai penggunaan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu permasalahan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, termasuk permasalahan kriminalitas dan permasalahan lingkungan hidup.

Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk mengakibatkan tekanan pada sumberdaya alam. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan wilayah pada daerah lain akibat ketidakmampuan wilayah menyediakan kebutuhan penduduk. Permasalahan penyediaan kebutuhan konsumsi yang tinggi pada daerah dengan kepadatan tinggi menuntut distribusi logistik yang lebih baik untuk menjadi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan air, energi, dan lahan pertanian yang tinggi menyebabkan tekanan

yang berlebihan pada lingkungan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi udara, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas air, yang berdampak pada kualitas Kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Pemerataan pembangunan pada semua wilayah menjadi penting dalam penyelesaian masalah kependudukan.

- c) Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (muda) yang lebih besar membutuhkan lapangan pekerjaan, sarana dan prasaranan umum yang besar dan perlu pengelolaan yang tepat.

Penyiapan kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi dan mengurangi dampak negative bonus demografi sangat diperlukan. Beberapa hal secara simultan perlu dipersiapkan, yaitu kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Komposisi penduduk usia produktif (15-65 tahun) di Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan dari 64% pada tahun 2005 menjadi 63% pada tahun 2010 dan 68% pada tahun 2022. Kemajuan dalam bidang kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan telah meningkatkan harapan hidup penduduk. Hal ini menjadi salah satu penyebab pertambahan jumlah penduduk usia produktif, selain dari peningkatan angka kelahiran beberapa dekade yang lalu yang menghasilkan generasi besar penduduk usia produktif saat ini.

Proporsi penduduk usia kerja yang meningkat menuntut kebutuhan lapangan kerja yang memadai untuk mengakomodasi penduduk usia muda. Hal ini memerlukan pasar kerja yang dinamis akibat peningkatan harapan bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Peningkatan pendidikan dan aspirasi, menjadikan generasi muda cenderung mencari pekerjaan yang memadai dan menantang. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan teknologi, transportasi dan fasilitas umum lainnya dalam pembangunan. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut memerlukan investasi yang besar dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan jangka panjang memerlukan perencanaan sistematis yang berkelanjutan untuk memenuhi dinamika perkembangan penduduk.

Penyediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bengkalis masih sangat diperlukan, mengingat mayoritas tenaga kerja masih menggantungkan perekonomian pada perusahaan dan lapangan usaha milik orang lain dengan bekerja sebagai pegawai/karyawan, dan masih minimnya tenaga kerja yang membuka lapangan usaha sendiri sebagai pekerjaan utama. Hal ini terlihat bahwa, sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja seminggu lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawa dan hanya sebanyak 4,79% penduduk Bengkalis yang bekerja dengan mempekerjakan penduduk lain dengan dibayar sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, bonus demografi harus dikelola sebagai modal dasar pembangunan daerah, sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan bonus demografi memerlukan penciptaan lapangan kerja dan investasi serta pembangunan infrastruktur. Penyesuaian keterampilan generasi mudah dengan kebutuhan

pasar kerja (link and match) perlu menjadi prinsip kebijakan pembangunan ketenagakerjaan untuk mengatasi terjadinya pengangguran struktural. Pemerataan pembangunan dan layanan publik serta infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan perlu diatasi agar tidak mengakibatkan terjadi peningkatan disparitas sosial-ekonomi. Peningkatan produktivitas, investasi dalam sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting bagi pengelolaan bonus demografi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### 3.1.2 Daya saing ekonomi

- 1) Perkembangan ekonomi sektor non migas masih rendah dan belum mampu menjadi penopang perekonomian daerah

Perkembangan sektor non-migas yang rendah dalam perekonomian daerah mencerminkan keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi menekankan pentingnya mengembangkan berbagai sektor dalam perekonomian daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang lebih unggul dan tangguh. Perkembangan sektor non-migas yang lambat mengakibatkan ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor akan dapat mengurangi ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar dan risiko yang terkait dengan sektor migas.

Sampai saat ini sektor migas masih dominan sebagai pembentuk struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dengan kontribusi melebihi 50%. Dominasi sektor migas dalam struktur perekonomian daerah berdampak pada pertumbuhan sektor non-migas. Ketika satu sektor mendominasi perekonomian daerah, sumber daya dan investasi cenderung dialokasikan ke sektor tersebut, tidak mengakibatkan terjadinya efek substitusi, sehingga mengurangi kesempatan untuk mengembangkan sektor lainnya. Dalam hal ini, perekonomian yang fokus pada sektor migas berdampak pada berkurangnya insentif dan investasi dalam pengembangan sektor non-migas. Hal ini mengakibatkan sektor non-migas tidak mampu tumbuh dan menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Dominasi sektor migas dan kondisi sektor non-migas belum menjadi penopang ekonomi daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan inklusif menuntut terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, ketika sektor non-migas masih belum berkembang, maka peluang kerja dan pendapatan mungkin terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam sektor migas. Hal ini dapat menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan kebijakan pembangunan yang dapat mengurangi ketergantungan perekonomian daerah pada sektor migas, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

- 2) Ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor migas menjadikan perekonomian Bengkalis rentan terhadap gejolak ekonomi dunia dan menghambat perkembangan ekonomi lokal

Sampai saat ini sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas masih mendominasi perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis (50,92% pada tahun 2023 pada PDRB ADHK 2010). Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah pada minyak dan gas, mengakibatkan Kabupaten Bengkalis memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan sektor pertambangan. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas dapat menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian, yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dunia. Gejolak harga minyak pada pasar internasional dapat menyebabkan kerentanan ekonomi daerah. Hal ini akan diperburuk oleh kondisi penurunan produksi minyak dan gas sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Dalam jangka panjang kondisi ini akan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pembangunan jangka panjang dan ketahanan ekonomi Bengkalis.

Selain mengakibatkan ketergantungan, dominasi komoditas minyak dan gas pada perekonomian Bengkalis, juga menyebabkan berkurangnya insentif pada pengembangan sektor-sektor diluar pertambangan. Hal ini disebabkan alokasi sumberdaya dan investasi cenderung mengalir pada sektor pertambangan, sehingga peluang ekonomi yang beragam dan inklusif terhambat, terutama pada sektor pertanian, industri dan pariwisata. Hal ini berakibat pada daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam secara merata. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka Bengkalis tidak memiliki keberagaman sektor ekonomi yang kuat di luar sektor minyak dan gas. Ketika sektor migas mengalami tekanan atau penurunan, dampaknya sangat terasa pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Ini menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi dan membatasi kemampuan Bengkalis untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global.

Ketergantungan perekonomian daerah pada satu sektor tertentu, mengakibatkan daerah dihadapkan dengan masalah daya saing. Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi alamnya, tetapi juga oleh keragaman ekonomi, kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan inovasi. Pada kondisi sektor pertambangan minyak dan gas mendominasi perekonomian daerah, maka daerah cenderung kurang berinovasi dan kurang beragam dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat mengurangi daya tarik Bengkalis sebagai tujuan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Upaya mitigasi dan mengurangi risiko ketergantungan ekonomi terhadap gejolak ekonomi dunia, maka Bengkalis perlu untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan memberikan dukungan pengembangan sektor-sektor selain pertambangan, seperti pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan investasi dalam industri lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi dan kewirausahaan juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadikan perekonomian daerah lebih tangguh terhadap perubahan ekonomi global.

- 3) Pengembangan sektor non migas belum terarah secara sistematis sehingga belum terdapat fokus pengembangan ekonomi jangka panjang pasca migas

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis antara lain disebabkan oleh kondisi geografis daerah menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan dan inklusif. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau memperumit aksesibilitas dan konektivitas antarpulau, da juga meningkatkan biaya infrastruktur dan transportasi. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan antarpulau menghambat distribusi barang, akses pasar, dan integrasi ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan investasi infrastruktur dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dominasi lahan gambut dalam wilayah Bengkalis (sampai 60%) merupakan tantangan dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan. Lahan gambut rawan terhadap kebakaran hutan, memiliki produktivitas pertanian yang rendah, dan dapat menjadi sumber gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. Strategi pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan meminimalkan risiko kebakaran lahan dan hutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Investasi untuk infrastruktur yang mendukung, teknologi yang inovatif, pelatihan bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan perlu diarahkan pada pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tantangan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bengkalis dalah berkaitan denngan penurunan ketergantungan ekonomi globalisasi dan pembangunan integrasi ekonomi lokal. Ketergantungan pada sektor migas, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan beberapa faktor yang menghambat daya saing daerah. Arah pembangunan Kabupaten Bengkalis perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Potensi pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif perlu dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan infrastruktur dalam sektor-sektor non migas secara berkelanjutan. Potensi pariwisata yang besar di Pulau Ruptat dapat dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bengkalis. Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan perlu menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata Pulau Ruptat. Pemanfaatan potensi pariwisata ini secara efektif akan menjadi pemicu perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan minyak dan gas. Pembangunan potensi pariwisata Pulau Ruptat juga akan mendorong dalam penciptaan lapangan kerja baru serta pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal melalui pengembangan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor-sektor perekonomian lainnya.

- 4) Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan kemandirian fiskal daerah menjadi rendah

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan daerah untuk mengelola keuangan public yang dimiliki secara mandiri tanpa terlalu banyak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Bengkalis mungkin mengalami



keterbatasan dalam hal ini, terutama jika terjadi penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas.

Potensi sumber daya alam dan budaya yang besar yang dimiliki Kabupaten Bengkalis merupakan potensi untuk mendiversifikasi pendapatan asli daerah. Namun, kurangnya investasi dan dukungan untuk mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif masih menjadi hambatan utama akibat dominasi sektor minyak dan gas dalam perekonomian. Ketergantungan perekonomian pada sektor pertambangan minyak dan gas menjadi permasalahan pengembangan ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Pada sisi lain pertumbuhan sektor pertambangan dalam pendapatan regional Kabupaten Bengkalis menunjukkan trend yang menurun. Dominasi sektor pertambangan dalam perekonomian dan kurangnya diversifikasi ekonomi menyebabkan pendapatan asli daerah masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Inisiatif untuk menggali potensi sumber daya lainnya seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif masih terbatas.

### 3.1.3 Daya saing SDM

- 1) Potensi kemungkinan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai dampak globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Nilai-nilai budaya Melayu mencerminkan warisan budaya dan tradisi yang dipegang oleh masyarakat melayu. Nilai-nilai budaya Melayu sering kali didasarkan pada ajaran agama, tradisi lokal, dan norma sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Beberapa ciri khas nilai-nilai budaya Melayu meliputi, kesopanan, gotong royong kebersamaan dalam keluarga, keagamaan dan spritualitas, kehormatan dan martabat, serta adat istiadat melayu lainnya. Nilai-nilai ini merupakan nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melayu.

Seiring dengan perkembangan zaman arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan. Pada satu sisi arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bernilai positif, karena dapat memperluas aksesibilitas dan membantu memelihara warisan budaya, mendorong budaya bahasa dan sastra berkembang lebih cepat dan mencapai audiens yang lebih luas, memfasilitasi produksi dan distribusi karya seni dan budaya secara global, memungkinkan pengembangan pendidikan multikultural yang memperkenalkan siswa pada berbagai budaya di dunia. Hal ini dapat membantu mempromosikan toleransi, pemahaman, dan kerjasama lintas budaya di antara generasi muda. Namun demikian pada sisi yang lain juga berpotensi memiliki dampak negatif diantaranya dapat membawa masuk budaya asing yang mengancam identitas budaya Melayu. Nilai-nilai tradisional Melayu, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan keagamaan, dapat tergerus oleh nilai-nilai yang diimpor dari budaya asing yang lebih individualistik dan konsumtif. Disamping itu juga meningkatnya dalam batas-batas tertentu penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing dalam lingkungan digital, jika tidak berhati-hati terdapat risiko terjadinya penurunan penggunaan bahasa Melayu tradisional dan penurunan minat terhadap sastra Melayu. Globalisasi sering kali juga mengubah budaya menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Ini dapat mengarah pada pemajuan

budaya yang dangkal dan dilabeli sebagai "Melayu" tanpa mempertimbangkan makna sebenarnya dari nilai-nilai budaya Melayu.

Hal lain menyangkut kebudayaan melayu di Kabupaten Bengkalis adalah belum dimanfaatkan secara maksimal atau belum terintegrasi dengan potensi kebudayaan melayu dengan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### 3.1.4 Daya saing sarana prasarana pendukung

- 1) Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infrastruktur yang masih rendah belum mendukung pembangunan daerah dengan baik

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal indeks daya beli masyarakat menyebabkan pertumbuhan lalu lintas semakin meningkat signifikan, bukan hanya kendaraan penumpang tetapi juga kendaraan barang dan berat muatan. Hal tersebut membutuhkan infrastruktur pendukung dan menyebabkan umur penyusutan jalan semakin cepat dan daya dukung konstruksi jalan jembatan saat ini umumnya tidak mampu berperan sesuai umur ekonomis dan daya dukung muatan sumbu terberat (MST) nya.

- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang belum memadai dan belum tersebar merata pada semua wilayah

Infrastruktur ekonomi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan kondisinya kurang baik. Sebagai contoh masih terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar dan perputaran ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar ber kondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarnya.

#### 3.1.5 Aspek Pelayanan umum

- 1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mencakup prinsip-prinsip, praktik, dan proses yang memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan umum. Di Kabupaten Bengkalis hal terlihat dari belum teradopsinya secara optimal teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan umum, yang menyebabkan masih belum maksimalnya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Disamping itu persoalan tata kelola pemerintahan

yang dihadapi adalah pelaksanaan transparansi informasi publik yang masih perlu dikuatkan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena transparansi merupakan fondasi penting dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat dan efisien. Ada beberapa alasan mengapa transparansi informasi publik sangat penting diantaranya akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, mendorong inovasi pembangunan, dan yang tak kalah penting ada membangun kepercayaan publik.

Permasalahan lain dalam tata kelola pemerintahan yang dihadapi adalah masih lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah proses pengelolaan dan pengaturan kelembagaan serta personil ASN yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

## 3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

### 3.2.1 Isu Strategis Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformasi berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Perubahan global ini akan mempengaruhi tatanan pembangunan dan kehidupan masyarakat termasuk Kabupaten Bengkalis. Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

#### 1) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga.

#### 2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Dibiidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

#### 3) Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang

adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi dirupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Teknologi yang berkembang dimasa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

#### 4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Tekanan penduduk dan pemangunan perkotaan di negara emergig economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

#### 5) Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Aia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7.

#### 6) Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang dutransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

#### 7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style).

#### 8) Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

#### 9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga irisi global-The Triple Planetari Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia mejadi kebijakan dan strategi global.

#### 10) Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

### 3.2.2 Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

#### 1) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta mitigasi bencana

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat serta mitigasi bencana yang lebih terukur dalam menimalkan resiko bencana yang lebih besar.

#### 2) Inovasi pembangunan yang efektif dan efisien didaerah dengan geografi sulit dan bergambut dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Bengkalis merupakan daerah dengan geografi sulit, terdiri dari pulau-pulau dan sekitar hutan. Hal ini menjadi tantangan dalam aksesibilitas, konektivitas, dan distribusi

infrastruktur dan layanan publik. Peningkatan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan distribusi barang menjadi kunci dalam memperbaiki aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dominasi wilayah bergambut juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Lahan gambut memiliki nilai ekologis yang tinggi namun rawan terhadap kebakaran hutan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan dan strategi pembangunan daerah, khususnya pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan berbasis ilmiah untuk memastikan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Potensi ekonomi dan kondisi geografis serta dominasi wilayah gambut telah berdampak pada pemerataan pembangunan yang tidak seimbang antar wilayah di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menjadi tantangan penting dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, diperlukan untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah. Penyediaan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kesejahteraan masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Meskipun terdapat potensi ekonomi yang besar, namun tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih cukup tinggi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, program perlindungan sosial, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan.

Peningkatan daya saing daerah menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi regional. Peningkatan daya saing infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan iklim investasi menjadi sangat penting untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan diversifikasi perekonomian daerah. Dengan mengatasi isu-isu strategis ini secara komprehensif, diharapkan Kabupaten Bengkalis dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dengan perekonomian yang kuat dan tangguh.

### 3) Pemerataan pembangunan antar wilayah yang unggul dan berkelanjutan

Ketimpangan kemajuan antar wilayah di Kabupaten Bengkalis antara lain disebabkan oleh kondisi geografi yang sulit diakses karena berada pada wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan sekitar hutan. Kondisi wilayah ini menghambat distribusi infrastruktur dan layanan publik secara merata, menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara wilayah sekitar pedalaman hutan dan pesisir. Potensi sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya investasi, akses teknologi yang terbatas dan akses pasar, serta masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

Untuk itu, penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Bengkalis

dalam jangka panjang. Penerapan strategi pembangunan yang holistik dan terpadu menjadi solusi dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi potensial. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, penguatan kapasitas masyarakat lokal, serta promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal semakin diperlukan. Pemerataan pembangunan yang didukung oleh kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi semua lapisan masyarakat pada semua wilayah. Ini akan membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kesetaraan peluang bagi seluruh penduduk Kabupaten Bengkalis.

4) Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat pinggiran

Memperluas perlindungan sosial diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Perlindungan sosial dapat dilakukan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan bantuan pangan. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi pada beberapa wilayah, terutama wilayah pesisir dan pinggir hutan, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi geografis yang sulit pada sebagian wilayah pulau-pulau dan sekitar hutan menyulitkan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik, sehingga meningkatkan isolasi sosial dan ekonomi.

Meskipun secara makro, Kabupaten Bengkalis memiliki PDRB per kapita tertinggi di Riau, terkait dengan sektor ekstraktif seperti minyak dan gas. Namun, kondisi ini tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi kelompok rentan dan masyarakat yang kurang mampu agar tidak tertinggal dalam pembangunan.

5) Pelestarian dan penerapan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat

Pelestarian dan penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat sangat penting dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini karena nilai-nilai budaya Melayu memiliki peran penting dalam membentuk identitas, moralitas, dan harmoni sosial masyarakat Melayu.

6) Diversifikasi sektor perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Rencana pembangunan yang efektif perlu memperhatikan permasalahan yang dihadapi baik yang terkait dengan kondisi geografis maupun ekonomi. Arah kebijakan yang menciptakan diversifikasi ekonomi yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas, sehingga menciptakan sumber daya pendapatan yang lebih beragam dan stabil. Investasi pembangunan infrastruktur transportasi daerah diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan antarwilayah serta antarsektor untuk mendukung distribusi barang, akses pasar, dan integrasi ekonomi yang kuat.

Investasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah dapat menjadi pendorong pengembangan sektor ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan menjadi isu penting agar potensi wilayah dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal sesuai dengan potensi ekonomi setiap wilayah diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

7) Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

Sesuai dengan rencana tata ruang, pusat-pusat pengembangan wilayah di daerah Kabupten Bengkalis dikembangkan dengan mengembangkan sarana prasarana, fasilitas, dan infrastruktur pendukungnya. Wilayah strategis dikembangkan dalam pusat-pusat pengembangan wilayah tersebut berupa pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), dan lainnya sesuai rencana struktur ruang wilayah. Isu pokok lingkungan hidup daerah Kabupaten Bengkalis dapat dibagi menjadi 3 topik besar, yaitu: alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim. Penjabaran dari isu strategis lingkungan hidup ini antara lain adalah: alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan sawah menjadi peruntukan lainnya, Penurunan kualitas air akibat limbah domestik, Penurunan kualitas udara akibat transportasi dan industri, Kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove, keanekaragaman hayati, penurunan debit air sungai, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

8) Tata Kelola pemerintahan yang adaptif

Tata kelola pemerintahan yang adaptif mengacu pada kemampuan sebuah pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal secara cepat dan efektif. Hal ini melibatkan penggunaan strategi, kebijakan, dan praktik yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di sekitarnya. Oleh sebab itu tata kelola pemerintahan harus dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.



## BAB IV

# VISI DAN MISI DAERAH KABUPATEN

### 4.1 VISI

Berdasarkan uraian permasalahan daerah dan isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, maka rencana pembangunan jangka panjang perlu merumuskan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2045 sebagai berikut:

***Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera Berbasis Perekonomian  
Daerah yang Unggul dan Berkelanjutan***

Adapun dasar pertimbangan penetapan Visi Bengkalis 2045 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 adalah:

- Merujuk dan sinergi dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada kemajuan dan keberlanjutan pembangunan pada berbagai bidang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
- Merujuk dan sinergi dengan Visi Riau 2045 dengan fokus pada mendorong kemajuan dan keberlanjutan pembangunan pada bidang perekonomian, infrastruktur dan pelayanan dasar.

Pendekatan misi, strategi, arah kebijakan serta program dan indikator capaian berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis serta evaluasi pencapaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis dan mempertimbangkan perubahan kondisi aktual perekonomian dan isu-isu kemasyarakatan.

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Visi Kabupaten Bengkalis 2045 adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Bengkalis; merupakan kristalisasi komitmen daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk mencapai pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah dan Sejahtera dengan terus mengurangi ketergantungan ekonomi pada ektor minyak dan gas. Pembangunan daerah harus dapat menyelaraskan kemajuan ekonomi dan budaya melayu sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah harus dilaksanakan dengan berbasis keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, merata pada setiap wilayah sehingga berkontribusi pada perubahan-perubahan positif pada kehidupan masyarakat.

***Bengkalis Bermarwah;*** pembangunan Kabupaten Bengkalis harus diarahkan pada penciptaan kondisi dimana seluruh masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

***Bengkalis Maju;*** pembangunan Kabupaten Bengkalis harus diupayakan untuk mencapai kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dari dukungan sektor industri dan pariwisata, kemandirian daerah dan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkualitas dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat dan kompetitif yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa.

**Bengkalis Sejahtera;** tujuan akhir pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa serta sejahtera yang didukung oleh aspek sosial dan budaya dan kestabilan politik, ketentraman dan ketertiban, pengamalan agama secara konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama, kelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang dicirikan oleh pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi, kemiskinan yang rendah dan ketimpangan antar wilayah yang rendah.

**Perekonomian Unggul dan Berkelanjutan:** pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata pada semua wilayah berbasis dan bercirikan potensi ekonomi setempat yang merata dan berkeadilan, pemerataan pendapatan masyarakat Berbasis Industri dan Pariwisata.

#### 4.2 SASARAN VISI

Pencapaian visi daerah Sebagai daerah Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera Berbasis Perekonomian Daerah yang Unggul dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut.

**Tabel IV-1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045**

Sasaran Visi	Indikator	Baseline	Target			
		2025	2029	2034	2039	2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	143,39 - 166	284,12 - 345,39	424,85 - 524,78	565,58 - 704,17	706,31 - 883,56
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	41,49	50,48	59,48	68,47	77,46
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	15,7	17,85 - 17,89	20,00 - 20,08	22,16 - 22,27	24,31 - 24,46
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,78 - 5,69	4,86 - 4,51	3,93 - 3,34	3,00 - 2,16	2,08 - 0,98
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,29 - 0,296	0,275 - 0,285	0,259 - 0,274	0,244 - 0,262	0,228 - 0,251
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	15,94 - 15,9	14,46 - 14,35	12,99 - 12,81	11,51 - 11,26	10,03 - 9,71
	d. Pertumbuhan Ekonomi	2,46 - 2,83	2,85 - 3,45	3,23 - 4,08	3,62 - 4,70	4 - 5,32
Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah Untuk Mencapai Visi Daerah	a. Indeks Daya Saing Daerah	3	3,29	3,64	4,02	4,53
	b. Indeks Inovasi Daerah	45,42	51,65	60,65	71,23	86,38
	c. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,98 - 59,00	59,00 - 63,37	63,37 - 67,74	67,74 - 72,12	72,12 - 72,70
	d. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,30 - 72,36	72,36-74,64	74,64-76,92	76,92-79,22	79,22 - 79,92
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	a. Indeks Modal Manusia	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	13	25,57	38,14	50,71	63,28
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,5	74,35	75,41	76,47	77,74

Sasaran pertama, meningkatnya pendapatan per kapita, mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis

ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 706,31 – 883,56 juta rupiah pada tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan sektor tersebut ditunjukkan dengan pencapaian indikator kontribusi PDRB sektor industri sebesar 24,31 – 24,46 persen pada tahun 2045 dan indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 77,46 pada tahun 2045.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi Provinsi Riau menuju kemiskinan 0,08-0,58 persen pada tahun 2045 dan ketimpangan 0,256–0,279 pada tahun 2045. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin menurun. Sasaran ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis yang semakin menurun pada kisaran 2,08 – 0,98 persen pada tahun 2045, rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,228 - 0,251 pada tahun 2045. Selanjutnya kontribusi PDRB Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2045 menjadi 10,03 - 9,71 persen terhadap PDRB Provinsi Riau dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2045 berkisar 4 - 5,32 persen.

Sasaran ketiga, Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah, sejalan dengan hasil kinerja pembangunan daerah yang juga semakin meningkat. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Daya Saing Daerah menjadi sebesar 4,53 pada tahun 2045 dan diikuti oleh peningkatan indikator Indeks Inovasi Daerah menjadi sebesar 86,38 pada tahun 2045. Selain itu terjadinya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 72,12 - 72,70 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 79,22 - 79,92 hingga tahun 2045.

Sasaran keempat, meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia, mendukung pencapaian sasaran Provinsi Riau daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Sasaran ini didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Modal Manusia yang meningkat hingga tahun 2045 menjadi 0,72.

Sasaran kelima, Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*, mendukung sasaran visi pembangunan Provinsi Riau. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Sasaran ini diukur dengan indikator Penurunan Intensitas

Emisi GRK (%) sebesar 63,28 persen dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) Daerah menjadi sebesar 77,74 persen pada tahun 2045

### 4.3 MISI

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2045 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi dan industri berbasis masyarakat
- 2) Mewujudkan transformasi sosial menuju pembangunan Manusia, Ketahanan Budaya Melau dan ekologi;
- 3) Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan Inovatif dan Berintegritas;
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 5) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkeadilan;

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud misi Kabupaten Bengkalis 2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi ekonomi industri berbasis masyarakat adalah mendorong dan membangun perekonomian dan industri berbasis masyarakat dengan ketersediaan sarana dan ekonomi yang dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah untuk tujuan keseimbangan struktur perekonomian daerah yang seimbang antar sektor dan memberikan dampak yang kuat pada distribusi pendapatan masyarakat.
- 2) Mewujudkan transformasi sosial inklusif dan berkelanjutan adalah mendorong pembangunan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang semakin tinggi.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas adalah menciptakan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang inovatif dan berintegritas dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan untuk mendukung kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan yang efisiensi dan pelaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penyediaan seluruh kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan adalah penyediaan seluruh sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata pada semua wilayah untuk pemenuhan seluruh kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar pusat-pusat perekonomian dan pusat-pusat aktivitas masyarakat dan mempermudah akses masyarakat pada semua wilayah terhadap seluruh prasarana

pelayanan dasar publik dan prasana pusat-pusat perekonomian dan pusat-pusat yang menjadi konsentrasi aktivitas masyarakat.

- 5) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkeadilan adalah seluruh proses pembangunan harus memperhatikan dan tetap konsisten terhadap keseimbangan pencapaian pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan harus mampu menciptakan daya saing daerah dan keseimbangan pembangunan antar wilayah yang ramah lingkungan dengan kualitas sosial dan ekonomi yang semakin tinggi. Misi memberikan fokus pada proyek strategis daerah yang dapat memberikan multiplayer efek pada pembangunan khususnya di Kabupaten Bengkalis.

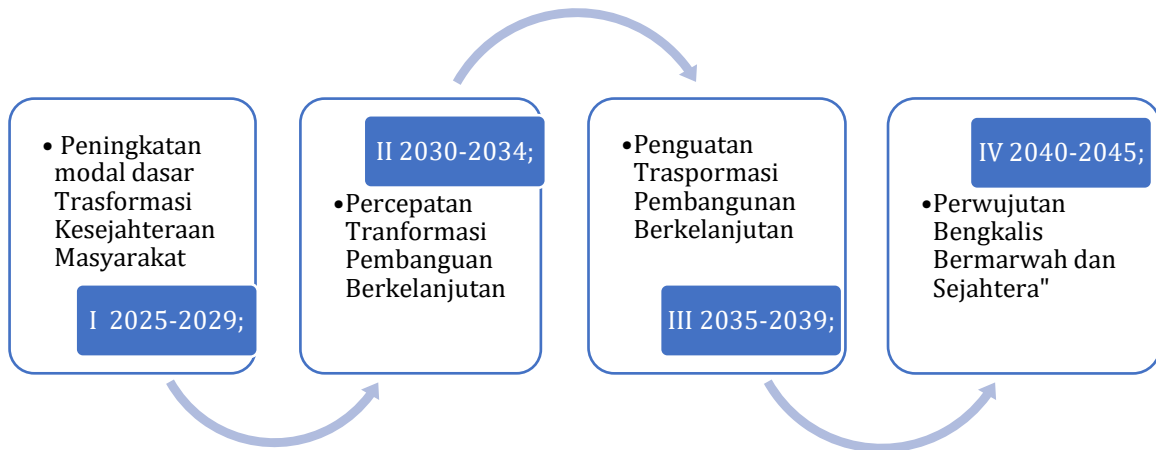
## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah

#### 5.1.1 Arah Pembangunan Daerah

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi misi daerah dan mengacu pada tahapan pembangunan nasional dan Provinsi serta disesuaikan dengan karakteristik daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan sebagai berikut:



**Gambar V-1 Tahapan Arah Kebijakan Lima Tahunan Jangka Panjang Kabupten Bengkalis Tahun 2025-2045**

##### 5.1.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029; Peningkatan modal dasar Kesejahteraan Masyarakat

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan peningkatan modal dasar pembangunan. Peningkatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; pengembangan pusat perekonomian baru serta melaksanakan tahanan pertama pada program infrastruktur strategis di Kabupten Bengkalis. Selanjutnya, peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; Pengembangan sinergi dan

akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas publik. Keberhasilan pencapaian arah kebijakan periode pertama ini ditandai dengan Pertumbuhan ekonomi 4,30%-4,73%; Tingkat kemiskinan berada pada 2,85% - 3,45%; Indeks Modal Manusia 0,60; Gini Rasio 0,275 - 0,285; Tingkat Pengangguran 5,83%; serta Pendapatan per Kapita 284,12-345,39 juta.

#### 5.1.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034; Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun pertama, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan percepatan proses pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui akselerasi kepada masyarakat khususnya pada pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial; peningkatan investasi dan penanaman modal dan pengoptimalan daya saing UMKM daerah; pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; pengembangan kerjasama multipihak antar lembaga; dan penguatan fungsi infrastruktur di kawasan strategis dalam upaya menciptakan multi effect pembangunan daerah. Pada tahap ini indikator pembangunan yang akan dicapai antara lain : Pertumbuhan ekonomi 3,23% - 4,08%; Tingkat kemiskinan 3,93% – 3,34%; Indeks Modal Manusia 0,64%; Gini Rasio 0,259 - 0,274; Tingkat Pengangguran 4,93% dan Pendapatan per Kapita 424,85-524,78 juta.

#### 5.1.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039; Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun kedua, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kemampuan dan daya saing daerah. Pengembangan kemampuan dan daya saing daerah diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengoptimalan kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat, laut, dan udara, serta pengembangan kawasan perdesaan

Pemantapan kapasitas tenaga kerja yang adaptif dalam meningkatkan peluang lapangan kerja serta Penguatan ekonomi hijau dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk pada sektor unggulan daerah. Pemerataan fasilitas layanan pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan berkualitas. Meningkatkan kualitas dan efektifitas perkembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah secara hirarkis dalam rangka menunjang kemajuan ekonomi. Sosial

dan budaya daerah Pemantapan kualitas dan kerjasama dalam pengelolaan pencegahan resiko bencana daerah melalui teknologi. Pemantapan sistim pelayanan Publik dan resposif berbasis IT dan berkelanjutan. Keberhasilan pada priode ini ditandai dengan capain indkikator pembangunan antara lain; Pertumbuhan ekonomi 3,62% - 4,70%; Tingkat kemiskinan 3,00% - 2,16%; Indeks Modal Manusia 0,68; Gini Rasio 0,244 - 0,262; Tingkat Pengangguran 4,03%; Pendapatan per Kapita 565,58-704,17 juta.

**5.1.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045; Mewujudkan Bengkulu Bermarwah dan Sejahtera**

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun ketiga, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan terwujudnya Bengkulu bermarwah dan sejahtera. capaian pembangunan diwujudkan melalui pemantapan kondisi lingkungan belajar sebagai pengoptimalan kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah; Terwujudnya ekonomi unggulan yang bernilai tambah tinggi dan terlaksananya transformasi digital terhadap Tenaga kerja; Terwujudnya transformasi layanan kesehatan yang dan pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat; Terwujudnya efektifitas perkembangan pusat pertumbuhan daerah secara hirarkis dalam rangka menunjang kemajuan ekonomi, Sosial dan budaya daerah; Terwujudnya pengelolaan sistim pengelolaan bencana yang terintegrasi yang di dukungan teknologi; Terwujudnya sistim layanan publik yang handal dan berkelanjutan dengan dukungan Teknologi Informasi; dan pemantapan penataan permukiman serta tata ruang wilayah. Pada periode ini keberhasilan dicerminkan dengan capaian antara lain; Pertumbuhan ekonomi 4,00%-5,32%; Tingkat kemiskinan 2,08% - 0,98%; Indeks Modal Manusia 0,72; Gini Rasio 0,228 - 0,251; Tingkat Pengangguran 3,13%; Pendapatan per Kapita 706,31-883,56 juta.

**Tabel V-1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2045**

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	I 2025-2029; Peningkatan modal dasar Kesejahteraan Masyarakat	II 2030-2034; Percepatan Pembangunan Berkelanjutan	III 2035-2039; Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan	IV 2040-2045; Mewujudkan Bengkulu Bermarwah dan Sejahtera
1) Mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi dan industri berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kerja untuk mendorong wirausaha pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta	Peningkatan nilai tambah produk daerah serta efisiensi rantai distribusi komoditas unggulan daerah melalui sinergisitas antar sektor serta	Pemantapan kapasitas tenaga kerja yang adaptif dalam meningkatkan peluang kerja serta Penguatan ekonomi hijau	Terwujudnya ekonomi unggulan yang bernilai tambah tinggi dan terlaksananya transformasi digital terhadap Tenaga kerja dan SDM



MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	I 2025-2029; Peningkatan modal dasar Kesejahteraan Masyarakat	II 2030-2034; Percepatan Pembangunan Berkelanjutan	III 2035-2039; Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan	IV 2040-2045; Mewujudkan Bengkalis Bermarwah dan Sejahtera
	meningkatkan daya saing komoditas	pengembangan Balai Latihan Kerja dan sekolah vokasi	dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk pada sektor unggulan daerah	
2) Mewujudkan transformasi sosial menuju pembangunan Manusia, Ketahanan Budaya Melayu dan ekologi	Peningkatan kualitas, sarana prasarana serta akses masyarakat yang ramah lingkungan pada layanan kesehatan dan pendidikan, budaya serta penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat.	Perepatan Peningkatan kualitas SDM dengan teknologi dan budaya serta peningkatan akses masyarakat pada layanan kesehatan dan pendidik bermutu melalui percepatan ketahanan sosial dan ekologi.	Pemantapan fasilitas layanan pendidikan dan Kesehatan yang berbasis ekologi dan budaya serta jaminan sosial berkualitas.	Terwujudnya transformasi layanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.
3) Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan Inovatif dan Berintegritas	Peningkatan Kualitas ASN dan Sistim tatakelola Pemerintahan daerah Sebagai landasan untuk percepatan Pembangunan	Percepatan pembangunan sistim pelayanan publik yang responsif berbasis IT dan berkelanjutan	Pemantapan sistim pelayanan Publik dan resposif berbasis IT dan berkelanjutan	Terwujudnya sistim layanan publik yang handal dan berkelanjutan dengan dukungan Teknologi Informasi.
4) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan sistem pencegahan bencana serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama antar pihak untuk pengelolaan pencegahan abrasi, pelestarian ekosistem mangrove, serta penguatan sistem pencegahan banjir, karhutla, dan pencemaran lingkungan secara efektif dan berkelanjutan.	Pemantapan kualitas dan kerjasama dalam pengelolaan pencegahan resiko bencana daerah melalui teknologi.	Terwujudnya sistim pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan yang mengarah pada <i>circular economy</i>

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	I 2025-2029; Peningkatan modal dasar Kesejahteraan Masyarakat	II 2030-2034; Percepatan Pembangunan Berkelanjutan	III 2035-2039; Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan	IV 2040-2045; Mewujudkan Bengkalis Bermarwah dan Sejahtera
5) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkeadilan	Membangun dan mengembangkan sistem pusat-pusat pertumbuhan yang belum berkembang secara hirarkis serta mengatasi kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah	Memperkuat pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan daerah secara hirarkis serta mengatasi kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah	Meningkatkan kualitas dan efektifitas perkembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah secara hirarkis dalam rangka menunjang kemajuan ekonomi. Sosial dan budaya daerah	Terwujudnya efektifitas perkembangan pusat pertumbuhan daerah secara hirarkis dalam rangka menunjang kemajuan ekonomi, Sosial dan budaya daerah

### 5.1.2 Arah Kebijakan Transformasi

Dalam mewujudkan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bengkalis, perlu dirumuskan juga Arah Kebijakan Transformasi Daerah yang dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah Kabupaten Bengkalis. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel V.2

**Tabel V-2 Arah Kebijakan Tranformasi RPJPD 2025-2045**

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan
Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
Transformasi Sosial	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
Transformasi Sosial	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
Transformasi Sosial	Menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan.
Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Transformasi Sosial	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.

<b>Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Transformasi Sosial	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
Transformasi Sosial	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
Transformasi Sosial	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
Transformasi Sosial	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau yang memiliki prestasi
Transformasi Sosial	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana
Transformasi Sosial	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
Transformasi Sosial	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kearifan local
Transformasi Sosial	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Transformasi Sosial	Penguatan manajemen talenta anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Transformasi Sosial	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
Transformasi Sosial	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Transformasi Sosial	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Khususnya di Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). (Politeknik Negeri Bengkalis)
Transformasi Sosial	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Percepatan pembangunan daerah pada daerah Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah
Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling.

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	Pengembangan/peningkatan government-induced activities yang berfokus pada peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand khususnya pada daerah perbatasan
Transformasi Sosial	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
Transformasi Sosial	Perluasan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat didaerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Perluasan penyediaan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah terluar dan terpencil.
Transformasi Sosial	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Terluar dan Terpencil.
Transformasi Sosial	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
Transformasi Sosial	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
Transformasi Sosial	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik geografi daerah
Transformasi Sosial	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penataan kawasan kumuh pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan yang integrasi antar sub sistem pertanian untuk penguatan ketahanan pangan daerah melalui implementasi teknologi pertanian
Transformasi Ekonomi	Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian berbasis kebutuhan lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian
Transformasi Ekonomi	Penyediaan dan peningkatan akses petani terhadap bibit unggul dan varietas unggul komoditi pertanian unggulan daerah
Transformasi Ekonomi	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan akses dan kapasitas petani dan kelembagaan petani terhadap teknologi pertanian dan informasi pasar berbasis kebutuhan lokalita, pengembangan IoT (Internet of Things) dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan efisiensi operasional dan modernisasi pertanian
Transformasi Ekonomi	Peningkatan literasi keuangan (financial literacy) dan perluasan akses pembiayaan usaha pertanian bagi petani
Transformasi Ekonomi	Penyediaan infrastruktur pertanian esensial yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian serta peningkatan efisiensi usahatani
Transformasi Ekonomi	Peembangan "closed loop modle" dalam pengembangan pertanian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, mengurangi limbah, dan menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dengan dukungan kelembagaan pembiayaan dan asuransi pertanian

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	Pengembangan ekonomi biru (blue economic) berbasis keunggulan wilayah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif dan kemitraan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan sekaligus peningkatan kesejahteraan Masyarakat
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan untuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan perekonomian daerah
Transformasi Ekonomi	Peningkatan kapasitas dan akses nelayan dan petambak terhadap teknologi dan informasi untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan melalui penyebaran ilmu/rekayasa/teknologi perikanan kontemporer kepada nelayan dan petambak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pelatihan manajemen usaha, penyediaan insentif dan penerapan aquaculture monitoring system
Transformasi Ekonomi	Peningkatan literasi keuangan (financial literacy) dan perluasan akses pembiayaan usaha perikanan tangkap dan budidaya
Transformasi Ekonomi	Peembangan "closed loop modle" dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumberdaya, mengurangi limbah dengan dukungan kelembagaan pembiayaan dan asuransi pertanian
Transformasi Ekonomi	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti pelabuhan perikanan, ruang penyimpanan (cold storage), rumah produksi dan pasar lelang perikanan yang diikuti oleh dukungan pelatihan dan insentif pembiayaan serta akses informasi pasar
Transformasi Ekonomi	Pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan dengan pemanfaatan teknologi yang adaptif
Transformasi Ekonomi	Modernisasi perikanan tangkap laut dengan penerapan teknologi dan praktik-praktik manajemen yang lebih efisien, berkelanjutan dan ramah lingkungan
Transformasi Ekonomi	Pengembangan ekosistem bisnis dan modernisasi perikanan budidaya yang mencakup aspek teknologi, aquaculture terkini, penyediaan sarana produksi bibit dan pakan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah
Transformasi Ekonomi	Pengembangan kawasan industri Buruk Bakul dan penyediaan infrastruktur penunjang lain yang saling terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian daerah
Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung pengembangan kawasan pengembangan pusat-pusat perekonomian daerah khususnya pada 5 (lima) gerbang pengembangan ekonomi
Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi daerah, khususnya pengembangan industri, perdagangan dan jasa, antara lain listrik, air bersih, perumahan, pengolahan limbah dan pusat pelatihan kerja

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan
Transformasi Ekonomi	Penguatan koordinasi kerjasama antar daerah dan antar wilayah dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan kawasan perkotaan sesuai kebutuhan daerah, seperti layanan listrik, layanan air minum, pengelolaan persampahan dan transportasi public
Transformasi Ekonomi	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan sistem ketahanan bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana
Transformasi Ekonomi	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage
Transformasi Ekonomi	Peningkatan kualitas konektivitas antar wilayah, khususnya antar wilayah pusat-pusat pertumbuhan daerah yang didukung oleh sarana transportasi dan komunikasi publik massal serta rendah emisi yang terhubung secara efisien dengan jaringan konektivitas provinsi dan nasional
Transformasi Ekonomi	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan pemukiman yang sehat secara merata dan berwawasan lingkungan serta infrastruktur energi dengan emisi rendah jaringan gas perkotaan
Transformasi Ekonomi	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
Transformasi Ekonomi	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Pulau Rupat
Transformasi Ekonomi	Penataan dan penguatan daya tarik wisata daerah yang terintegrasi, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
Transformasi Ekonomi	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan kualitas konektivitas antar wilayah, khususnya antar wilayah strategis pusat-pusat pertumbuhan daerah yang didukung oleh sarana transportasi dan komunikasi publik massal dan rendah emisi yang terhubung secara efisien dengan jaringan konektivitas provinsi dan nasional
Transformasi Ekonomi	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
Transformasi Ekonomi	Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai dan Pasir Pengarayan-Duri;

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan baik pada pelabuhan pengumpul/pengumpan dan pada pelabuhan utama bertaraf global port, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pelayaran logistic
Transformasi Ekonomi	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis dan berkelanjutan serta mengatasi kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah
Transformasi Ekonomi	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Sungai Selari
Transformasi Ekonomi	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas kabupaten Bengkalis untuk mendukung ketahanan Energi daerah
Transformasi Ekonomi	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
Transformasi Ekonomi	Menyediakan sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan pemukiman yang sehat secara merata dan berkelanjutan
Transformasi Ekonomi	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
Transformasi Ekonomi	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
Transformasi Ekonomi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
Transformasi Ekonomi	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan kesehatan perusahaan BUMD.
Transformasi Ekonomi	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan system ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix)

Transformasi	Arah Kebijakan
	pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
Transformasi Ekonomi	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital
Transformasi Tata Kelola	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, responsif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang adaptif dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan profesional, akuntabel dan bebas korupsi
Transformasi Tata Kelola	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
Transformasi Tata Kelola	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
Transformasi Tata Kelola	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
Transformasi Tata Kelola	Penguatan integritas partai politik
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis lingkungan untuk menekan tingkat kriminalitas.
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah
Keamanan daerah tangguh, demokrasi	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),



Transformasi	Arah Kebijakan
substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah Kabupaten Bengkalis dengan prioritas provinsi riau prioritas nasional.
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Dukungan terhadap pertanahan negara khususnya pada daerah pulau pulau terluar
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Penguatan nilai budaya melayu dalam kehidupan bermasyarakat
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Membangun sistem pencegahan dan pengendalian pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
Implementasi Transformasi	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
Implementasi Transformasi	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah

Transformasi	Arah Kebijakan
	(RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
Implementasi Transformasi	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pasir
Implementasi Transformasi	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
Implementasi Transformasi	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
Implementasi Transformasi	Mendukung percepatan pelaksanaan refoorma agrarian
Implementasi Transformasi	Pengembangan dan penguatan riset untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah serta penguatan kolaborasi riset antar lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga-lembaga lain yang terkait
Implementasi Transformasi	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
Implementasi Transformasi	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
Implementasi Transformasi	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
Implementasi Transformasi	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Bengkalis
Implementasi Transformasi	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
Implementasi Transformasi	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

### 5.1.3 Target Pembangunan Infrastruktur Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis

Arah pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis menurut spasial telah diatur dan ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2040. Secara spasial, Kabupaten Bengkalis telah menetapkan beberapa kawasan strategis pusat-pusat pertumbuhan daerah baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Wilayah Duri yang difokuskan sebagai pusat perniagaan, Kawasan Pulau Rukat sebagai pusat

pariwisata dan Kawasan Sungai Pakning-Buruk Bakul dan Pulau Bengkalis yang diarahkan sebagai koridor untuk pintu perniagaan Asean (barang dan jasa).

Untuk membangun pertumbuhan dan pengembangan kawasan-kawasan tersebut serta kawasan lainnya di Kabupaten Bengkalis secara merata dan terintegrasi, maka disusunlah Target Pembangunan Infrastruktur Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis 2025-2045 seperti pada Gambar dibawah ini. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau percepatan memajukan semua kawasan secara terintegrasi dan efektif sesuai dengan potensi daerah dan pola pengembangan wilayah Kabupaten Bengkalis.



**Gambar V-2 Kawasan Strategis Pusat-Pusat Pertumbuhan Daerah Kabupaten Bengkalis**

Target pembangunan infrastruktur strategis ini diharapkan terwujud dengan berbagai kemitraan dalam pembiayaan dan pelaksanaannya. Target pembangunan infrastruktur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pembangunan **Gerbang Ekonomi ASEAN** di Kawasan Rupert Utara untuk menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan jaringan ekonomi regional ASEAN
- Pengembangan **Kawasan Ekonomi Khusus Rupert** untuk membangun pertumbuhan ekonomi pariwisata dan industri kreatif serta industri pendukung lainnya
- Pembangunan dan penguatan **koneksi ro-ro Pulau Bengkalis – Pulau Rupert**.

- Pembangunan **Sport Centre di Pulau Bengkalis** dengan beberapa fokus cabang olah raga bertaraf internasional
- Pembangunan **Pusat Kebudayaan dan Tamadun Islam** di Kabupaten Bengkalis sebagai upaya memperkuat identitas budaya dan spiritual masyarakat Melayu setempat. Pusat Kebudayaan dan Tamadun Islam ini bertujuan untuk menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan keislaman di wilayahnya.
- Pengembangan **Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR)** di Selat Baru, Kabupaten Bengkalis, menjadi **Pos Lintas Batas Negara (PLBN)** merupakan usulan strategis untuk memanfaatkan posisinya sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan perbatasan.
- Pembangunan **Jembatan Bengkalis-Sungai Pakning** merupakan proyek strategis yang direncanakan untuk menghubungkan Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera. Jembatan ini akan memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer dan diproyeksikan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menuju ke jaringan perdagangan regional ASEAN
- **Revitalisasi Bandara Sungai Selari** di Bengkalis merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dengan dasar wilayah bandara yang sudah ada.
- Pembangunan **RS Pratama Bukit Batu** untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta mendukung rencana pengembangan kawasan lainnya.
- Pengembangan **Kawasan Industri Buruk Bakul (KIBB)** di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, telah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Lokasi ini dinilai strategis karena kedalamannya memungkinkan untuk aktivitas pelabuhan besar, termasuk kapal kargo. KIBB memiliki luas sekitar 300 hektare dan direncanakan untuk mendukung berbagai sektor industri, dengan fokus pada sektor perikanan, perkebunan, serta potensi kelautan.
- Pembangunan kawasan Bukit Batu diarahkan sebagai koridor pengembangan Pertanian Hortikultura, Industri Pengolahan dan Perdagangan jasa untuk mendukung terciptanya pembangunan **Food Estate** di kec siak kecil. Pada koridor ini, telah dan perlu diwujudkan secara bertahap dan sistematis dengan pengembangan kawasan industri Buruk Bakul sebagai kawasan potensi untuk membangun perekonomian non migas Kabupaten Bengkalis.
- Pembangunan dan pengembangan **Jalur Konektifitas Sentra Industri Kabupaten Bengkalis (Buruk Bakul) Menuju Jalan Tol Pekanbaru-Dumai** untuk memperlancar arus logistik dan lainnya
- Pembangunan **Politeknik Duri** yang bertujuan pengembangan SDM di kawasan industri minyak Duri untuk mendukung keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pembangunan kewilayahan.

- Pembangunan **Duri Islamic Centre** bertujuan membangun pusat keagamaan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan pembangunan masyarakat di daerah yang heterogen.
- Pembangunan **Balai Raja Ecopark** di Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata berbasis alam dan mendukung konservasi lingkungan. Kawasan ini terletak di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir.

Kawasan strategis pusat-pusat pertumbuhan daerah ini perlu diwujudkan dan dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan menciptakan jalinan konektivitas antar kawasan secara baik dan efektif. Pusat-pusat pertumbuhan ini juga diharapkan sebagai penyangga kemajuan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa depan baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

## 5.2 SASARAN POKOK

- 1) Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sektor unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkalis diarahkan pada upaya mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas. Transformasi struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan memperkuat landasan perekonomian daerah pada sektor-sektor diluar minyak dan gas yang kokoh pada sebagai sektor, yaitu sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor jasa-jasa. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada upaya menciptakan sektor unggulan dan melakukan diversifikasi dan membangun keunggulan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan daerah yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Pembangunan sektor unggulan daerah perlu diperkuat dengan membangun triger ekonomi daerah melalui Kawasan Industri Buruk Bakul dan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PSKN) Rupa sebagai cluster pengembangan pariwisata dan industri kreatif Kabupaten Bengkalis. Kedua kawasan ini akan menjadi motor penggerak peningkatan kontribusi sektor non migas dalam perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2045, khususnya pada sektor industri dan perdagangan serta sektor pariwisata dan industri kreatif juga sektor-sektor jasa terkait lainnya, sehingga kontribusi sektor diluar minyak gas meningkat menjadi sekitar 70% pada tahun 2045. Pada sasaran pokok ini terdapat dua arah pembangunan yang akan dilakukan yaitu IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi dan Pengembangan Pariwisata. Pencapaian dari sasaran pokok ini ditandai dengan:

- Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari baseline tahun 2025 sebesar 13,09% menjadi 19,07% pada tahun 2045.
- Meningkatnya rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu dari baseline tahun 2025 berkisar 17% – 18%, menjadi 20% - 21% pada tahun 2045
- Meningkatnya rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu dari baseline tahun 2025 sebesar 0,28%, menjadi 0,50% pada tahun 2045.
- Meningkatnya jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) dari baseline tahun 2025 sebesar 4,39 ribu orang menjadi 22,03 ribu orang.
- Meningkatnya proporsi PDRB ekonomi kreatif dari baseline tahun 2025 sebesar 0,8% menjadi 5% pada tahun 2045.

## 2) Terwujudnya Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.

Terdapat dua arah pembangunan pada sasaran pokok ini yaitu Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD dan Transformasi Digital. Pembangunan ekonomi daerah ditujukan pada pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang merata dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada pembangunan ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan akses bekerja dan berusaha bagi seluruh masyarakat pada semua sektor perekonomian, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat harus disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya alam daerah sebagai faktor produksi utama dan dorongan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan daya saing pasar untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku-pelaku ekonomi. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat harus dilaksanakan secara merata dan berkeadilan antar wilayah pesisir dan daerah dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar pelaku dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan produktivitas daerah. Pencapaian dari sasaran pokok ini ditandai dengan:

- Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian dari baseline tahun 2025 sebesar 11,56% menjadi 17,06% pada tahun 2045.
- Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah dari baseline tahun 2025 sebesar 2,56 menjadi 6 pada tahun 2045.
- Meningkatnya rasio kewirausahaan daerah dari baseline tahun 2025 sebesar 4,70% menjadi 10,90% pada tahun 2045.
- Meningkatnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 1,1% menjadi 9% pada tahun 2045.

- Meningkatnya *Return on Aset* (ROA) BUMD dari baseline tahun 2025 sebesar 0,06% menjadi 1,66% pada tahun 2045.
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari baseline tahun 2025 sebesar 6,73% menjadi 3,13% pada tahun 2045.
- Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari baseline tahun 2025 yang berkisar 60-65% menjadi 66-70% pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dari baseline tahun 2025 sebesar 6,1 menjadi 7,5 pada tahun 2045.

3) Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan

Pada sasaran pokok ini yang terdapat satu arah pembangunan yaitu Pendidikan Berkualitas yang Merata. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan tenaga pendidik yang berkompentensi, serta kurikulum pendidikan yang adaptif. Pencapaian dari sasaran pokok ini ditandai dengan:

- Meningkatnya persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari baseline tahun 2025 sebesar 17,42%-19,42% menjadi 77,99%-79,99% pada tahun 2045, dan untuk numerasi dari baseline tahun 2025 berkisar 0,00%-2,00% menjadi 61,50%-63,50% pada tahun 2045.
- Persentase satuan pendidikan SD dan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari baseline tahun 2025 berkisar 32,29%-34,29% menjadi 76,14%-78,14% pada tahun 2045, dan untuk numerasi dari baseline tahun 2025 berkisar 15,68%-17,68% menjadi 59,36%-61,36% pada tahun 2045.
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun dari baseline tahun 2025 sebesar 9,95 tahun menjadi 12,15 tahun pada tahun 2045.
- Meningkatnya harapan lama sekolah dari baseline tahun 2025 sebesar 13,52 tahun menjadi 15,32 tahun pada tahun 2045.
- Meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari baseline tahun 2025 sebesar 11,80% menjadi 11,80-13,59% pada tahun 2045.
- Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dari baseline tahun 2025 sebesar 59,74% menjadi 75% pada tahun 2045.

4) Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang prima dan didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal

Pada sasaran pokok ini arah pembangunan di arahkan pada Kesehatan untuk semua. Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/

rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, dan oleh sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan dan didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal. Pencapaian target ini ditandai dengan:

- Meningkatnya umur harapan hidup dari baseline tahun 2025 sebesar 72,07 tahun menjadi 74,27 tahun pada tahun 2045.
  - Menurunnya angka kematian ibu dari baseline tahun 2025 sebesar 94,08 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 11,08 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2045.
  - Menurunnya prevalensi stunting pada balita dari baseline tahun 2025 sebesar 7,11% menjadi 2% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dari baseline tahun 2025 sebesar 29,11% menjadi 100% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dari baseline tahun 2025 sebesar 56,49% menjadi 100% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan daerah dari baseline tahun 2025 sebesar 75,65% menjadi 99,5% pada tahun 2045.
- 5) Menurunnya tingkat kemiskinan khususnya di wilayah pesisir dan terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

Arah kebijakan ini memiliki sasaran pada Perlindungan sosial yang adaptif. Tujuan utama dari sasaran ini adalah menciptakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin khususnya di wilayah pesisir dengan capaian indikator capaian sasaran adalah:

- Menurunnya tingkat kemiskinan dari baseline tahun 2025 sebesar 5,63-5,78% menjadi 2,03-3,00% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari baseline tahun 2025 sebesar 31,53% menjadi 95,13% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dari baseline tahun 2025 sebesar 4,88% menjadi 20-30% pada tahun 2045.
- 6) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kearifan budaya melayu disertai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kearifan budaya melayu dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional adapun indikator ketercapaian target ini dicapai dengan upaya pelaksanaan pendidikan, ketahanan sosial budaya dan



pelestarian terhadap budaya serta nilainya sebagai payung negeri. Pencapaian target ini ditandai dengan:

- Meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan dari baseline tahun 2025 sebesar 58,98-59 menjadi 72,12-72,7 pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama dari baseline tahun 2025 sebesar 72,3-72,36 menjadi 79,22-79,92 pada tahun 2045.

7) Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas

Sasaran pokok ini berfokus pada terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif di Kabupaten Bengkalis. Pencapaian target ini ditandai dengan:

- Meningkatnya indeks pembangunan kualitas keluarga dari baseline tahun 2025 sebesar 73,50-73,51 menjadi 78,73-78,8 pada tahun 2045.
- Menurunnya indeks ketimpangan gender dari baseline tahun 2025 sebesar 0,47 menjadi 0,27 pada tahun 2045.

8) Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan menjadikan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup sebagai landasan dari setiap aktivitas pembangunan

Menciptakan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang berkesinambungan pada penggalan periode dalam RPJPD terhadap sarana dan prasarana pemukiman dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Terdapat dua arah pembangunan pada sasaran ini yaitu berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Meningkatnya konsumsi listrik per kapita dari baseline tahun 2025 sebesar 4.130 kWh menjadi 6.000 kWh pada tahun 2045.
- Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari baseline tahun 2025 sebesar 11,51 menjadi 3,15 pada tahun 2045.
- Meningkatnya kapasitas air baku dari baseline tahun 2025 sebesar 0,24 m<sup>3</sup>/detik menjadi 9,01 m<sup>3</sup>/detik pada tahun 2045.
- Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dari baseline tahun 2025 sebesar 1% menjadi 100% pada tahun 2045.
- Menurunnya indeks risiko bencana dari baseline tahun 2025 sebesar 134,61 menjadi 95,01 pada tahun 2045.
- Menurunnya persentase penurunan emisi GRK dari baseline tahun 2025 sebesar 13.

## 9) Terwujudnya aparatur Pemerintahan yang Produktif dan Inovatif.

Terwujudnya aparatur pemerintahan yang produktif dan inovatif dicapai untuk mewujudkan *good governance and clean government*. Tata kelola kelembagaan pemerintah ditargetkan dapat mewujudkan perbaikan reformasi hukum, pelayanan publik yang lebih efektif serta meningkatkan integritas. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Peningkatan indeks reformasi hukum dari baseline tahun 2025 sebesar 44,82 dengan target peningkatan pada tahun 2045
- Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dari baseline tahun 2025 sebesar 2,90 menjadi 5 pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks pelayanan publik dari baseline tahun 2025 sebesar 3,89 menjadi 5 pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks integritas nasional dari baseline tahun 2025 sebesar 72,25 menjadi 87,03 pada tahun 2045.

## 10) Terlaksananya pemerintahan yang berintegritas

Terlaksananya pemerintahan yang berintegritas mencangkup terciptanya hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, serta demokrasi yang substansial sehingga berdampak terhadap stabilitas perekonomian daerah dan menciptakan ketangguhan diplomasi dan berdaya gantar kawasan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Meningkatnya proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dari baseline 64,8% menjadi 82,18% pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks demokrasi dari baseline tahun 2025 sebesar 73,80-76,86 (sedang) menjadi kategori tinggi pada tahun 2045.
- Meningkatnya rasio pajak daerah terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 0,20% menjadi 2,20% pada tahun 2045.
- Menjaga tingkat inflasi dari baseline tahun 2025 sebesar 2-3% menjadi 1-3% pada tahun 2045.
- Meningkatnya total dana pihak ketiga terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 6-7% menjadi 25-35% pada tahun 2045.
- Meningkatnya aset dana pensiun terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 0,05% menjadi 0,14% pada tahun 2045.
- Meningkatnya nilai transaksi saham kabupaten berupa nilai rata-rata tahunan dari baseline tahun 2025 sebesar 5.048,88 miliar menjadi 30.673,95 miliar pada tahun 2045.

- Meningkatnya total kredit terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 9% menjadi 49,7% pada tahun 2045.
- Meningkatnya inklusi keuangan dari baseline tahun 2025 sebesar 91,35% menjadi 99,02% pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks daya saing daerah dari baseline tahun 2025 sebesar 3,00 menjadi 3,80 pada tahun 2045.

11) Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan

Menciptakan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang berkesinambungan pada penggalan periode dalam RPJPD terhadap sarana dan prasarana pemukiman dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Meningkatnya indeks pengelolaan keanekaragaman hayati dari baseline tahun 2025 sebesar 0,394 menjadi 0,474 pada tahun 2045.
- Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari baseline tahun 2025 sebesar 73,50 menjadi 77,74 pada tahun 2045.
- Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari baseline tahun 2025 sebesar 15% menjadi 50% pada tahun 2045.
- Meningkatnya timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dari baseline tahun 2022 sebesar 5,59% menjadi 89,92% di tahun 2045.
- Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah dari baseline sebesar 27,16% menjadi 100% pada tahun 2045.

12) Terimplementasikannya prinsip pembangunan berkelanjutan;

Terimplementasikannya prinsip pembangunan berkelanjutan dengan arah pembangunan difokuskan pada penerapan ekonomi hijau yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pembangunan ini adalah Indeks Ekonomi Hijau Daerah dan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Meningkatnya indeks ekonomi hijau daerah dari baseline tahun 2025 sebesar 59,86 menjadi 87,18 pada tahun 2045.
- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer dari baseline tahun 2025 sebesar 31,22% menjadi 42,90% pada tahun 2045.

13) Terbangunnya konektivitas antar wilayah yang berkualitas dan nyaman di wilayah strategis pertumbuhan

Terwujudnya konektivitas antarwilayah merupakan upaya meningkatkan pelayanan dasar infrastruktur yang berkualitas secara merata di berbagai wilayah. Konektivitas ini melibatkan integrasi infrastruktur dan kebijakan strategis pada setiap penggalan pemerinthan bupati terpilih. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan:

- Meningkatnya koefisien variasi harga antarwilayah tingkat kabupaten dari baseline tahun 2025 sebesar 8,27 menjadi 51,3 pada tahun 2045.
- Meningkatnya pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 20-23% menjadi 30-35% pada tahun 2045.
- Meningkatnya NETT ekspor barang dan jasa terhadap PDRB dari baseline tahun 2025 sebesar 55-60% menjadi 65-70% pada tahun 2045.

Selain itu keberhasilan sasaran pokok ini juga tercermin dengan capaian tahun 2045 antara lain:

- Terbagunnya dan beroperasinya konektivitas antar struktur wilayah secara hirarkis dengan kualitas yang baik;
- Terbagunnya dan beroperasinya Jembatan P. Bengkalis - P. Sumatera (S. Pakning)
- Terbagunnya dan beroperasinya Revitalisasi Bandara Sei. Selari
- Terbagunnya dan beroperasinya konektivitas jalur transportasi sentra industri Bengkalis ke TOL Pekanbaru
- Konektivitas Roro Bengkalis - Rupert

14) Terbangunnya struktur wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah

Sasaran pembangunan daerah yang mencakup struktur wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah adalah sebuah sasaran yang berfokus pada pembangunan proyek strategis daerah yang memiliki multi efek dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mencapai pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dengan target capaian pada tahun 2025 antara lain:

- Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dari baseline 81,43% menjadi 100% pada tahun 2045.
- Meningkatnya persentase desa mandiri dari baseline tahun 2025 sebesar 73,92% menjadi 100% pada tahun 2045.

Selain itu keberhasilan sasaran pokok ini juga tercermin dengan capaian tahun 2045 antara lain:

- Terbangunya dan beropersinya Wilayah Pulau Rupa sebagai koridor potensi pengembangan Pariwisata Nasional dan pengembangan Perikanan Tangkap dan Tambak;
- Terbangunya dan beropersinya Wilayah Selat Malaka sebagai potensi pengembangan Perdagangan Internasional dan Pengembangan Pulau Terluar;
- Terbangunya dan beropersinya Wilayah Mandau-Pinggir sebagai koridor potensi pengembangan Migas, Perkebunan dan Perdagangan/Jasa;
- Terbangunya dan beropersinya Wilayah Bukit Batu sebagai koridor potensi pengembangan Pertanian Hortikultura, Industri Pengolahan dan Perdagangan/Jasa;
- Terbangunya dan beropersinya Wilayah Pulau Bengkulu sebagai koridor potensi pengembangan Perikanan Tangkap dan Tambak, Pemerintahan serta Pendidikan.

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah kabupaten Bengkulu diuraikan sebagai berikut;

**Tabel V-3 Indikator Utama Pembangunan**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sektor unggulan daerah.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	13.09	19.07	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17 - 18	20 -21	
		Pengembangan Pariwisata Terpadu	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0.28	0.50	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	4.39	22.03	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,8	5	
2	Terwujudnya Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,56	17,06	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	2,56	6	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4.70	10.90	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,1	9	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	0.06	1.66	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.73	3.13	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60-65	66-70	
		Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,1	7,5	Angka Target dan Forecast Provinsi
3	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: • Literasi Membaca • Numerasi	17,42–19,42 0,00–2,00	77,99–79,99 61,50–63,50	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: • Literasi Membaca • Numerasi	32,29–34,29 15,68–17,68	76,14–78,14 59,36–61,36	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	9.95	12.15	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.52	15.32	
			Proporsi Penduduk Ber Umur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	11,80	11,80-13,59	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	59,74	75	Angka Target dan Forecast Provinsi
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang prima dan didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal	Kesehatan untuk Semua	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72.07	74.27	
			Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	94.08	11.08	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7.11	2	
			Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	29.11	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	56.49	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan daerah (%)	75.65	99.5	Angka Target dan Forecast Provinsi
5	Menurunnya tingkat kemiskinan khususnya di wilayah pesisir dan terwujudnya	Perlindungan sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	5,63 - 5,78	2.03-3,00	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	58,53	95.13	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
	perlindungan sosial yang adaptif		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	4,88 (2023)	20-30	
6	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kearifan budaya melayu disertai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,98 - 59	72,12 - 72,7	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,3 - 72,36	79,22 - 79,92	Angka Target dan Forecast Provinsi
7	Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,50 - 73,51	78,73 - 78,8	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.47	0.27	
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan menjadikan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup sebagai landasan dari setiap aktivitas pembangunan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi :			
			a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	4130	6000	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	11,51	3,15	
			Ketahanan Air			
		a. Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)*	0,24	9,01	Angka Target dan Forecast Provinsi	
		b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1	100		
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	134.61	95.01			
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Tahunan	13	90	Angka usulan target dari Provinsi untuk Bengkalis		
9	Terwujudnya aparatur Pemerintahan yang Produktif dan Inovatif.	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Indeks Reformasi Hukum*	44,82 (2023)	100	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.90	5	
			Indeks Pelayanan Publik	3.89	5	
			Indeks Integritas Nasional	72,25	87,03	Angka Target dan Forecast Provinsi
10	Terlaksananya pemerintahan yang berintegritas	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,8 (2020)	82,18	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	73,80 - 76,86 (Sedang)	Tinggi	Angka Target dan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
						Forecast Provinsi
		Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.20	2.20	
			Tingkat Inflasi (%)	2-3	1-3	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan :			
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	6-7	25-35	
			Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,14	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Nilai Transaksi Saham Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	5.048,88 b)	30.673,95 b)	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Total Kredit/PDRB (%)	9	49,7	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Inklusi Keuangan (%)	91,35	99,02	Angka Target dan Forecast Provinsi
		Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	Indeks Daya Saing Daerah	3.00	3.80	
11	Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,394	0,474	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Indeks kualitas lingkungan hidup	73.50	77.74	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	15	50	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Pengelolaan Sampah a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) b. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	5,59 (2022) 27,16 (2022)	89,92 100	Angka Target dan Forecast Provinsi
12	Terimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Penerapan Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,86	87,18	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	31,22	42,90	Angka Target dan Forecast Provinsi
13	Terbangunnya konektivitas antar wilayah yang berkualitas dan nyaman di wilayah strategis pertumbuhan	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	8,27	5,13	Angka Target dan Forecast Provinsi
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20-23	30-35	
			NETT Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	55-60	65-70	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
14	Terbangunnya struktur wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :			
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	81,43 (2023)	100	
			Persentase Desa Mandiri (%)	73.92	100	

## BAB VI PENUTUP

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis dalam dua puluh tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Bupati terpilih untuk masa bakti 20 tahun ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh stakeholder Kabupaten Bengkalis untuk turut andil dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

### 6.1 Kaidah Pelaksanaan

Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, Kepala daerah terpilih (Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJP ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya yang meliputi;

- 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Daerah ke RPJM Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJP Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai visi daerah Kabupaten Bengkalis. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD.
- 3) Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD, dan menjadi pedoman bagi RPJMD untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan.
- 4) Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

- 5) Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun RPJP mengacu pada RPJPN dan RPJP Provinsi Riau, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.

## 6.2 SKEMA PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan serta pengunaan skema anggaran tepat antara lain; Skema anggran dari ABPN bauget sharing untuk proyek stratgis daerah, skema Kerjsama pemerintah dengan dengan Badan Usaha dan skema CSR.

## 6.3 MANAJEMEN RESIKO DAN KERANGKA PENGENDALIAN

Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

- 1) Implementasi manajemen resiko terhadap target pencapaian visi serta indikator capaian juga perlu untuk dilakukan sebagai sandingan dan referensi dalam membuat kebijakan kontijensi dalam meminimalkan resiko kegagalan pelaksanaan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat terdapat beberapa indikator baru yang penting bagi daerah Bengkalis dalam mencerminkan keberhasilan daerah.

- a. Target Pendapatan perkapita tahun 2025 terlalu tinggi sebesar 143,39 - 166 (Rp Juta), berdasarkan data realiasi tahun 2023 sebesar Rp. 123 juta. Pendapatan perkapita di kabupaten Bengkalis sangat berhubungan pada harga migas dunia.
  - b. Tingginya target capain masyarakat miskin pada capain tahun 2045 berkisar 2,08 - 0,98 diperlukan daya ungkit yang sangat besar untuk mencapai target tersebut.
  - c. Target Indeks Modal Manusia (IBEI) indikator ini belum pernah diukur sebelumnya. Kabupaten Bengkalis terdiri dari kepulauan di wilayah pesisir yang memerlukan biaya pembangunan yang lebih besar di banding pulau Sumatra.
- 2) Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta
  - 3) Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera Berbasis Perekonomian Daerah yang Unggul dan Berkelanjutan.

Bupati Bengkalis,  
  
KASMARNI